



BALAI GATHUK

Perancangan Balai Kota
Magelang dengan
Pendekatan *Participatory
Design* sebagai Bentuk
Demokratisasi Arsitektur

DWIWANGGA SANG NALENDRA HADI
19512096

SUPERVISOR:
DR. IR. REVIANTO BUDI SANTOSA, M.ARCH., IAI.

STUDIO AKHIR DESAIN ARSITEKTUR
2023

BALAI GATHUK

Perancangan Balai Kota Magelang dengan
Pendekatan *Participatory Design* sebagai
Bentuk Demokratisasi Arsitektur

Karya bersama *stakeholders* masyarakat dan Pemerintah Kota
Magelang dalam desain partisipatoris guna Tugas Akhir.

Didesain oleh:

Dwiwangga Sang Nalendra Hadi
19512096

Supervisor:

Dr. Ir. Revianto Budi Santosa, M.Arch., IAI.



Laboratorium Reka Rupa Ruang
Jurusan Arsitektur
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Islam Indonesia



LEMBAR PENGESAHAN

Studio Akhir Desain Arsitektur yang Berjudul:
Final Architecture Design Studio Entitled:

**Balai Gathuk: Perancangan Balai Kota Magelang dengan Pendekatan
Participatory Design sebagai Bentuk Demokratisasi Arsitektur**

***Balai Gathuk: Design of Magelang City Hall with Participatory Design Approach
 as a Form of Architectural Democratization***

Nama lengkap mahasiswa: Dwiwangga Sang Nalendra Hadi
Student's full name:

Nomor mahasiswa: 19512096
Students identification:

Telah diuji dan disetujui pada: Yogyakarta, 25 Juli 2023
Has been evaluated and agreed on

Pembimbing
Supervisor

Dr. Ir. Revianto Budi
 Santosa, M.Arch., IAI.

Penguji 1
Examiner 1

M. Galieh Gunagama,
 S.T., M.Sc.

Penguji 2
Examiner 2

Dr. Ar. Jarwa Prasetya Sih
 Handoko, ST., M.Sc., IAI., GP.

Diketahui oleh:
Acknowledge by:

Ketua Program Studi Sarjana Arsitektur
Head of Architecture Undergraduate Program



Jr. Hanif Budiman, MA, Ph.D

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan bahwa seluruh bagian karya ini adalah karya sendiri kecuali karya yang disebut referensinya dan tidak ada bantuan dari pihak lain baik seluruhnya ataupun sebagian dalam proses pembuatannya. Saya juga menyatakan tidak ada konflik hak kepemilikan intelektual atas karya ini bagi kepentingan pendidikan dan publikasi kepada Jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia.

Magelang, 1 Agustus 2023

Penulis



Handwritten signature of Dwiwangga Sang Nalendra Hadi.

Dwiwangga Sang Nalendra Hadi

CATATAN DOSEN PEMBIMBING

Berikut ini adalah penilaian laporan Studio Akhir Desain Arsitektur:

Nama mahasiswa: Dwiwangga Sang Nalendra Hadi

Nomor mahasiswa: 19512096

Judul laporan:

Balai Gathuk: Perancangan Balai Kota Magelang dengan Pendekatan
Participatory Design sebagai Bentuk Demokratisasi Arsitektur

*Balai Gathuk: Design of Magelang City Hall with Participatory Design Approach
as a Form of Architectural Democratization*

Kualitas buku laporan Studio Akhir Desain Arsitektur:

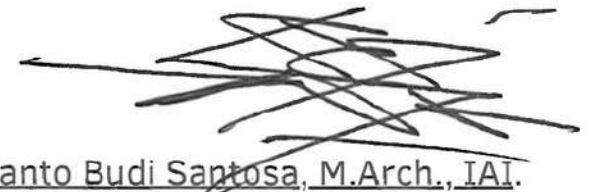
Sehingga,

Untuk menjadi acuan produk laporan Studio Akhir Desain Arsitektur

*) mohon lingkari salah satu

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Dosen pembimbing



Dr. Ir. Revianto Budi Santosa, M.Arch., IAI.

KATA PENGANTAR

Otoritarianisme seorang arsitek menunjukkan level egosentris dalam merancang sehingga karya yang dihasilkan lebih cenderung baik baginya, tapi tidak selalu baik bagi semua. Sebagaimana Rezaei (2020) yang membagi tipe-tipe perancang dalam level egosentris, pragmatis, fasilitator, *technical assistant giver*, dan advokat, karya ini menjadi upaya untuk mendalami peran perancang sebagai seorang advokat yang melayani masyarakat sesuai dengan minat politis mereka dan terlibat dalam penyelesaian problematika secara bersama. Hal ini bertujuan untuk menekan ego perancang sehingga karya yang dihasilkan diupayakan sebagai karya yang memenuhi keinginan semua pihak.

Terilham dari prinsip demokratis bangsa kita dimana "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", penggalian karya ditelusuri dengan memahami argumentasi-argumentasi yang timbul dari pihak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan. Perancang mencoba memosisikan diri sebagai juri yang adil, sambil menerjemahkan idealisme bersama dalam menemukan rancangan yang ideal bagi Balai Kota Magelang. Berangkat dari isu mendesak bahwa Pemerintah Kota Magelang harus memindahkan Kantor Walikotanya ke lokasi baru dalam jangka waktu dekat, karya ini menjadi bentuk kepedulian perancang untuk mengusulkan konsep balai kota yang dimiliki bersama sekaligus membantu mengawali proses perancangannya.

Sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan, penulis yang diciptakan dari tanah, memohon agar tidak bersifat langit, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt., Tuhan Semesta Alam. Atas segala kemudahan dan petunjuk yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan desain berbasis riset ini dalam karya terakhir sebelum diwisuda sebagai seorang Sarjana Arsitektur. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan pada setiap pihak yang membantu dalam penyempurnaan karya ini:

- Kedua orang tua dan kakak yang telah memberikan dukungan langsung bagi kelancaran penulis;
- Masyarakat Kota Magelang yang antusias dalam memberikan pandangan dan penilaiannya terhadap desain, khususnya kepada *stakeholders*: **Mas Bagus Priyana** dan **Ibu Elizabeth Rahayu Sri Hastuti, S.Pd, M.Si.**;
- Pemerintah Kota Magelang yang mendukung upaya penelitian untuk kemajuan bersama, khususnya pada *stakeholders* **Sekretariat Daerah**: Bapak Drs. H. Joko Budiyo, M.M.; **BAPPEDA** yang diwakili oleh Bapak Iwan Triteny Setyadi, S.T., M.T. dan Ibu Dr. Yetty Setyaningsih, S.P., M.Eng.; **DPUPR** yang diwakili oleh Ibu Rizqi Dwi Herawati, S.T. serta seluruh pihak di lingkup **Pemerintahan Daerah Kota Magelang** yang membantu;
- **Bapak Dr. Ir. Revianto Budi Santosa, M.Arch., IAI.** sebagai supervisor penulis yang selalu memberikan bimbingan terbaik untuk penyempurnaan karya ini;
- **Bapak M. Galieh Gunagama, S.T., M.Sc.** dan **Dr. Ar. Jarwa Prasetya Sih Handoko, ST., M.Sc., IAI., GP.** sebagai penguji yang memberikan masukan dan saran pengembangan untuk desain berbasis riset ini;
- Rekan penulis yang memberikan dukungan langsung dalam penyelesaian karya ini, **Muhammad Raffi Anton Pratama, Fiorino Piscal Akbar, Nur Afifah Rahmah, dan Nofal Saflri**;
- Seluruh jajaran dosen dan staff Departemen Arsitektur UII, khususnya **Bapak David Hendri, S.T., M.T., IAP.** sebagai mentor penulis sejak ADS 1 yang mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi, **mas Hilmi** dan **mbak Tyas** yang selalu ramah di Lab RRR;
- Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi selalu penulis ingat.

Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk sesama dan membantu Kota Magelang tercinta dalam perencanaan.

Magelang, 1 Agustus 2023
Penulis



Dwiwangga Sang Nalendra Hadi

ABSTRAK

Kantor Walikota Magelang dimandatkan oleh Pemerintah Pusat untuk pindah ke lokasi baru yang telah disepakati bersama akibat adanya konflik kepemilikan lahan dengan Akademi TNI. Rencana pemindahan tidak diiringi dengan evaluasi bahwa Kota Magelang tidak memiliki tempat pertemuan antara penduduk dan pemerintah yang menjadi konsep dari balai kota. Atas dasar tersebut, konsep balai kota ditawarkan kepada Pemerintah untuk nantinya dirancang bersama masyarakat. Kepemilikan bersama menjadi upaya mendemokratisasi arsitektur balai kota sebagai bangunan gedung negara sehingga linear dengan prinsip negara yang mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat. Menggunakan metode *participatory design* agar desain yang dihasilkan dapat diterima oleh setiap pihak, khususnya masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan. *Participatory design* dikhususkan pada metode *design for users* dimana pendapat para *stakeholders* dikumpulkan (*emphatize*) untuk didefinisikan keperluan mereka sehingga desainer dapat mensintesis ide untuk diterapkan dalam rancangan yang kemudian hasil desain tersebut akan diuji kembali kepada *stakeholders*. Alternatif rancangan ditunjukkan dan pendapat *stakeholders* dalam uji desain dipertimbangkan guna menciptakan desain final berdasarkan konsensus. *Stakeholders* yang ditetapkan adalah *sampling* pendapat masyarakat Kota Magelang dan perwakilan dalam bidang pelestarian kebudayaan, sejarah, dan pendidikan (*owner*) sedangkan pemerintah dalam segi perencanaan yang diwakili BAPPEDA dan pembangunan DPUPR (*managerial*) serta Sekretariat Daerah sebagai pelaksana pemerintahan (*end user*). Hasil rancangan menunjukkan bahwa balai kota yang dirancang bersama memenuhi harapan dari setiap pihak dengan verifikasi dari *stakeholders* pemerintah dan perwakilan masyarakat serta nilai *assesment* 3.72/4.00 dari 68 responden sebagai *sampling* penilaian dari masyarakat. Desain juga memenuhi peraturan normatif yang diatur dalam PP No. 16 Tahun 2021 dalam kebutuhan dan standar ruang bangunan gedung negara, prinsip bangunan gedung hijau dalam efisiensi energi dengan penyediaan sumber energi alternatif panel surya (51.000 watt) dan OTTV (27,94 Watt/m²), mencapai kenyamanan visual berdasarkan *assesment* dari dialux dan kenyamanan termal dengan uji CFD serta menunjukkan performa struktur yang 100% aman terhadap bencana gempa dengan hasil evaluasi resist.

ABSTRACT

The Office of the Mayor of Magelang City was mandated by the Central Government to move to a new location that had been mutually agreed upon due to land ownership conflicts with the TNI Academy. The relocation plan was not accompanied by an evaluation that the City of Magelang does not have a meeting place between the residents and the government which is the concept of the city hall. On this basis, the city hall concept was offered to the Government to be designed together with the people. Shared ownership is an effort to democratize the architecture of the city hall as a state building so that it is linear with the state principle that recognizes sovereignty in the hands of the people. Using the participatory design method so that the resulting design can be accepted by all parties, especially the people as the holder of sovereignty and the government as the executor of sovereignty. Participatory design is devoted to the design for users method where the opinions of stakeholders are gathered (emphasized) to define their needs so that designers can synthesize ideas to be implemented in designs which then the design results will be tested back on stakeholders. Design alternatives are demonstrated and stakeholder opinions in test designs are considered to create a final design based on consensus. Stakeholders determined were a sampling of the opinions of the people of Magelang City and representatives in the fields of cultural preservation, history and education (owner) while the government in terms of planning represented by BAPPEDA and the development of the DPUPR (managerial) and Sekretariat Daerah as the executor of government (end user). The design results show that the jointly designed city hall meets the expectations of each party with verification from government stakeholders and people representatives as well as an assessment score of 3.72/4.00 from 68 respondents as a sampling of people ratings. The design also meets the normative regulations stipulated in PP No. 16 Tahun 2021 regarding the needs and standards of state building space, the principles of green buildings in energy efficiency by providing alternative energy sources are solar panels (51,000 watts) and OTTV (27.94 Watt/m²), achieving visual comfort based on an assessment of dialux and comfort thermal analysis by CFD test and showed a structural performance that was 100% safe against earthquakes with the results of a resist evaluation.

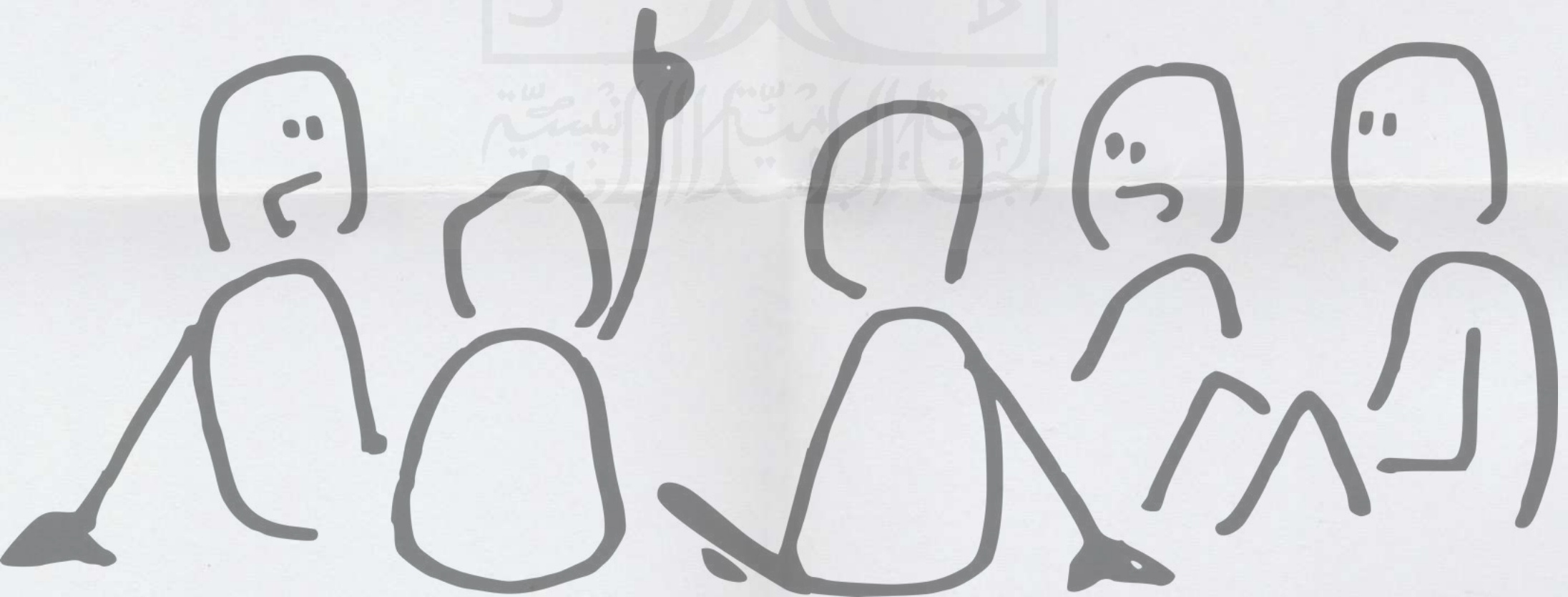
DAFTAR ISI

Lembar Judul	I
Lembar Pengesahan	II
Pernyataan Keaslian Karya	III
Catatan Dosen Pembimbing	IV
Kata Pengantar	V
Abstrak Bahasa Indonesia	VI
<i>Abstract in English</i>	VII
Bab 1 Pendahuluan	01
1.1. Judul Rancangan	02
1.2. Premis Perancangan	03
1.3. Latar Belakang	04
1.4. Peta Permasalahan	12
1.5. Urgensi Pendekatan Partisipatoris	13
1.6. Orisinalitas dan Kebaruan	14
Bab 2 Penelusuran Persoalan dan Pemecahannya	15
2.1. Kajian Tema Perancangan	16
2.2. Kajian Tipologi	18
2.3. Kajian Preseden	22
2.4. Metode Perancangan	26
2.5. Kajian dan Analisis Pendekatan Perancangan	29
2.6. Indikator Keberhasilan Desain	50
2.7. Peta Ringkasan Desain	51
2.8. Gambaran Awal Rancangan	53
Bab 3 Eksplorasi Konsep Perancangan	60
3.1. Konsep Tata Tapak	61
3.2. Pra-rancangan dan Alternatif	63
Bab 4 Uji Kesepakatan Rancangan	68
4.1. Uji Kesepakatan <i>Stakeholders</i>	69
4.2. Penilaian Desain Pendekatan Populer	75
4.3. Pemilihan Alternatif Rancangan	76
4.4. Galeri Kegiatan Partisipatoris	78
4.5. Uji Desain Normatif	79

Bab 5 Hasil Rancangan	87
5.1. Perspektif Muka Depan Balai Kota	88
5.2. Perspektif Tampak Belakang Balai Kota	89
5.3. Tampak Ortogonal Bangunan Balai Kota	90
5.4. Situasi Balai Kota	91
5.5. Axonometri Exploded	92
5.6. Organisasi Massa Balai Kota	93
5.7. Siteplan Balai Kota	97
5.8. Denah	98
5.9. Potongan	113
5.10. Detail Arsitektural	119
5.11. Detail Selubung Bangunan	121
5.12. Detail Interior Utama	122
5.13. Skematik Pencahayaan dan Penghawaan	123
5.14. Skematik Transportasi Vertikal dan Disabilitas	124
5.15. Skematik Jaringan Infrastruktur	125
5.16. Skematik Keselamatan Bangunan	126
5.17. Perspektif Eskterior dan Interior	127
5.18. Komentar dan Saran Penguji	128
Bab 6 Lampiran	129
Surat Keterangan Cek Plagiasi	130
Model Bangunan (Maket)	131
Poster Presentasi (APREB)	132
Lampiran Uji Desain	138
Daftar Pustaka	141



1. PENDAHULUAN



1.1. JUDUL RANCANGAN

"BALAI GATHUK: PERANCANGAN BALAI KOTA MAGELANG DENGAN PENDEKATAN PARTICIPATORY DESIGN SEBAGAI BENTUK DEMOKRATISASI ARSITEKTUR"

Balai Gathuk

Merepresentasikan harapan sebagai rancangan gedung yang dikenal ramah terhadap seluruh lapisan masyarakat sebagaimana bahasa Jawa dalam bausastra (1939) yang mengartikan *gathuk* sebagai *tepung (srawung)* dan erat kaitannya dengan keramahaman masyarakat Jawa. Selain itu, kata *gathuk* juga mirip dengan kata *gethuk* yang merupakan kuliner khas Kota Magelang sehingga pengucapan dan pemaknaannya memang diharapkan menjadi homofon, *gathuk* sebagai filosofis keramahan bangunan terhadap seluruh lapisan masyarakat, *gethuk* sebagai filosofis kuliner khas yang merakyat.

Balai Kota

Balai kota merepresentasikan fungsi gedung rancangan sebagai tempat rapat, pertemuan, dan sebagainya antara pemerintah kota dan warganya (KBBI, 2016). Hal tersebut membedakan balai kota yang juga berfungsi sebagai ruang publik dengan istilah kantor yang hanya eksklusif sebagai tempat bekerja.

Participatory Design

Merepresentasikan pendekatan yang dilakukan dimana desain partisipatif mencoba melibatkan masyarakat dan pengguna lain dalam proses mendesain sehingga arsitek tidak otoritatif dalam mengambil keputusan rancangan (Rezaei, 2020).

Demokratisasi Arsitektur

Pendekatan partisipatif sebagai gerakan yang demokratis dengan kriteria kemampuan perancang yang komunikatif serta mampu menerima dan merestrukturisasi keinginan kelompok masyarakat (Bacon, 1967 dalam Rezaei 2020). Pendekatan tersebut linear dengan idealisme demokrasi Indonesia sehingga perancangan balai kota mampu merepresentasikan rasa kepemilikan bersama karena didapat dari hasil konsensus.

1.2.PREMIS PERANCANGAN

IDEALISME DEMOKRASI DAN ARSITEKTUR DALAM BANGUNAN PEMERINTAHAN

Indonesia memiliki sistem birokrasi yang memiliki realitas bersifat ambivalen dimana antara kepentingan privat dan publik tercampur sehingga tercipta gaya feodalistik dalam birokrasi yang bertentangan dengan semangat demokratis guna menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, netral, dan profesional (Baru & Rusbiyanti, 2020). Birokrasi yang feodal membuat masyarakat tidak bisa mengekspresikan pendapatnya untuk turut membangun tata pemerintahan yang baik. Partisipasi publik yang heterogen menjadi upaya demokratis sehingga kedudukan pemerintah perlu dekat dengan “suara rakyat”. Dalam skala arsitektur, kedudukan pemerintah diidentikan dengan kantor. Kantor pemerintahan erat kaitannya dengan kebangsawanan sehingga banyak yang terkesan menjaga kewibawaannya dengan menjauhkan diri dari masyarakat (Tarigan, 2020). Sebagaimana contoh, Kantor Walikota Magelang yang seharusnya melayani masyarakat Kota Magelang justru terletak jauh di perbatasan dengan Kabupaten Magelang. Meskipun akan dipindahkan, hal tersebut bukan berasal dari pemikiran “kedekatan dengan rakyat”, tetapi karena adanya konflik pemanfaatan gedung dengan Akademi TNI.

Istilah kantor walikota menjadi lebih eksklusif karena hanya memuat fungsi sebagai tempat bekerjanya eksekutif sehingga tidak mencerminkan konsep demokrasi. Konsep balai kota sebagai tempat pertemuan, rapat, dan sebagainya antara pemerintah dan masyarakat menjadi antitesis dari rencana penerapan kembali fungsi kantor walikota. Adanya ruang bagi masyarakat membuat konsep balaikota menjadi lebih demokratis karena rakyat sebagai pemilik dapat turut mengaksesnya sebagai ruang publik. Keberagaman kepentingan dalam merumuskan fungsi bagi publik dan pemerintah perlu dilakukan harmonisasi yang diarahkan oleh arsitek sebagai “juri yang adil” sehingga pendekatan *participatory design* menjadi solusi demokratis yang linear dengan prinsip *good governance*. Dalam lingkup *participatory design*, arsitek memposisikan diri merancang untuk pengguna (*design for users*) dimana pendapat para pengguna yang beragam dengan tingkat komitmen tinggi menjadi pertimbangan untuk mensintesisasikan solusi rancangan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hasil rancangan dikonsultasikan kembali dengan pengguna untuk melihat masukan dan tingkat afirmasi terhadap konsep yang ditawarkan.

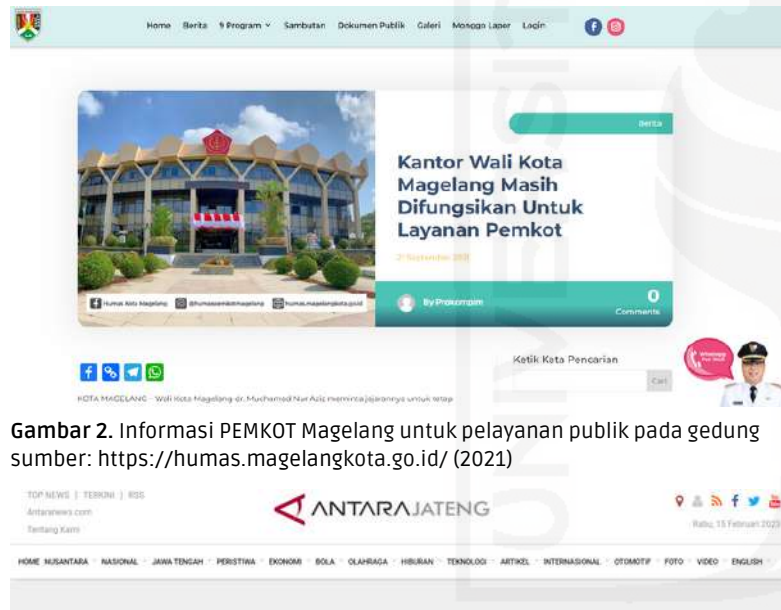


1.3. LATAR BELAKANG

1.3.1. KONFLIK PENGGUNAAN GEDUNG KANTOR WALIKOTA MAGELANG



Gambar 1. Berita mengenai konflik gedung sumber: <https://borobudurnews.com/> (2020)



Gambar 2. Informasi PEMKOT Magelang untuk pelayanan publik pada gedung sumber: <https://humas.magelangkota.go.id/> (2021)



Gambar 3. Berita penyelesaian konflik kepemilikan lahan sumber: <https://jateng.antaranews.com/> (2022)

1981

Tanah dan Bangunan merupakan kepemilikan dari Dephankam Cq. Mako Akabri/Mako Akademi TNI, Berdasarkan SHP No.9 Tahun 1981, IKN No.2020335014, Luas Tanah 40.000 M2

1985

Kepemilikan gedung beserta tanah di Kompleks Kantor Walikota Magelang merupakan hibah dari Kementerian Pertahanan melalui Kementerian Dalam Negeri dimana Gubernur Jawa Tengah memberikan mandat untuk dipergunakan sebagai Kantor Walikota Magelang (Bersifat pinjam pakai).

(Keterangan Pers Walikota Sigit dalam Kompas.com 2020)

2020

Terjadi konflik pemanfaatan gedung dimana Akademi TNI merencanakan untuk menggunakan kompleks tersebut sebagai perkantoran sehingga berharap aset dapat segera dikembalikan (Terjadi pemasangan plang kepemilikan tanah oleh TNI).

(Keterangan Komandan Resimen Chandradimuka Akademi TNI Kolonel (Pas) Tri Bowo dalam Kompas.com 2020)

2022

Konflik pemanfaatan Gedung Walikota Magelang diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dengan nota kesepahaman yang menghasilkan komitmen Kementerian Keuangan untuk menghibahkan tanah dan bangunan Balai Diklat Kepemimpinan Kemenkeu di Jalan Alun-Alun Utara Kota Magelang kepada Pemkot Magelang (Indriani, 2022).



Gambar 4. Pemasangan logo TNI pada Kantor Walikota Magelang
sumber: <https://humas.magelangkota.go.id/> (2021)

● 2023

Setelah konflik pemanfaatan tanah-bangunan selesai dengan nota kesepahaman antara TNI, Kementerian Keuangan, dan Pemkot Magelang dalam nomor B/1077/IX/2022 slog tertanggal 13 September 2022, lambang TNI yang terpasang sebagai bentuk manifestasi klaim aset sempat diturunkan pada September 2022. Namun, pada 3 Februari 2023 lambang tersebut kembali dipasang sehingga menimbulkan polemik atas nota kesepahaman.

prokompim dalam <https://humas.magelangkota.go.id/> (2022)



Kantor Walikota Magelang berdiri di atas tanah milik Akademi TNI dan diminta untuk dikembalikan

KONFLIK KEPEMILIKAN LAHAN

RESOLUSI KONFLIK

Diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dengan keputusan:

Kantor Walikota (Pemkot) harus pindah ke lokasi baru di Utara Alun-Alun Kota Magelang

Dalam jangka waktu 5,5 tahun (sejak 2022) proses tersebut harus selesai



"Hingga saat ini belum ada rancangan kompleks kantor walikota pada lokasi yang baru"

1.3.2. KOTA MAGELANG: KOTA YANG TIDAK MEMILIKI BALAI KOTA

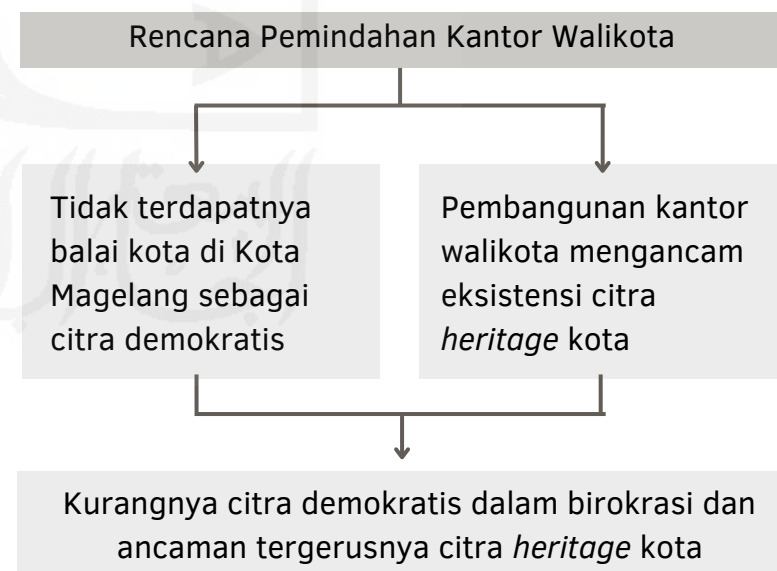
Salah satu bentuk fisik yang menjadi representasi suatu kota adalah bangunan kantor pemerintahan yang menjadi manifestasi dari kekuasaan birokrasi (Rudianto, 2001). Namun, fungsi kantor menjadi lebih eksklusif sehingga representasi eksekutif sebagai pemegang kekuasaan lebih dominan daripada rakyat yang menjadi pemilik utama. Konsep yang lebih merepresentasikan rakyat dapat dimanifestasikan dengan balai kota yang menjadi gedung kotapraja tempat pertemuan, rapat, dan sebagainya antara penduduk dan pemerintah kota (KBBI, 2016). Dalam definisi tersebut terdapat pemaknaan bahwa bangunan menjalankan fungsinya sebagai representasi dari upaya perlindungan prinsip demokratis karena menjadi wadah berkantornya pemerintah dan pertemuan penduduk dengannya. Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menjabarkan prinsip keterbukaan dalam kantor walikota dapat mengikuti desain dari balai kota. Hal ini dikarenakan terdapat kemudahan akses bagi siapapun pada balai kota untuk mendapatkan informasi publik yang nantinya akan berpengaruh pada persepsi dan citra pemimpin (Liputan6.com, 2012).

Merasakan kehadiran balai kota menjadi proses demokratisasi karena masyarakat dapat mengaksesnya sebagai wadah untuk pengembangan dan pemberdayaan aktivitas sosial-budaya disamping fungsi administrasinya (Rudianto, 2001). Kota Magelang secara resmi tidak memiliki balai kota dan secara fisik hanya terbangun kantor dengan fungsi administrasi. Akibat hal tersebut, rakyat sebagai pemegang kekuasaan utama tidak memiliki wadah untuk dekat dengan pelaksana kedaulatannya.

Selain memiliki citra demokratis, balai kota juga memiliki citra regional yang melestarikan identitas suatu kota dengan merekam kembali historismenya (Rudianto, 2001). Kota Magelang memiliki riwayat historis kuat sebagai Kota *Heritage* dimana bangunan kolonial pada masa lampau banyak yang lestari dan menjadi keunikan kota (Prameswari, 2019). Namun, pembangunan massif mengancam eksistensi dari bangunan-bangunan tersebut. Hal ini bukan berarti balai kota harus melestarikan langgam arsitektur kolonial, tetapi dapat merepresentasikan jejak *heritage* dengan menelusuri elemen-elemen bangunan yang mampu diadaptasi dalam rancangan.



Gambar 5. Pendapat Jokowi mengenai idealisme kantor walikota
sumber: <https://www.liputan6.com/> (2012)



1.3.3. DINAMIKA KEBUTUHAN BIROKRASI DALAM LOKASI BARU



**± 14.000 M2
LOKASI RENCANA
KANTOR BARU**

**Jarak: 4,2 KM (8
menit berkendara
dengan mobil)**



**± 40.000 M2
KANTOR
WALIKOTA
EXISTING**

Gambar 6. Tangkapan satelit lokasi rencana kantor walikota (atas) dan existing (bawah)
sumber: googleearth.com (2023)

Perpindahan Kantor Walikota Magelang ke lokasi baru menimbulkan konflik dari segi birokrasi dan teknis. Dalam kantor *existing* terdapat tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersebar pada kompleks perkantoran seluas \pm 40.000 m² dimana akibat konflik pemanfaatan lahan, OPD tersebut harus pindah ke lokasi baru yang memiliki luas lahan 1/4 dari kantor *existing* (\pm 1400 m²). Luasan lahan yang semakin kecil membuat upaya rekayasa pemindahan para OPD menjadi pertimbangan serius. Berdasarkan hasil wawancara dengan DPUPR Kota Magelang yang menjadi penanggung jawab pembangunan, terdapat dua skema pemindahan dimana skema pertama memindahkan seluruh OPD ke lokasi baru dengan asumsi kebutuhan bangunan sebanyak tiga tower di atas lima lantai dan taksiran kebutuhan anggaran per tower Rp 70 M (Membutuhkan \pm Rp 210 M). Skema kedua dengan pemilihan OPD yang diprioritaskan untuk berkantor di lokasi baru, tetapi belum menjadi skema yang tetap karena terdapat penyesuaian.

Berdasarkan RPJMD Kota Magelang 2021-2026 skema anggaran untuk pembangunan hanya ditargetkan sebesar Rp 76 Miliar (hingga tahun 2025) yang menyebabkan skema pemindahan pertama oleh DPUPR menjadi sulit karena terbatas anggaran. Anggaran terbatas juga menyebabkan pembangunan bertahap sehingga perlu manajemen di setiap tahapnya agar balai kota tetap dapat berfungsi selagi menunggu tahap pembangunan selanjutnya.

Tantangan penyesuaian kebutuhan prioritas sebagai problem yang mendesak dapat diselesaikan dengan skema pembangunan bertahap. Namun, tantangan muncul berkaitan dengan dinamika zaman yang menyebabkan fluktuasi kebutuhan perangkat daerah. Adanya pengembangan Pemerintah Daerah Metaverse menunjukkan ruang dapat lebih disederhanakan, kebutuhan pelayanan secara digital diharapkan dapat menggantikan fungsi kantor fisik (Putri, 2022). Perencanaan ruang dalam yang fleksibel diperlukan untuk menunjang kebutuhan pemerintah yang fluktuatif, antara menambah unit atau mengurangi, sehingga ruang dalam bisa tetap memenuhi kebutuhan masa sekarang hingga kedepannya.



Gambar 7. Peluncuran Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (KОВI OTDA) berbasis metaverse oleh Kemendagri. Sumber: Kemendagri (2022)

Pemda Pakai Metaverse, Kemendagri: Bertemu Saya dan Pejabat dalam Bentuk Animasi 3 Dimensi

Tim PRMN 02 - 27 April 2022, 17:46 WIB



Gambar 8. Rencana metaverse sebagai bentuk Pemda masa depan sumber: www.pikiran-rakyat.com (2022)



1.3.3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KURANG MELIBATKAN PUBLIK

Eksklusivitas kantor hanya menjadi wadah para birokrat dalam memerintah, tidak menjadi tempat untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakatnya. Tersedianya ruang bagi publik di pemerintahan perlu dilakukan karena terdapat wadah untuk diskusi mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga memunculkan opini publik yang dapat membantu merumuskan kebijakan publik yang adil (Habermas, 1991 dalam Malik 2018).

Pemerintah Kota Magelang merencanakan pembangunan Kantor Walikota di lokasi baru dengan pembentukan tim khusus yang merencanakan, mengalokasi dana, koordinasi, realisasi, hingga transisi OPD ke kantor yang baru (Fitriana dan Rusiana, 2022). Dalam tahap perencanaan, pemerintah kurang melibatkan pendapat publik. Usulan akan fungsi kantor juga menjadi upaya eksklusivitas sehingga tidak merencanakan bagaimana bangunan pemerintahan dapat dijadikan tempat diskusi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Perencanaan yang kurang melibatkan pendapat publik, khususnya masyarakat Kota Magelang, dapat menyebabkan konflik, baik konflik sosial yang berkaitan dengan transparansi maupun konflik arsitektural berkaitan dengan rancangan gedung milik rakyat.

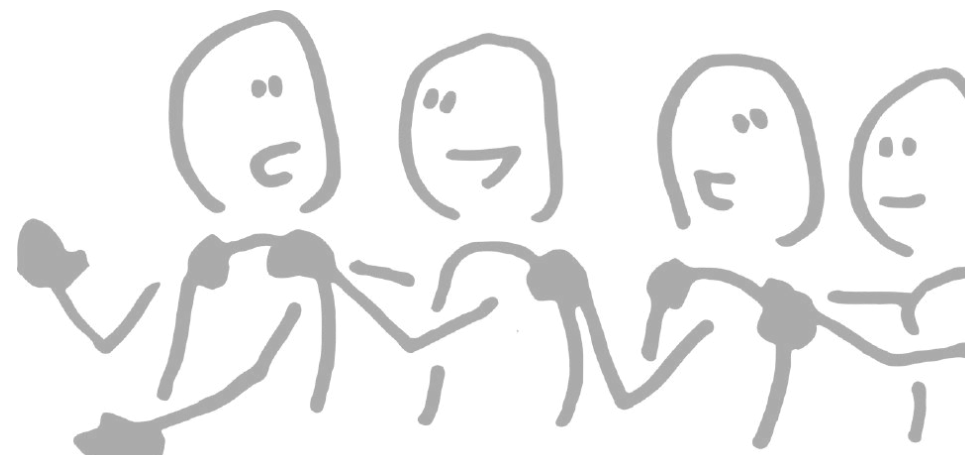
Perencanaan balai kota menjadi alternatif yang lebih memperhatikan fungsi sebagai wadah aktivitas masyarakat disamping Kantor Walikota yang hanya stagnan untuk urusan birokrasi. Pelibatan masyarakat juga dapat dilakukan dalam merencanakan ruang publik yang mengakomodir kepentingan umum dalam balai kota. Oleh karena itu, elemen partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam perencanaan balai kota daripada kantor yang perencanaannya cenderung otoritatif.



Gambar 9. Rencana Pemkot Magelang dalam pemindahan Kantor Walikota sumber: <https://www.suara.com/news/> (2022)



Gambar 10. Problematika dan isu strategis dalam RPJMD Kota Magelang 2021-2026 dari segi perencanaan. sumber: RPJMD Kota Magelang (2021)



Linear dengan prinsip pembangunan, pasal 261 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa perencanaan pembangunan Daerah harus menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Partisipatif sebagai elemen pelibatan masyarakat secara massif menciptakan problem baru berkaitan dengan heterogenitas dalam preferensi desain hingga waktu pembahasan untuk mencapai mufakat. Sebagai bentuk mediasi antara heterogenitas kebutuhan publik dan kepentingan pemerintah proses dialog diperlukan antara tiga *stakeholders* utama, yaitu pemerintah sebagai pemberi kebijakan, arsitek sebagai perancang, dan masyarakat (Sanders, 2002 dalam Permanasari et al., 2018). Proses dialog yang merupakan upaya partisipatif menjadi penting dalam menggali keinginan publik dan fakta lapangan melalui pemerintah. Namun, proses dialog membutuhkan waktu yang lama sehingga *participatory design* dianggap sebagai *never ending process* jika tidak dilakukan pembatasan.

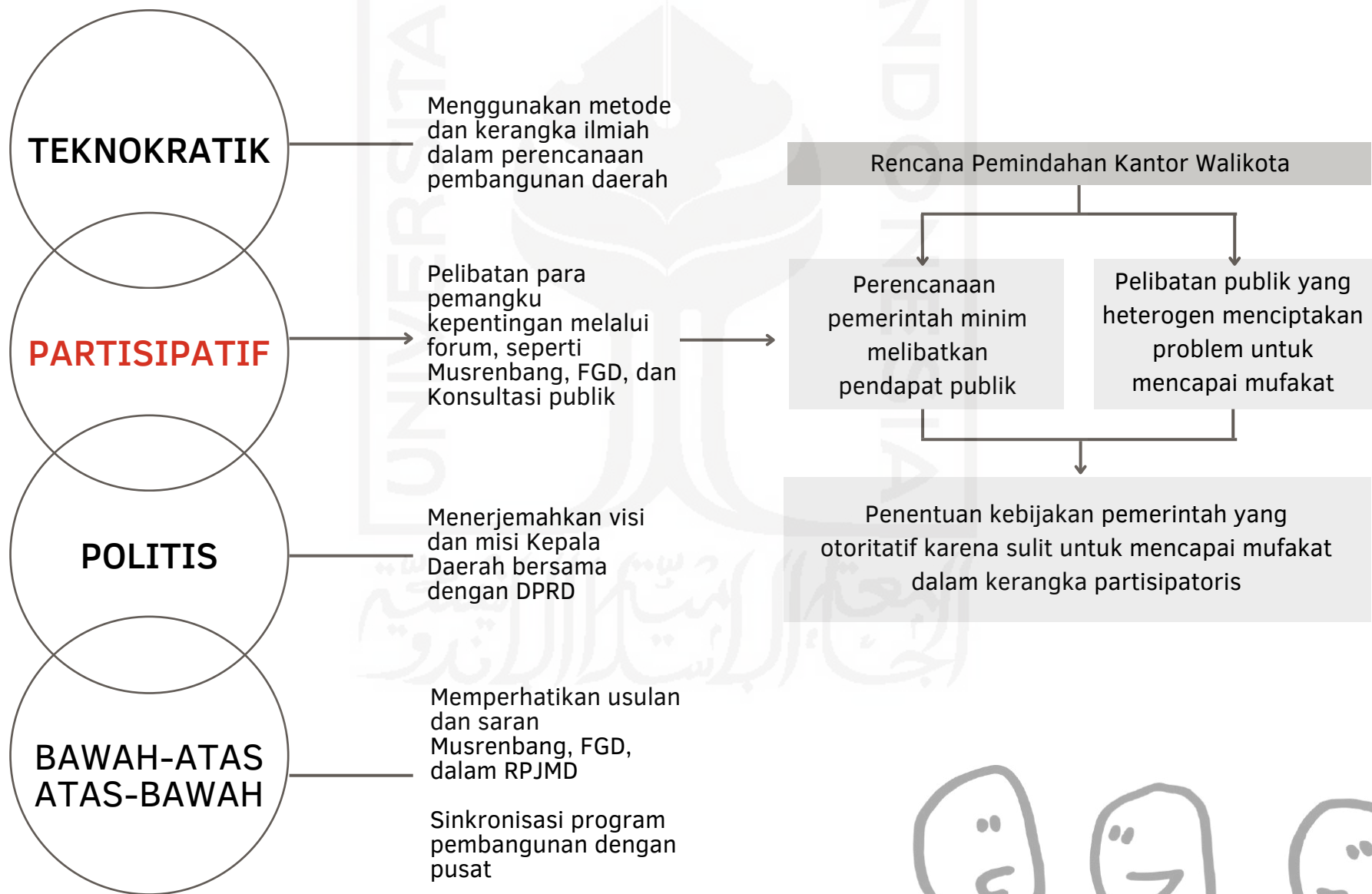
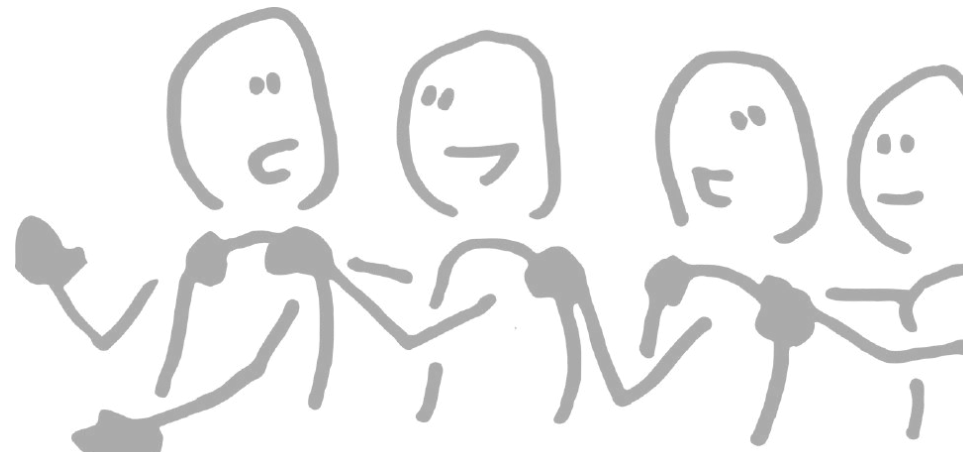


Diagram prinsip perencanaan pembangunan daerah

Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026



Berdasarkan data dan fakta, latar belakang perancangan yang terdiri dari konflik penggunaan gedung hingga penyelesaiannya dengan perpindahan seluruh bentuk birokrasi ke lokasi baru sebagai isu aktual, kesadaran bahwa Kota Magelang tidak memiliki balai kota yang mampu menjadi wadah aktivitas pertemuan antara publik dan pemerintah, terdapatnya dinamika kebutuhan birokrasi pada lokasi baru yang cenderung fluktuatif, dan perencanaan yang kurang melibatkan publik sebagai isu-isu yang berkembang sehingga menimbulkan problematika sebagai berikut:

PERMASALAHAN UMUM

Bagaimana merancang Balai Kota Magelang sebagai lingkungan bersama yang mampu menjadi wadah aktivitas kantor dan ruang publik?

PERMASALAHAN KHUSUS

- Bagaimana rancangan balai kota yang merepresentasikan kebanggaan masyarakat Kota Magelang
- Bagaimana rancangan ruang dalam yang memenuhi kebutuhan para birokrat sekarang, tetapi memungkinkan terjadinya fleksibilitas kebutuhan dimasa depan?
- Bagaimana rancangan ruang luar sebagai tempat publik beraktivitas secara produktif, tetapi tidak mengganggu kinerja para birokrat yang berkantor?

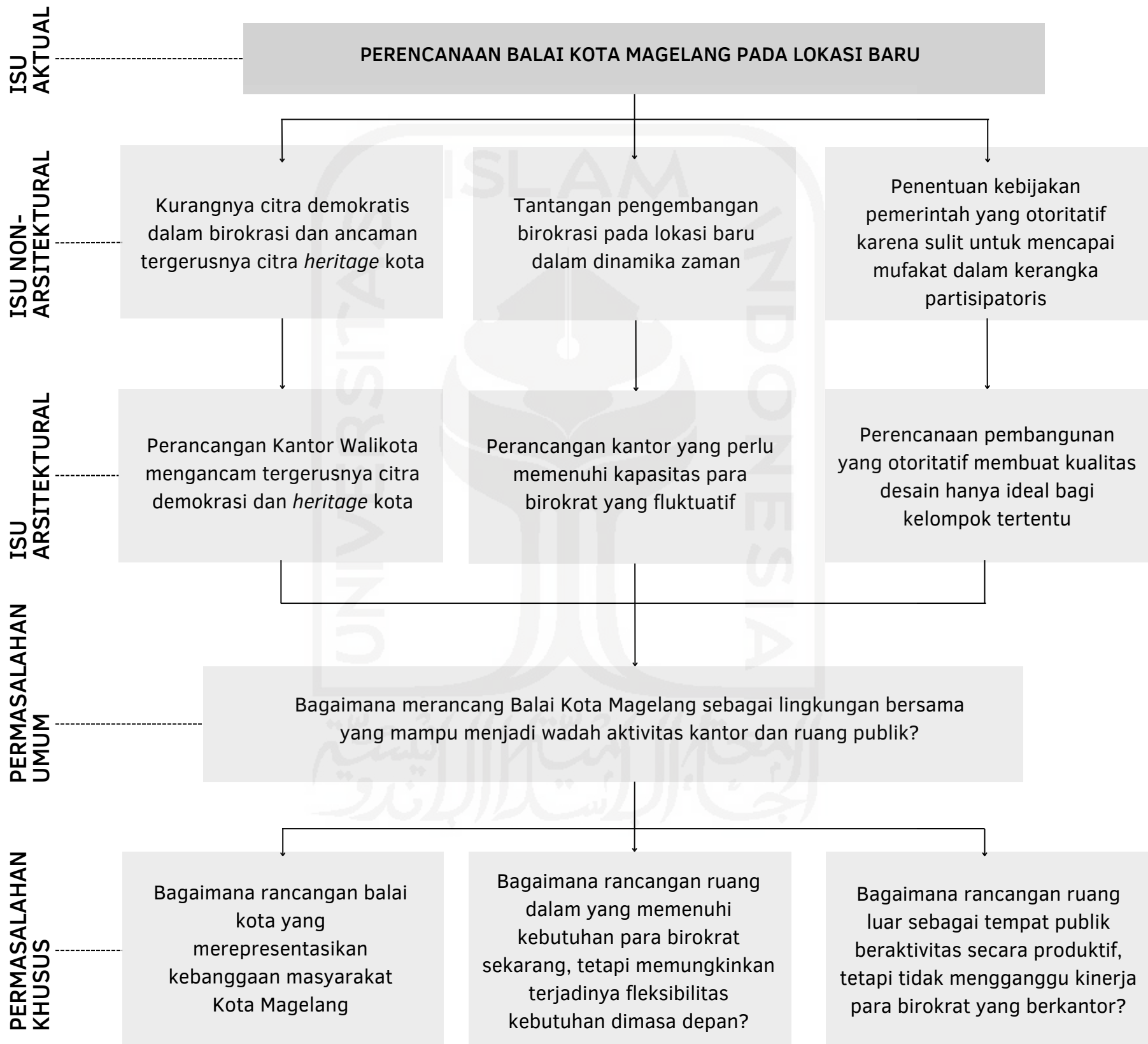
TUJUAN

Menghasilkan rancangan Balai Kota Magelang yang merepresentasikan citra demokratis dan identitas kota sebagai simbol kebanggaan warga dengan rancangan ruang luar untuk aktivitas publik secara produktif dan ruang dalam yang memenuhi kebutuhan para birokrat yang dinamis.

SASARAN

- Merancang balai kota yang menjadi citra demokratis dan identitas kota melalui penelusuran harapan warga dan historisme kawasan
- Merancang ruang luar yang produktif dengan memenuhi keinginan publik melalui penelusuran pendapat masyarakat
- Merancang ruang dalam yang dapat fleksibel sesuai kebutuhan para birokrat dengan memperhatikan kajian normatif dan penelusuran rencana para birokrat

1.4. PETA PERMASALAHAN



1.5. URGENSI PENDEKATAN PARTISIPATORIS

Balai kota menjadi bentuk representasi dari kekuasaan demokratis yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, peraturan yang dirumuskan secara normatif (PP No. 16 Tahun 2021) hanya mengatur fungsinya sebagai kantor pemerintahan. Berkaitan dengan definisinya secara umum sebagai ruang publik karena menjadi tempat pertemuan juga dengan penduduk, perlu dilakukan upaya merancang sebagai strategi menciptakan "tempat yang hidup" daripada sekadar formalitas penyediaan ruang. Pendekatan partisipatoris dilakukan untuk menghimpun pendapat *stakeholders* tentang balai kota yang menjadi preferensi mereka. Secara fundamental, pendekatan partisipatoris dilakukan perancang dengan pertimbangan:

- Masyarakat memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi dalam merumuskan kepentingan umum untuk diakomodir dalam ruang publik balai kota. Pendekatan yang hanya mengandalkan intuisi perancang kurang mampu menciptakan "tempat yang hidup" karena tidak didasarkan atas penelusuran fakta akan preferensi publik Kota Magelang.
- Meskipun PP No. 16 Tahun 2021 mengatur secara fungsi kantor pemerintahan sebagai bagian dari konsep balai kota, penelusuran aspek *intangible* perlu dilakukan untuk mengetahui rencana Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun kembali birokrasi di lokasi baru. Partisipatori terhadap *stakeholder* pemerintah dilakukan guna menghimpun informasi penting berkaitan dengan rencana awal, realita pembangunan, dan harapan dalam desain. Data-data yang terhimpun dianalisis untuk menemukan strategi desain pada perancangan kantor pemerintahan.
- Balai kota menjadi bagian dari representasi kebanggaan masyarakat sehingga dalam menelusuri aspek tersebut, pendapat warga perlu dihimpun untuk menemukan bagaimana balai kota mampu merepresentasikan citra demokratisnya sebagai ruang kekuasaan rakyat dengan terciptanya ruang publik yang berkualitas. Selain itu, penelusuran balai kota yang mencitrakan identitas kota perlu dilakukan partisipatori bersama *stakeholder* untuk mensintesis identitas apa yang perlu dikuatkan dalam rancangan.



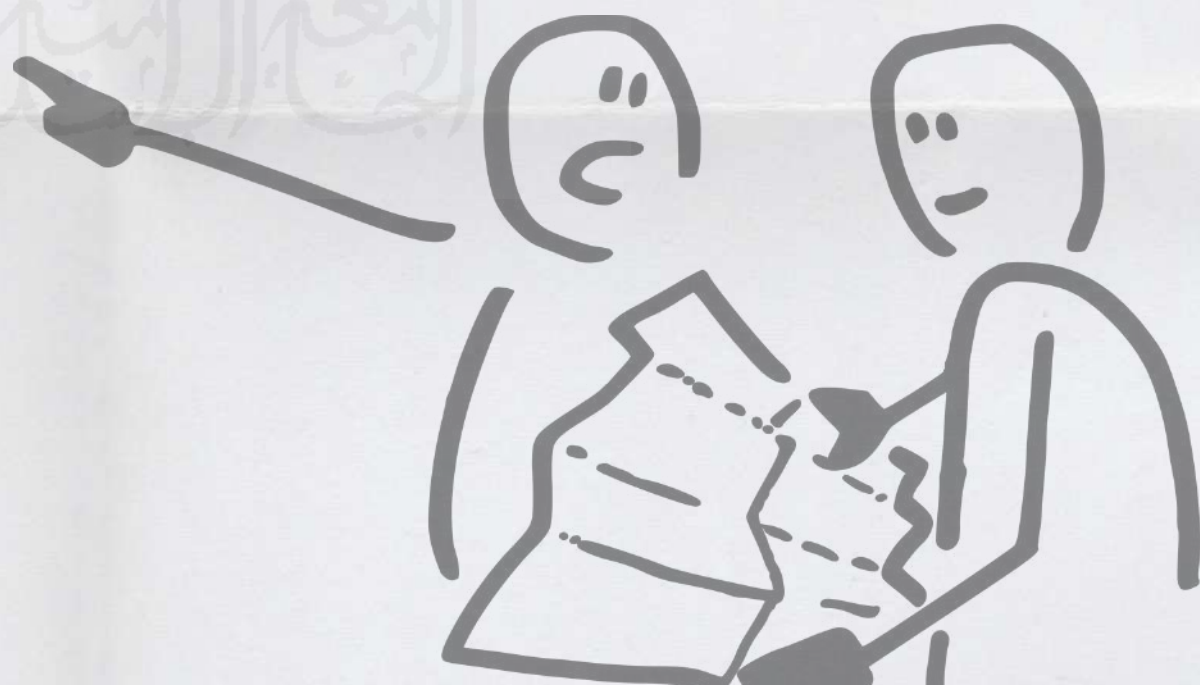
1.6. ORISINALITAS DAN KEBARUAN

Nama	Judul	Pendekatan	Lokasi	Perbedaan
Artahsasta B. P. Binilang, Rieneke L. E. Sela, Esli D. Takumansang (2015)	Balaikota Tahuna (Arsitektur <i>Art deco</i>)	Arsitektur <i>Art deco</i>	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Tidak memprioritaskan bentuk bangunan sebagai rancangan, lebih mengedepankan proses desain yang menghimpun pendapat <i>stakeholder</i> untuk menemukan permasalahan dan ide desain.
Oky Setra Dahmet (2018)	Revitalisasi Ex. Bangunan Balaikota Lama dan RTH Imam Bonjol Padang sebagai Kawasan Wisata Cagar Budaya	Revitalisasi arsitektur	Padang, Sumatra Barat	Tidak melakukan revitalisasi dalam merekomendasikan fungsi baru bangunan. Upaya pendekatan berbeda dari perancangan. Bangunan tidak dikategorisasikan sebagai bangunan cagar budaya.
Michael Theodore Boentoro (2018)	Balai Kota Pangkalpinang dengan Pendekatan Arsitektur Lokal	Arsitektur lokal	Pangkalpinang, Bangka Belitung	Nilai lokalitas tidak sebatas direpresentasikan pada simbolisme kebudayaan antara elemen eksterior dan interior, tetapi diekspresikan pada proses desain yang mementingkan pendapat banyak orang.
Dodi Jajat Sudrajat, Ika Kartika, Tri Wahyu Handayani (2019)	Kajian Konsep Kearifan Lokal Pada Perancangan Kantor Bupati Kabupaten Bandung	Kearifan lokal	Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Konsep kearifan bangsa dalam kerangka demokrasi arsitektur digunakan dengan metode partisipatoris yang berbeda dari hanya sekadar memetakan elemen arsitektur lokal dari segi bentuk.
Alfredo Christian (2020)	Balai Kota Surakarta dengan Pendekatan <i>Green Architecture</i>	<i>Green Architecture</i> (Arsitektur berkelanjutan)	Surakarta, Jawa Tengah	Penggunaan pendekatan desain partisipatif sebagai respon sosial dan idealisme balaikota. Konsep keberlanjutan dalam BGH menjadi kaidah normatif perancangan.

2. PENELUSURAN PROSOALAN DAN PEMECAHANNYA



البرية من الكتاب العزيز



2.1. KAJIAN TEMA PERANCANGAN

2.1.1. *Participatory Design* sebagai Bentuk Demokratisasi Arsitektur

Participatory design berlandaskan dari pemikiran bahwa lingkungan kita didesain oleh beberapa individu, tetapi efeknya dapat dirasakan oleh banyak orang sehingga bentuk interaksi langsung dengan mendengarkan setiap orang yang membagikan pengalamannya menjadi penting dalam memodifikasi lingkungan dimana dia hidup (Salama 1995 dalam Rezaei 2020). Membagikan suatu pengalaman erat kaitannya dengan interaksi sosial. Dalam desain partisipatif, guna menemukan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah dalam rancangan ruang publik, perlu dilakukan komunikasi antara *stakeholder* utama, yaitu pemerintah sebagai pemberi kebijakan, arsitek sebagai perancang, dan masyarakat dimana proses tersebut penting untuk memenuhi ekspektasi semua pihak (Sanders, 2002 dalam Permanasari et al., 2018). Desain partisipatif secara ringkas menurut Arkomjogja (2016) sebagaimana yang dikutip Fauzi dan Nareswari (2022) memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Membuat suatu bangunan yang dimiliki oleh masyarakat
2. Membantu untuk pengembangan, dokumentasi, dan teknik yang berguna dalam meningkatkan komitmen partisipatif
3. Mengarahkan untuk mengetahui permasalahan bersama, menentukan prioritas, hingga pencarian solusi sebagai langkah yang dapat dikembangkan masyarakat.

Produk rancangan hasil desain partisipatif harus dalam porsi yang adil dimana desain tidak hanya berkaitan dengan peminangan kebutuhan pemilik dana maupun otoritas, lebih dari itu semua pihak yang terlibat menjadi pertimbangan serius untuk mendapatkan mufakat yang sesuai dengan kepentingan bersama (Cowen and Shenton, 1996 dalam Putra and Zahro 2019). Henry Sanoff membagi tindakan desain dalam *participatory* dalam tiga tahapan, yaitu definisi masalah, elaborasi tindakan, dan evaluasi hasil (Salama 1995 dalam Rezaei 2020). *Participatory design* dinilai sebagai upaya demokratis karena pengambilan keputusan secara kolektif terdesentralisasi dalam sektor-sektor masyarakat yang menyebabkan seluruh individu memahami keterampilan dalam berpartisipasi secara efektif guna merumuskan keputusan yang berpengaruh terhadap mereka (Sanoff, 2010 dalam Luck 2018).

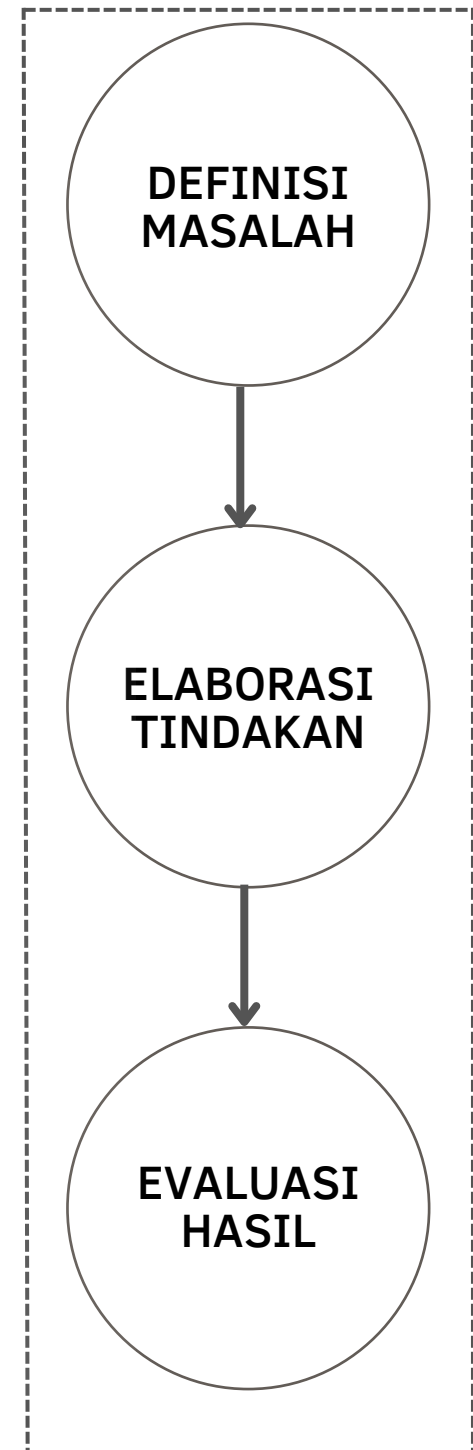


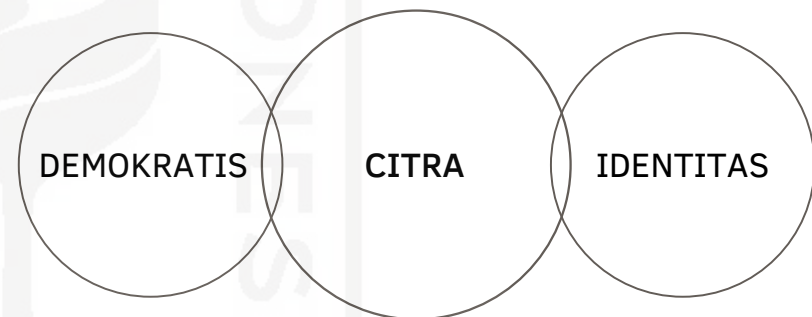
Diagram. Alur utama proses desain berbasis partisipatori yang melibatkan para pemangku kepentingan

2.1.2. Balai Kota dan Kantor Walikota: Mendefinisikan Idealisme

Balai kota berperan sebagai tempat terselenggaranya pemerintahan eksekutif yang menjalankan sistem demokrasi suatu kota dalam pelayanan masyarakat, dari pelaksanaan maupun kelembagaan atau organisasi (Christian, 2019). Linear dengan pelayanan masyarakat, balai kota didefinisikan dalam KBBI sebagai gedung tempat pertemuan, rapat, dan sebagainya antara pemerintah itu sendiri dan penduduk. Kantor Walikota memiliki definisi yang lebih privat berkaitan dengan fungsinya yang hanya mengakomodir ruang kerja untuk urusan administrasi tanpa memikirkan perannya sebagai bangunan rakyat. Secara ideal balai kota memiliki idealisme sebagai ruang publik dimana masyarakat mudah mengaksesnya dan ruang bekerja berkaitan dengan urusan administrasi atau kelembagaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa balai kota memiliki fungsi yang lebih kompleks dan ideal karena dapat berperan dalam mengakomodir urusan administratif sekaligus pertemuan dengan rakyat.

2.1.3. Citra Demokrasi dan Identitas pada Balai Kota

Citra balai kota yang demokratis untuk warganya berkaitan dengan penyediaan ruang yang memiliki hubungan dekat antara fungsi publik dan kantor dalam sifat yang manusiawi, menjunjung persamaan, dan terbuka. Sebagai kebanggaan warga, unsur regionalisme dalam identitas kota dapat direpresentasikan dalam simbolisme, bentuk bangunan, tata tapak, maupun ruang dalam (Rudianto, 2001). Identitas regional dapat digali dari perjalanan historis Kota Magelang dalam riwayatnya sebagai *heritage city*. Citra demokrasi dapat diinterpretasikan pada kategorisasi ruang publik dan ruang administrasi untuk pemenuhan kebutuhan birokrasi, kejelasan orientasi bangunan, dan jalur sirkulasi (Rudianto, 2001).



2.2. KAJIAN TIPOLOGI

2.2.1. Tipologi Umum: Balai Kota Magelang sebagai Bangunan Gedung Negara (BGN)



Acuan Normatif: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Dalam ketentuan umum Bangunan Gedung Negara (BGN) didefinisikan sebagai bangunan guna keperluan dinas dimana hal miliknya dikuasai oleh negara atau daerah dan pengadaannya bersumber dari APBN, APBD, atau perolehan lainnya yang sah secara hukum. Balai Kota Magelang yang secara administratif berperan sebagai kantor pemerintahan dan penganggarannya disusun berdasarkan RPJMD membuatnya diklasifikasikan sebagai BGN. Meskipun dilakukan pendekatan perancangan secara partisipatif, terdapat kaidah-kaidah normatif yang mengikat dan wajib menjadi dasar perancangan, khususnya pada fungsi kantor pemerintahan.

Pasal 41:	Kenyamanan bangunan gedung terdiri atas kenyamanan ruang gerak, kondisi udara, pandangan dari dan ke dalam gedung, dan tingkat getaran dan kebisingan
Pasal 50:	Kelengkapan sarana dan prasana pemanfaatan bangunan gedung: a. ruang ibadah; b. ruang ganti; c. ruang laktasi; d. taman penitipan anak; e. toilet; f. bak cuci tangan; g. pancuran; h. urinoar; i. tempat sampah; j. fasilitas komunikasi dan informasi; k. ruang tunggu; l. perlengkapan dan peralatan kontrol; m. rambu dan marka; n. titik pertemuan; o. tempat parkir; p. sistem parkir otomatis; dan/atau q. sistem kamera pengawas
Pasal 53:	Ketentuan arsitektur bangunan gedung meliputi penampilan bangunan, tata ruang dalam, serta keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara lingkungan dan bangunan gedung
Pasal 54:	Fasilitas dan peralatan dalam kondisi darurat yang harus ada meliputi pintu darurat dan jalur penyelamatan; tangga darurat dan/atau elevator darurat; ruang kompartemen; lampu dan tanda darurat; sistem deteksi, alarm, dan komunikasi darurat; sumber listrik darurat; ruang pusat pengendali keadaan darurat; sistem pengendalian asap; perlengkapan alat pemadam api; penggunaan konstruksi bangunan yang tahan api tahan gempa, dan/atau kedap air.
Pasal 107:	Bangunan kelas 4 (bangunan hunian campuran) dan 5 (bangunan kantor) di atas empat lantai dengan sedikitnya memiliki luasan 50.000 m ² wajib menggunakan BGH.

Prinsip normatif Bangunan Gedung Hijau (BGH):

- a. Perumusan kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak;
- b. Pengurangan (reduce) penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia;
- c. Pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
- d. Penggunaan kembali (reuse sumber daya yang telah digunakan sebelumnya);
- e. Penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle);
- f. Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya Pelestarian;
- g. Mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
- h. Orientasi pada siklus hidup;
- i. Orientasi pada pencapaian mutu yang diinginkan;
- j. Inovasi teknologi untuk perbaikan yang berkelanjutan; dan
- k. Peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.

Pasal 108:

Pasal 124:

BGN yang memiliki luas di atas 5000 m² wajib menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Pasal 128:

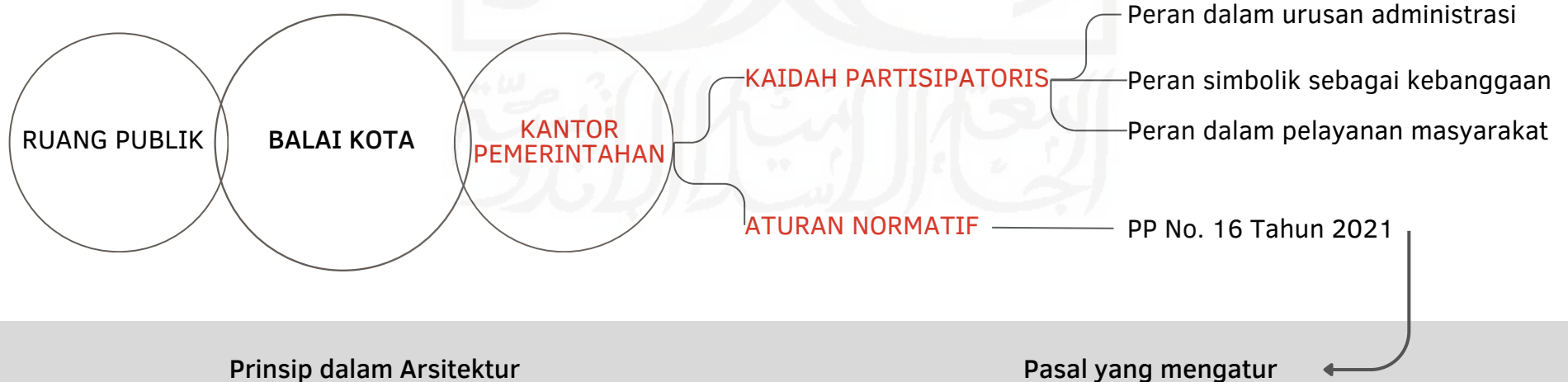
BGN harus memenuhi klasifikasi, luasan standar, dan jumlah lantai standar dimana yang diklasifikasi wajib mengikuti kaidah tersebut salah satunya adalah Bangunan Gedung Kantor.

Pasal 130:

Standar luasan bangunan gedung kantor dapat mengikuti kaidah 10 m² per personel. Standar luas ruang bangunan terdiri atas (pada tabel 1 terlampir).

Pasal 133:

BGN yang dibangun maksimal delapan (8) lantai dihitung dari permukaan tanah terendah. Maksimal lapis basemen adalah tiga lapis. Lebih dari ketentuan memerlukan persetujuan Menteri dengan pertimbangan kebutuhan, perda terkait ketinggian bangunan atau jumlah lantai, dan koefisien perbandingan harga tanah dan bangunan gedung.



Fungsi (*Utilitas*)

41, 50, 107, 108, 124, 128, 130, 133

Kekuatan bangunan (*Firmitas*)

54, 55

Estetika (*Venustas*)

53

No.	Nama ruang	Klasifikasi	Organisasi Ruang	Luasan
1	Ruang pimpinan tinggi utama atau pimpinan tinggi madya setara eselon IA atau walikota atau bupati atau yang setingkat	RUANG UTAMA	ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 5 (lima) orang, ruang simpan, dan ruang toilet	117 m ²
2	ruang pimpinan tinggi madya setara eselon Ib atau yang setingkat (Wakil Walikota)		ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet	83,4 m ²
3	ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon Ila (SEKDA)		ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet	74,4 m ²
4	ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon Iib atau yang setingkat (kepala dinas)		ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet	62,4 m ²
5	ruang administrator setara eselon IIIa atau yang setingkat		ruang kerja, ruang tamu, ruang sekretaris, dan ruang simpan	24 m ²
6	ruang administrator setara eselon IIIb atau yang setingkat		ruang kerja, ruang tamu, dan ruang simpan	21 m ²
7	ruang pengawas setara eselon IV atau yang setingkat		ruang kerja, ruang staf untuk 4 (empat) orang, dan ruang simpan	18,8 m ²
8	ruang rapat utama pimpinan tinggi utama atau pimpinan tinggi madya setara eselon I atau yang setingkat	RUANG PENUNJANG	kapasitas 75 (tujuh puluh lima) orang	90 m ²
9	ruang rapat utama pimpinan tinggi pratama setara eselon II atau yang setingkat		kapasitas 30 (tiga puluh) orang	40 m ²
10	ruang studio		10% dari staff	4 m ² /orang
11	Ruang arsip		seluruh staff	0,4 m ² /orang
12	Toilet		per 25 orang (pemakai pejabat administrator, pengawas, staff)	2 m ² /orang
13	Musala		20% dari jumlah personel	0,8 m ² /orang

Tabel 1. Standar luas ruang bangunan pada Bangunan Gedung Negara
Sumber: Dokumentasi pribadi (2023) dalam PP Nomor 16 Tahun 2021

2.2.2. Tipologi Khusus: Citra Demokrasi pada Rancangan Balaikota Magelang

Berdasarkan kajian dari Rudianto (2001) yang merancang Balaikota Surakarta sebagai Representasi Kekuasaan Demokrasi dalam Guna dan Citra Arsitektur terdapat prinsip yang linear dengan pendekatan partisipatori desain yang juga menjadi bentuk demokratisasi arsitektur. Terdapat prinsip yang menjabarkan rancangan balaikota dapat menjadi bentuk interpretasi demokrasi, yaitu:

A. PUBLIC SPACE



Merencanakan ruang dimana terdapat kehadiran publik, seperti plaza, pelataran, lapangan upacara, dan ruang hijau dengan fungsi utama sebagai tempat interaktif masyarakat dalam menyampaikan ide secara langsung kepada pemerintah (*wacana komunikasi*), tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dalam kerangka kepentingan umum dan pelayanan publik (*public pressure*), dan wadah sosialisasi masyarakat (Rudianto, 2001). Prinsip tersebut perlu dilakukan penyesuaian kembali mengingat secara normatif, Kota di Indonesia sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik sebagai integrasi pelayanan. Nilai komunikatif dan wadah sosialisasi menjadi pendekatan yang relevan dalam konsep ruang publik.

B. KEJELASAN ORIENTASI



Menjadi dasar dari kesan visual yang membangun citra dari balaikota. Titik orientasi dan sumbu imajiner dapat membantu penciptaan keseimbangan (Rudianto, 2001). Orientasi bangunan jika berdasar pada prinsip BGH, dapat mengorientasikan bangunan agar nilai solar faktornya rendah yang berpengaruh terhadap penurunan nilai OTTV. Antara orientasi saintifik dan sosial perlu keseimbangan agar tercipta desain yang memiliki kebanggaan bagi masyarakat sekaligus mendukung isu keberlanjutan.

C. JALUR SIRKULASI



Jalur sirkulasi digunakan untuk menunjang pembagian *zoning*, ruang, hingga mendefinisikan fungsi jalan utama, *service*, maupun pedestrian. Rudianto (2001) membagi sirkulasi menjadi:

1. Sirkulasi ruang luar yang memisahkan antara pejalan kaki dan kendaraan
2. Sirkulasi ruang dalam yang terdiri dari sirkulasi utama (terbuka) dan sekunder yang membentuk ruang tertutup bagi publik.
3. Sirkulasi vertikal sebagai jalur penghubung antarlantai berupa tangga sirkulasi, darurat, dan ramp.

Selain itu, sirkulasi mekanis diperlukan dalam perancangan modern sebagai upaya kemudahan aksesibilitas, seperti elevator untuk publik, pegawai, dan servis.

2.3. KAJIAN PRESEDEN

2.3.1. Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah

Balai Kota Surakarta tidak hanya berperan sebagai bangunan bagi kalangan pemerintah, lebih dari itu, balaikota juga terbuka untuk publik dengan intervensi rancangan yang memiliki idealisme untuk menghapus sekat antara pemerintah dan masyarakat (surakarta.go.id, 2019).



Gambar 11. Balaikota lama Surakarta yang berpagar (kiri) dan hasil redesain pada tahun 2018 (kanan). Sumber: jawapos.com (2018) dan pribadi (2023)

Desain Balai Kota Solo memiliki citra utama pada pendoponya yang terletak pada bagian depan

Pada awalnya desain balai kota cenderung privat dengan pagar dan dinding kaca yang membatasi

Pembatas dibuka sebagai simbol keterbukaan

Menjadi pendopo yang dapat dimanfaatkan publik, misal dalam berlatih tari dan aktivitas lain

sumber: surakarta.go.id (2018)



Pendopo menjadi tempat aktivitas warga pada balaikota



Aktivitas kantor dan pelayanan publik pada desain yang terbuka

Gambar 12. Pendopo balaikota (atas) dan kantor pemerintah (bawah)
Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)

Menjadi simbol ekspresi hari raya dengan penyediaan figur temporal yang representatif pada area hijau yang terbuka



Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)



RUANG PERKANTORAN

Ruang-ruang administratif diletakkan pada bagian belakang pendopo sehingga lebih privat

Gambar 13. Kompleks Perkantoran Pemkot Surakarta.
Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)



RUANG PUBLIK

Desain tanpa pagar yang terintegrasi dengan trotoar membuatnya terbuka untuk diakses oleh publik



SIMBOLISME KEBUDAYAAN

Simbolisme lokal pada figur Punakawan menjadi elemen estetik sebagai spot foto sekaligus menegaskan identitas kebudayaan Jawa



AKSES UNTUK PUBLIK

Penyediaan akses bagi pengunjung dan desain yang terbuka membuatnya menjadi spot wisata

Gambar 14. Fasilitas yang tersedia pada Balaikota Surakarta.
Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)



2.3.2. Balai Kota Bandung, Jawa Barat



Gambar 15.
Bagian wilayah kantor Walikota Bandung yang melestarikan bangunan *heritage* dan perpaduan dari unsur modern.
Sumber: jabarekspres.com



Gambar 16.
Konsep taman sebagai pusat kegiatan rakyat yang menjadi ruang publik pada balai kota
Sumber: hargatiket.net

Kantor Walikota yang memiliki kompleks taman dengan vegetasi yang asri diubah peruntukannya agar dapat dinikmati oleh publik. Bagian selatan balai kota direvitalisasi pada tahun 2017 dan dikembangkan menjadi taman dengan beberapa spot wisata menarik, seperti labirin hijau, monumen gembok cinta, dan kolam bermain sebagai ruang publik yang dapat dinikmati bersama oleh masyarakat pada lingkungan kerja walikota sehingga antara pemerintah dan rakyat dapat menikmati “kantor yang dimiliki bersama” (rumah.com, 2022). Penciptaan tempat yang mampu dinikmati oleh semua kalangan menjadikannya sebagai preseden yang ideal dalam konsep arsitektur yang demokratis.

Masterplan kawasan menunjukkan upaya sirkulasi sebagai elemen pengarah publik untuk beraktivitas pada taman balai kota yang membedakannya dengan sirkulasi menuju balai kota sebagai pusat administratif. Selain itu, vegetasi menjadi upaya peneduh sekaligus elemen pembatas antara ruang publik untuk masyarakat dan ruang administratif pemerintahan.



sumber: archdaily.com (2015)

2.3.3. Town and City Hall Buenos Aires, Argentine

Arsitek: Foster + Partners
Tahun: 2014

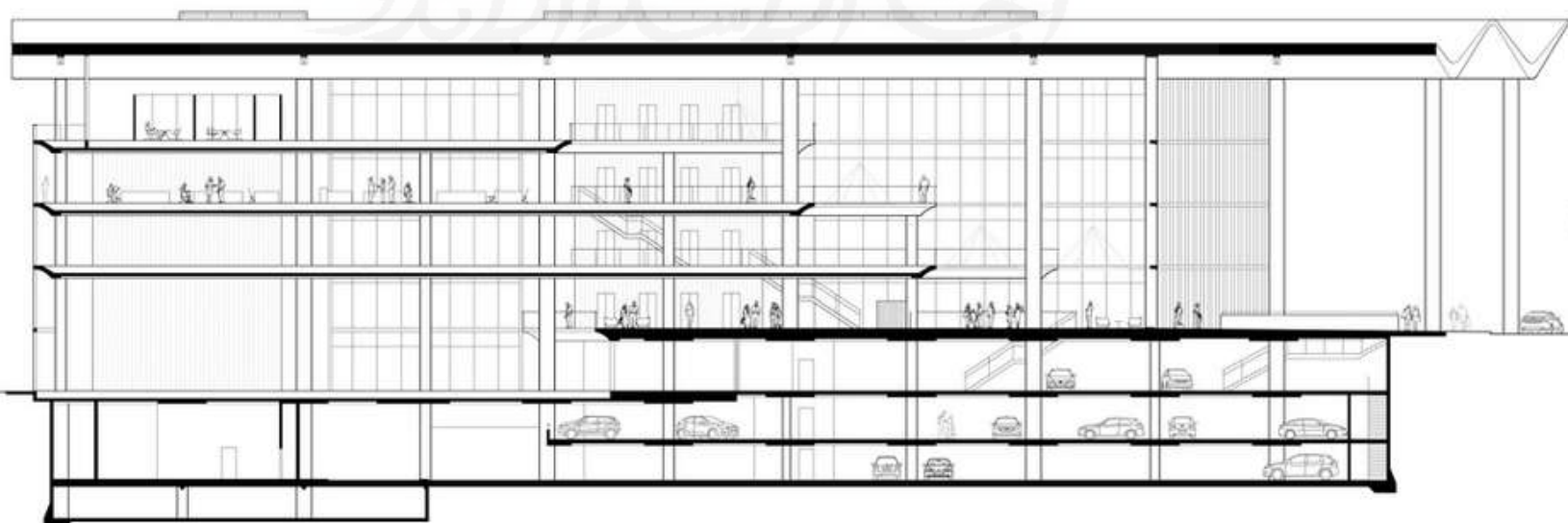
Perancangan balai kota dengan kapasitas 1.500 staf di Argentina yang merupakan desain ramah lingkungan dengan konsep lantai kerja yang bertingkat dan terbuka sehingga memiliki fleksibilitas ruang yang inovatif.

Memiliki rancangan ruang dalam yang terbuka dengan atrium setinggi empat lantai dan dinding kaca sebagai elemen selubung memberikan pencahayaan alami dan memberikan visual yang baik untuk taman pada lingkungan sekitar. Ruang dengan aktivitas yang terbuka, pencahayaan alami yang terang, memungkinkan komunikasi yang baik terhadap sesama departemen dan mencerminkan rasa kebersamaan (archdaily.com, 2015).



sumber: archdaily.com (2015)

Terdapat fasilitas berupa kafe dan auditorium yang berpanel kayu dan memiliki kapasitas hingga 300 orang dan dapat digunakan untuk acara setempat. Hal ini memberikan fungsi rancangan yang tidak hanya berperan sebagai tempat administratif, lebih dari itu berperan pula dalam pelayanan komunitas setempat (archdaily.com, 2015).



sumber: archdaily.com (2015)

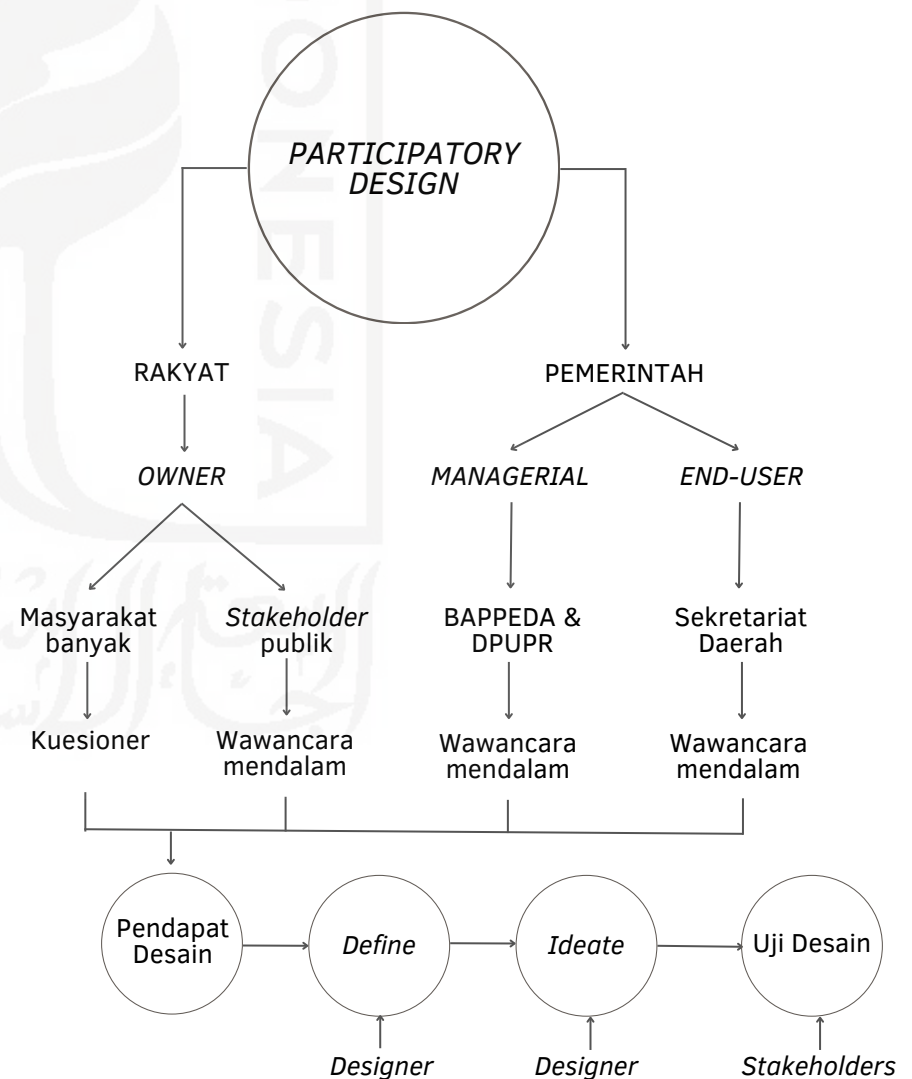
2.4. METODE PERANCANGAN

2.4.1. Metode Pengumpulan Data

Sanders (2002) menyatakan bahwa desain partisipatif menjadi metode desain yang komunikatif dengan menghimpun data dari para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, arsitek, dan rakyat. Kategorisasi tersebut digunakan untuk memetakan para *stakeholders* sebagai narasumber utama untuk mendapatkan data yang terbagi menjadi pemilik (*owner*), manajerial (arsitek), dan pengguna akhir (*end-user*). Linear dengan kaidah normatif pasal 1 ayat (2), penetapan kepemilikan balai kota disimpulkan sebagai kepemilikan bersama atas rakyat sehingga dibutuhkan pendapat rakyat yang memiliki derajat heterogenitas tinggi. Merespon hal tersebut data preferensi rakyat terhadap balai kota yang ideal dihimpun menggunakan kuesioner dengan penetapan responden minimal 30 karena linear dengan ukuran sampel yang mendekati normal (Alwi, 2015). Selain itu, wawancara terhadap *stakeholder* publik juga dilakukan untuk mendapat data idealisme secara kualitatif. Manajerial ditetapkan sebagai penanggung jawab perencana dan pembangunan balaikota sehingga *stakeholder* dari BAPPEDA dan DPUPR Kota Magelang diterapkan metode wawancara mendalam terstruktur yang digunakan untuk mengetahui informasi teknis tentang perpindahan balai kota tersebut. *End-user* yang ditetapkan adalah Sekretariat Daerah sebagai birokrat yang merepresentasikan kekuasaan eksekutif dimana mereka perlu berkantor dalam desain balai kota dan menjadi pengguna utama. Informasi tentang birokrasi dan idealismenya dihimpun melalui teknik wawancara mendalam terstruktur.

2.4.2. Metode Analisis Data

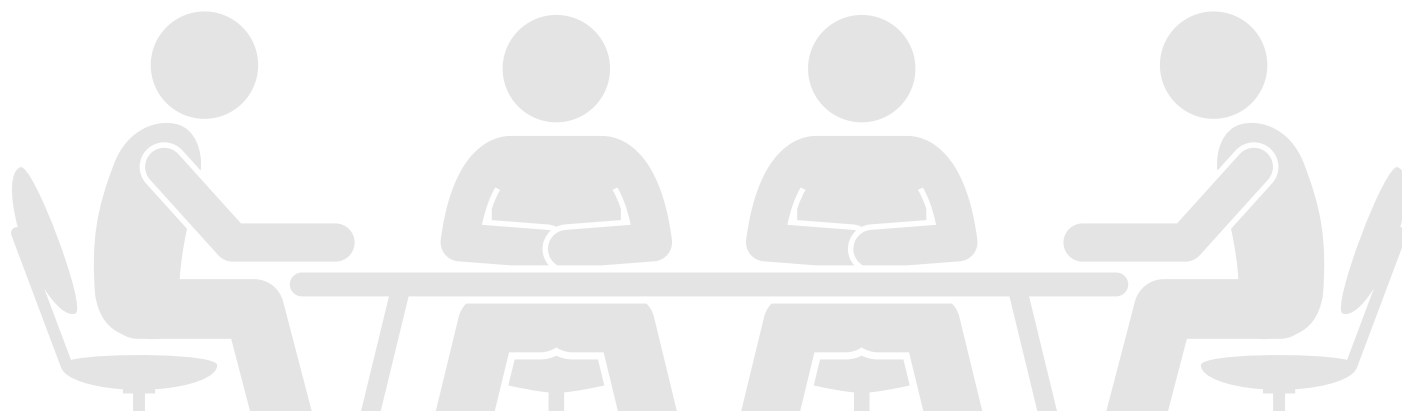
Analisis data dilakukan untuk mendapatkan preferensi desain dari ketiga *stakeholder* dalam balai kota. Preferensi tersebut digunakan untuk menentukan strategi desain ketika membangun ruang publik untuk aktivitas masyarakat dan ruang dalam sebagai tempat administratif perkantoran. Analisis dilakukan dengan mengerucutkan peran *stakeholders* dalam dua peran utama, masyarakat yang berperan dalam penentuan preferensi kepentingan umum ruang publik dan pemerintah yang berperan dalam penentuan peran balaikota sebagai ruang administrasi dan pelayanan publik. Selain itu, penelusuran peran simbolik balai kota dilakukan dengan mendengarkan *stakeholder* publik yang menjadi *keynotes* dan pemerintah.



2.4.3. Kerangka Berpikir dalam Metode Desain Partisipatif

Berdasarkan buku *A Concensus Handbook* oleh organisasi *seeds for change* yang dikutip oleh buku *Arsitektur Partisipatoris untuk Masa Depan Arsitektur Indonesia (2022)*, kerangka dalam pengambilan keputusan secara partisipatif dapat dilakukan melalui enam tahap. Kerangka tersebut diadaptasi sebagai cara berpikir partisipatif untuk mendapatkan desain yang ideal dalam perancangan Balai Kota Magelang.

- ↓
- Tahapan 1: Memperkenalkan dan menjelaskan mengenai permasalahan dengan membagikan informasi mengenai rencana pembangunan Balai Kota Magelang
 - Tahapan 2: Mengeksplorasi permasalahan dan mencari ide penyelesaian dengan mengumpulkan pendapat dan reaksi, ide dari para *stakeholders*, dan komunikatif dengan diskusi aktif saat mendengarkan keterangan.
 - Tahapan 3: Mencari literatur berkaitan dengan proposal utama yang menyatukan ide-ide para *stakeholders* untuk mengatasi masalah utama
 - Tahapan 4: Mendiskusikan hasil rancangan untuk mendapat masukan sehingga desain balaikota lebih dapat diterima oleh para *stakeholders*.
 - Tahapan 5: Tes kesepakatan dengan para *stakeholders* dengan penilaian desain akhir untuk mengukur seberapa tinggi preferensi mereka tertuang pada rancangan (dengan kuesioner penilaian menggunakan skala likert).
 - Tahapan 6: Implementasi keputusan dengan membuat rencana kerja dan rekomendasi tahapan dalam eksekusi desain (*masterplan* pembangunan bertahap)

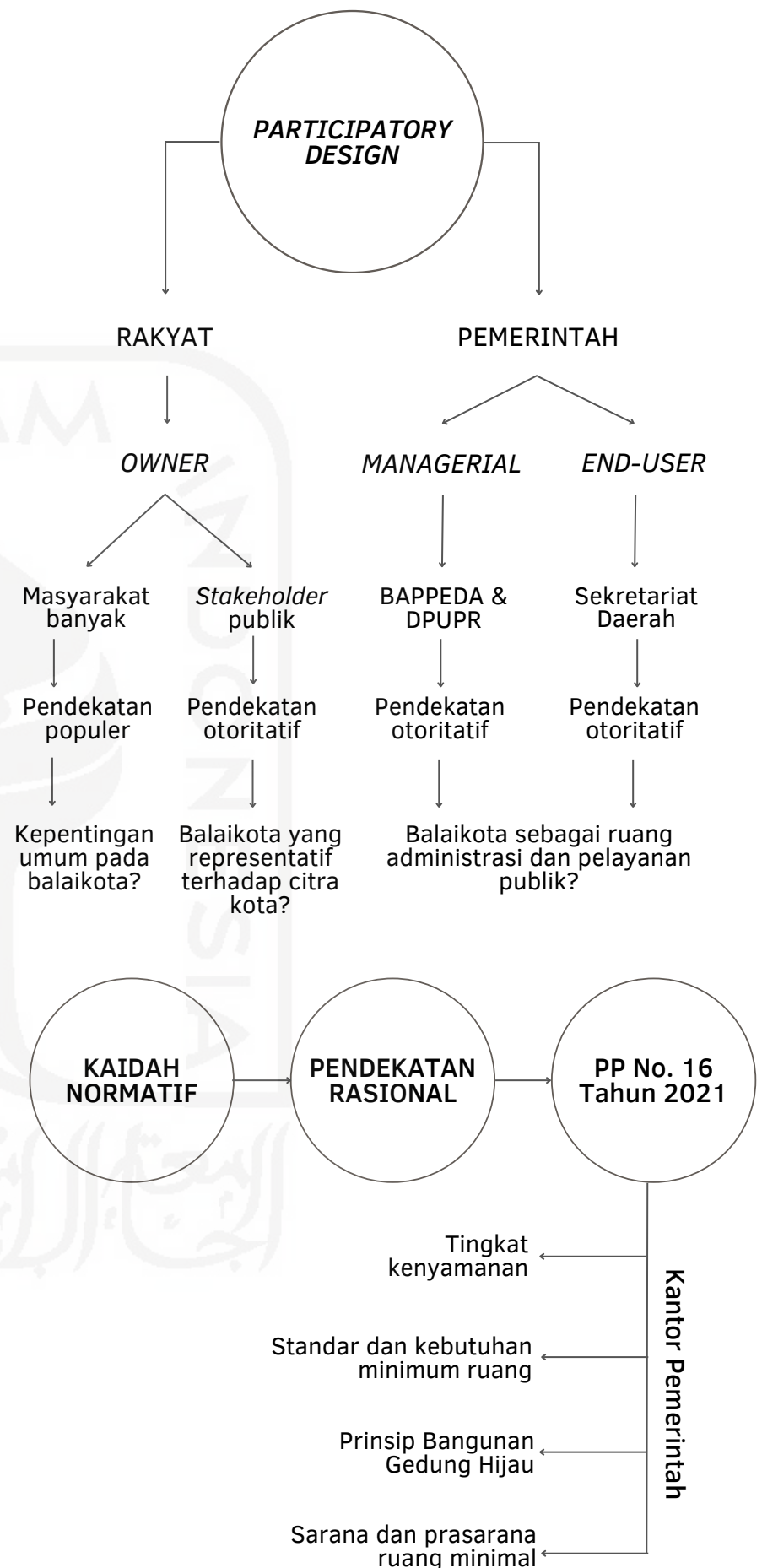


2.4.4. Batasan Partisipatoris

Sebagaimana Vogel (2021) membagi tiga tipe partisipatoris, **desain untuk pengguna (*for users*)** dimana solusi rancangan didasarkan pada kebutuhan pengguna dimana selama proses desain berlangsung mereka dilibatkan untuk konsultasi desain yang ideal; **desain dengan pengguna (*with users*)** dimana antara perancang dan pengguna bekerja sama dalam seluruh proses desain untuk menemukan solusi bersama; dan **desain oleh pengguna (*by users*)** dimana pengguna akan diberikan pemahaman dasar tentang merancang kemudian diberikan akses serta sumberdaya dan mereka merancang solusi desain secara mandiri.

Perancang menetapkan batasan pada **desain untuk pengguna (*for users*)** sehingga para *stakeholders* dilibatkan untuk menemukan problematika mereka (*emphatize*) dan perancang mengolah untuk menemukan solusi (*define*) dalam bentuk rancangan (*ideation*) yang kemudian akan dikonsultasikan kepada para pengguna tersebut. Tidak semua aspek dapat dipartisipatoriskan sehingga terdapat kaidah normatif yang akan dipenuhi oleh perancang, khususnya PP No. 16 Tahun 2021. Secara umum terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk menemukan solusi atas permasalahan:

1. **Pendekatan rasional:** berkaitan dengan alasan logis yang berdasar pada data standar yang sudah diatur dalam norma
2. **Pendekatan otoritatif:** mendudukan sumber atau orang sebagai pengguna yang paling paham sehingga konsultasi desain diperlukan untuk memverifikasi ketepatan langkah dalam merancang
3. **Pendekatan populer:** mendudukan pengguna sebagai orang awam yang tidak terlalu paham akan permasalahan, tetapi memiliki komitmen tinggi untuk berpartisipasi.



2.5. KAJIAN DAN ANALISIS PENDEKATAN RANCANGAN

2.5.1. Kajian Tapak Perancangan

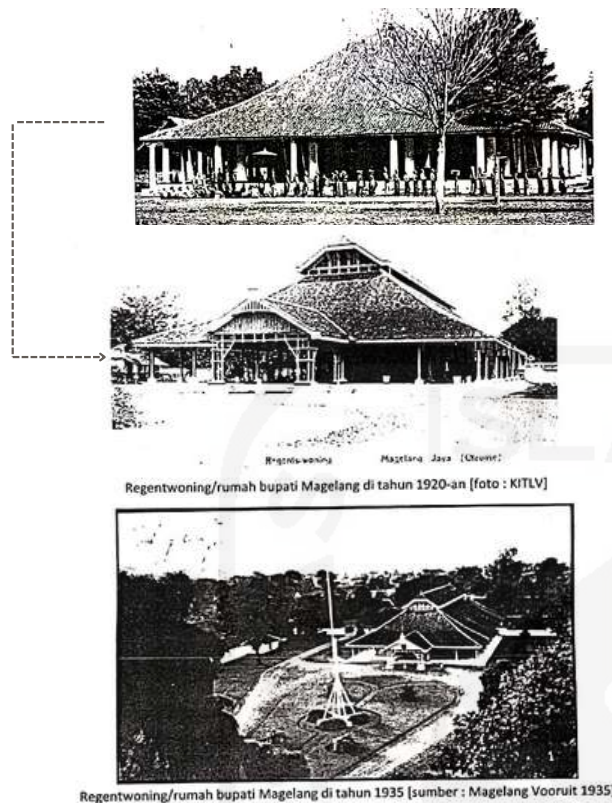
2.5.1.1. Analisis Historis Tapak sebagai *Spirit of Place*



Stadsgemeente Magelang (Kotapraja Magelang) menugaskan Herman Thomas Karsten untuk mengatur tata ruang dimana ekologi kota dibuat bersih, tertib, dan rapi. Sebagai manifestasi dari tujuan tersebut, wilayah di sepanjang jalan protokol, permukiman elit, dan tangsi militer ditanami flora yang beraneka ragam untuk mempercantikannya. Bunga khas yang ditanam antara lain *bougenvil*, *gladiol*, *mawar*, *lili* untuk mempercantik visual kota. Selain itu, pohon peneduh seperti asem belanda, flamboyan, kenari, dan beringin juga ditanam untuk meneduhkan ruang-ruang publik kota. Pada saat itu, taman kota yang terkenal salah satunya adalah alun-alun (Christanto, 1998 dalam tulisan Bagus Priyana pada antaranews 2019). Taman-taman bunga memperindah visual kota yang memiliki kondisi geografis dikelilingi pegunungan sehingga mendapat julukan sebagai "*tuin van java*" atau tamannya Pulau Jawa yang berkembang pada era modern sebagai julukan **Magelang Kota Sejuta Bunga**. Alun-alun sebagai pusat kota melambangkan simbol kehidupan sosial yang harmonis antara Masjid Agung yang bergaya arsitektur jawa, Gereja Kristen Protestan dan Gereja Katolik yang bergaya arsitektur kolonial, dan Klenteng Liong Hok Bio yang bergaya arsitektur oriental (Juwono et al., 2018). Simbolisme tersebut tetap bertahan hingga masa modern Magelang sehingga kelestariannya membuat Kota Magelang berperan sebagai "*Heritage City*".



Gambar 17. Riwayat Tapak Calon Balaikota sebagai Kediaman Bupati dengan pendoponya. Pendopo yang sekarang sudah tidak asli, tetapi merepresentasikan.



Riwayat Tapak: Sebagai Pusat Pemerintahan

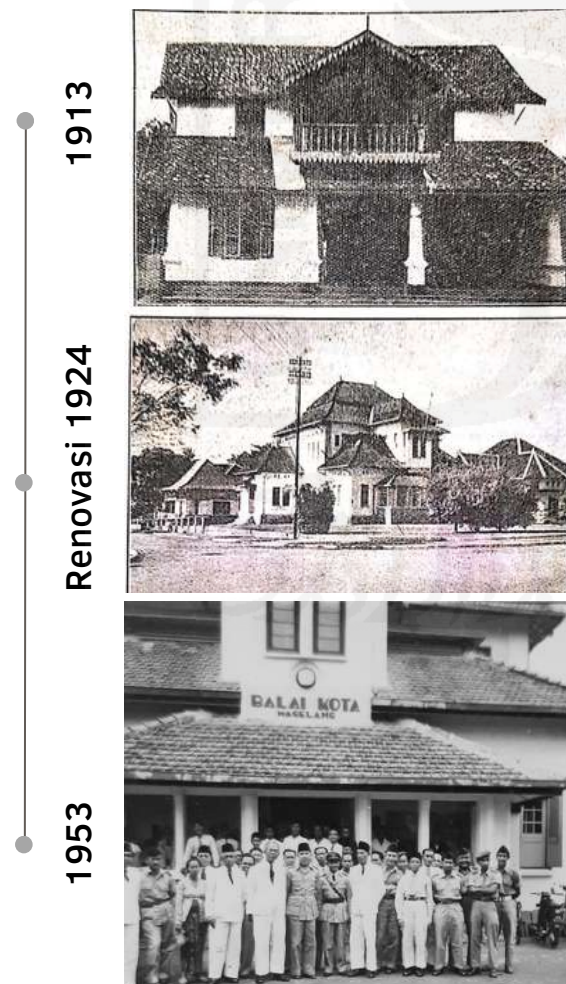
Bupati pertama Magelang, Danukromo, pada tahun sekitar 1813 mendirikan pusat pemerintahan di tanah yang terletak antara Desa Magelang dan Gelangan. Tanah tersebut landai dan lebih tinggi dari tanah sekitar sehingga mirip seperti *siti hinggil* di Yogyakarta. Didirikanlah tiga bangunan utama yang menunjang pemerintahan, yaitu alun-alun sebagai ruang publik, masjid, dan kediaman bupati. Pembangunan kawasan tersebut mengikuti pola kebudayaan tradisional Jawa. Kediaman bupati juga mengambil langgam Jawa dengan ciri khas bagian depan yang terdapat pendopo. Dalam dokumen disinyalir akibat adanya gempa pada 1867, bentuk fisik *regentwoning* berubah menjadi seperti gambar 17. Peristiwa Magelang Bumi Hangus (1945-1949) disinyalir juga menjadi penyebab kehilangan fisik dari kediaman bupati tersebut. Sekarang tapak calon balaikota tersebut terdapat pendopo yang bukan bangunan asli tetapi menjadi representasi dari situs tersebut.

Riwayat Balai Kota (*Raadhuis*) di Kota Magelang

Dalam perkembangan Kota Magelang, terbentuk daerah mandiri (1 April 1906) yaitu daerah otonomi *gemeente* dengan luas yang kurang lebih sama dengan wilayah Kota Magelang modern. Asisten Residen Kedu mendirikan *raadhuis* atau balai kota di Kota Magelang (sekarang menjadi kantor PDAM). Awal mula *raadhuis* hanya bergaya sederhana seperti rumah pada umumnya. Kenaikan status menjadi *stadsgemeente* pada 1926 membuat Kotapraja Magelang dipimpin oleh *burgemeester* (walikota) dan *raadhuis* (balai kota) dibuat semakin luas dengan gaya arsitektur *indies*. Pada zaman awal kemerdekaan, jejak Balai kota masih terdapat (1953) dimana ciri khas adanya teras yang terbuka pada akses masuknya menggambarkan keterbukaan dalam pelayanan masyarakat. Terdapat keterkaitan idealisme dimana balai kota dibangun tanpa ada pagar (disinyalir agar publik dapat mengaksesnya dengan mudah untuk layanan administratif). Jejak Balai Kota Magelang pada zaman modern sudah tergantikan oleh bangunan baru dan beralih fungsi sehingga Kota Magelang saat ini tidak memiliki balai kota.

Sejarah disarikan dari wawancara dengan Bagus Priyana (6/03/23) sebagai Ketua Komunitas Kota Toea Magelang

Gambar 18. Riwayat Balaikota pada zaman Kolonialisme Belanda
Sumber: *wetenswaardigheden van magelang* (1935) dan Koleksi Pribadi Bagus Priyana





2.5.1.2. Pemetaan Kawasan Sekitar Tapak

Kawasan sekitar tapak didominasi oleh bangunan-bangunan *heritage* yang masih bertahan. Rata-rata mengambil gaya arsitektur indies (3,4,8) dan kentara sebagai bangunan peninggalan kolonial (7,11,12). Masjid Agung mengadaptasi langgam tradisional Jawa (1) sedangkan klenteng yang sudah dibangun baru tetap mempertahankan gaya arsitektur tionghoanya (6). Hanya beberapa bangunan yang terkesan modern (2, 10) dan kawasan no. 9 berkembang menjadi pusat perbelanjaan dengan dominansi bangunan modern.



Gambar 19. Bangunan sekitar tapak
Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)

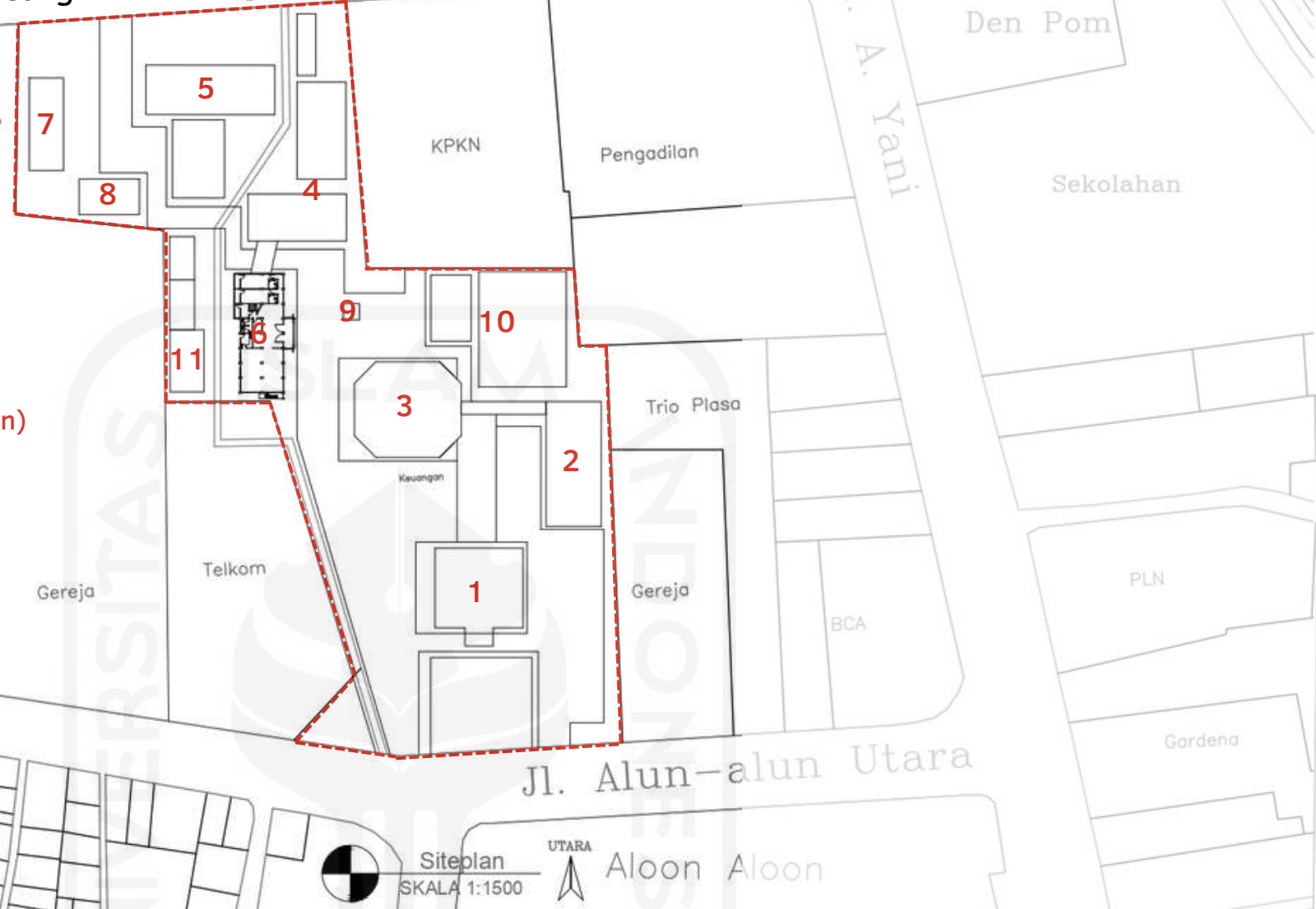
2.5.1.3. Analisis Tapak Existing

Perda Kota Magelang No. 4 Tahun 2012 TENTANG RTRW Kota Magelang 2011-2031

- KDB 70-90%
- KDH minimum 10%
- TLB 1-10 lantai (termasuk basemen)

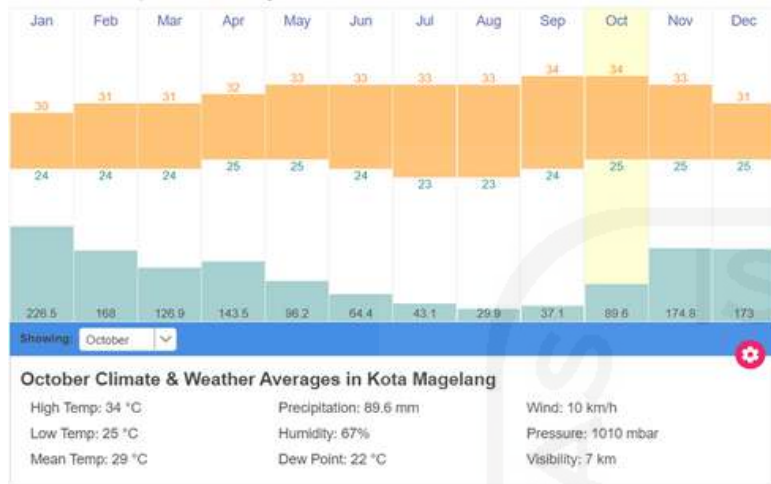
- 1: Pendopo
 2: Gedung A (Kantor)
 3: Gedung B (Kelas pendidikan)
 4: Gedung C (Asrama)
 5: Gedung D (Asrama)
 6: Gedung E (Asrama)
 7: Rumah Dinas
 8: Musholla
 9: Tower
 10: Lapangan Tenis
 11: Rumah Genset

Gambar 20. Tapak dan tata ruang sekitar. Sumber: DPUPR Kota Magelang (2022)



Gambar 21. Beberapa sampel bangunan *existing* yang menunjukkan peruntukannya sebagai asrama sehingga dinilai tidak layak untuk fungsi kantor walikota berdasarkan keterangan narasumber manajerial.

2.5.1.4. Analisis klimatologi tapak



sumber: timeanddates.com (2021)



sumber: googleearth.com (2023) dan <https://globalwindatlas.info/en> (2023)

	Indicator totals						
	1	2	3	4	5	6	
LAYOUT	12	0	1	0	0	0	orientation N and S (long axis E - W)
				0 - 10	3 - 12		compact courtyard plan
SPACING	11, 12						open spacing for breezes as 3, but wind protection
	1 - 10						compact estate layout
AIR MOVEMENT	3 - 12			0 - 3			single banked rooms, for permanent air movement
	1, 2			6 - 12			double banked rooms, for temporary air movement
	0	2 - 12					no air movement required
		0, 1					
OPENING SIZES				0, 1	0		large: 40-80%
				1 - 12			medium: 25-40%
				2 - 5			small: 15-25%
				6 - 10			very small: 10-20%
				11, 12	0 - 3		medium: 25-40%
					4 - 12		
OPENING POSITION	3 - 12						In N and S walls, at body height on windward side as 14, but openings also in internal walls
	1 - 2			0 - 5			
	0	2 - 12					
PROTECTION OF OPENINGS					0 - 1		Full permanent shading rain protection
					2 - 12		
WALLS AND FLOORS					0 - 2		light, low capacity
					3 - 12		heavy, over 8h time lag
ROOFS	10 - 12				0 - 2		light, reflective, cavity
					3 - 12		light, well insulated
					0 - 5		heavy, over 8h time lag
					6 - 12		
EXTERNAL FEATURES						3 - 12	outdoor sleeping area
						2 - 12	simple rainwater drainage

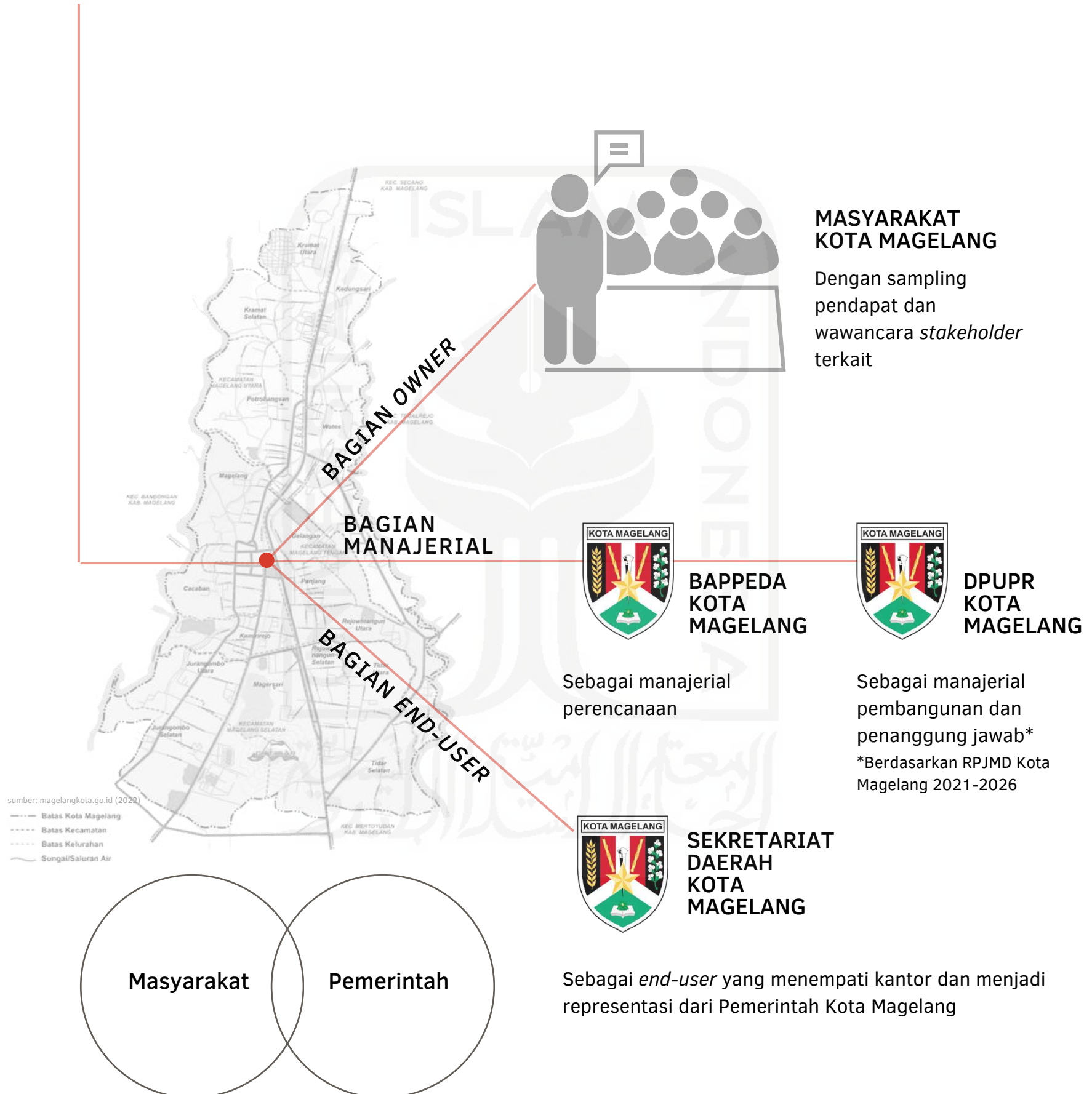
Berdasarkan tabel *mahoney*, orientasi bangunan direkomendasikan menghadap utara-selatan. Menggunakan bukaan yang besar sebagai respon sirkulasi udara yang baik, dan *shading* yang digunakan untuk menghalangi panas matahari.

Berdasarkan data dari *global wind atlas*, angin terbesar pada sekitar tapak memiliki kecepatan 3.04 m/s yang berhembus dari arah selatan. Dalam kategorisasi kecepatan angin menurut Lippmeier (1997) hal tersebut tergolong kecepatan angin yang tidak nyaman sehingga perlu dilakukan intervensi.

Lippmeier (1997) mengkategorisasikan kecepatan angin yang nyaman dalam empat kategori, yaitu: (1) < 0.25 m/s adalah nyaman, gerakan angin tidak terasa; (2) 0.25 – 0.5 m/s adalah nyaman, gerakan angin terasa; (3) 1.0 – 1.5 m/s gerakan angin terasa ringan sampai tidak menyenangkan; (4) diatas 1.5 m/s gerakan angin terasa tidak menyenangkan (Lippmeier, 1997, dalam Munawaroh & Elbes, 2019, p. 86).

2.5.2. Kajian Hasil Partisipatori

AKSI PARTISIPATORI



PARTISIPATORI OWNER

Sebagaimana pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara normatif mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, kepemilikan balai kota diinterpretasi sebagai hak milik publik. Berdasarkan norma tersebut, pendapat publik dihimpun untuk mengetahui preferensi masyarakat dalam balai kota sebagai ruang publik yang ideal. Berkaitan dengan upaya menciptakan ruang publik yang berkualitas bagi masyarakat, semangat simbolik Kota Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga yang berdasarkan historisme kawasan sebagai "*tuin van java*" ditinjau. Tingkat afirmasi konsep tersebut juga diuji untuk ditemukan apakah simbol tersebut relevan dengan preferensi publik di Kota Magelang.

Variabel: Publik

Parameter: Fungsi ruang publik

Indikator. Preferensi ruang publik prioritas dalam balaikota

Parameter: Ruang publik yang menarik dalam konsep lokalitas

Indikator. Tingkat afirmasi terhadap konsep *tuin van java*

Parameter: Harapan publik terhadap balai kota

Indikator. Menghimpun suara publik terhadap idealisme balai kota

Participatory Design: Menemukan Public Interest terhadap Rancangan Balaikota

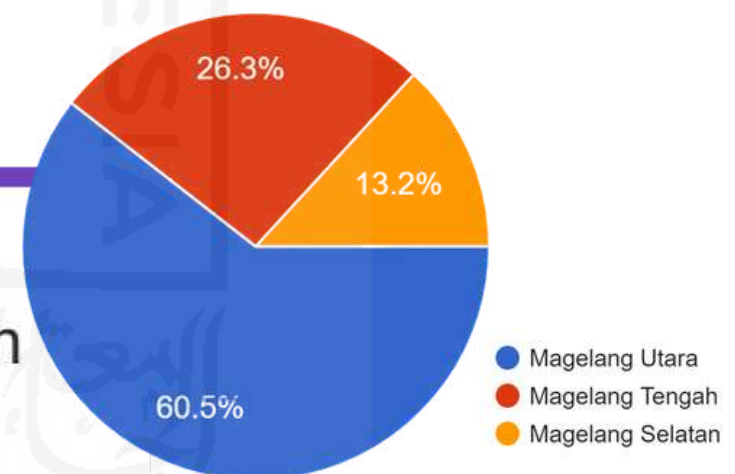
Salam warga Kota Magelang!

Perkenalkan saya Dwiwangga Hadi, mahasiswa Jurusan Arsitektur, Universitas Islam Indonesia yang sedang menempuh Tugas Akhir Sarjana dengan judul TA (Skripsi): **Perancangan Balaikota Magelang dengan Pendekatan Participatory Design sebagai Bentuk Demokratisasi Arsitektur**. Mohon bantuannya untuk mengisi kuesioner ini untuk menemukan bagaimana preferensi atau keinginan publik Kota Magelang dalam konsep balaikota yang ideal bagi masyarakat.

Terima kasih atas bantuannya semua

Hormat saya,

Dwiwangga Hadi



KUESIONER

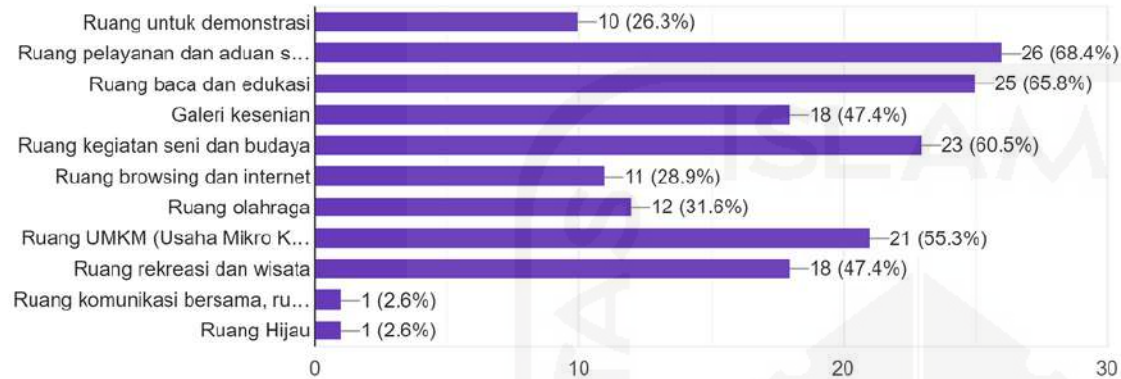
Kuesioner terakhir (3 Maret 2023) yang diisi oleh 38 responden menunjukkan distribusi terbesar terdapat pada responden berasal dari Kecamatan Magelang Utara, disusul Magelang Tengah, dan Magelang Selatan. Kuesioner memenuhi kriteria minimal untuk ukuran sampel yang mendekati normal.

HASIL KUESIONER

Preferensi terhadap Ruang Publik Prioritas

Fungsi ruang publik mana saja yang harusnya dapat diakomodir Balaikota Magelang?

38 responses



Ruang prioritas

1. Ruang pelayanan dan aduan langsung
2. Ruang baca dan edukasi
3. Ruang kegiatan seni dan budaya
4. Ruang UMKM
5. Ruang rekreasi dan wisata
6. Galeri kesenian

Ruang opsional

7. Ruang olahraga
8. Ruang browsing dan internet
9. Ruang untuk demonstrasi
10. Ruang komunikasi bersama, laktasi, terbuka hijau, kesehatan, istirahat

Fungsi ruang publik yang dominan dipilih oleh responden adalah ruang pelayanan dan aduan secara langsung. Hal ini menunjukkan kebutuhan publik akan fungsi ideal balai kota yang menunjukkan tupoksinya sebagai tempat pelayanan masyarakat. Meskipun Kota Magelang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), masyarakat masih mempreferensikan fungsi utama balai kota sebagai ruang pelayanan khususnya berkaitan dengan aduan langsung. Dari hal tersebut, perlu dilakukan pendefinisian ulang ruang pelayanan publik yang juga tidak mengganggu eksistensi MPP. Berkaitan dengan paradigma pengaduan langsung dan linear dengan keterangan Sekda bahwa kantor walikota masih terdapat urusan pelayanan yang berkaitan dengan perizinan, maka kategori pelayanan publik yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi prioritas utama.

Afirmasi terhadap Konsep "Tuin van Java"

Kriteria Afirmasi	Komponen	Preferensi (38 responden)				Nilai
		Tidak (1)	Kemungkinan (2)	Cenderung (3)	lya (4)	
Konsep "tuin van java"	Balaikota Magelang yang memiliki taman bunga dalam desainnya mewakili konsep Magelang Kota Sejuta Bunga dan Tuin van Java	2	5	13	18	3.236842105
	Rancangan Balaikota Magelang dengan taman bunga membuat saya ingin mengaksesnya	2	5	23	8	2.973684211
	Adanya UMKM Flora pada taman balaikota menjadi hal yang penting dalam mendukung fungsi perekonomian	2	4	15	17	3.236842105
	Adanya ruang edukasi untuk flora menjadi hal yang penting untuk diakomodir pada konsep taman bunga balaikota	0	3	17	18	3.394736842

Tingkat afirmasi

Mayoritas responden setuju dalam memilih preferensi ruang publik yang menghidupkan kembali konsep *tuin van java*. Namun, terjadi penurunan nilai afirmasi menjadi cenderung berkaitan dengan keinginan publik untuk mengaksesnya. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi diperlukan untuk meningkatkan minat publik dalam mengakses balaikota.

Tingkat afirmasi:
 0-1 (Tidak setuju)
 1-2 (Kemungkinan)
 2-3 (Cenderung)
 3-4 (Setuju)

Pendapat publik secara demokratis untuk harapan balai kota yang ideal

PENDAPAT AWAL	KATEGORISASI PENDAPAT
Ada ruang terbuka untuk masyarakat mengaduh	Ramah publik
tetap terjaga dan terawat kebersihannya dari sampah, dan terdapat toilet yang bersih	Lingkungan yang bersih
balaikota seharusnya bisa menjadi representasi Magelang kota sejuta bunga. Namun, tagline "magelang kota sejuta bunga" hanya sekedar memperindah taman. Sisi edukasi belum ada sampai sekarang. Maka harapannya kota mgl bisa menambahkan botanical garden atau sejenis taman untuk edukasi agar konteks sejuta bunga tidak hanya memperindah taman saja.	Representasi nilai lokal dan edukasi
Balaikota yang dirancang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat disamping fungsinya sebagai pusat pemerintahan. Lebih jauh lagi diharapkan balaikota ini dapat mengakomodasi masyarakat dari segala usia dan juga penyandang disabilitas mungkin dengan penataan-penataan tertentu sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman serta memiliki kesan tertentu yang membuat mereka berminat untuk kembali mengunjungi balaikota sehingga seandainya dibangun semacam UMKM center maka kegiatan UMKM akan terus berlanjut dan tidak mandeg di kemudian hari	Ramah publik, ramah disabilitas, fungsi ekonomi
Desain dan slogan kota disesuaikan dengan kondisi real	representasi nilai lokal
Ruang yg bisa mempresentasikan keterbukaan pendapat dan mengaspirasi dg baik keinginan warga kota mgl.	Ramah publik
Balaikota dapat diakses untuk kegiatan umum akan tetapi harus tetap tertib dan bersih	Ramah publik
Universal design krn pasti bnyk lansia dan anak kcill.. mewadahi kegiatan2 para mahasiswa jg kyk tempat buat nugas:")	Ramah publik
Memiliki tempat parkir motor yg rapi dan beratap yg estetik, memiliki entrance dan ruang tunggu yg nyaman, estetik sekaligus galeri yg mengedukasi pengunjung atas Kota Magelang (sejarah, pembangunan, kebijakan). Tersedia tempat sampah dan toilet yg representatif.	Ramah publik, nilai edukatif, estetika desain
Kami berharap balai kota yg bisa dijangkau semua jalur angkutan u tuk memudahkan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan sendiri.	aksesibilitas mudah
semoga lancar, semangat	-
Lbh bersih	Lingkungan yang bersih
Bisa menampung semua aspirasi masyarakat, mudah dijangkau, jalur yang mudah, dan prosedur pemanfaatannya tidak rumit.	Ramah publik
Bisa menjadi ajang / tempat kegiatan untuk kepentingan seluruh masyarakat juga...jadi bukan untuk kegiatan yang bersifat protokoler saja.	Ramah publik
Bisa diakses semua warga tidak perlu diportal	Ramah publik
Bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat	Ramah publik
Segera di realisasikan	Pembangunan mudah
Balaikota sepertinya harus memiliki fungsi juga bagi masyarakat karena sejatinya balai merupakan milik masyarakat, dengan begitu harapannya kegiatan pelayanan pemerintah dapat tepat sasaran yaitu untuk melayani masyarakat itu sendiri.	Ramah publik
memperbaiki fasilitas yang sebelumnya sudah ada dan sekarang sudah kurang berfungsi	<i>adaptive reuse</i>



Mudah diakses dengan transportasi terutama transportasi umum, ramah lansia dan difabel, penyediaan lahan parkir yang sesuai dengan jumlah pengunjung atau lebih, memiliki ruang edukasi untuk masyarakat, memiliki pelayanan yang baik seperti ruang tunggu yang nyaman, terintegrasi dengan teknologi terbaru.	aksesibilitas mudah, ruang edukasi, fasilitas pendukung memadai, penerapan teknologi modern
Meningkatkan kesejahteraan warga kota Magelang	Fungsi ekonomi
Ada ruang musik/kesenian utk ajang petunjukan pencari bakat yg menghibur dan tersalurkan khususnya utk masyarakat magelang	kebudayaan
Ruang publik yg lebih terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, memberi kesan ramah dan ngayomi sejak pertama orang melihat. Kemudian diwujudkan dalam pelayanan yg juga ngayomi	Ramah publik
Bisa segera terealisasi dan apabila sdh terealisasi di mudahkan dalam mengakses	pembangunan mudah
Balaikota itu nantinya tetap memperhatikan kondisi yang tertib, disiplin serta nyaman sebagaimana suasana balaikota sekarang.	ketertiban umum
Ke depannya lebih baik lagi dan didesain lebih menarik lagi	estetika desain
Dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, namun tidak hanya saja dgn biaya yg wuah. Tp lbh ke fungsi & manfaatnya bagi masyarakat	fungsi pendukung
Ruang terbuka hijau dan ruang teduh yang nyaman untuk ditinggali	ruang hijau
Dapat mengakomodir kegiatan masyarakat dengan adanya ruang untuk berekspresi warga Kota Magelang	Ramah publik
nyaman aman dan bersih	Lingkungan yang bersih
-	-
Semoga balaikota dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat magelang dan menjadi kebanggaan warga magelang	Representasi nilai lokal
Fasilitas publik dan ruang hijau harus bisa dipergunakan dengan maksimal dan memberikan manfaat kepada masyarakat	fungsi pendukung, ruang hijau
Balaikota dapat dirancang sesuai dengan karakteristik kota magelang sehingga memiliki daya tarik masyarakat	Representasi nilai lokal
Harapan saya balaikota dapat membantu masyarakat dalam kegiatan umkm maupun edukasi. Saya harapkan juga balaikota memiliki desain yang dapat mewakilkan budaya warga lokal magelang sehingga dapat mempromosikan budaya magelang pada khalayak luas. Selain itu juga desain balai kota saya harapkan memiliki konsumsi daya yang minim dan ramah lingkungan.	Representasi nilai lokal, fungsi ekonomi, aspek keberlanjutan, ruang edukasi
Balaikota yang Elegan & bermartabat	estetika desain
Kemudahan mengaksesnya	aksesibilitas mudah
Kami berharap rancanganya semakin bsik	pembangunan mudah



HASIL WAWANCARA

STAKEHOLDER PUBLIK



Wawancara dilakukan dengan perwakilan *stakeholder* publik sebagai pelengkap informasi dari segi *owner* yang diwakili oleh sampling dengan kuesioner. *Stakeholder* yang ditetapkan adalah aktivis atau *public figure* yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Sebagai seorang anggota yang aktif dalam kegiatan kebudayaan dan historis Kota Magelang, Elizabeth Rahayu Sri Hastuti, S.Pd, M.Si, berperan sebagai anggota dari Komunitas Magelang Kembali, seorang edukator, dan aktivis kebudayaan. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai informasi mengenai pandangan publik terhadap kantor walikota sekarang dan harapan akan pembangunan Balai Kota Magelang.



AUDIO

Mengetahui,
Magelang 4 Maret 2023
Stakeholder publik

(Elizabeth Rahayu Sri Hastuti, S.Pd, M.Si.)

FUNGSI UNTUK PUBLIK

Balai kota hendaknya memiliki akses yang mudah untuk dikunjungi, terdapat fasilitas wifi, resto untuk kuliner, dan yang utama adalah toilet yang bersih bagi publik.

KONSEP TUIN VAN JAVA

Tuin van Java bisa lebih diimplementasikan pada desain yang mendukung upaya menciptakan kota magelang yang sehat dan bahagia selain memadupadankan bunga-bunga yang memiliki riwayat historis.

EVALUASI KANTOR WALIKOTA EXISTING

Sebagai preseden, kantor walikota *existing* memiliki kesan formal, lebih tertutup sehingga dari sisi humanismenya kurang. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tidak terwakili.

FUNGSI BALAI KOTA YANG IDEAL

Idealnya balai kota menunjang fungsi administrasi (untuk memenuhi kepentingan publik dalam urusan kantor) dan fungsi pelayanan publik agar masyarakat tidak terkesan takut dengan para birokrat dalam menyampaikan aspirasi dan harapan, khususnya rakyat kecil. Kaitannya dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), balai kota tetap perlu mengakomodir urusan pelayanan, tapi bisa yang urusannya tidak administratif.

BALAI KOTA YANG REPRESENTATIF

Balai kota perlu merepresentasikan ciri khas dari Kota Magelang agar terdapat pembeda dengan balai kota lainnya. Selain itu, upaya rancangan balai kota yang terbuka menjadi penting untuk menarik animo publik guna mengaksesnya bahkan menjadi tempat yang hidup untuk bersosialisasi. Simbol yang dapat merepresentasikan balai kota untuk Magelang adalah muatan lokal jawa dan unsur *heritage* (cagar budaya). Unsur *heritage city* menjadi rohnya Kota Magelang yang perlu dilestarikan.

Beberapa hasil wawancara yang berkaitan dengan sejarah kawasan dan Balai Kota Magelang diinformasikan pada sub bab 2.5.1.1. Analisis Historis Tapak sebagai *Spirit of Place*



Wawancara dilakukan dengan perwakilan *stakeholder* publik sebagai pelengkap informasi. *Stakeholder* yang ditetapkan adalah aktivis atau *public figure* yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, pelestarian budaya, dan sejarah Magelang. Wawancara mendalam dilakukan dengan Bagus Priyana (Ketua Komunitas Kota Toea Magelang) yang aktif dalam kegiatan pelestarian sejarah Magelang untuk memperoleh informasi mengenai pandangan publik tentang identitas Kota Magelang sebagai upaya merancang balai kota yang representatif bagi warganya.



AUDIO

(Bagus Priyana)

HARAPAN DALAM PERANCANGAN BALAI KOTA

Dalam konteks tapak calon balai kota, terdapat pendopo yang meskipun bukan bentuk asli dari pendopo kediaman Bupati saat dulu, pendopo tersebut menjadi representasi dari sejarah Magelang yang perlu dilestarikan. Kaitannya dengan keterbatasan lahan, kedepannya efisiensi tata ruang dengan berkembangnya teknologi dapat menjadi salah satu dasar pemikiran bahwa ruangan tersebut bisa cukup tanpa harus merobohkan pendopo yang merepresentasikan jejak pemerintahan lampau.

BALAI KOTA YANG REPRESENTATIF

Tuin van java (1901) secara historis muncul dari julukan seorang misionaris yang kagum akan keindahan Magelang sebagai kota yang dikelilingi oleh gunung dan sungai-sungai. Istilah tersebut juga pernah berkembang menjadi *paradijs van java* (1920) atau surganya tanah jawa. Konsep *tuin van java* diimplementasikan pada gaya hidup masyarakat (khususnya belanda) yang gemar menanam tanaman. Sebagai kawasan yang dikelilingi oleh cagar budaya, balai kota hendaknya menyesuaikan dengan citra kawasan. Upaya merekam kronologi sejarah untuk melestarikan jejaknya menjadi langkah dalam merancang balai kota yang representatif.

Pelestarian pendopo pada tapak balai kota

Aksesibilitas mudah

Rekam jejak sejarah untuk balai kota yang representatif

Fasilitas publik yang lengkap dan bersih

Mengakomodir fungsi pelayanan publik

Mengikuti citra kawasan sekitar yang heritage

PENDAPAT DESAIN

*dari *stakeholder* publik yang diwawancara

PARTISIPATORI MANAJERIAL

Stakeholder manajerial yang ditetapkan adalah BAPPEDA sebagai perencana dan DPUPR Kota Magelang sebagai pelaksana pembangunan. Informasi didapat melalui wawancara mendalam dengan pertanyaan terstruktur yang terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama menanyakan mengenai bangunan *existing* Kantor Walikota yang sedang digunakan, bagian kedua berkaitan dengan rencana pembangunan kantor walikota di lokasi baru. Sebagai prolog, desainer menyampaikan rencana desain berbasis risetnya dengan pendekatan *participatory design* dimana idealisme balai kota sebagai ruang pertemuan antara warga dan pemerintah dibandingkan dengan rencana awal kantor walikota yang cenderung privat.

Variabel: Pemerintah

Parameter: Peran administratif sebagai ruang kerja birokrat

Indikator. Peran administratif kantor existing

1. Peran kantor walikota existing terhadap jalannya birokrasi (Berkaitan dengan fungsi kantor).
2. Kapasitas yang diakomodir oleh kantor existing (Berkaitan dengan jumlah OPD dan idealnya kantor menampung kapasitas para birokrat).
3. Efektivitas kantor existing (Berkaitan dengan tata massa)
4. Alur kegiatan yang biasa dilakukan oleh para birokrat dalam mengakses dan memanfaatkan kantor sebagai ruang kerja

Indikator. Peran administratif rencana kantor baru

1. Idealisme perencanaan dan pembangunan (Preferensi antara balaikota dan kantor walikota)
2. Rencana dalam manajemen lokasi baru pada Balai Diklat Kementerian Keuangan.
3. Kebutuhan ruang dan kapasitas yang direncanakan

Parameter: Peran simbolik sebagai kebanggaan

Indikator. Kesesuaian desain bangunan dengan nilai lokalitas
Indikator. Simbolisme yang diharapkan dalam desain pada lokasi baru

Parameter: Peran Pelayanan dan Wadah Aktivitas Masyarakat

Indikator. Aktivitas pelayanan pada kantor existing
Indikator. Aktivitas pelayanan yang diagendakan pada lokasi baru



WAWANCARA STAKEHOLDER BAPPEDA KOTA MAGELANG

BAPPEDA Kota Magelang bertugas membantu Walikota dalam melakukan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan (bappeda.magelangkota.go.id, 2013). BAPPEDA menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengawal MoU mengenai pemindahan kantor walikota ke lokasi baru dan turut berkoordinasi dengan DPUPR Kota Magelang sebagai penanggung jawab. Dalam upaya desain partisipatif, BAPPEDA ditempatkan sebagai manajerial perencanaan.



Narasumber: Iwan Triteny Setyadi, S.T., MT. sebagai Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala BAPPEDA Kota Magelang, Handini Rahayu, S.T., M.Eng. dalam penyediaan informasi berkaitan dengan perencanaan Kantor Walikota di lokasi baru.



Iwan Triteny S
Kabid Ekonomi & Prasarana Wilayah

AUDIO

PERAN DAN FUNGSI KANTOR EXISTING

Berperan sebagai kantor pemerintahan, tetapi publik dapat mengaksesnya (khususnya untuk kegiatan FGD atau penelitian)

PREFERENSI TATA MASSA BANGUNAN

Preferensi desain: bangunan kantor tersentral dengan ekspansi vertikal sebagai respon lahan Kota Magelang yang sempit.

EVALUASI KANTOR EXISTING

Kapasitas dan luasan ideal dalam menampung tujuh OPD yang ada, fasilitas pendukung memenuhi, gedung masih layak huni, kualitas dan kuantitas mencukupi (terkait kebutuhan ruang bagi pegawai)

RUANG PENTING UNTUK BIROKRAT

Walikota dan Wakil Walikota sebagai pejabat politik dibawahnya terdapat Sekretaris Daerah sebagai eksekutif yang mengendalikan secara operasional para OPD. Dalam koordinasi terdapat ruang rapat khusus untuk walikota-wakil dan Sekda kaitannya dengan para OPD.

● **KONSEP BALAI KOTA**

Konsep balai kota diterima dengan catatan perlu mempertimbangkan bahwa lokasi baru memiliki lahan yang hanya 1/4 dari total luasan kantor existing.

● **TIMELINE PEMINDAHAN**

Balai Diklat memerlukan waktu sehingga pemindahan dapat dilakukan pada 2025

2025 menjadi awal pembangunan

2027 Menempati kantor baru

● **ANGGARAN DALAM RPJMD**

BAPPEDA memiliki tanggung jawab dalam mengawal RPJMD Kota Magelang 2021-2026 dimana terdapat pencadangan anggaran tiap tahun sebesar Rp 20-30 Milyar sebagai tabungan untuk membangun hingga 2025 dianggarkan Rp 60-80 Milyar (dimana kemampuan tersebut belum cukup untuk menghandel pembangunan di lokasi baru dengan ideal)

● **PREFERENSI MEMBANGUN: DEMOLISH UNTUK FUNGSI BARU**

Bangunan Balai Diklat Kemenkeu yang cenderung berfungsi sebagai asrama perlu dirombak total untuk memenuhi fungsi kantor

● **SIMBOL HERITAGE**

Harmonisasi dengan lingkungan sekitar yang merupakan kawasan heritage menjadi simbol yang diharapkan agar tidak terjadi "sampah visual"

● **FUNGSI PELAYANAN DAN PERKANTORAN**

Kantor Walikota dapat berorientasi pada sektor pemerintahan dengan harapan balai kota dapat berperan untuk aktivitas masyarakat



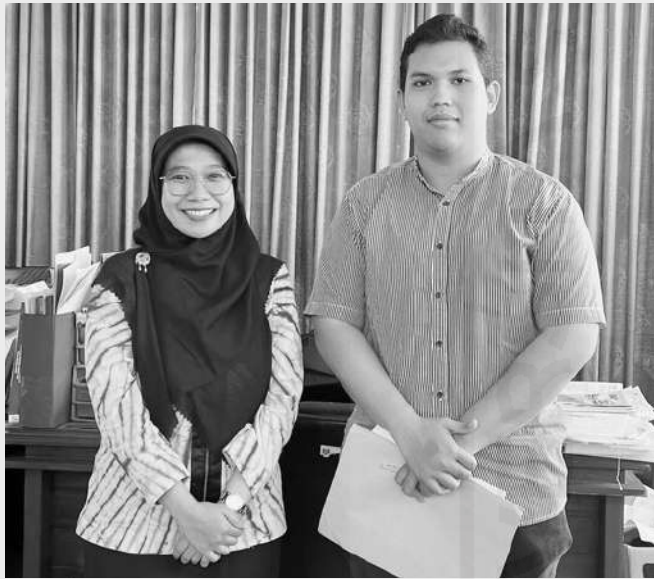
WAWANCARA STAKEHOLDER BAPPEDA





WAWANCARA STAKEHOLDER DPUPR KOTA MAGELANG

DPUPR Kota Magelang bertugas dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, baik secara fisik maupun nonfisik (dpupr.magelangkota.go.id, 2023). DPUPR Kota Magelang menjadi penanggung jawab proyek pembangunan Kantor Walikota Magelang di lokasi baru berdasarkan RPJMD 2021-2026. Dalam upaya desain partisipatif, DPUPR ditempatkan sebagai manajerial pembangunan sehingga informasi teknis lebih dalam digali pada *stakeholder* ini.



Narasumber: Rizqi Dwi Herawati, S.T. sebagai Fungsionaris TBP (Tata Bangunan dan Perumahan) An. Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi (PBJK) yang ditunjuk Kepala DPUPR Kota Magelang, M. S. Kurniawan, S.T., M.T., dalam penyediaan informasi berkaitan dengan pembangunan kantor walikota di lokasi baru.



AUDIO

An. Bidang PBJK

Fung. TBP

Rizqi Dwi Herawati, S.T.

PERAN DAN FUNGSI KANTOR EXISTING

Kantor Walikota dominan berfungsi sebagai perkantoran dimana fungsi pelayanan lebih dititikberatkan pada Mal Pelayanan Publik. Meskipun demikian masih terdapat pelayanan publik, khususnya BPKAD untuk melayani pajak

EVALUASI KANTOR EXISTING

Kantor Walikota existing sebenarnya tidak memenuhi standar karena tidak memenuhi kaidah kebutuhan minimal ruang 6 m² per orang untuk kantor. Terdapat kaidah-kaidah normatif yang tidak terpenuhi, seperti tingkat penghawaan dan pencahayaan alami. Merespon hal tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan desain kantor pada lokasi baru khususnya dengan pendekatan Bangunan Gedung Hijau (BGH) PUPR.

RUANG PENTING UNTUK BIROKRAT

Pada tahun 2025 Kantor Walikota beserta staff dan jajarannya harus sudah pindah, keterbatasan lahan membuat terdapat penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu pindah tidak dalam satu kawasan dengan walikota.

*Daftar sementara terlampir tetapi belum fix

EVALUASI EXISTING SITE UNTUK KANTOR BARU

Lokasi perencanaan berdasarkan hibah dari Kementerian Keuangan terdiri dari beberapa fungsi seperti kantor, ruang belajar, dan asrama (terdapat tiga gedung asrama) dimana fungsi ruang pada kawasan didominasi untuk kenyamanan istirahat bukan untuk bekerja sehingga tidak sesuai dengan fungsi yang akan diakomodir nantinya, yaitu kantor walikota.

KONSEP BALAI KOTA

Konsep balai kota dipilih karena secara ruh fungsinya lebih luas daripada hanya sekadar kantor. Balai kota perlu ada meskipun tidak terlalu mewah sehingga diperlukan upaya minimalis di lahan yang sempit.

SKEMA PEMINDAHAN

Terdapat dua skema pemindahan:

Skema 1 berkaitan dengan pemindahan seluruh OPD ke lokasi yang baru, terhitung membutuhkan tiga tower bangunan dengan jumlah lantai diatas lima dimana diprediksi per tower membutuhkan dana Rp 70 miliar

Skema 2 terdapat penyesuaian OPD yang perlu dilakukan pembagian sehingga tidak semua OPD dapat diakomodir pada lokasi yang baru

PREFERENSI MEMBANGUN: MEMBANGUN BARU UNTUK FUNGSI BARU

Kondisi gedung *existing* balai diklat kemenkeu yang difungsikan untuk pendidikan bukan kantor sudah tidak dapat memenuhi standar karena kondisi yang sudah tua, shaft plumbing misalnya sudah tidak memenuhi kaidah standar, jaringan elektrikal tidak SNI sehingga direkomendasikan untuk renovasi besar atau membangun baru (Faktor usia dan tidak memenuhi standar bangunan sekarang). Kawasan terdiri atas 5 gedung utama + pendopo dimana fungsi pendopo diharapkan jangan dihilangkan tetapi tetap memperhatikan lahan yang terbatas untuk pembangunan.

SIMBOL HERITAGE

Bangunan harus menunjukkan upaya penggalian nilai lokalitas khususnya berkaitan dengan spirit *heritage*, salah satunya berkaitan dengan bunga khas Magelang (simbol flora).

FUNGSI PELAYANAN DAN PERKANTORAN

Fungsi pelayanan lebih dititikberatkan pada Mal Pelayanan Publik sehingga perancangan lebih dominan berfungsi untuk kantor.



**WAWANCARA
STAKEHOLDER DPUPR
KOTA MAGELANG**

REVIEW WAWANCARA MANAJERIAL

BAPPEDA DAN DPUPR KOTA MAGELANG



Penentuan Strategi Desain berdasarkan Hasil Wawancara Manajerial

Parameter: Peran administratif sebagai ruang kerja birokrat

Indikator. Peran administratif kantor existing

- Memiliki peran dominan sebagai kantor, tetapi publik dapat mengaksesnya
- Menampung tujuh Organisasi Perangkat Daerah, meskipun secara normatif dikategorikan tidak standar, tetapi pegawai merasa nyaman (Penyesuaian ruang untuk kenyamanan)
- Bangunan kantor tersentral dengan ekspansi vertikal untuk efektivitas lahan
- Ruang rapat menjadi hal yang penting diakomodir untuk koordinasi pimpinan ke bawahan

Indikator. Peran administratif rencana kantor baru

- Persetujuan konsep Balai kota sebagai tempat pertemuan pemerintah dan rakyat
- Dilakukan pembangunan dengan ekspansi vertikal untuk memenuhi skema pemindahan OPD
- Kapasitas maksimal adalah tujuh OPD dapat diakomodir dan minimum lima OPD (OPD prioritas)

Parameter: Peran simbolik sebagai kebanggaan

Indikator. Keseuaian desain bangunan dengan nilai lokalitas

- Memetakan gaya bangunan sekitar yang cenderung *heritage* untuk mencegah sampah visual

Indikator. Simbolisme yang diharapkan dalam desain pada lokasi baru

- Simbol kebudayaan sebagai *tuin van java* dengan bunga khas Magelang

Parameter: Peran Pelayanan dan Wadah Aktivitas Masyarakat

Indikator. Aktivitas pelayanan pada kantor existing

- Dominansi sebagai perkantoran, pelayanan dipusatkan pada Mal Pelayanan Publik

Indikator. Aktivitas pelayanan yang diagendakan pada lokasi baru

- Dominansi sebagai perkantoran, tetapi dapat diakses publik

Menggunakan konsep balai kota

Ekspansi vertikal untuk penghematan lahan

Peran kantor yang ramah publik

Pemindahan OPD dengan skema prioritas

Mendukung keberlanjutan: Norma BGH

Pembangunan bertahap

Simbolisme heritage dalam rancangan

Pemetaan gaya arsitektur lingkungan sekitar

**PENDAPAT
DESAIN**

PARTISIPATORI *END-USER*

Stakeholder end-user yang ditetapkan adalah Sekretariat Daerah Kota Magelang yang merepresentasikan lembaga eksekutif (dibawah Walikota dan Wakil Walikota Magelang) dan menjadi pengguna utama kantor. Informasi didapat melalui kuesioner dengan pertanyaan terstruktur yang terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama menanyakan mengenai bangunan existing Kantor Walikota yang sedang digunakan untuk pemetaan hal yang menjadi kelaziman bagi para pegawai, bagian kedua berkaitan dengan rencana pembangunan kantor walikota di lokasi baru. Sebagai prolog, desainer menyampaikan rencana desain berbasis risetnya dengan pendekatan *participatory design* dimana idealisme balaikota sebagai ruang pertemuan antara warga dan pemerintah dibandingkan dengan rencana awal kantor walikota yang cenderung privat.

Variabel: Pemerintah

Parameter: Peran administratif sebagai ruang kerja birokrat

Indikator A. Peran administratif kantor existing

1. Peran kantor walikota *existing* terhadap jalannya birokrasi (Berkaitan dengan fungsi kantor).
2. Efektivitas kantor existing (Berkaitan dengan tata ruang dan massa)

Indikator B. Peran administratif rencana kantor baru

1. Idealisme perencanaan dan pembangunan (Preferensi antara balaikota dan kantor walikota)
2. Rencana dalam memanfaatkan lokasi baru pada Balai Diklat Kementerian Keuangan.

Parameter: Peran simbolik sebagai kebanggaan

Indikator C. Kesesuaian desain bangunan dengan nilai lokalitas

Indikator D. Simbolisme yang diharapkan dalam desain pada lokasi baru

Parameter: Peran Pelayanan dan Wadah Aktivitas Masyarakat

Indikator E. Aktivitas pelayanan pada kantor *existing*

Indikator F. Aktivitas pelayanan yang diagendakan pada lokasi baru

*Menggunakan subvariabel, parameter, dan indikator yang sama dengan manajerial berkaitan dengan kategorisasi *end-user* sebagai *stakeholder* pemerintah. Penggalan informasi lebih ditekankan dari segi kelaziman birokrasi yang sudah dibentuk dan rencana penyesuaian birokrasi tersebut di lokasi baru sedangkan manajerial lebih menekankan para perencanaan dan pembangunan balaikota. Sebagai *stakeholder* pemerintah, antara informasi manajerial dan *end-user* diselaraskan untuk menemukan idealisme peran balaikota dari sudut pandang birokrat.



WAWANCARA STAKEHOLDER SEKDA KOTA MAGELANG

Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok dalam membantu Walikota guna menyusun kebijakan dan koordinasi hal-hal administratif terhadap tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif (magelangkota.go.id, 2019). Sebagai birokrat yang mewakili eksekutif (Walikota dan Wakil Walikota) dan Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah menjadi representasi dari pengguna *end-user* karena dominan sebagai birokrat yang bertugas di kantor walikota. Oleh karena itu, untuk mendapat informasi berkaitan dengan balaikota yang ideal, SEKDA menjadi narasumber yang berperan sebagai *end-user* (pengguna).



Narasumber: **Drs. H. Joko Budiyono, MM**, sebagai Sekretaris Daerah Kota Magelang 2019-2023 yang memberikan informasi mengenai birokrasi dan rencana kedepan para birokrat dalam merespon perpindahan Kantor Walikota Magelang. Informasi didapat dengan wawancara mendalam terstruktur.



AUDIO

(Drs. H. Joko Budiyono, MM)

HISTORISME KONFLIK DAN PENYELESAIANNYA DALAM BIROKRASI

Kompleks Kantor Walikota Magelang berawal dari bangunan yang akan difungsikan sebagai MAKO AKABRI tetapi setelah dibangun tidak jadi difungsikan sehingga terdapat inisiatif oleh Walikota saat itu Kolonel Bagus Panuntun untuk difungsikan sebagai Kantor Walikota Magelang pada tahun 1985. Hal ini menyebabkan peruntukan bangunan yang sebenarnya berfungsi untuk kantor AKABRI dan simbolismenya yang mencerminkan militer dari ornamen segi lima pada bangunan beralih fungsi menjadi kantor pemerintahan sipil (Pemkot Magelang). Status tanah aset adalah milik TNI sehingga karena belum balik nama, gedung diminta kembali oleh pihak TNI pada tahun 2017 untuk difungsikan sebagai Markas Akademi TNI. Hal-hal teknis untuk penyelesaian konflik diselesaikan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Menkopolkam, Prof. Dr. H. Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., dengan MoU pemberian aset BPLK Kementerian Keuangan di Kota Magelang untuk difungsikan sebagai Kantor Walikota baru. Karena gedung juga masih aktif digunakan untuk pendidikan, Kementerian keuangan meminta waktu 2,5 tahun untuk mengurus perpindahan dan Pemerintah Kota Magelang juga meminta waktu 3 tahun untuk membangun dan mengurus perpindahannya.

EVALUASI BANGUNAN KANTOR EXISTING DAN BIROKRASINYA

Bangunan *existing* ideal secara kapasitas dan tertata sangat baik. Terdapat gedung pemerintahan eksekutif yang terdiri dari gedung pusat sebagai kantor dari Walikota dan Wakilnya beserta Sekretariat Daerah (terdiri dari asisten dan para Kepala Bagian). Terpisah dari gedung pusat, terdapat unit-unit gedung yang mengakomodir Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti inspektorat, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, BPKAD, Diskominfo, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kompleks juga mengakomodir gedung DPRD beserta Sekretaris Dewan dan masjid yang lahannya dikuasai pemerintah sehingga tidak dipindah.

OPD PRIORITAS DENGAN EKSEKUTIF

Terdapat empat OPD yang menjadi prioritas untuk mendampingi eksekutif secara langsung, yaitu inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM

PELAYANAN PUBLIK

Segala bentuk pelayanan dialihkan 90% nya ke Mal Pelayanan Publik. Hanya beberapa yang tetap terakomodir pada kantor *existing*, khususnya yang berkaitan dengan perizinan, misalnya izin PIRT.

EVALUASI TAPAK CALON KANTOR WALIKOTA BARU

Karena didominasi fungsi asrama (90%), bangunan tidak dapat difungsikan untuk kegiatan birokrasi sehingga perlu dilakukan *demolish* total. Hal tersebut berkaitan dengan kenyamanan untuk bekerja dalam urusan administrasi.

IDEALISME BALAI KOTA

Idealisme balai kota diterima dengan memperhatikan fungsinya sebagai kantor untuk urusan administrasi

PREFERENSI TATA BANGUNAN

Bangunan terpadu (terpusat) dengan ekspansi vertikal merespon keterbatasan lahan

SIMBOLISME KEBUDAYAAN

Balai kota nantinya dapat merepresentasikan perpaduan berbagai macam budaya lokal, seperti gethuk dan Gunung Tidar.

Menggunakan konsep balai kota

Ekspansi vertikal untuk penghematan lahan

Orientasi pelayanan publik: pelayanan perizinan

Pemindahan OPD dengan skema prioritas

Demolish total existing tapak

Pembangunan baru bertahap

Gabungan simbol kebudayaan lokal sebagai citra

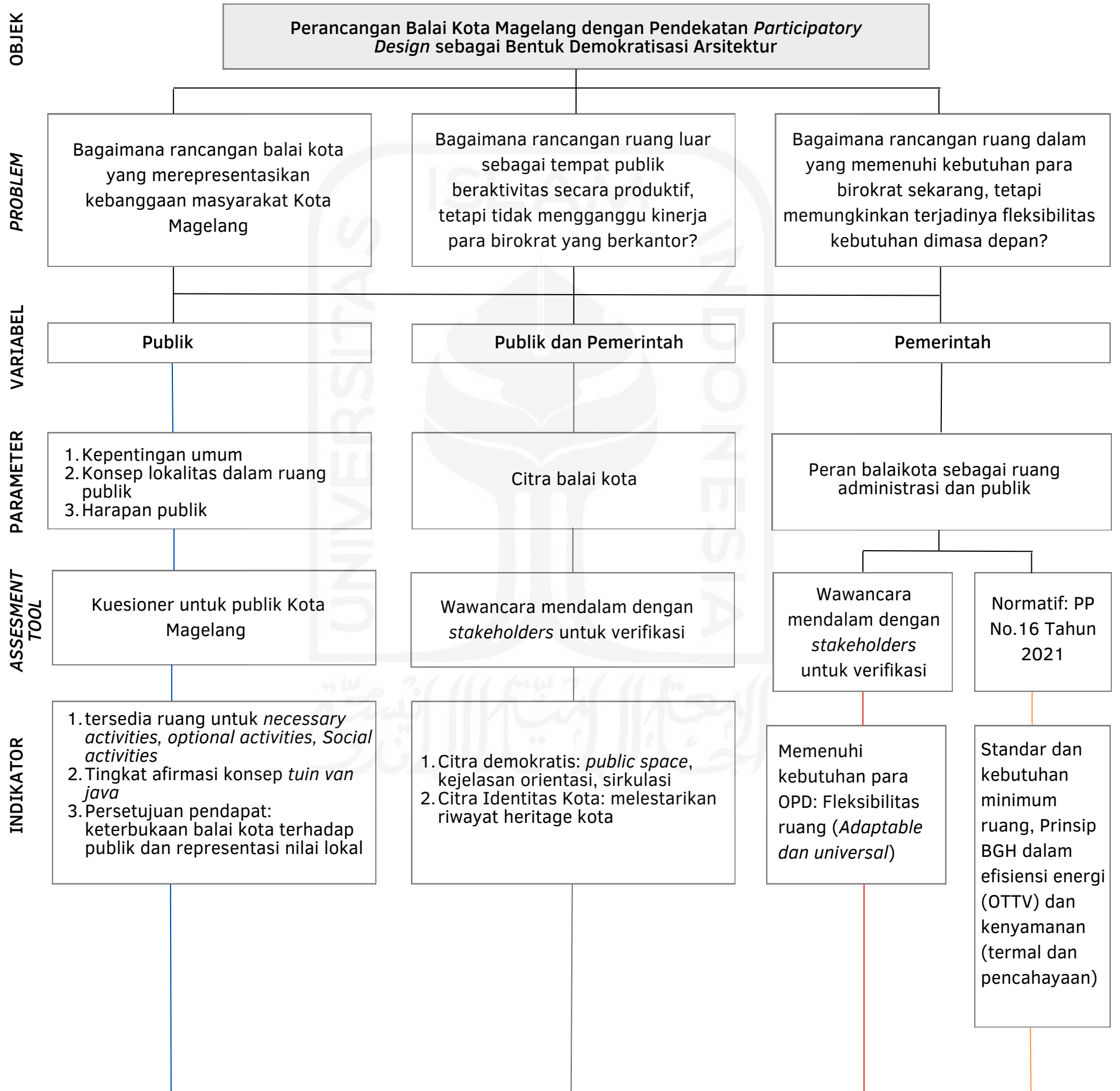
PENDAPAT DESAIN

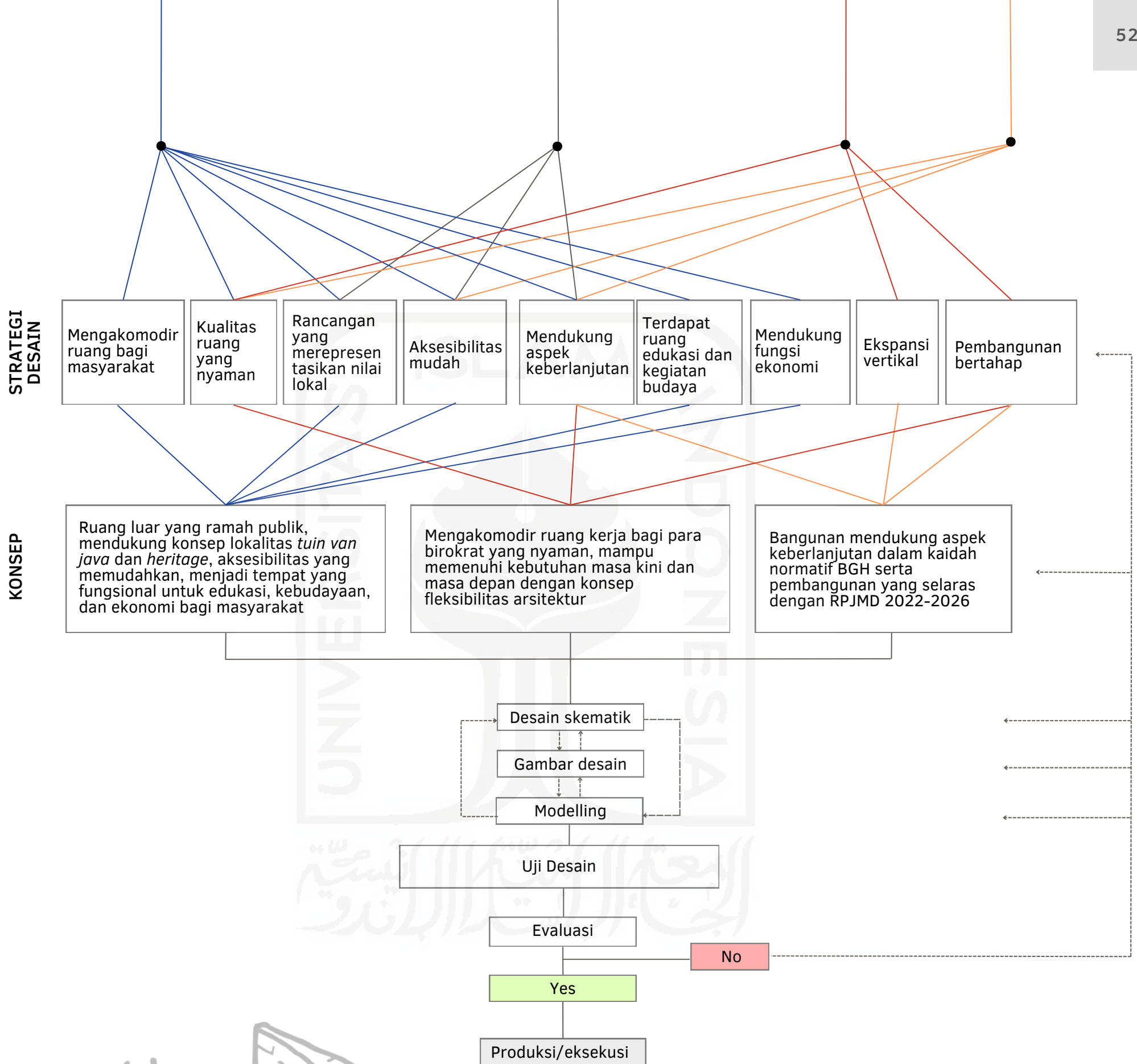
2.6. INDIKATOR KEBERHASILAN DESAIN

No.	Teori	Variabel	Parameter	Indikator	Pendekatan	Cara menguji	Sasaran	Relevansi teori dengan sasaran
1	Partisipatoris	Publik	Kepentingan umum	Tersedia ruang untuk <i>necessary activities, optional activities, Social activities</i>	populer	Kuesioner	Untuk menciptakan ruang luar yang produktif berdasarkan fisik, aktivitas, dan citra	Menciptakan tempat publik yang berdasarkan preferensi masyarakat Kota Magelang sehingga dapat menjadi wadah aktivitas yang hidup bagi para penduduk karena didasarkan pada keinginan publik
			Konsep lokalitas dalam ruang publik	Tingkat afirmasi konsep <i>tuin van java</i>	populer	Kuesioner		
			Harapan publik	Persetujuan pendapat: keterbukaan balaikota terhadap publik dan representasi nilai lokal	populer	Kuesioner		
		Pemerintah	Peran balaikota sebagai ruang administrasi dan publik	Memenuhi kebutuhan para OPD: Fleksibilitas ruang	otoritatif	Verifikasi stakeholder	Untuk menciptakan ruang dalam yang fleksibel	Menciptakan ruang kerja yang fleksibel perlu dilakukan pengukuran kemungkinan apa saja yang dapat berubah dalam dinamika zaman (Rencana pemindahan OPD terkini dan penerapan teknologi pada pelayanan)
		Publik dan Pemerintah	Citra balaikota	Citra demokratis: <i>public space</i> , kejelasan orientasi, sirkulasi	otoritatif	Verifikasi stakeholder	Untuk menciptakan balaikota yang representatif	Menciptakan balaikota dari segi bentuk sebagai citra fisik untuk melestarikan <i>image heritage</i> kota dan <i>tuin van java</i> serta citra demokrasi yang berdasarkan penyediaan ruang publik, aksesibilitas yang mudah, dan orientasi yang perlu ditelusuri dengan menghimpun informasi dari para <i>stakeholders</i> .
				Citra Identitas Kota: melestarikan riwayat heritage kota	otoritatif	Verifikasi stakeholder		
2	Normatif	Pemerintah	Kantor pemerintah	Standar dan kebutuhan minimum ruang, Prinsip Bangunan Gedung Hijau dalam efisiensi energi (OTTV) dan kenyamanan (termal dan pencahayaan)	rasional	Verifikasi standar	Untuk memenuhi norma kantor pemerintahan	Menciptakan kantor pemerintahan yang sesuai dengan kaidah bangunan gedung negara sehingga memenuhi prasyarat peraturan




2.7. PETA RINGKASAN DESAIN






2.8. GAMBARAN AWAL RANCANGAN

EMPHATIZE




Pendapat
End-User: Sekda



(Drs. H. Joko Budiyono, MM)

AUDIO



Menyetujui konsep balai kota

Ekspansi vertikal untuk penghematan lahan

Orientasi pelayanan publik: pelayanan perizinan

Pemindahan OPD dengan skema prioritas


Demolish total existing tapak karena tidak layak

Pembangunan bertahap

Gabungan simbol kebudayaan lokal sebagai citra

BUKIT TIDAR

Sebagai simbol pakunya Tanah Jawa dan menjadi salah satu simbol budaya Kota Magelang



KULINER GETUK

Getuk (makanan berasal dari singkong) yang merupakan makanan khas Magelang dan ditemukan pertama kali saat zaman penjajahan Jepang bahkan pernah menjadi pengganti bahan pangan pokok masyarakat saat itu

Getuk gondok dengan bentuk dan warna yang variatif

Getuk trio yang terdiri dari tiga warna: putih cokelat, dan pink

Getuk lindri yang terdiri dari serat-serat panjang



TUIN VAN JAVA

Terkenal sebagai kota taman yang indah sejak zaman Belanda, kebudayaan menanam bunga menjadi bentuk hobi para noni yang dilestarikan menjadi spirit **Kota Sejuta Bunga**



DEFINE

- Keterbatasan anggaran membuat upaya *demolish total* bangunan existing dilakukan bertahap sesuai kebutuhan prioritas (Walikota-Sekda-OPD)
- Balai kota menjadi tempat pelayanan publik tambahan selain dari Mal Pelayanan Publik (MPP) yang letaknya terpisah dari lokasi
- Keterbatasan lahan membuat bangunan di ekspansi secara vertikal dan gabungan simbol kebudayaan menjadi citra yang perlu direpresentasikan dalam rancangan

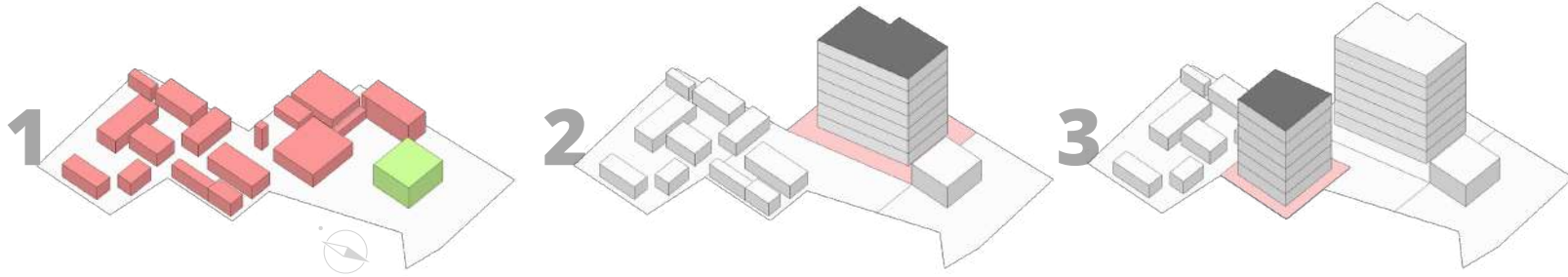
IDEATE



Pembangunan dilakukan dalam empat tahapan utama berdasarkan prioritas

- Pembangunan gedung utama untuk Kantor Walikota dan Sekda
- Pembangunan jalan sebagai akses tembus (memecah potensi kemacetan pada kawasan alun-alun)
- Pembangunan kantor para OPD (prioritas inspektorat, BAPPEDA, BKPSDM, dan BPKAD)
- Pembangunan Galeri UMKM (Opsional)

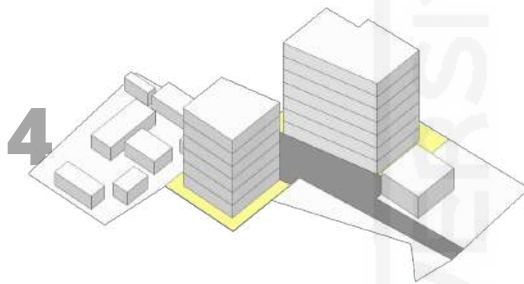
- **GEDUNG TERDAMPAK PEMBANGUNAN TAHAP 1 : KANTOR UTAMA (MANDATORY)**
- **GEDUNG TERDAMPAK PEMBANGUNAN TAHAP 2 : JALAN TEMBUS (MANDATORY)**
- **GEDUNG TERDAMPAK PEMBANGUNAN TAHAP 3 : KANTOR OPD (MANDATORY)**
- **GEDUNG TERDAMPAK PEMBANGUNAN TAHAP 4 : GALERI UMKM (OPSIONAL)**



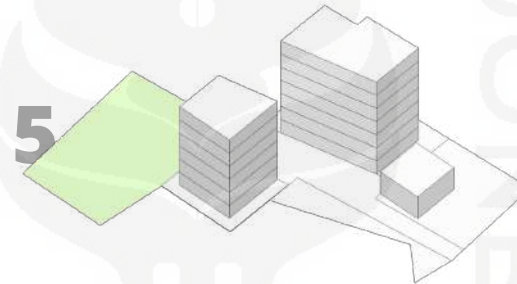
1 Melakukan demolish bangunan existing secara bertahap dengan pertimbangan bangunan existing (berupa asrama) dinilai tidak layak digunakan. Pendopo depan tetap dilestarikan sebagai ruang publik selatan

2 Tahap pertama dilakukan demolish 5 bangunan existing paling depan yang digunakan untuk membangun kantor walikota-sekda sebagai representasi pemerintahan kota

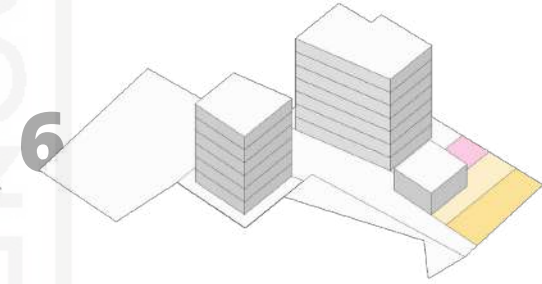
3 Tahap kedua dilakukan demolish 4 bangunan existing untuk keperluan pembangunan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) prioritas yang harus dekat dengan eksekutif



4 Menggunakan akses keluar-masuk *existing* dan menyediakan akses gawat darurat pada sekeliling bangunan (6 m)

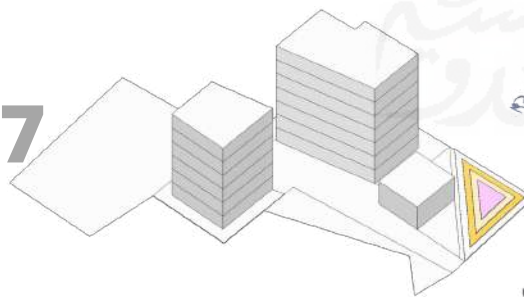


5 Tahap ketiga dilakukan demolish 5 bangunan existing untuk keperluan opsional jika luasan kantor OPD memenuhi. Direncanakan menjadi ruang publik bagian utara balai kota.

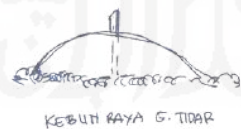


6 Merencanakan taman bunga representatif pada ruang publik selatan dengan pemilihan *tone* warna bunga seperti gethuk trio (pink, putih, coklat)

Bunga dengan riwayat historis Kota Magelang



7 Mengambil form taman bunga *tuin van java* dengan undak-undakan yang merepresentasikan gunung tidar sebagai simbol budaya dan filosofis "pakuning tanah Jawa"



Phlox drummondii
pink



Gladiolus
putih



Bougenville
cokelat-kuning

EMPHATIZE



Pendapat Managerial: BAPPEDA dan DPUPR



Iwan Tritany S
Kabid Ekonomi & Perencanaan Wilayah

AUDIO



An Bidang P&JK
Fung. T&P
Rizqi Dwi Herawati, S.T.

AUDIO



Menyetujui konsep balai kota

Ekspansi vertikal untuk penghematan lahan

Peran kantor yang ramah publik

Pemindahan OPD dengan skema prioritas

Mendukung keberlanjutan: Norma BGH

Pembangunan bertahap

Simbolisme heritage dalam rancangan

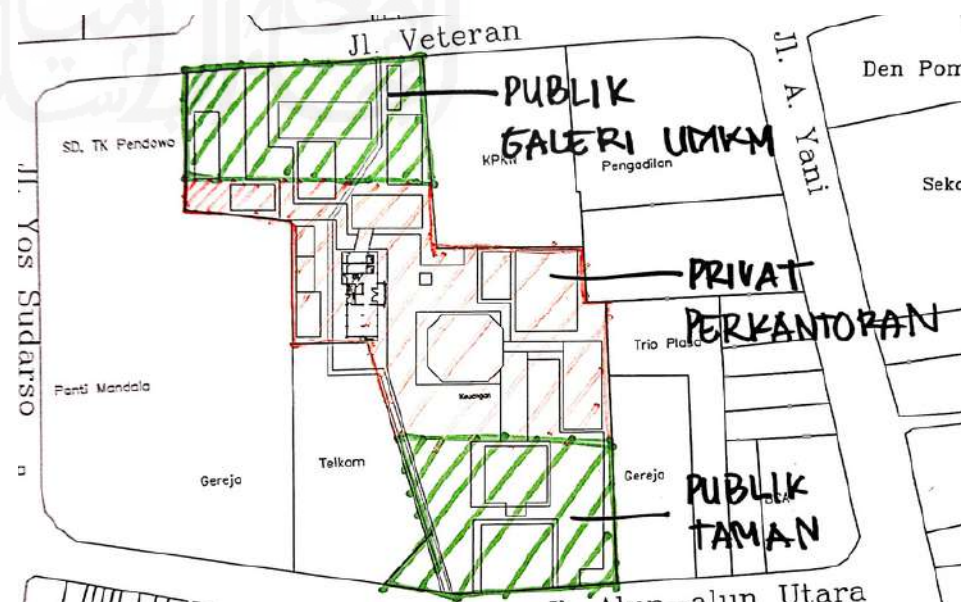
Pemetaan gaya arsitektur lingkungan sekitar

DEFINE

- Menyetujui konsep balai kota sehingga diperlukan perencanaan *zoning* publik dan privat (kantor) dalam kawasan yang terintegrasi tanpa mengganggu kondusivitas birokrasi
- Style bangunan yang menyelaraskan langgam arsitektur sekitar dan merepresentasikan identitas magelang sebagai kota *heritage*
- Akibat keterbatasan lahan, pembangunan dilakukan secara bertahap dengan ekspansi vertikal

IDEATE

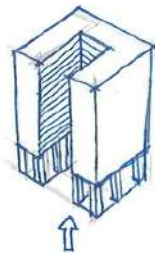
Membagi *zoning* publik pada tapak yang berbatasan dengan jalan agar mudah diakses publik 24 jam sehingga zona perkantoran dapat dilakukan pembatasan akses saat tutup tanpa mengurangi konsep ruang publik balai kota sebagai tempat milik rakyat.





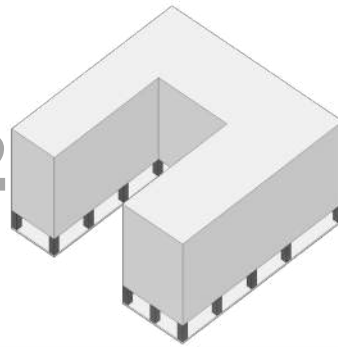
1

Pembentukan *void* (*courtyard*) pada bangunan vertikal untuk penghawaan dan pencahayaan alami



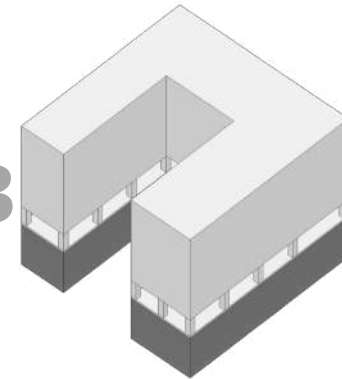
2

Zonning lantai dasar yang diperuntukkan untuk pelayanan publik dibuat terbuka dengan void



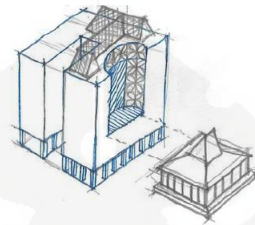
3

Melakukan ekspansi basement untuk penghematan lahan parkir di lantai dasar



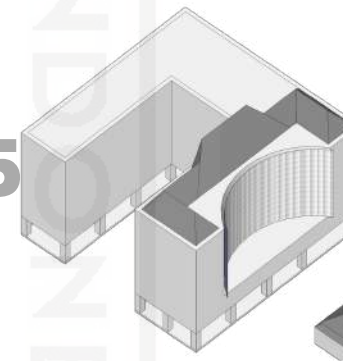
4

Mengadaptasi lengkung dan elemen kolom bangunan ikonik Water Torrent Magelang sebagai identitas heritage pada bangunan



5

Mengadaptasi elemen kebudayaan lokal dengan model atap tajug dan motif kawung pada secondary skin



6

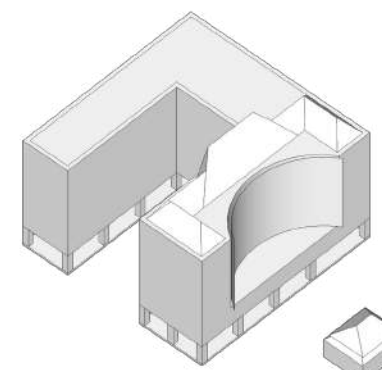
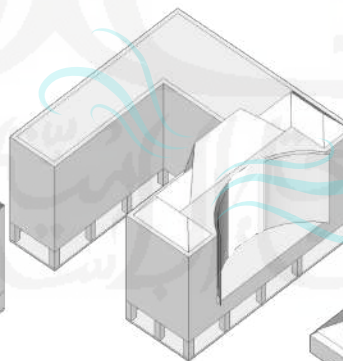
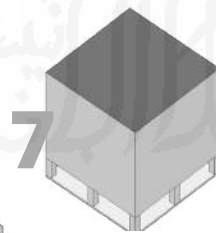
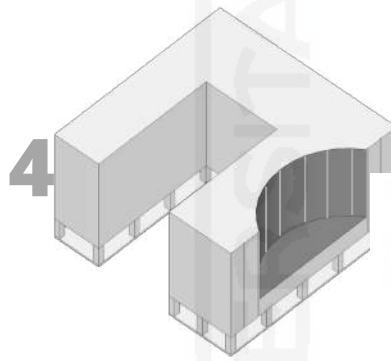
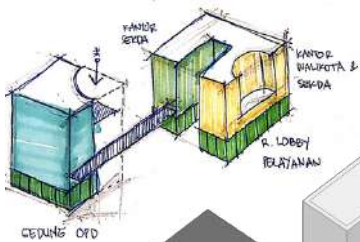
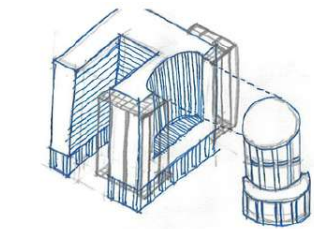
Penambahan massa untuk memenuhi kebutuhan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) prioritas dengan lantai dasar berupa lobby yang terbuka untuk publik seperti bangunan utama

7

Membuat lengkung pada bangunan sebagai aksent dinamis mengikuti fasad utama dan digunakan untuk meningkatkan pencahayaan serta penghawaan alami bangunan OPD

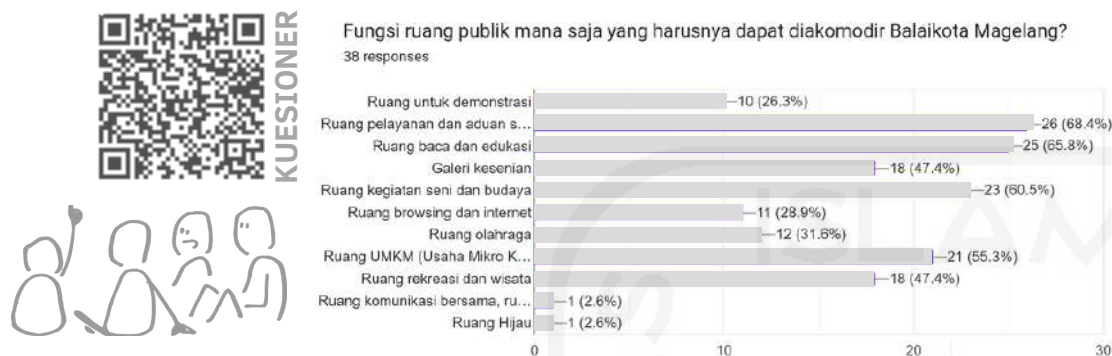
8

Membuat bukaan tengah pada fasad utama untuk alur penghawaan alami dengan potensi angin terbesar dari arah selatan



EMPHATIZE

PUBLIK (MASYARAKAT KOTA MAGELANG)



- Merepresentasikan nilai lokal
- Aksesibilitas mudah
- Balai kota yang ramah publik
- Mendukung aspek keberlanjutan
- Terdapat ruang edukasi dan kegiatan budaya
- Mendukung fungsi ekonomi
- Konsep lokalitas: "tuin van java"
- Mengakomodir ruang pelayanan dan aduan langsung

PERWAKILAN PUBLIK: AKTIVIS KEBUDAYAAN DAN SEJARAH KOTA MAGELANG



Pelestarian pendopo *existing* pada tapak balai kota

Rekam jejak sejarah untuk balai kota yang representatif

Mengikuti citra kawasan sekitar yang *heritage*

Mengakomodir fungsi pelayanan publik

Fasilitas publik yang lengkap dan bersih

Aksesibilitas mudah

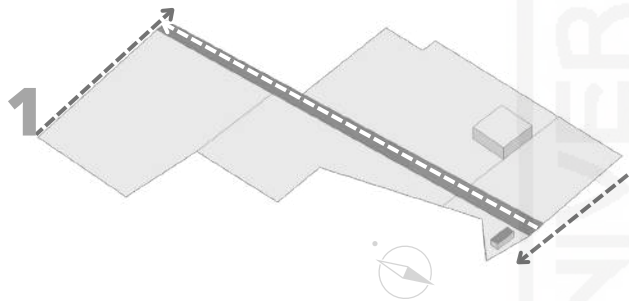
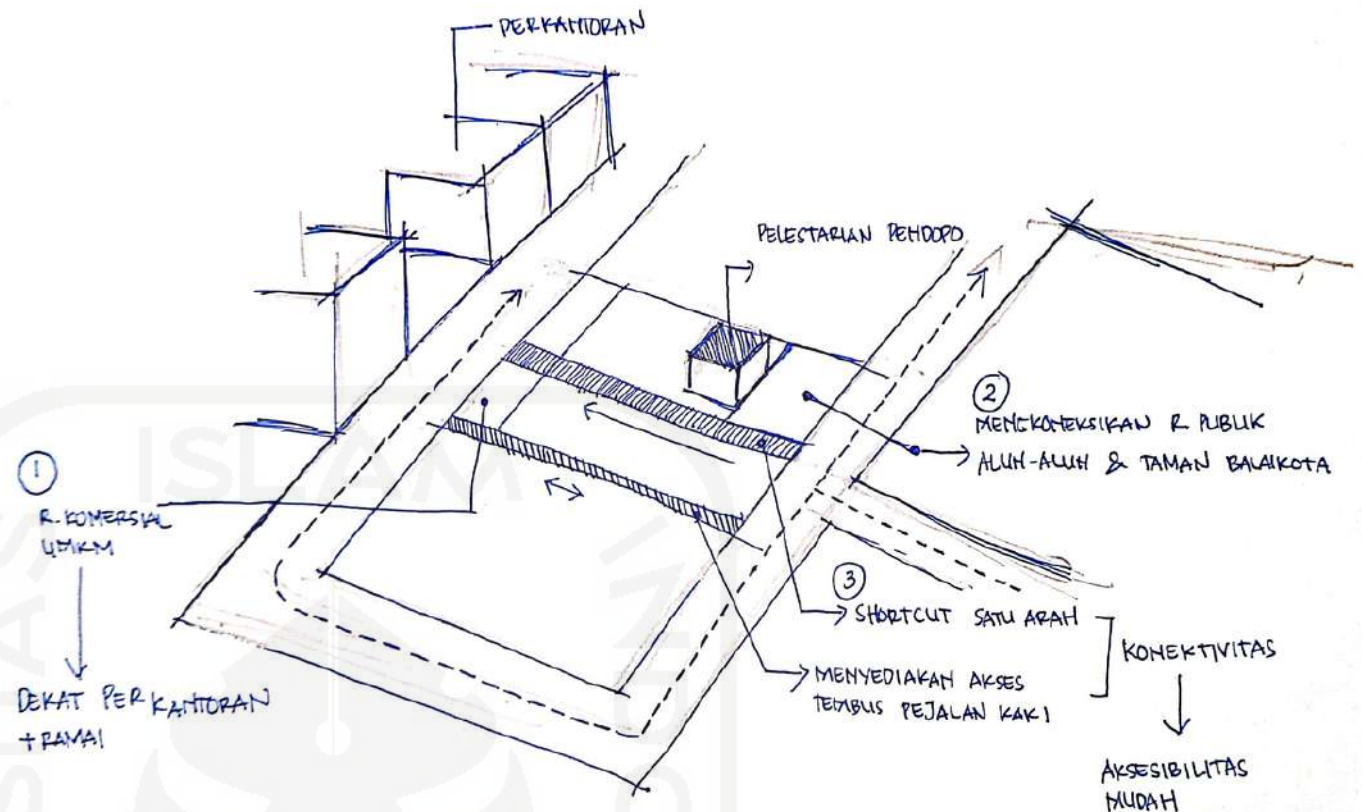
DEFINE

- Masyarakat menginginkan secara fungsi balai kota dapat dimanfaatkan publik untuk beraktivitas sehingga diperlukan pengaturan *zoning* yang mampu membagi zona aktivitas publik secara efektif dengan aktivitas perkantoran yang perlu privasi
- Fungsi perekonomian dipreferensikan masyarakat sehingga diperlukan ruang komersial yang dapat disewakan sekaligus membantu UMKM
- Terdapat ruang edukasi dan kegiatan budaya membuat pelestarian pendopo *existing* diperlukan, improvisasi ruang diperlukan agar pendopo dan lingkungan sekitar mampu menjadi tempat yang hidup.
- Balai kota perlu merepresentasikan identitas *heritage* kolonial kawasan dan lokalitas jawa. Selain itu, simbolisme Magelang sebagai "Tuin van Java" yang indah perlu diinterpretasi dengan mudah pada rancangan.

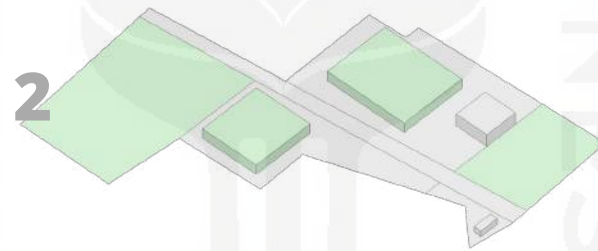
IDEATE

Terdapat tiga ide utama dalam merencanakan tapak sebagai ruang publik

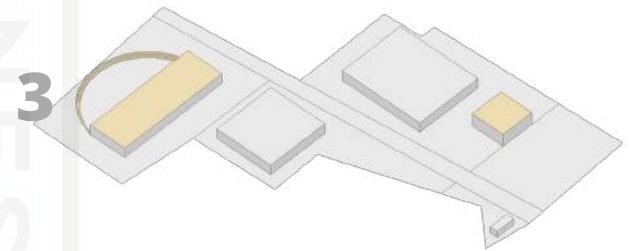
1. Menempatkan ruang komersial (UMKM) pada bagian tapak yang dekat perkantoran
2. Mengkoneksikan antara alun-alun dan taman pendopo sebagai ruang publik
3. Membuat akses tembus jalan dari alun-alun ke kawasan perkantoran untuk mempermudah aksesibilitas
4. Merepresentasikan *tuin van java* pada lansekap balaikota



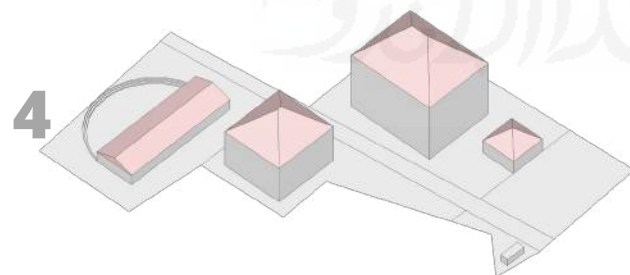
Merancang akses tembus satu arah jalan selatan ke utara untuk menghindari *traffic jam* area alun-alun. Halte dirancang pada bagian selatan tapak



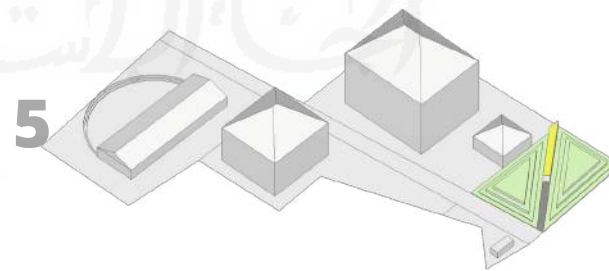
Zonning lantai 1 direncanakan sebagai ruang publik yang digunakan untuk pelayanan. Taman diplot pada zona utara dan selatan sebagai representasi citra demokratis pada muka depan-belakang.



Merancang zona UMKM di utara (kondisi ramai) untuk mendukung fungsi perekonomian dan amfiteater untuk acara kesenian, melestarikan fungsi pendopo untuk kegiatan kebudayaan



Mengambil pelestarian atap model perisai sebagai riwayat heritage balai kota dan mengikuti langgam atap tajug pendopo depan

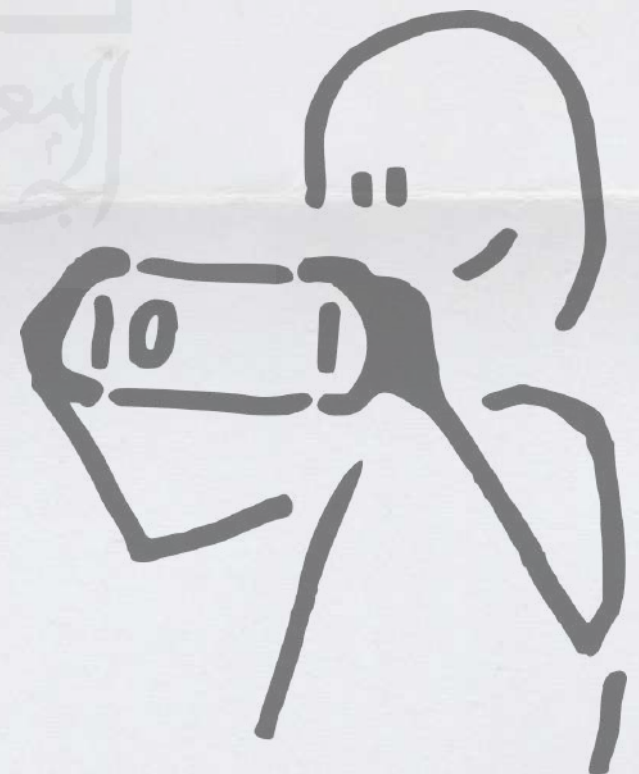


Merancang taman bunga *tuin van java* yang edukatif dengan adanya museum *outdoor* pada bagian sirkulasinya untuk menarik pengunjung

3. EKSPLORASI KONSEP PERANCANGAN



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية



3.1. KONSEP TATA TAPAK



Tahap 1: Kebutuhan prioritas dan mendesak

Ruang publik berupa taman bunga sebagai simbolisme "*tuin van java*" dirancang pada muka balai kota. Hal ini untuk memberikan representasi yang kuat tentang identitas sejuta bunga Kota Magelang sekaligus sebagai bagian dari koneksi antara alun-alun dan balaikota sebagai ruang publik (pemenuh aspek *social activities*)

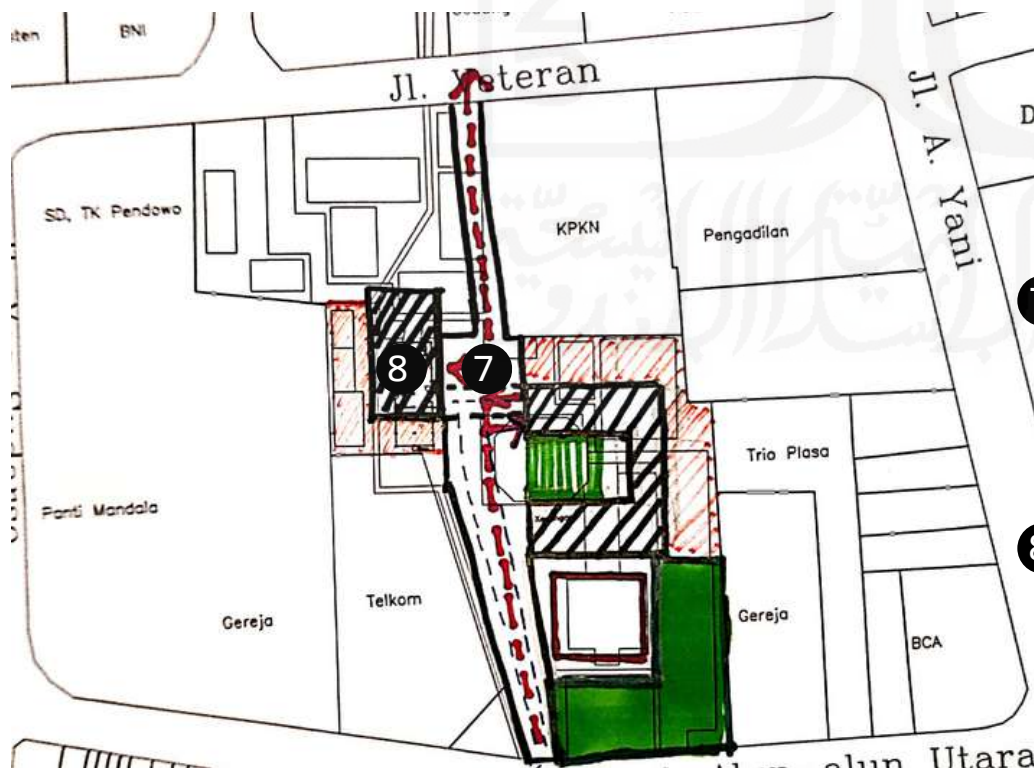
Pelestarian pendopo existing untuk ruang aktivitas kebudayaan

Bangunan kantor utama untuk memenuhi kebutuhan walikota-wakil walikota dan sekretariat daerah (pemenuh aspek *necessary activities*)

Memberi jarak 6 m antarbangunan untuk akses gawat darurat

Aksesibilitas *existing* dimanfaatkan

Bangunan kompleks yang tidak di-demolish dapat dimanfaatkan sementara untuk kantor OPD



Tahap 2: Kebutuhan prioritas

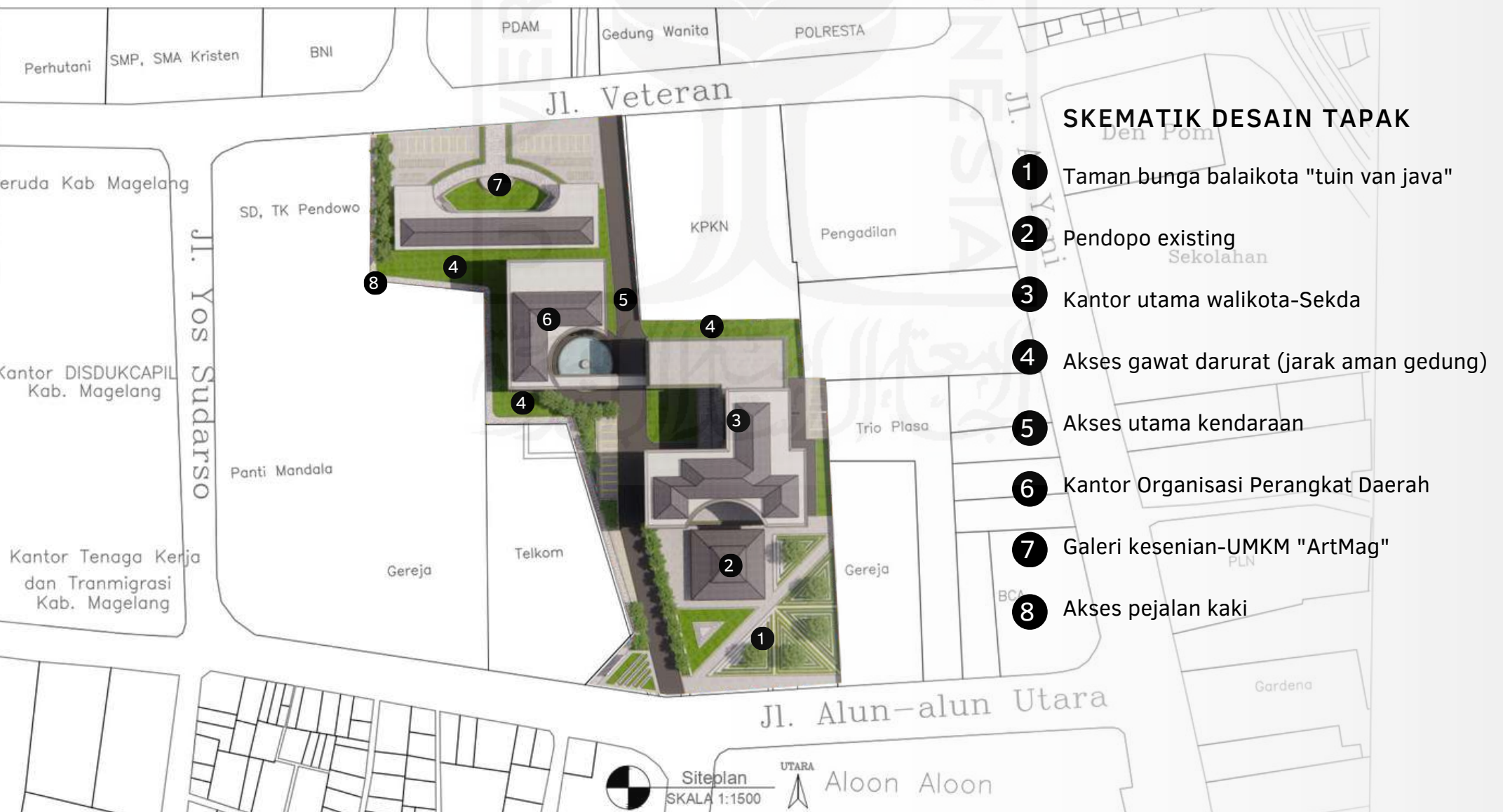
Pembuatan jalan akses tembus menuju jalan veteran guna memecah kemacetan yang mungkin timbul (rekayasa satu arah akses kendaraan sebagai pemenuh aspek *optional activities*)

Perancangan gedung kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) prioritas (Inspektorat, BAPPEDA, BKPSDM, BPKAD) yang dekat dengan kantor utama dan terintegrasi dengan adanya jembatan penghubung antarkantor (Pemenuh aspek *necessary activities*).



Tahap 3: Kebutuhan opsional

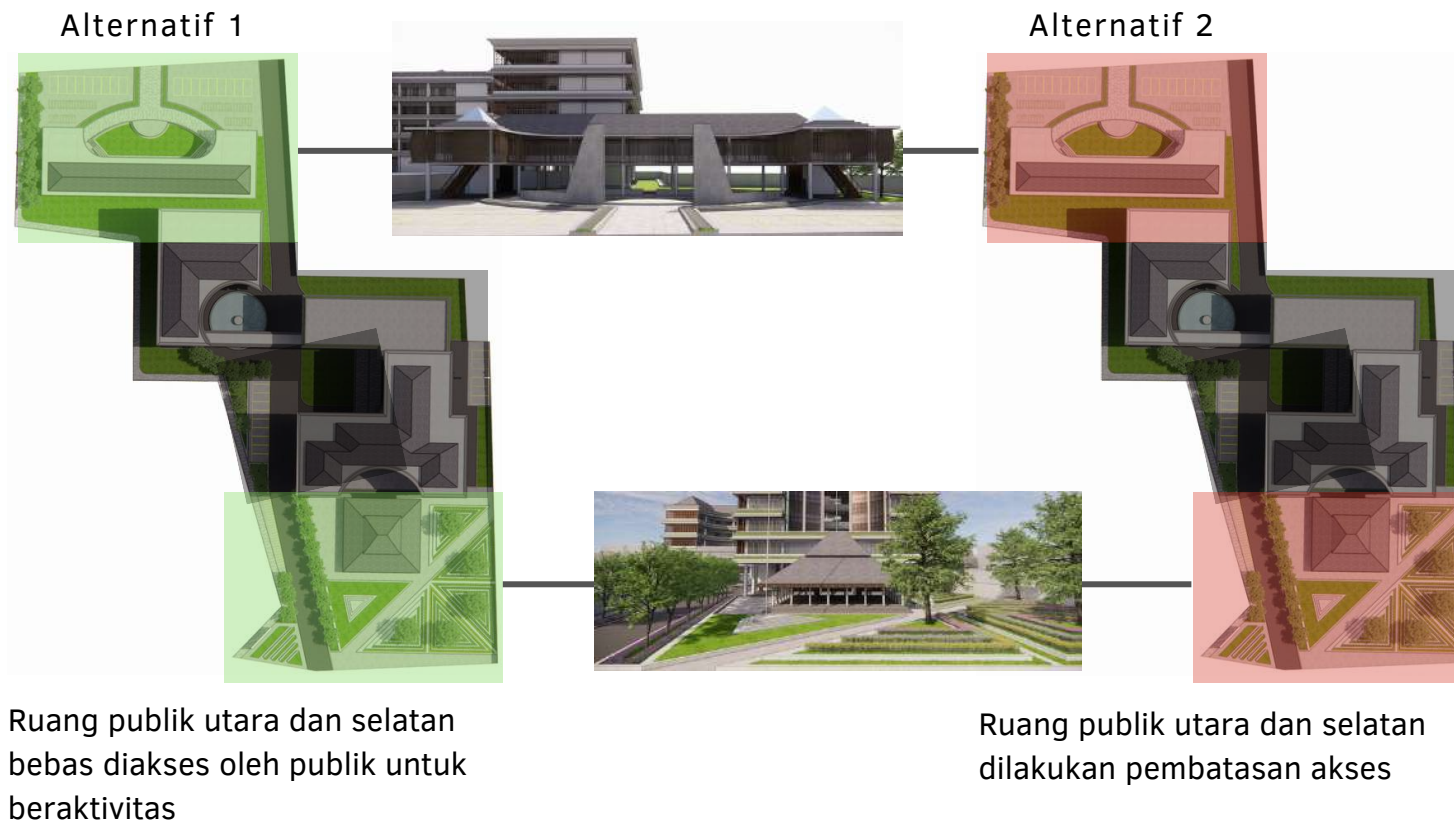
Merencanakan galeri kesenian dan UMKM pada akses jalan veteran yang cukup ramai karena didominasi oleh wilayah perkantoran. Karena cukup ramai dan menjadi jalur menuju Semarang dan Yogyakarta zona tersebut direncanakan sebagai tempat UMKM kuliner gethuk untuk oleh-oleh dan galeri kesenian rakyat sebagaimana kehendak publik yang menginginkan adanya fungsi tersebut pada balai kota (pemenuh aspek *social activities*).



3.2. PRA-RANCANGAN DAN ALTERNATIF

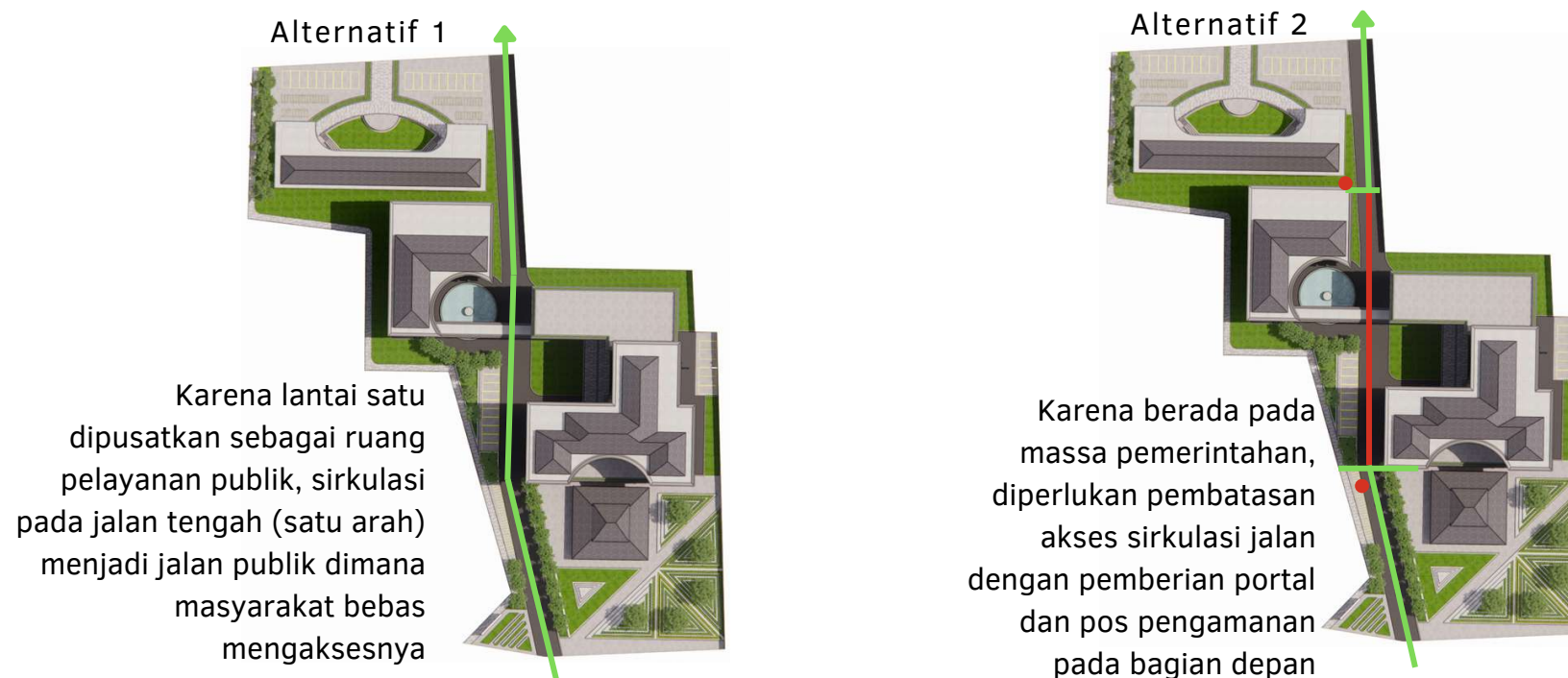
Indikator: Citra Balai Kota

Parameter: Citra demokratis: *public space* dan kejelasan orientasi



Indikator: Citra Balai Kota

Parameter: Citra demokratis: sirkulasi



Indikator: Citra Balai Kota

Parameter: Citra Identitas Kota: melestarikan riwayat heritage kota

**KONSEP TAMAN BUNGA
TUIN VAN JAVA**

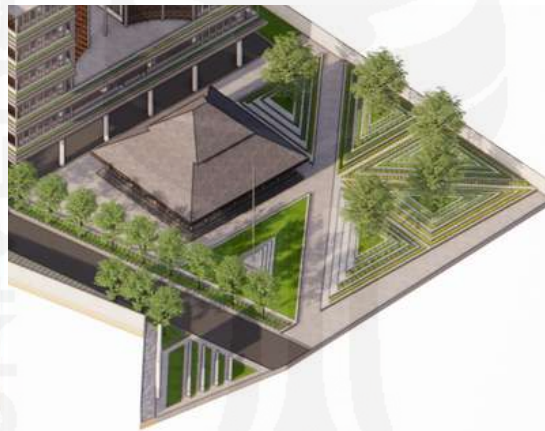


Telaah - Kota Magelang dalam catatan kota taman berkelanjutan



sumber:
<https://jateng.antaranews.com/>
(2019)

Pemilihan vegetasi yang memiliki riwayat historis sebagai taman kotanya Magelang saat zaman kolonial dimana bunga menjadi penghias visual dengan pohon sebagai peneduh. Komposisi antara rumput sebagai groundcover, bunga, dan pohon menjadi salah satu ciri taman kota magelang.



1
Bougenville
cokelat-kuning



2
Gladiolus
putih



3
Phlox drummondii
pink



4
Pohon
beringin



5
Pohon Asam
Belanda



6
Pohon Sawo
Kecik

Sebagai ruang publik pada muka kawasan, taman bunga dirancang dengan konsep filosofi yang merepresentasikan Kota Magelang sebagai kota yang dikelilingi lima gunung utama.



Figuratif taman bunga segitiga berundak berjumlah 5



Pohon sawo kecil

Phlox drummondii
(pink)

Gladiolus putih

Bougenville cokelat-kuning

Pohon Asam Belanda



Simbolisme Gunung Tidar
pakuning tanah jawa

Simbolisme 5 gunung:
Sumbing, Merapi,
Merbabu, Pegunungan
Menoreh, Telomoyo

Indikator: Citra Balai Kota

Parameter: Citra Identitas Kota: melestarikan riwayat heritage kota

KONSEP FASAD MUKA BANGUNAN UTAMA

Alternatif 1



Citra bangunan kolonial lebih ditonjolkan dengan aksent lengkungan dan diberikan kesan kolom seperti pada water torrent dan *arch* mengadopsi style *art nouveau* plengkung Magelang yang menjadi bangunan *heritage* kolonial

Alternatif 2



Citra kebudayaan Jawa ditonjolkan pada pemilihan fasad lengkung batik kawung yang berpola bunga juga sekaligus untuk memberikan identitas Magelang sebagai *tuin van java*

Alternatif 3



Gabungan citra kebudayaan lokal Jawa dan riwayat *heritage* kolonial yang dipadupadankan. Warna hijau, pink, putih, dan coklat menjadi elemen aksent warna yang berasal dari warna getuk gondok sebagai kuliner khas Magelang.

KONSEP AKSEN UTAMA BANGUNAN ARTMAG

Alternatif 1



Citra bangunan galeri kesenian Magelang mengambil bentuk fasad dinamis dan memanjang seperti getruk lindri dan atap mengambil model limasan sederhana yang biasanya ditemui pada rumah masyarakat biasa sebagai filosofis kerakyatan.

Alternatif 2



Menambah aksent gapura pada pintu masuk dan amfiteater sehingga terdapat kesan menyambut.

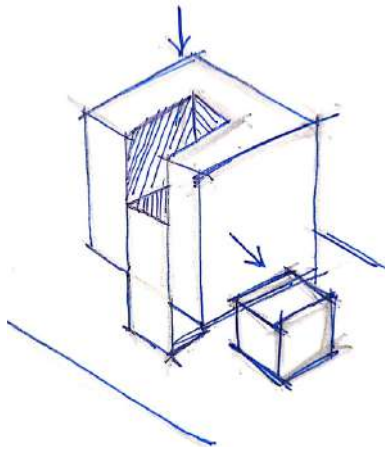
Alternatif 3



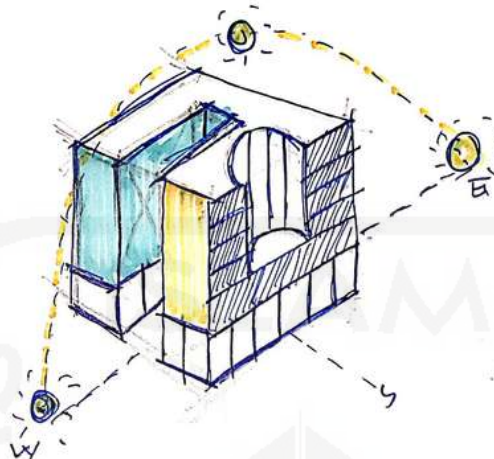
Menambah aksent pada atap berupa gunung yang berasal dari kesenian grebeg getruk magelang yang biasanya membawa gunung getruk jaler dan estri dalam acaranya.

Indikator: Peran balai kota sebagai ruang administrasi

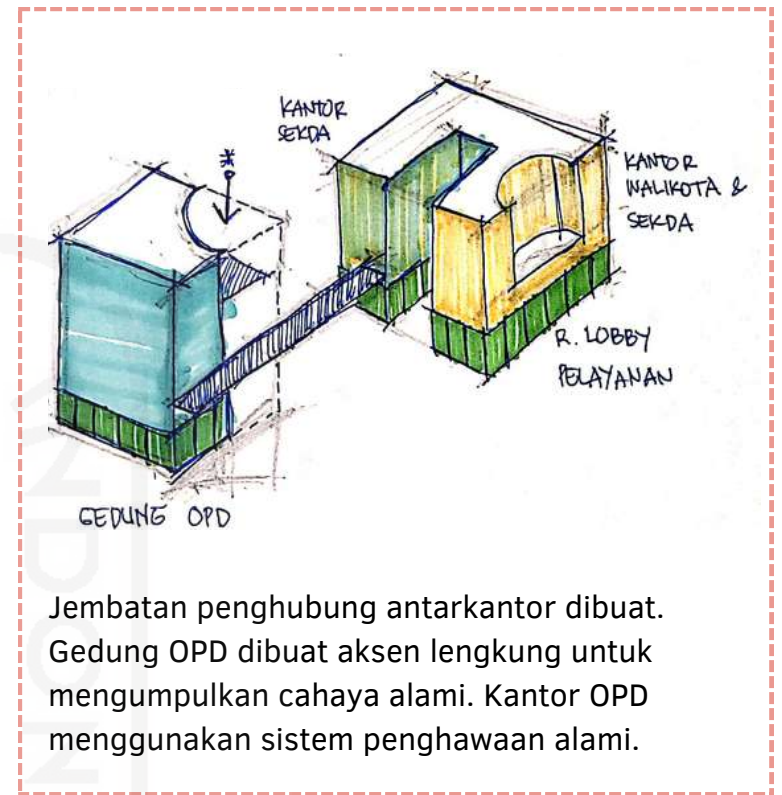
Parameter: Memenuhi kebutuhan ruang para birokrat (eksterior)



Massa bangunan utama diorientasikan menghadap pendopo dan alun-alun agar mudah diinterpretasi oleh publik. Pembuatan *courtyard* untuk alur pencahayaan dan penghawaan alami



Bukaan kaca terbesar diorientasikan pada selatan bangunan yang memiliki nilai solar faktor rendah (gedung ber-AC). Bagian gedung belakang menggunakan penghawaan alami. Bagian bawah gedung menjadi void yang terbuka untuk lobi pelayanan.



Jembatan penghubung antarkantor dibuat. Gedung OPD dibuat aksen lengkung untuk mengumpulkan cahaya alami. Kantor OPD menggunakan sistem penghawaan alami.

Alternatif 1



Alternatif 2



Antara gedung OPD dan Kantor Walikota-Sekda dirancang terpisah tanpa penghubung sehingga masing-masing unit memiliki independensinya.

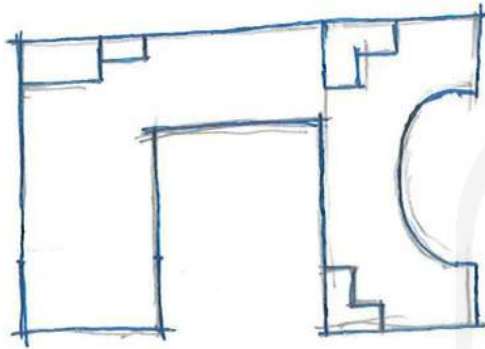


Gedung OPD dan Kantor Walikota terkoneksi dengan jembatan penghubung sehingga memudahkan koordinasi antarbirokrat dan meningkatkan aksesibilitas antargedung.

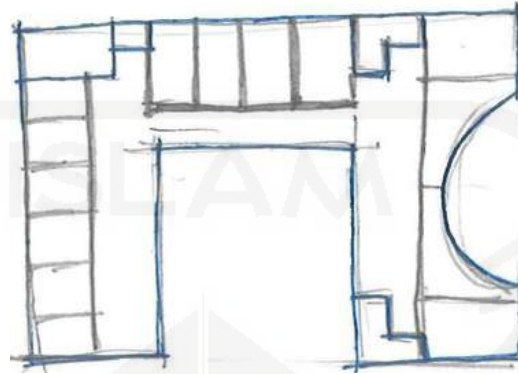
Indikator: Peran balai kota sebagai ruang administrasi
Parameter: Memenuhi kebutuhan ruang para birokrat (**Interior**)

Konsep fungsi bangunan:

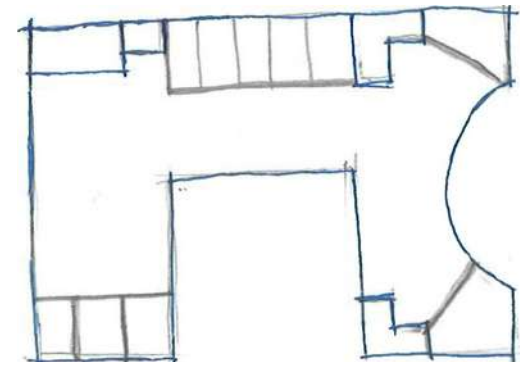
Gedung perkantoran dengan konsep *openspace*



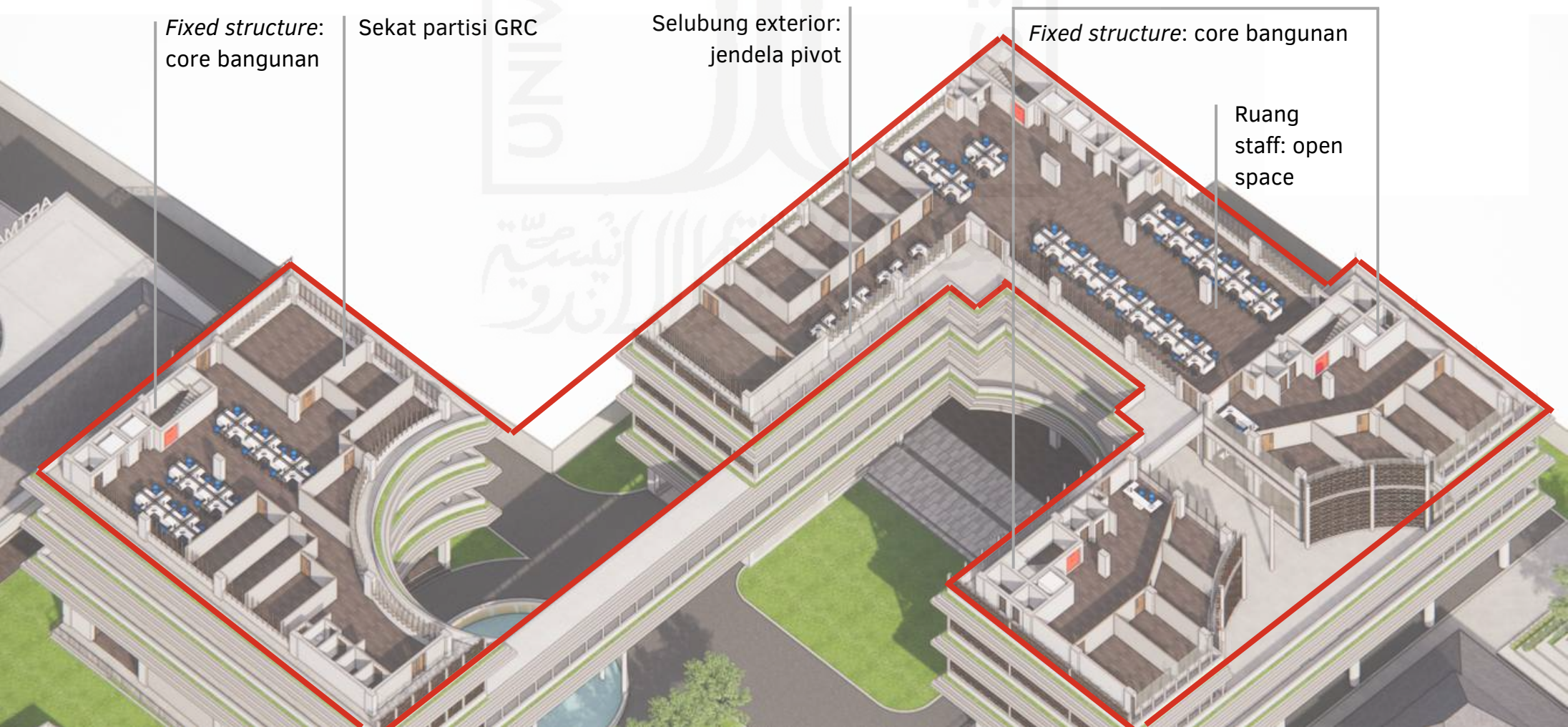
Ruangan didesain open plan dimana elemen fix hanya berupa elemen dinding exterior dan struktur. Hal ini dimaksudkan agar pengaturan kebutuhan ruang dalam dapat fleksibel mengikuti dinamika kebutuhan birokrasi yang dinamis.



Interior dilakukan penyekatan menggunakan dinding partisi mengikuti ruang yang dibutuhkan masa kini berdasarkan data para birokrat yang akan diakomodir.



Namun, konfigurasi ruang dapat diubah kedepannya dengan konsep open plan. Dinding partisi dimungkinkan untuk dikonfigurasi ulang.



Fixed structure:
core bangunan

Sekat partisi GRC

Selubung exterior:
jendela pivot

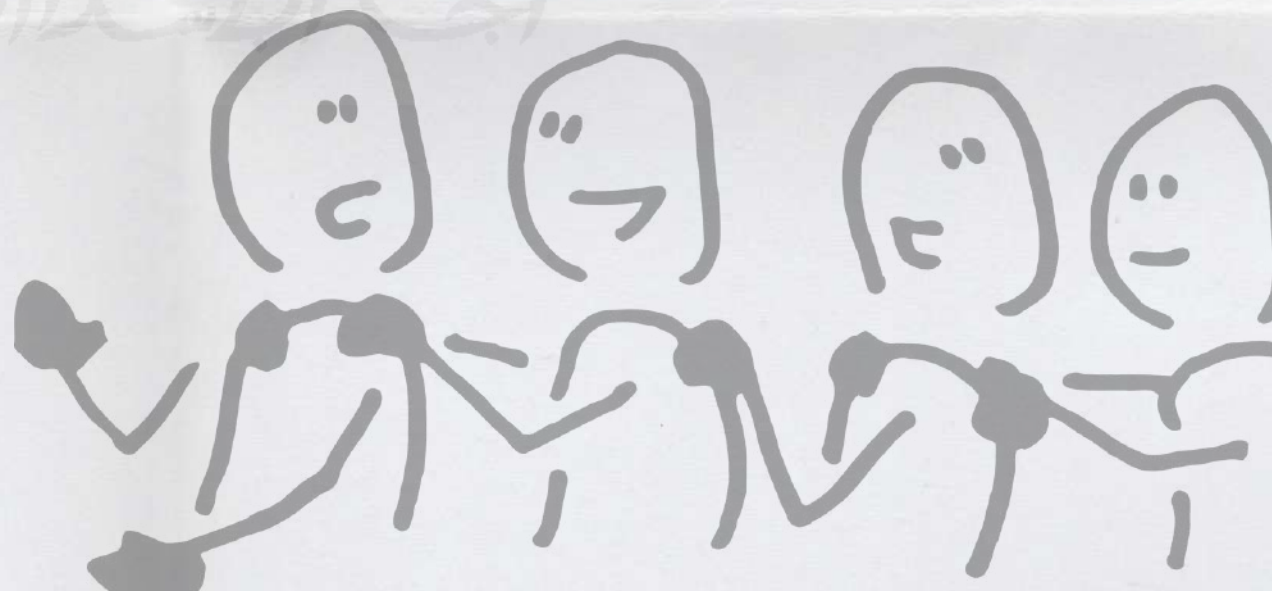
Fixed structure: core bangunan

Ruang
staff: open
space

4. UJI KESEPAKATAN RANCANGAN



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية



4.1. UJI KESEPAKATAN *STAKEHOLDERS*

Menunjukkan pra-rancangan kepada *stakeholders* untuk mendengar pendapat dan masukan serta memilih alternatif terbaik berdasarkan preferensinya.



Dokumen
Uji Desain

END-USER

20/23
Joko Nugroho

	<p>Sekda Kota Magelang Stakeholder: Pemerintah Peran: End-User</p>	<p>- Apresiasi konsep arsitektur - sangat keren / Cadeh of kebutuhan orang / orang kantor Walikota - sangat cocok untuk di Aplikasi - pilihan untuk penerapan</p>
--	---	---

1

2

MASUKAN

Sekat interior baiknya transparan untuk meningkatkan teamwork antarpegawai dan pejabat

Menggunakan sekat kaca (*curtain wall*) sehingga pencahayaan juga lebih optimal

Publik baiknya tetap bisa mengakses balai kota dengan mudah, tetapi perlu kontrol keamanan yang baik dalam lingkungan

Diberikan pos pengamanan pada akses utara dan selatan, publik hanya bisa mengakses lantai dasar

RESPON



3




Perlu penambahan vegetasi pohon beringin dan kepel yang identik dengan filosofis Jawa

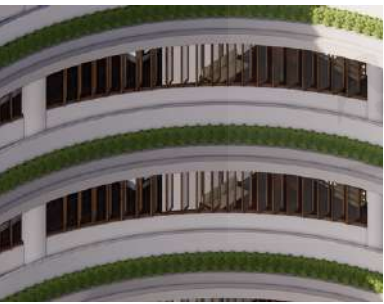


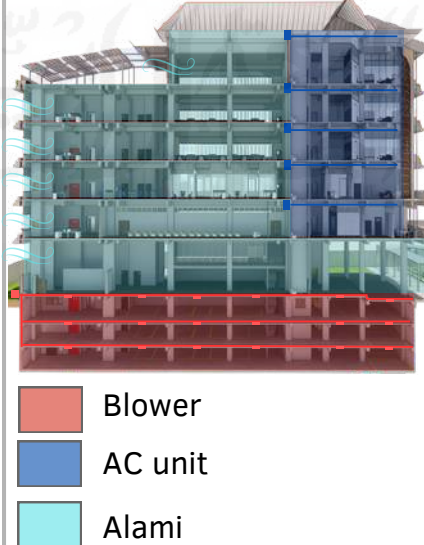






Dokumen Uji
Desain

MANAGERIAL


 <div data-bbox="642 399 821 624">  </div> <p data-bbox="554 639 952 755"> DPUPR Kota Magelang Stakeholder: Pemerintah Peran: Manajerial pembangunan </p>	<p data-bbox="1131 395 1897 515"> Hai Dewangga, Terima kasih sudah melakukan tugas akhir dengan objek Balai Kota. Nanti kami dikasih filenya ya ☺ </p> <p data-bbox="1240 559 1552 711">  Rizqi Dwi Herawati, S.T. </p>
--	---

MASUKAN	<p>1</p> <p>Bentang jarak dinding ke dinding dipertimbangkan untuk isu pencahayaan</p>	<p>2</p> <p>Sediakan ruang pengelolaan sampah internal</p>	<p>3</p> <p>Pertimbangkan untuk menjadikan bangunan tropis dan bangunan hijau</p>	<p>4</p> <p>Bayangan gedung dapat dimanfaatkan untuk area rapat dan ruang terbuka</p>
	<p>Isu pencahayaan direspon dengan menggunakan banyak bukaan dan shading untuk mereduksi panas. Tingkat pencahayaan diuji dengan dialux</p>  	<p>Direncanakan diletakkan di selatan gedung OPD dengan ukuran 5x3 m untuk masing" organik; anorganik</p> 	<p>Hanya sebagian kecil gedung <25 % yang menggunakan penghawaan mekanis (gedung utama dan basement)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Blower ■ AC unit ■ Alami 	<p>Ruang terbuka untuk apel bisa menggunakan inner court yang lebih teduh. Ruang rapat terbuka dapat dilakukan pada rooftop.</p>  
RESPON				




Dokumen Uji
Desain

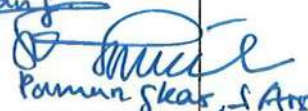
MANAGERIAL



DPUPR Kota Magelang
Stakeholder: Pemerintah
Peran: Manajerial pembangunan



1. Pertimbangkan untuk penambahan area parkir basement yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum pada malam / hari libur mengakomodir kekurangan parkir alun-alun kota magelang


 Agus Purnamasari, S. Arh.

5

Jumlah lantai bisa ditambah untuk pengoptimuman keterbatasan lahan

6

Pertimbangkan untuk penambahan area parkir basement


Pertimbangan biaya yang terbatas dengan kebutuhan ruang yang mencukupi dirasa sudah memenuhi aspek kebutuhan ruang. Kapasitas parkir dilakukan peningkatan dengan menambah jumlah basement menjadi 3 sehingga kapasitas parkir menjadi mobil 107 dan motor 219.






Dokumen Uji
Desain


MANAGERIAL





BAPPEDA Kota Magelang
Stakeholder: Pemerintah
Peran: Manajerial pembangunan

- Konsep perancangan ini perlu disempurnakan supaya lebih komprehensif sesuai hasil diskusi / wawancara -
- Secara keseluruhan, konsep perancangan telah memadukan pendapat dari stakeholder user & masyarakat & memenuhi unsur partisipatory design.
- sukses-selalu -


 Dr. Yetty Setipantingsih, SP. M. Eng

7

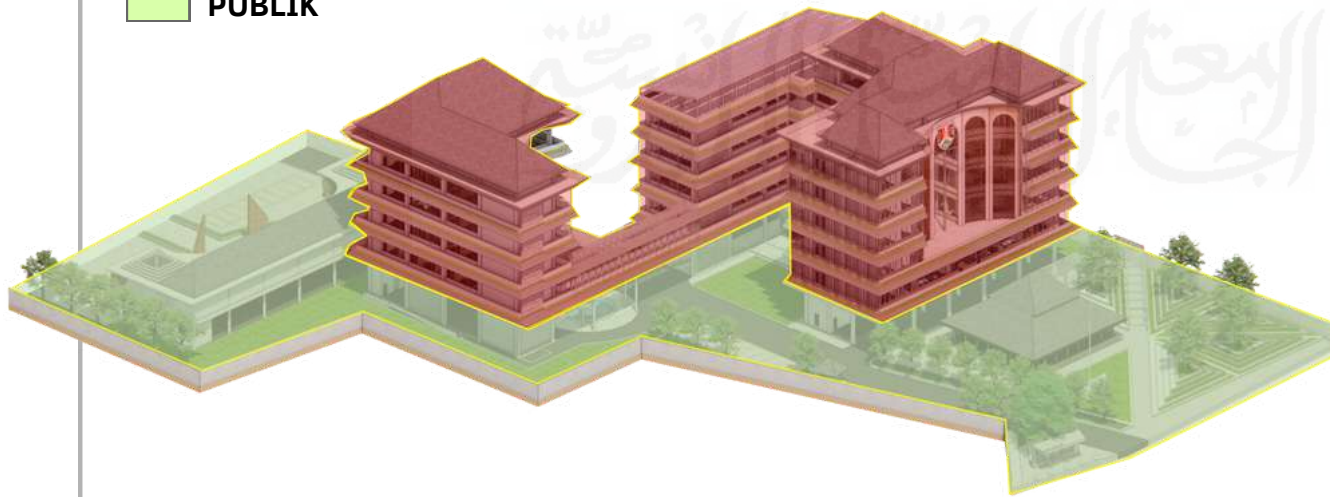
Konsep terbuka dan terbatas menjadi tepat untuk menciptakan peruntukkan ruang publik dan kantor

8

Memilih kembali vegetasi yang mampu bertahan pada lingkungan outdoor tropis, khususnya pada taman bunga representatif

Lantai dasar semua ruang terbuka untuk publik, lantai perkantoran yang terletak di atas dilakukan pembatasan akses dengan aksesibilitas elevator yang hanya dapat digunakan pegawai (*authorized people*).

■ PRIVAT
■ PUBLIK



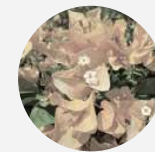
Vegetasi yang lebih tahan dan memiliki tone warna sama dengan konsep gethuk trio pada taman bunga representatif dipilih



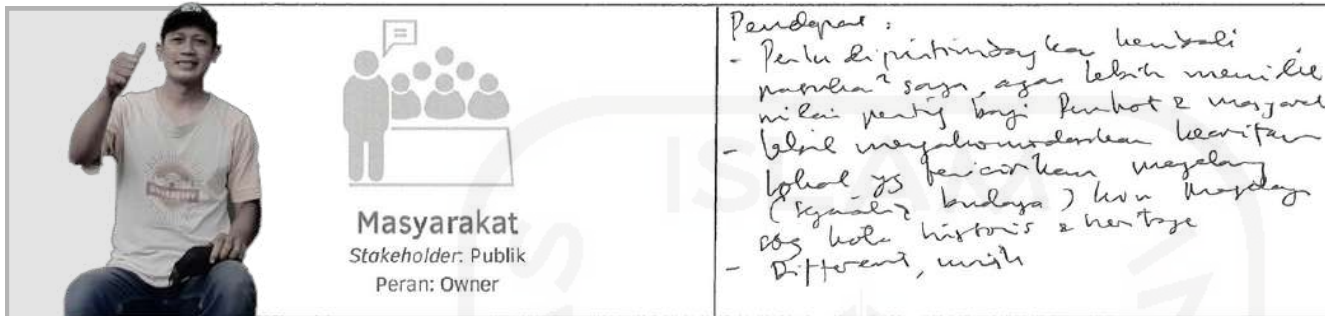
Bunga Lantana
(*Lantana camara*)



Bunga bintang
(*Isotoma longiflora*)



Bougenville
cokelat-kuning



	1	2	3	4
MASUKAN	Perhatikan nilai penting antara pemkot dan masyarakat, khususnya urgensi pendirian area UMKM di bagian utara	Lebih mencirikan kebudayaan lokal Magelang sebagai kota historis dan heritage	Pertimbangkan form lengkung (arch) pada muka bangunan agar lebih berkesan kolonial	Pertimbangkan form gapura agar lebih mengedepankan lokalitas, misal gunung wayang
RESPON	UMKM menjadi pilihan opsional, tetapi melihat urgensinya bahwa belum terdapat pusat edukasi dan kuliner gethuk, terdapat potensi untuk memulainya. Selain ekonomi juga terdapat potensi sebagai tempat wisata. 	Muka bangunan mengambil style water torrent yang cenderung bergaya kolonial dengan aksesoris ornamen dan atap yang bergaya Jawa sebagai lokalitas. 	Menambahkan lis sehingga terdapat kesan seperti pada style arch bangunan heritage plengkung Kota Magelang. 	Gubahan gapura diubah mengambil bentuk gunung wayang yang dapat menjadi backstage dari panggung performer. 



OWNER

	<p>Masyarakat Stakeholder: Publik Peran: Owner</p>	<p>Rancangan Balai kota sangat bagus dari berbagai aspek. Separah, fungsi Ruang (possible space), Artistik (konsep 5 gunung) juga ciri khas Kota Magelang sebagai Kota Cagar Budaya. (Kota Getuk, Gunung Tidar, Water Tower, Batilo dll)</p> <p>Harapan: Balai kota Magelang yang representatif dimana masyarakat merasa Handdrbeni & penuh makna filosofi yang penting untuk dilestarikan.</p>
--	---	---

Stakeholder Publik

(Elizabeth Rahayu, Stt, M.Si)

5

Ruang publik yang bisa diakses siapapun, tetapi tetap diberi batasan temporer atau sesuai kebutuhan

6

Pembatasan akses agar kesan balai kota tidak menjadi jalur alternatif menuju jalan utara

7

Makna taman bunga *tuin van java* dan simbol gunung tidar perlu diberikan narasi dan informasi untuk edukasi



museum outdoor berupa
ada sirkulasi taman bunga yang
menarik pengunjung secara visual
getahui tuin van java.



4.2. PENILAIAN DESAIN: PENDEKATAN POPULER

68
RESPONDEN

Masyarakat
Kota Magelang



Kuesioner
19/07/2023



Tempat UMKM membantu
wadah pengembangan ekonomi

Perlu disediakan tempat
pagelaran *outdoor*

Sangat menginspirasi dengan
mengadaptasi budaya lokal

Perlu ada fasilitas duduk dan
penerangan, bunga perlu lebih
variatif

Ruang publik disarankan dapat
menjadi wadah edukasi flora
dan fauna dalam tuin van java

sampling Pendapat
para responden

Perlu ditambahkan pohon dadap
serep yang menjadi pohon
herbal khas kota magelang

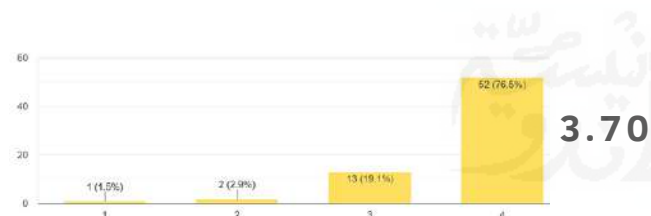
Citra heritage dan lokalitas Kota
Magelang



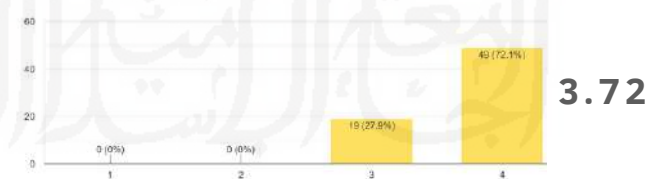
Konsep ruang publik utama di Balai
Kota



Konsep ruang publik representatif



Konsep ruang publik sekunder pada
Balai Kota



Konsep ruang publik yang terbuka
untuk rakyat



Konsep ruang publik tersier di Balai
Kota



Rata-rata tingkat
preferensi sampling
masyarakat dengan
pendekatan populer

3.72/4.00

kategori: Baik-sangat
baik

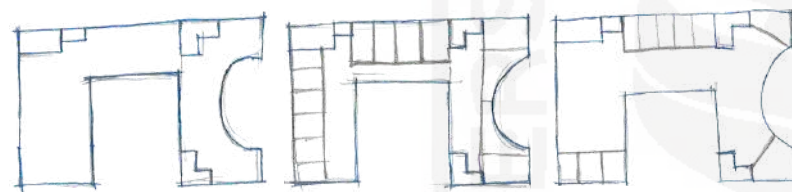
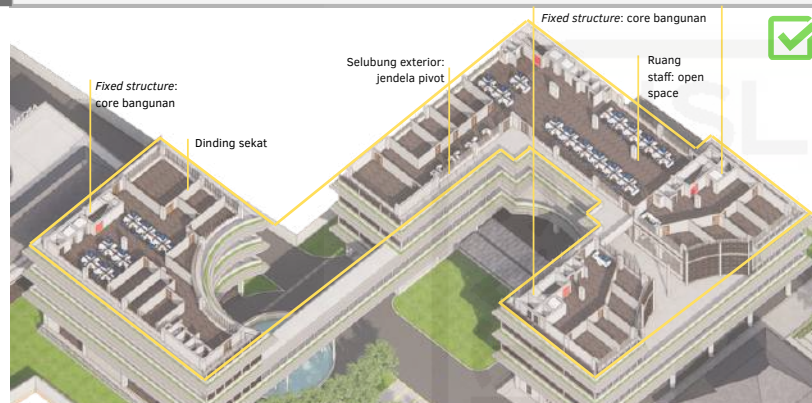


HASIL PENILAIAN
DAN PENDAPAT
RESPONDEN

4.3. PEMILIHAN ALTERNATIF RANCANGAN

Menggunakan metode verifikasi *stakeholders*, alternatif desain ditunjukkan untuk dipilih alternatif terbaik berdasarkan preferensi masing-masing *stakeholders*. Hasil menunjukkan alternatif yang dipreferensikan oleh mayoritas *stakeholders* adalah sebagai berikut:

1 Afirmasi konsep fleksibilitas ruang interior



Open plan Kebutuhan sekarang Kebutuhan nanti?

2 Pemilihan hubungan antargedung (eksterior)

Alternatif 2



Gedung OPD dan Kantor Walikota terkoneksi dengan jembatan penghubung sehingga memudahkan koordinasi antarbirokrat dan meningkatkan aksesibilitas antargedung.

3 Pemilihan zona publik dan kejelasan orientasi

Alternatif 1



Ruang publik utara dan selatan bebas diakses oleh publik untuk beraktivitas

4 Aksesibilitas dan sirkulasi

Alternatif 2



Karena berada pada massa pemerintahan, diperlukan pembatasan akses sirkulasi jalan dengan pemberian portal dan pos pengamanan pada bagian depan

5 Citra identitas kota dalam muka utama bangunan



Alternatif 3 Gabungan citra kebudayaan lokal Jawa dan riwayat heritage kolonial yang dipadupadankan.



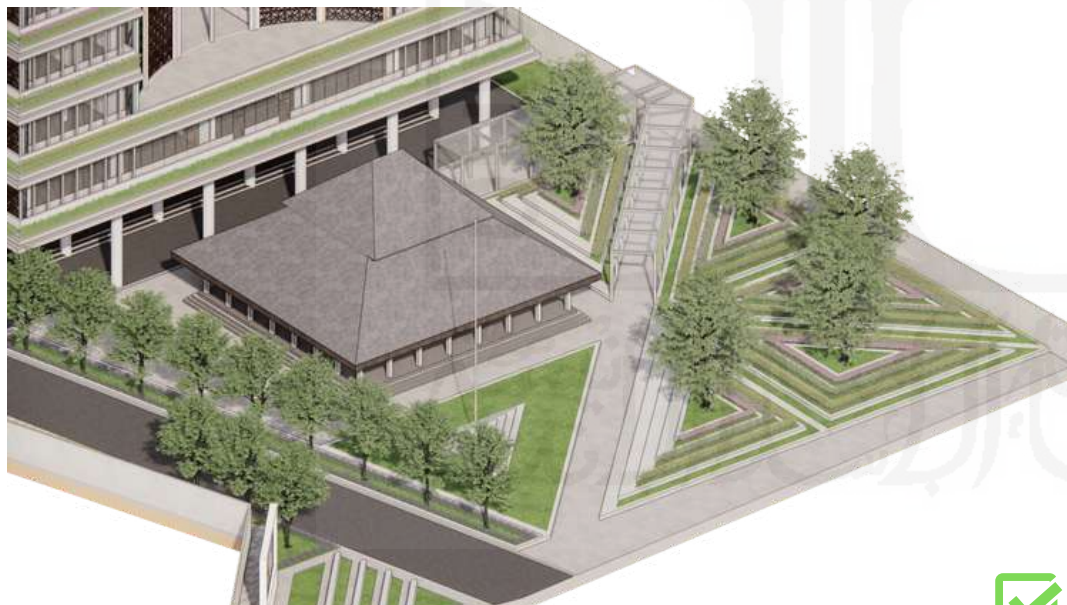
6 Aksen pada gedung ArtMag sebagai citra kota



Alternatif 3 Menambah aksen pada atap berupa gunung yang berasal dari kesenian grebeg getuk magelang yang biasanya membawa gunung getuk jaler dan estri dalam acaranya.



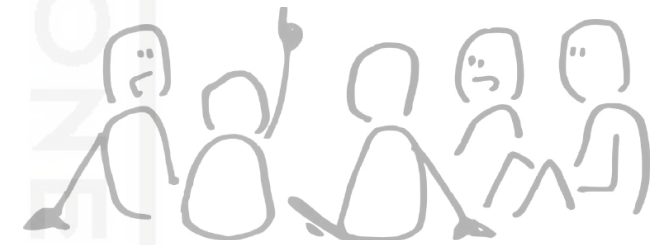
7 Afiriasi Konsep taman bunga *tuin van java*



Taman bunga disusun berundak melambangkan lima gunung yang mengelilingi Kota Magelang (Merapi, Merbabu, Sumbing, Telomoyo, Menoreh) dengan pusat pada undak-undakan tiang bendera sebagai simbol "*pakuning tanah jawa*" Bukit Tidar Magelang

4.4. GALERI KEGIATAN PARTISIPATORIS

Lampiran foto dokumentasi dengan *para stakeholders* saat melakukan kegiatan uji desain. Kegiatan partisipatoris menjadi salah satu peran advokasi *bureucratic-active* dengan tendensi untuk melayani komunitas terhadap ketertarikan prinsip politisnya (rezaei, 2020), dalam hal tersebut masyarakat Kota Magelang yang demokratis.



4.5. UJI DESAIN NORMATIF

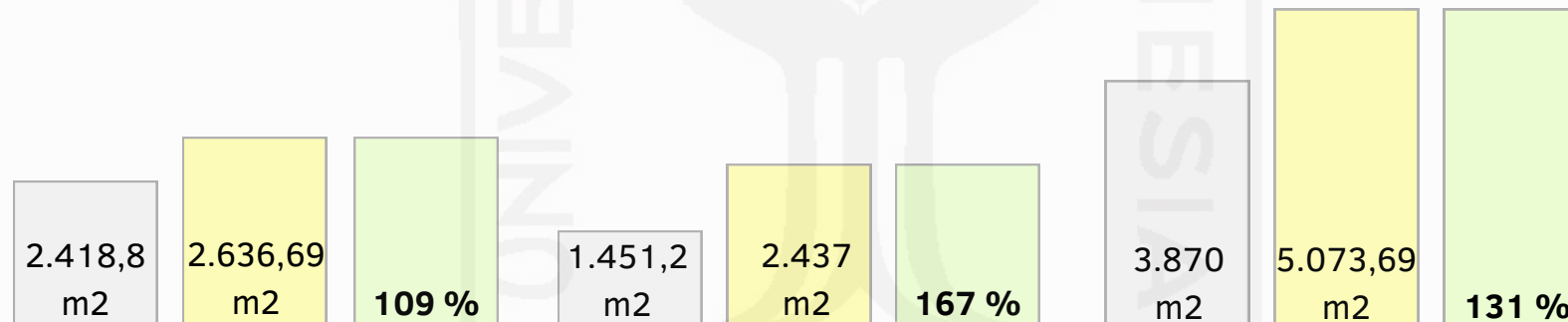
Melakukan uji desain berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku (PP No. 16 tahun 2021)

KETERCAPAIAN KEBUTUHAN RUANG

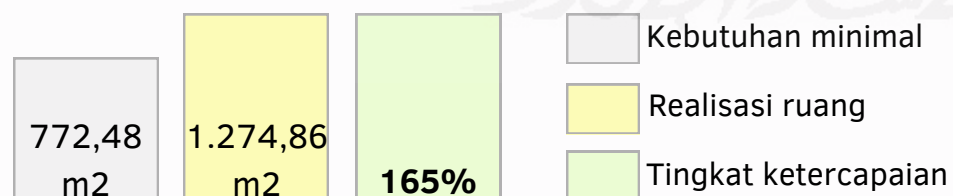
Total luasan gedung	Luas Realisasi Ruang (m2)
Kepegawaian (Staff)	2,437.00
Ruang pejabat struktural	2636.69
Ruang penunjang	1274.86
Basement	4920
Lobby gedung utama	1032
R. Pleno	198
Rooftop gedung utama	494
Lobby gedung OPD	540
Galeri UMKM	575
Galeri Kesenian	575
R. Infrastruktur	576
TOTAL	15,258.55



xlsx. data
kebutuhan
ruang detail



Ruangan Utama Pejabat Struktural + Ruangan Staff = Total ruang kepegawaian



Ruang penunjang

Acuan:



PP No. 16
tahun 2021



Data
DPUPR
Kota
Magelang

Perhitungan Kebutuhan Ruang

NO	OPD	JML BIDANG (ruang)	JML PEGAWAI (ORANG)	THL (ORANG)	TOTAL PEGAWAI (ORANG)	KETERANGAN	Standar per orang (m2)	(m2)	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	31	2	33		10.00	330.00	DATA: DPUPR KOTA MAGELANG
2	Sekretariat Daerah	10	145	50	195		10.00	1.950.00	
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	29	12	41		10.00	410.00	
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5	47	38	85		10.00	850.00	
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3	24	33	57	terpisah	10.00	570.00	
6	Dinas Kesehatan	3	44	7	51	terpisah	10.00	510.00	
7	Inspektorat Daerah	4	30	3	33		10.00	330.00	
	SKEMA 1: TOTAL KESELURUHAN		350	145	495			4.950.00	
	SKEMA 2: OPD PRIORITAS				367			3.670.00	

	KEBUTUHAN RUANG	RUANG BIDANG+SEKRETARIAT (RUANG)	JUMLAH PEGAWAI/RUANG (ORANG)	Luasan minimal (m2)	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	11	330.00	DATA: DPUPR KOTA MAGELANG
2	Sekretariat Daerah	11	18	1.950.00	
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	8	410.00	
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6	14	850.00	
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4	14	570.00	
6	Dinas Kesehatan	4	13	510.00	
7	Inspektorat Daerah	5	7	330.00	

Nd.	Ruang Utama	Klasifikasi kebutuhan	Luasan (m2)	Kebutuhan	Total	Realisasi (m2)	Keterangan	
1	Ruang pimpinan tinggi utama (1A): Walikota	ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 5 (lima) orang, ruang simpan, dan ruang toilet	117	1	117	123.1	-	ACUAN NORMA: KEBUTUHAN RUANG PEJABAT STRUKTURAL (NORMATIF BERDASAR PP NO. 16 TAHUN 2021)
2	Ruang pimpinan tinggi madya setara eselon (1b) atau yang setingkat (Wakil Walikota)	ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet	83.4	1	83.4	104.73	-	
3	ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon IIa (SEKDA)	ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet	74.4	1	74.4	74.9	-	
4	ruang pimpinan tinggi pratama setara eselon IIb atau yang setingkat	ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua) orang, ruang simpan, dan ruang toilet	62.4	10	624	660	per ruang pejabat eselon IIB ±66 m2	
5	ruang administrator setara eselon IIIa atau yang setingkat	ruang kerja, ruang tamu, ruang sekretaris, dan ruang simpan	24	17	408	467.16	per ruang pejabat eselon IIIA ±27.48 m2	
6	ruang administrator setara eselon IIIb atau yang setingkat	ruang kerja, ruang tamu, dan ruang simpan	21	44	924	1012	per ruang pejabat eselon IIIb ±23 m2	
7	ruang pengawas setara eselon IV atau yang setingkat	ruang kerja, ruang staf untuk 4 (empat) orang, dan ruang simpan	18.8	10	188	194.8	per ruang pejabat eselon IV ±19.48 m2	
TOTAL RUANGAN UTAMA PEJABAT STRUKTURAL					2418.8	2636.69	Terpenuhi 109%	
RUANGAN STAFF (OPEN PLAN OFFICE AREA)					1,451.20	2,437.00	Terpenuhi 167%	
TOTAL					3,870.00	5073.69	Terpenuhi 131%	

Ruang penunjang	Klasifikasi kebutuhan	Standar (m2)	Jumlah	Luas ruang minimal	Realisasi (m2)	Keterangan	
Ruang rapat utama pimpinan tinggi utama atau pimpinan tinggi madya setara eselon I atau yang setingkat	kapasitas 75 (tujuh puluh lima) orang	90	1	90	295.82	100,47 m2 ruang rapat pimpinan 195,35 m2 ruang pleno	
Ruang rapat utama pimpinan tinggi pratama setara eselon II atau yang setingkat	kapasitas 30 (tiga puluh) orang	40	7	280	319	per ruang ± 53 m2 (Gedung Utama) per ruang + 40 m2 (Gedung OPD)	
Ruang studio	10% dari staff	4	38.7	154.8	39	Tidak terlalu dibutuhkan dan tidak urgent	
Ruang arsip	seluruh staff	0.4	387	154.8	212	Lantai 5 gedung utama	
Toilet	per 25 orang (pemakai pejabat administrator, pengawas, staff)	2	15.48	30.96	235	5+3 difabel per lantai pada gedung utama 1+1 difabel per lantai pada gedung OPD	
Musala	20% dari jumlah personel	0.8	77.4	61.92	174.04	84,23 m2 gedung Sakda 89,81 m2 gedung OPD	
TOTAL					772.48	1274.86	Ketercapaian 165% dari ketentuan minimum luasan ruang

ACUAN NORMA:
KEBUTUHAN RUANG
PENUNJANG (NORMATIF
BERDASAR PP NO. 16
TAHUN 2021)

Kapasitas parkir total (basement dan lansekap)	20% total staff	18	77.4	1393.2	2254.5	Mobil 107 unit Motor 219 unit
Basement (termasuk kapasitas parkirnya)	1640/ basement	4920	m2 (total 3 basement dan kapasitas parkirnya (74 mobil dan 140 motor))			

Ruang Lain	Luasan ruang (m2)	Acuan
Lobby gedung utama	1032	Asumsi
Rooftop gedung utama	494	
R. Pleno	198	
Lobby gedung OPD	540	
Galeri UMKM	575	
Galeri Kesenian	575	
R. Infrastruktur	576	
Lanskap (perkiraan)	11853	

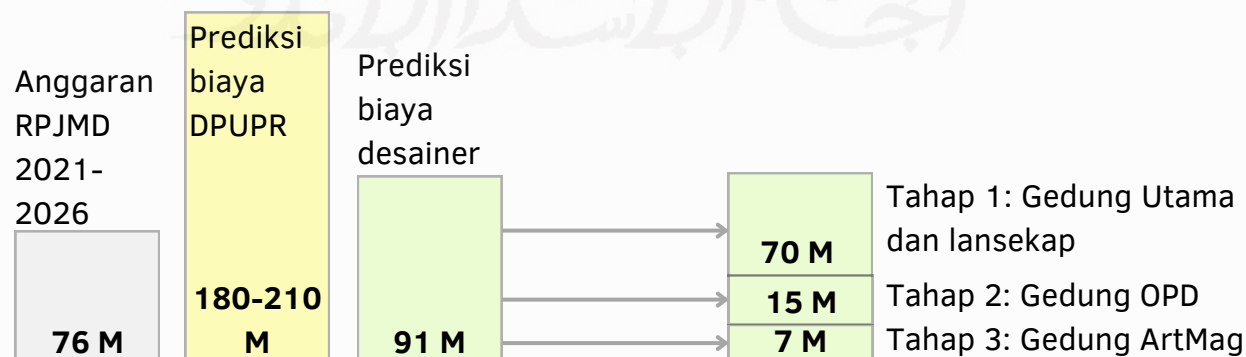
PRAKIRAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN



Prakiraan biaya gedung utama walikota-sekda	Prakiraan biaya gedung OPD	Prakiraan biaya gedung ArtMag	Prakiraan biaya pekerjaan lansekap	Keterangan
11,408.55	2700	1150	11853	m2
Rp62,747,025,000	Rp14,850,000,000	Rp6,325,000,000	Rp6,519,150,000	rupiah
Rp90,441,175,000				Total

SHBJ BGN tertinggi per m2: Rp 5.550.000

Acuan: RPJMD
(2021-2026)
dan SHBJ Kota
Magelang

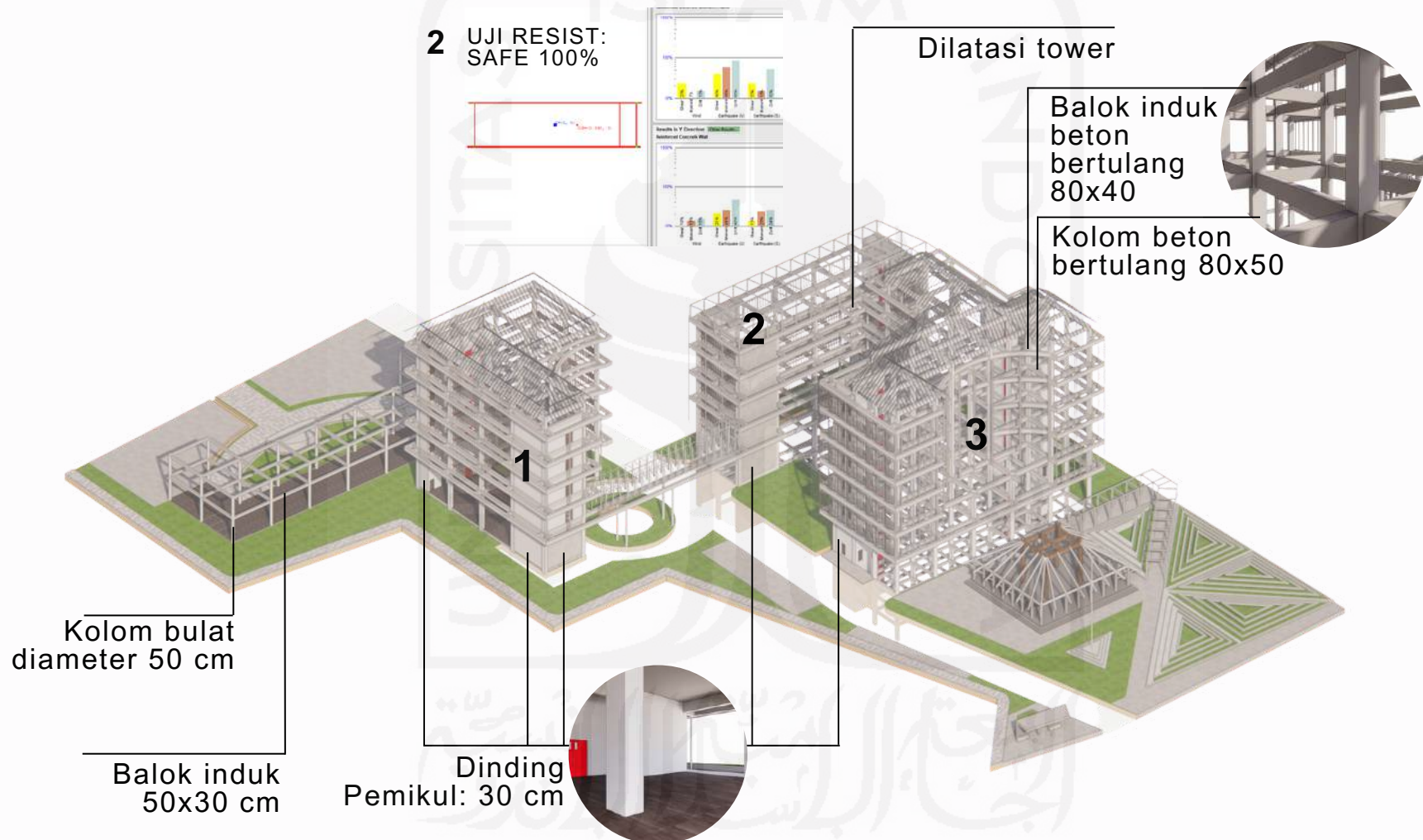


KELAYAKAN STRUKTUR

Kelayakan struktur bangunan berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021 pasal 55 direpresentasikan dengan keberhasilan 100% uji resist struktur bangunan

Pasal 55

- (1) Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d di atas dan/atau di dalam tanah dan/air dan/atau prasarana atau sarana umum, harus direncanakan mampu memikul semua jenis beban dan/atau pengaruh luar yang mungkin bekerja selama kurun waktu umur layan struktur.



1 UJI RESIST: SAFE 100%

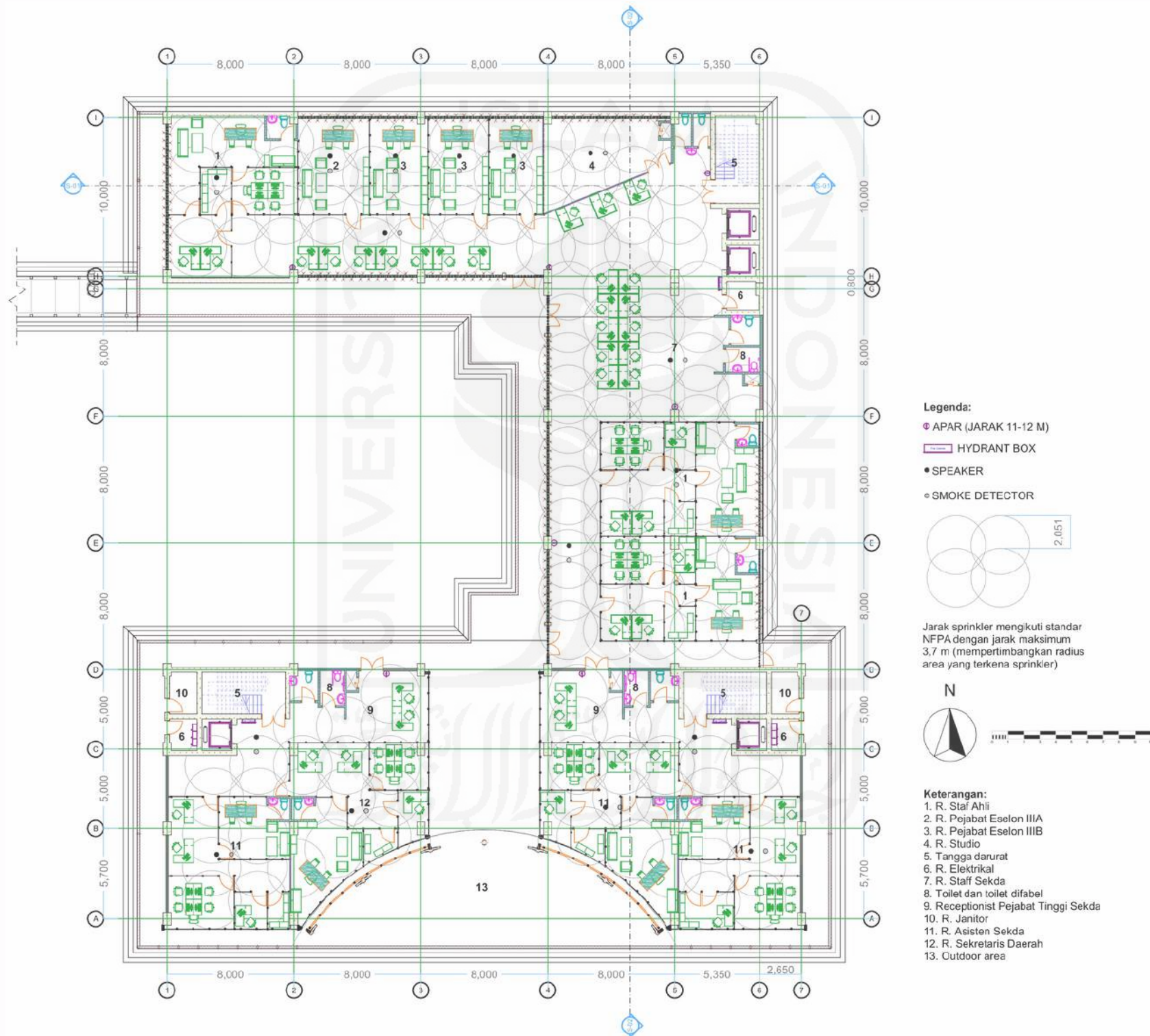


3 UJI RESIST: SAFE 100%

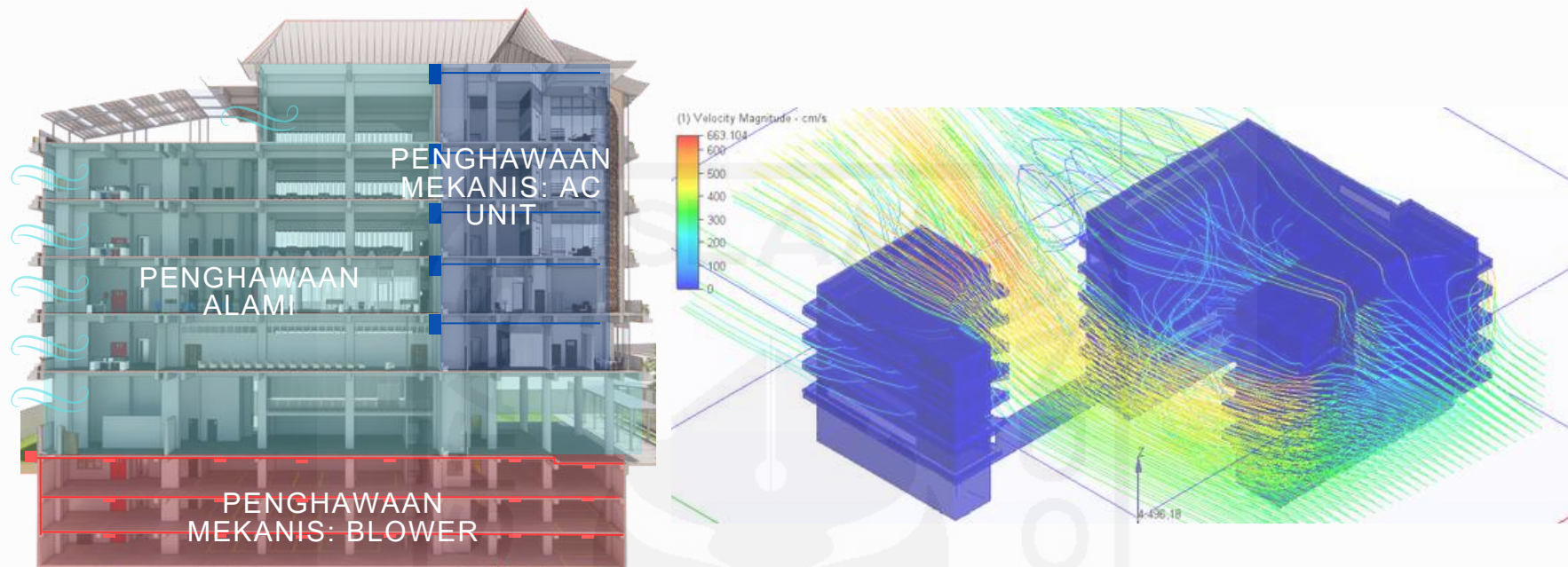


KETERCAPAIAN KELAYAKAN INFRASTRUKTUR

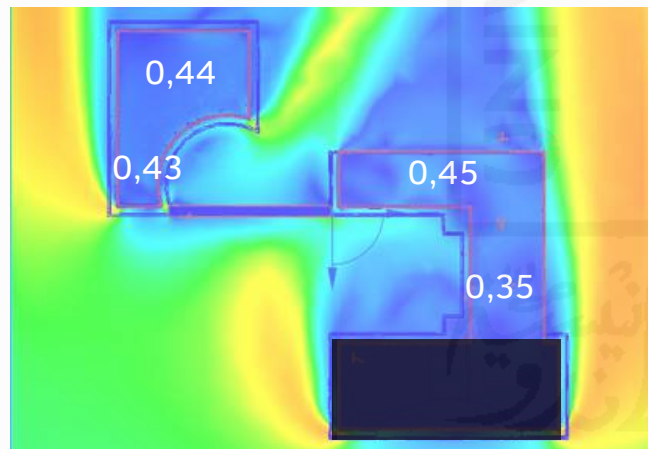
Kelaikan sistem keselamatan bangunan berdasarkan PP
No.16 Tahun 2021 pasal 54 pada gedung



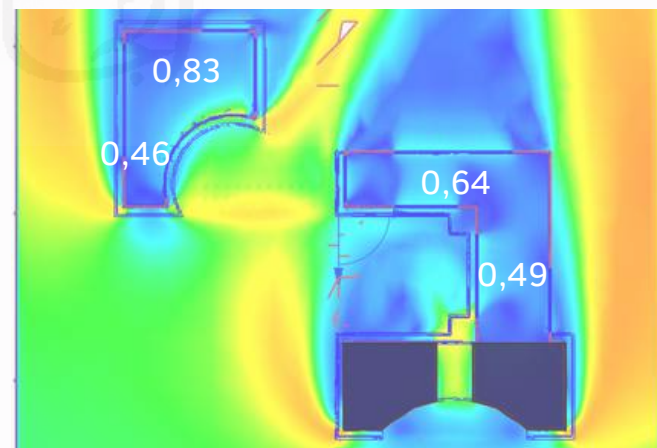
KETERCAPAIAN TINGKAT KENYAMANAN TERMAL



Dilakukan uji penghawaan alami dengan Autodesk CFD dengan potensi angin terbesar dari selatan sebesar 3.04 m/s. Penilaian kenyamanan berdasarkan teori Lippsmeier (1997) dimana kecepatan angin 0,25-1,00 m/s tergolong nyaman secara termal.



Pada zona lantai 1 yang tidak terdapat bolongan tengah, kecepatan angin berkisar 0,35-0,45 m/s dan tergolong nyaman secara termal

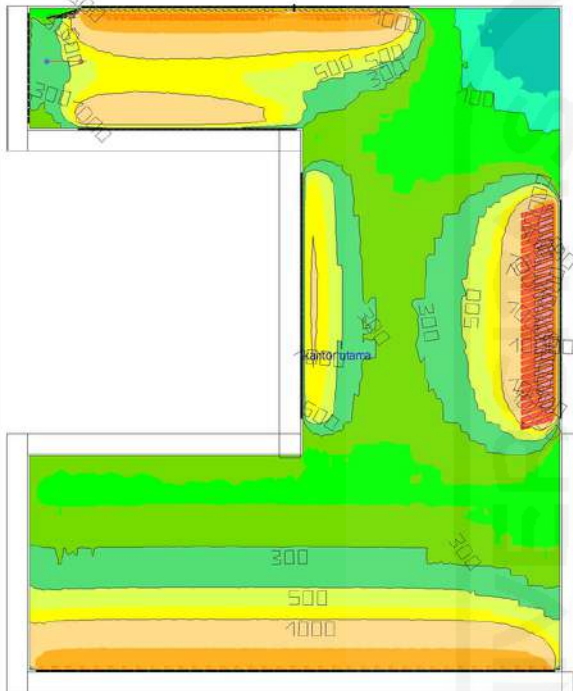


Pada zona lantai tipikal yang terdapat bolongan tengah, kecepatan angin berkisar 0,46-0,83 m/s yang lebih nyaman secara termal

KETERCAPAIAN TINGKAT KENYAMANAN VISUAL

Kenyamanan visual pada bangunan direpresentasikan menggunakan simulasi software dialux untuk menguji tingkat pencapaian pencahayaan alami. Berdasarkan SNI 03-6197-2000 rata-rata dari standar kenyamanan visual pada ruang kerja adalah 350 lux (target pencapaian)

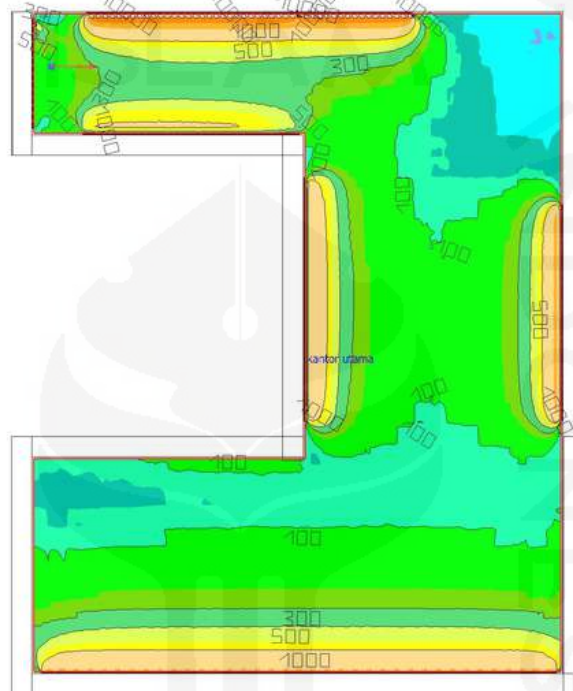
Pukul 08.00



Area diatas 350 lux=
588,4 m2
Area= 1400 m2

Persentase=
42 %

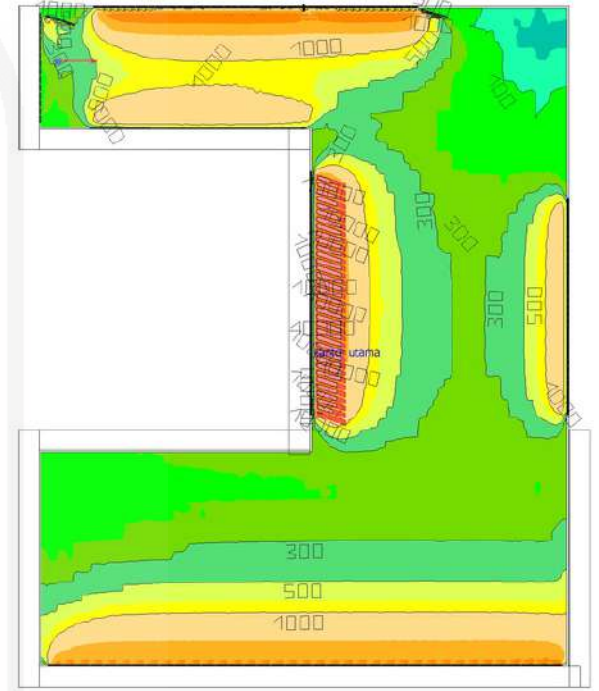
Pukul 12.00



Area diatas 350 lux=
311,05 m2
Area= 1400 m2

Persentase=
22 %

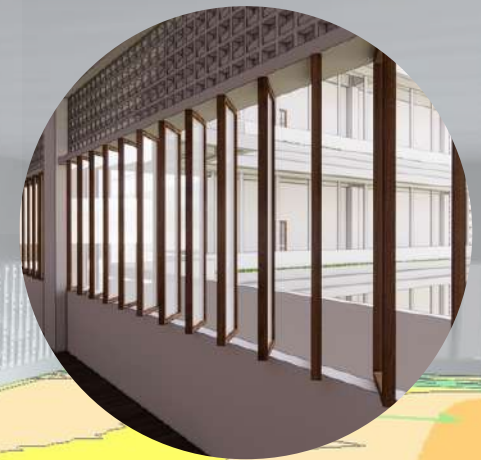
Pukul 15.00



Area diatas 350 lux=
595,8 m2
Area= 1400 m2

Persentase=
43 %

Model jendela pivot dimensi
0,5x2 pada ketinggian 1.1 m



KETERCAPAIAN TINGKAT EFISIENSI ENERGI

Efisiensi energi selain dirancang pada bangunan kantor yang mayoritas menggunakan sistem penghawaan alami, pada gedung kantor utama yang menggunakan sistem penghawaan mekanis AC unit, nilai OTTV dihitung sebagai prasyarat (dimana nilai OTTV harus <35 watt/m²).

BUILDING ENVELOPE COMPLIANCE FORM V2.0

PERSYARATAN

Nilai Overall Thermal Transfer Value (OTTV) untuk bangunan tidak boleh melebihi 35 Watts/m²

Project name : BALAI GATHUK: BALAIKOTA MAGELANG

Address : J. Aduh-Alun Utara No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah
50117

No	Side	Konduksi melalui Dinding	Konduksi melalui Bukaan	Radiasi melalui Bukaan	Total	Total Area Fasad	OTTV
		Watt	Watt	Watt	Watt	m ²	Watt/m ²
		A	B	C	D = A+B+C	E	D / E
1	UTARA	6.818,65	384,38	1.454,12	8.657,15	407,15	21,26
2	TIMUR LAUT	-	-	-	-	-	-
3	TIMUR	9.929,53	1.279,20	4.159,29	15.368,02	628,00	24,47
4	TENGGARA	-	-	-	-	-	-
5	SELATAN	2.598,75	8.128,66	21.250,50	31.977,91	961,30	32,26
6	BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-
7	BARAT	7.859,25	1.279,20	9.024,17	18.162,62	628,00	28,92
8	BARAT LAUT	-	-	-	-	-	-
		27.206,19	11.071,44	35.888,08	74.165,70	2.654,45	27,94
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL

COMPLY? **YES**

No	Side	Total Area Bukaan	WWR
		m ²	(%)
		F	F / E
1	UTARA	18,75	4,61
2	TIMUR LAUT	-	-
3	TIMUR	62,40	9,94
4	TENGGARA	-	-
5	SELATAN	396,52	40,00
6	BARAT DAYA	-	-
7	BARAT	62,40	9,94
8	BARAT LAUT	-	-
		540,07	20,35
		TOTAL	TOTAL

Nilai OTTV: 27,94 WATT/M2
WWR (AVG): 20,35%



Pemasangan panel surya pada rooftop gedung utama

510 panel surya
kapasitas 100 wp

Prediksi penghasilan energi: 51.000 w atau (51kw)



File perhitungan
OTTV (xlsx)

Strategi pengurangan nilai OTTV:

- Orientasi bukaan kaca diletakkan pada fasad selatan (curtain wall)
- Fasad selatan yang menggunakan curtain wall menggunakan glass back panel insulation
- Menghindari bukaan pada bagian fasad barat dan timur bangunan
- Menggunakan secondary skin berupa batik motif kawung dengan dimensi 1x1x0,2 m
- Pemilihan kaca dengan nilai SHGC rendah (sunenergy 0,8 mm) dimana masih dimungkinkan penurunan nilai OTTV dibawah 25 watt/m² jika menggunakan kaca stopray vision 31T yang memiliki nilai SHGC terendah (0,19)

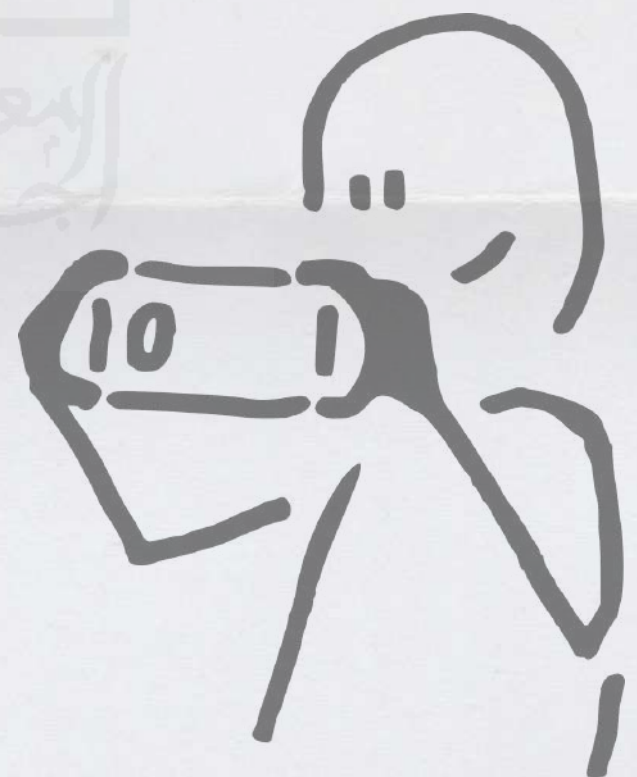
5. HASIL RANCANGAN



VIDEO
ANIMASI



YOUTUBE



5.1. PERSPEKTIF MUKA DEPAN BALAI KOTA



BIMX

LOKASI

Jl. Alun-Alun Utara No.2, Magelang,
Kec. Magelang Tengah, Kota
Magelang, Jawa Tengah 56117



5.2. PERSPEKTIF TAMPAK BELAKANG BALAI KOTA



BIMX

LOKASI

Jl. Alun-Alun Utara No.2, Magelang,
Kec. Magelang Tengah, Kota
Magelang, Jawa Tengah 56117



5.3. TAMPAK ORTOGONAL BANGUNAN BALAI KOTA



Tampak timur



Tampak barat



Tampak utara

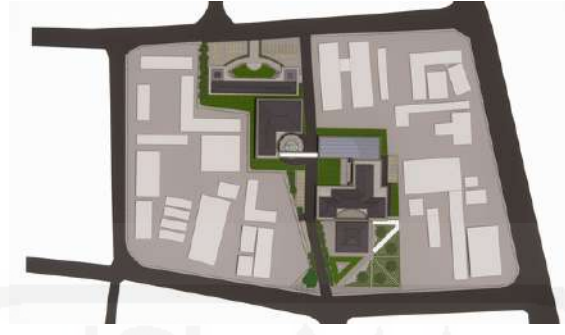


Tampak selatan

5.4. SITUASI BALAI KOTA



Pagi 08.00



Siang 12.00



Sore 15.00

Balai kota dengan ruang publiknya yang lebih teduh dan kantor eksekutif yang merepresentasikan pemerintahan demokratis serta merakyat

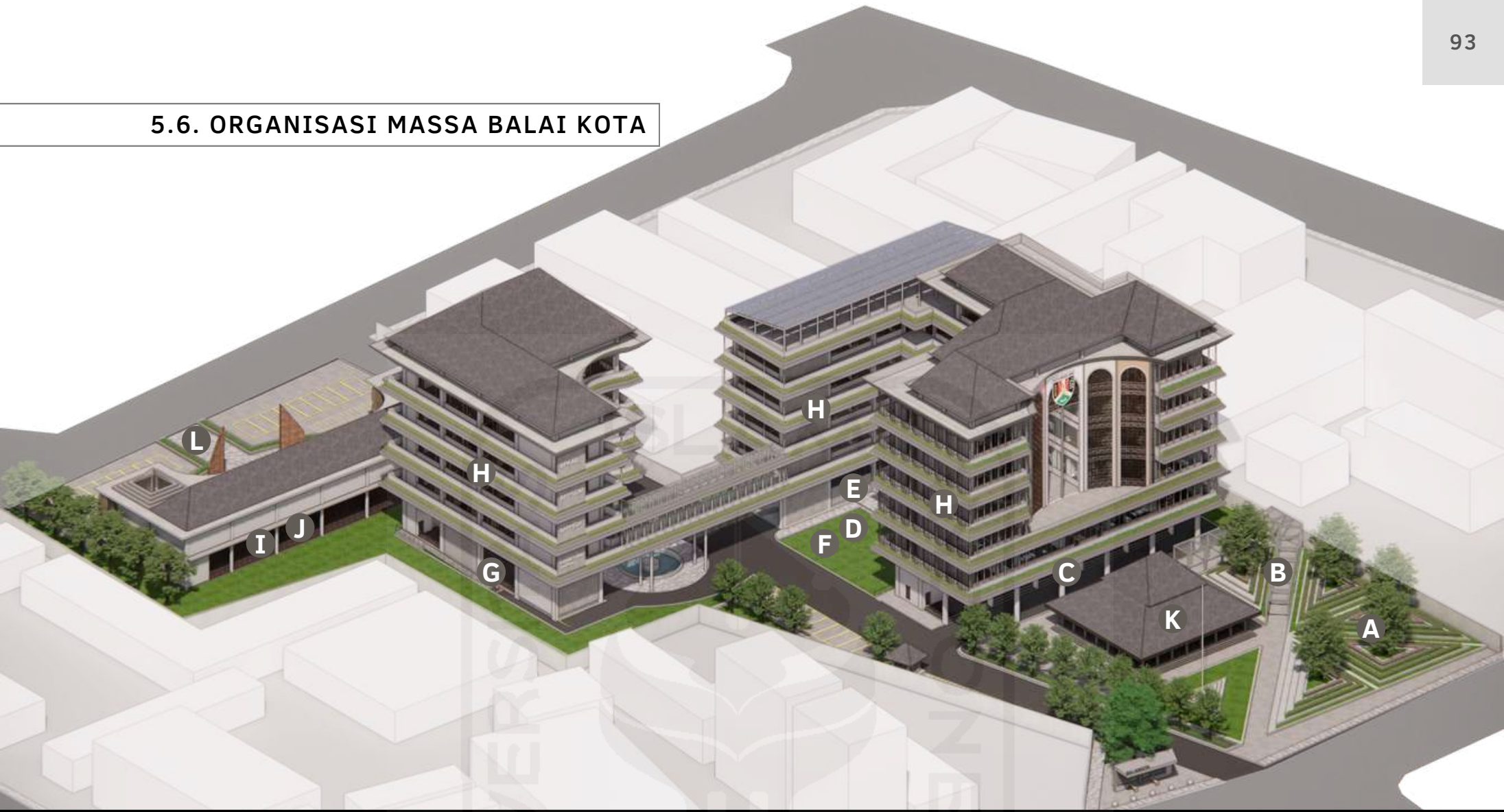


Alun-alun Kota Magelang sebagai ruang terbuka publik luas untuk kegiatan dengan jumlah massa yang banyak

5.5. AXONOMETRI EXPLODED



5.6. ORGANISASI MASSA BALAI KOTA



Keamanan balai kota diakomodir pada pengaturan zoning dimana lantai dasar (GF) digunakan untuk ruang publik dan lantai atas (UF) digunakan untuk keperluan perkantoran. Aksesibilitas ke UF hanya melalui elevator dengan pembatasan akses sehingga ruang birokrat lebih aman terhadap potensi gangguan keamanan.



PRIVAT PUBLIK



Ruang publik selatan: taman bunga *tuin van java*

Sebagai muka depan balai kota, ruang publik selatan merepresentasikan citra *tuin van java* dengan adanya taman bunga yang disusun berdasarkan filosofi identitas Kota Magelang. *Tone* warna bunga disesuaikan dengan warna gethuk trio, pelestarian pendopo menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, penyusunan taman bunga berundak berlandaskan filosofis Magelang sebagai kota yang dikelilingi oleh banyak gunung.



Paviliun *tuin van java* outdoor

Paviliun *tuin van java* menceritakan riwayat historis Kota Magelang sebagai *paradijs van Java* dengan ilustrasi yang memberikan kesan visual menarik sehingga masyarakat tidak jenuh mempelajarinya daripada hanya sekedar tulisan nama latin tanaman atau narasi sejarah yang monoton ditemui pada perancangan instalasi informasi umum pada ruang publik.



Lobby balai kota (gedung utama)

Lobby utama balai kota menjadi tempat penerimaan tamu sekaligus masyarakat yang berkunjung. Selain itu, ruang ini secara tidak langsung juga menjadi tempat pengawasan pengunjung yang mengakses balai kota. Bagian ruang yang terbuka memberi kesan balai kota yang dapat diakses oleh siapapun sehingga tercipta kesan demokratis atau keberpihakan terhadap rakyat.



Ruang pelayanan dan pengaduan

Ruang pelayanan dan perizinan menjadi ruang yang banyak dipreferensikan oleh masyarakat Kota Magelang dalam kuesioner yang disebar. Ruang ini ditempatkan pada bagian utara *lobby* utama dan paling dekat dengan akses parkir publik (parkir *outdoor*). Hal ini sebagai strategi agar pengunjung memiliki akses terdekat dalam mendatangi tempat pelayanan.



Kantin bersama



Lapangan yang teduh untuk apel dan masyarakat



Lobby kantor OPD



Ruang kerja staff

Kantin diletakkan dekat dengan ruang pelayanan dan perizinan sehingga kantin selain mudah diinterpretasi oleh pengunjung juga mudah diakses. Hal ini sebagai strategi sehingga para *tenants* yang berjualan mendapat spektrum pengunjung yang lebih luas (karena tidak hanya berasal dari pegawai kantor) untuk meningkatkan hasil penjualannya.

Pendapat mengenai ruang apel pegawai yang harus teduh diakomodir pada *courtyard* yang teduh karena terletak diantara bangunan tinggi balai kota. Karena kegiatan apel bersifat temporer, lapangan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk duduk santai sehingga letaknya dirancang dekat dengan ruang pelayanan.

Selain berfungsi untuk menerima tamu, *lobby* pada gedung kantor OPD juga secara tidak langsung digunakan untuk mengawasi pengunjung yang mengaksesnya. Selain itu, adanya *microlibrary* pada lobby juga diharapkan berguna untuk sarana edukasi masyarakat sehingga *lobby* OPD dapat hidup sebagai ruang publik yang edukatif.

Berangkat dari koreksi bahwa untuk meningkatkan kinerja antartim sekat kantor harus transparan yang juga menjadi bentuk memudahkan pengawasan, rancangan ruangan staff didesain *open plan* sedangkan ruang para pejabat didesain dengan sekat transparan kaca (*curtain wall*). Hal ini juga digunakan untuk meningkatkan kinerja pencahayaan alami gedung.



Stand UMKM Kuliner Getruk

Berdasarkan penelusuran pendapat, masyarakat meminta adanya ruang UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Uji desain menghasilkan bahwa UMKM yang diakomodir perlu memiliki nilai penting antara Pemkot dan masyarakat. UMKM kuliner getruk menjadi ide untuk mengintegrasikan para penjual getruk yang beragam di Kota Magelang sebagai pusat oleh-oleh. Untuk menarik pengunjung, fungsi ruang berupa instalasi museum dan galeri kesenian ditambah sehingga bangunan tidak memiliki fungsi monoton.



Galeri historis getruk Magelang (museum)

Instalasi museum yang menjelaskan getruk sebagai kuliner khas Kota Magelang diharapkan mampu menarik secara visual pengunjung yang mengakses gedung ArtMag. Hal ini menjadi strategi untuk meningkatkan pengunjung sehingga diharapkan kuliner getruk dapat dipahami, dipelajari, dan dibeli (penyeimbangan nilai sosial sebagai ruang publik dan nilai komersial).



Pendopo existing: untuk masyarakat

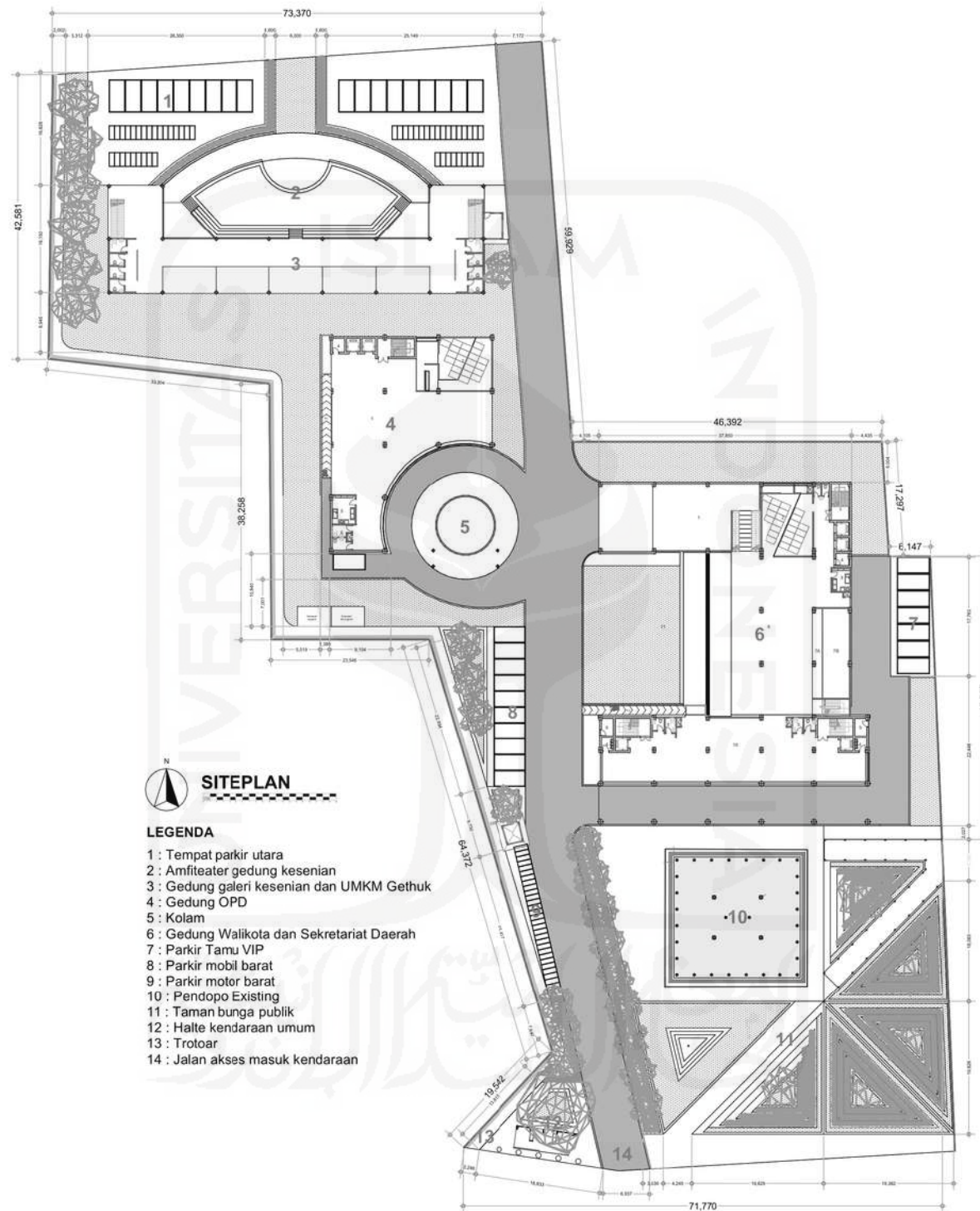
Pelestarian pendopo bagian depan juga berlandaskan pemikiran bahwa pendopo tersebut merepresentasikan jejak historis situs kabupaten kuno. Selain itu, rancangan ini juga mengembalikan fungsi pendopo sebagai ruang menerima tamu dimana tamu yang dimaksud adalah rakyat sehingga pendopo tidak bersifat eksklusif, tetapi terbuka untuk diakses oleh para pengunjung balai kota.



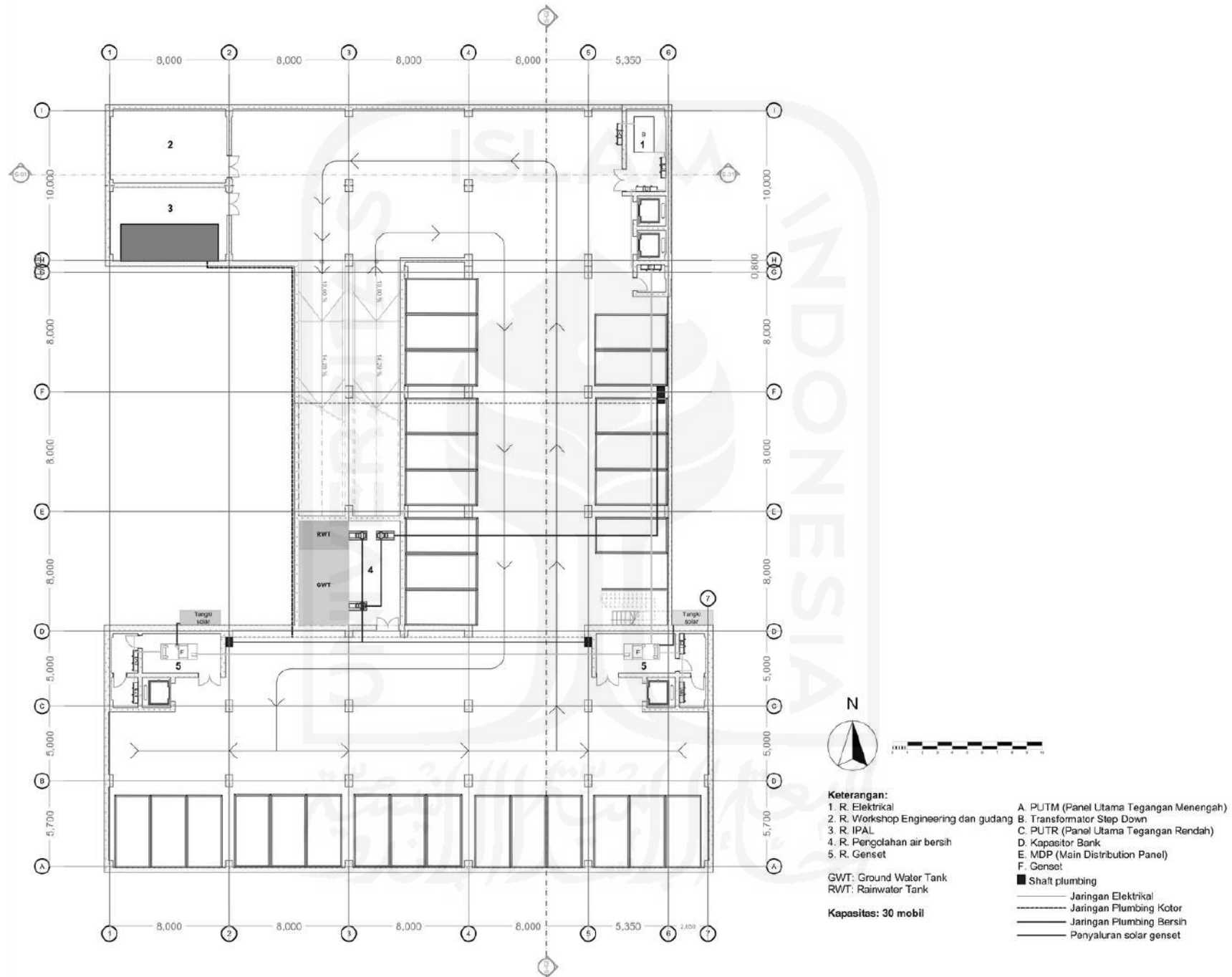
Amfiteater galeri kesenian ArtMag

Bangunan ArtMag menggabungkan fungsi sosial, komersial, dan edukasi-budaya sehingga tercipta bangunan yang tidak monoton dengan harapan pengunjung yang mengaksesnya meningkat. Lantai satu dimanfaatkan sebagai tempat penjualan dan galeri historis getruk, amfiteater didesain sebagai panggung budaya untuk menarik pengunjung dengan penampilan pelaku seni. Lantai dua menjadi galeri kesenian yang dimanfaatkan untuk acara pameran karya seniman Magelang (ruang bersifat *open plan*).

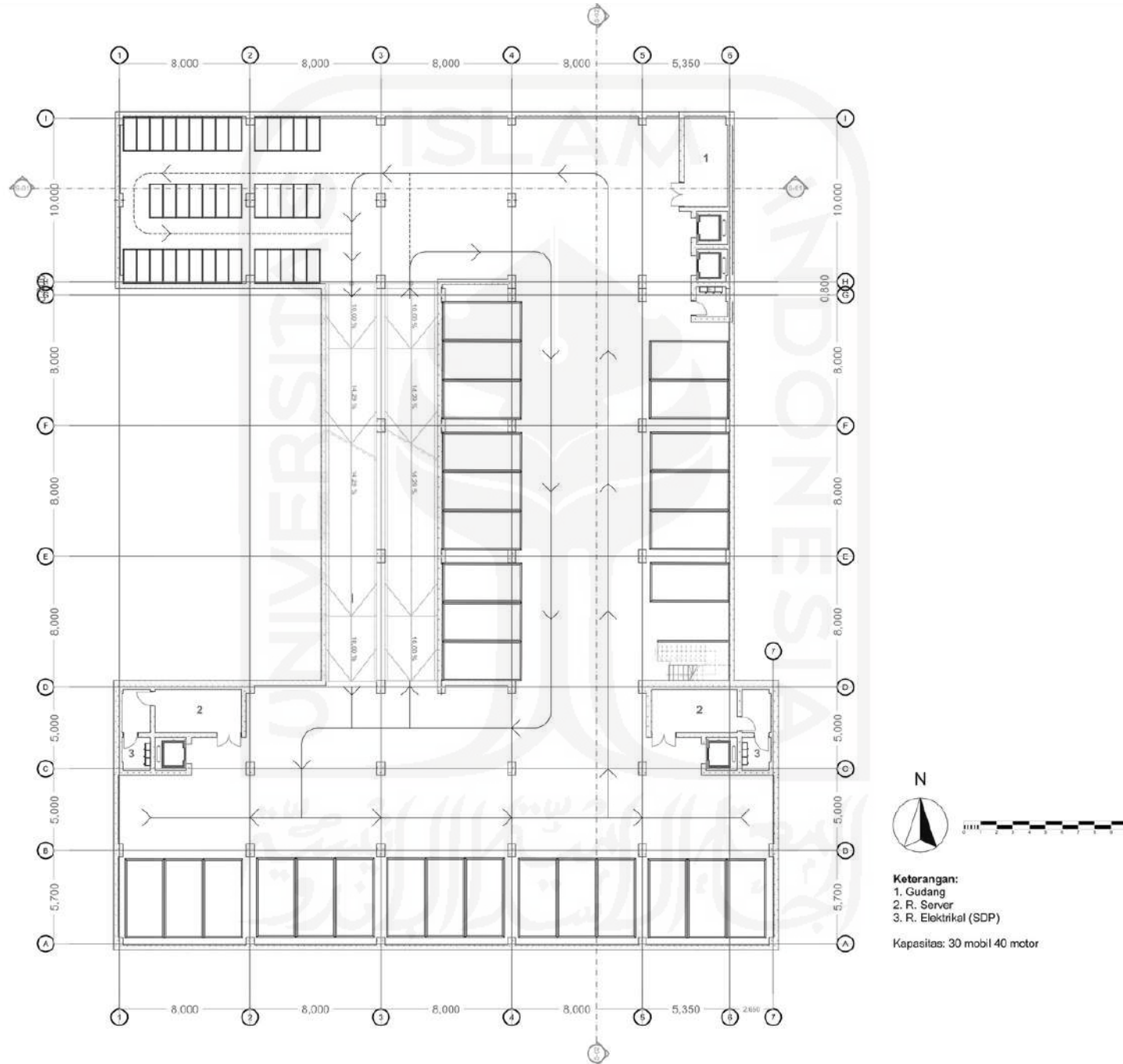
5.7. SITEPLAN BALAI KOTA



5.8. DENAH DENAH BASEMENT 3: GEDUNG UTAMA



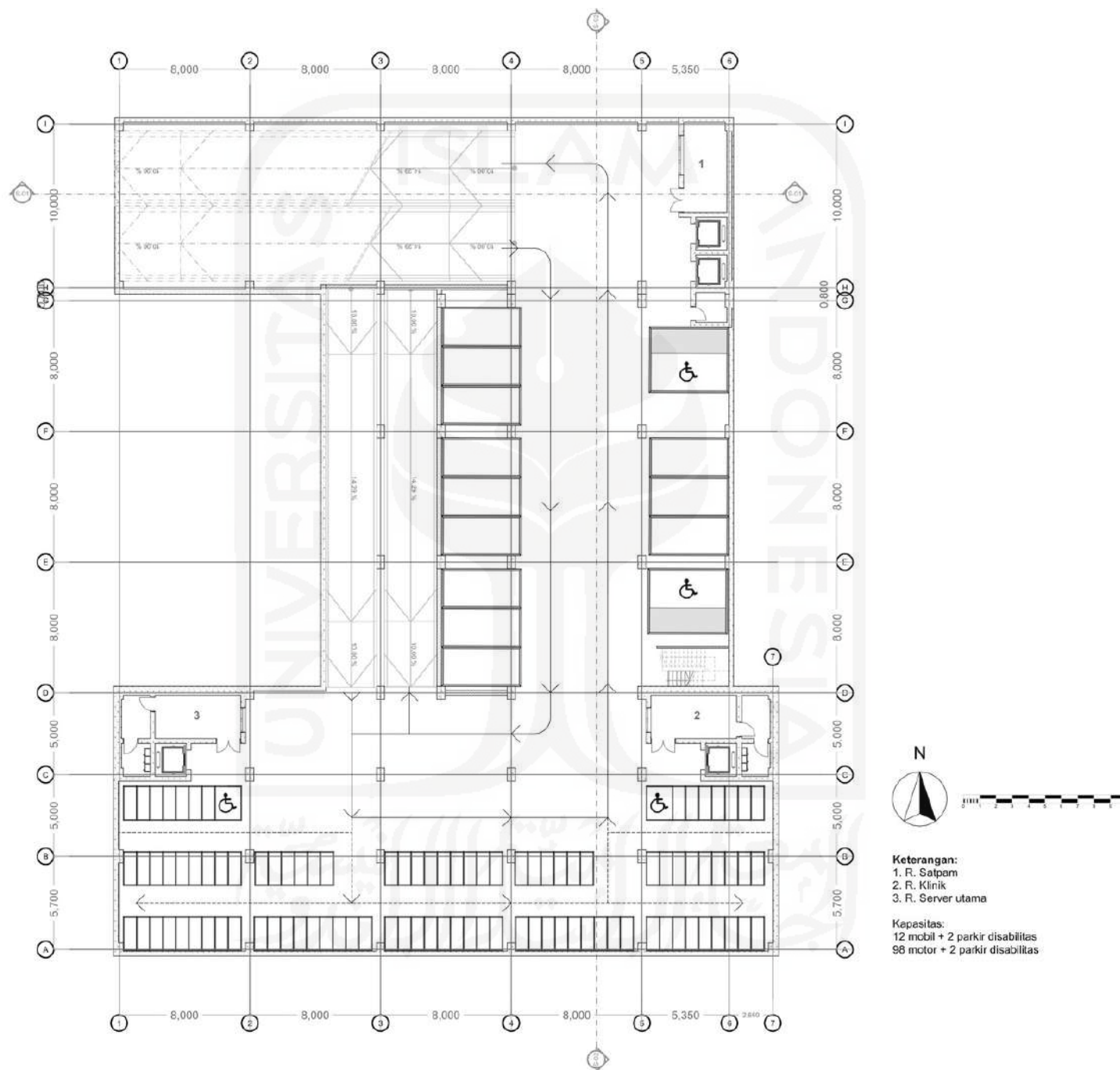
DENAH BASEMENT 2: GEDUNG UTAMA



Dokumen
 Gambar
 Arsitektural



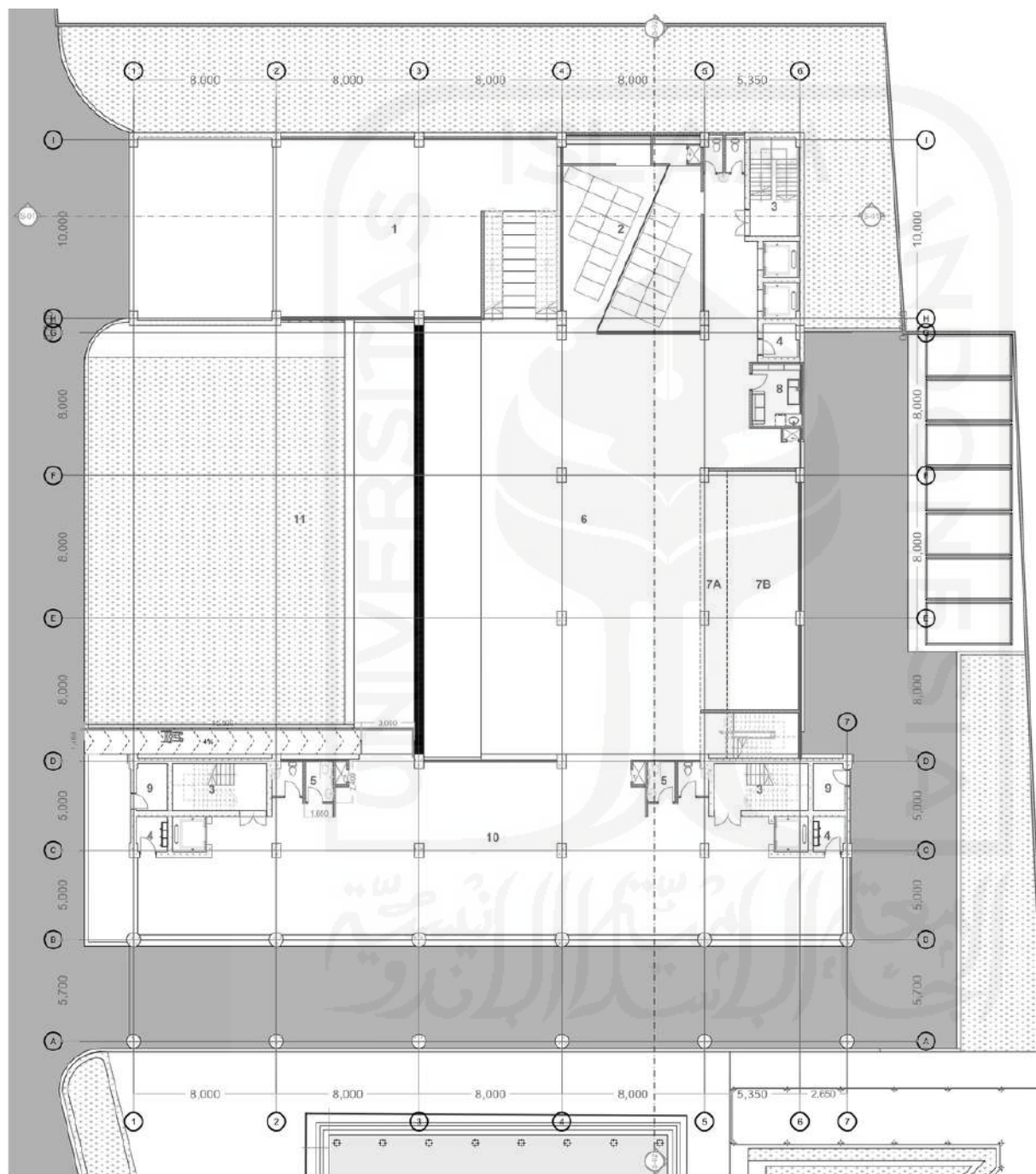
DENAH BASEMENT 1: GEDUNG UTAMA



Dokumen
Gambar
Arsitektural



DENAH GF GEDUNG UTAMA



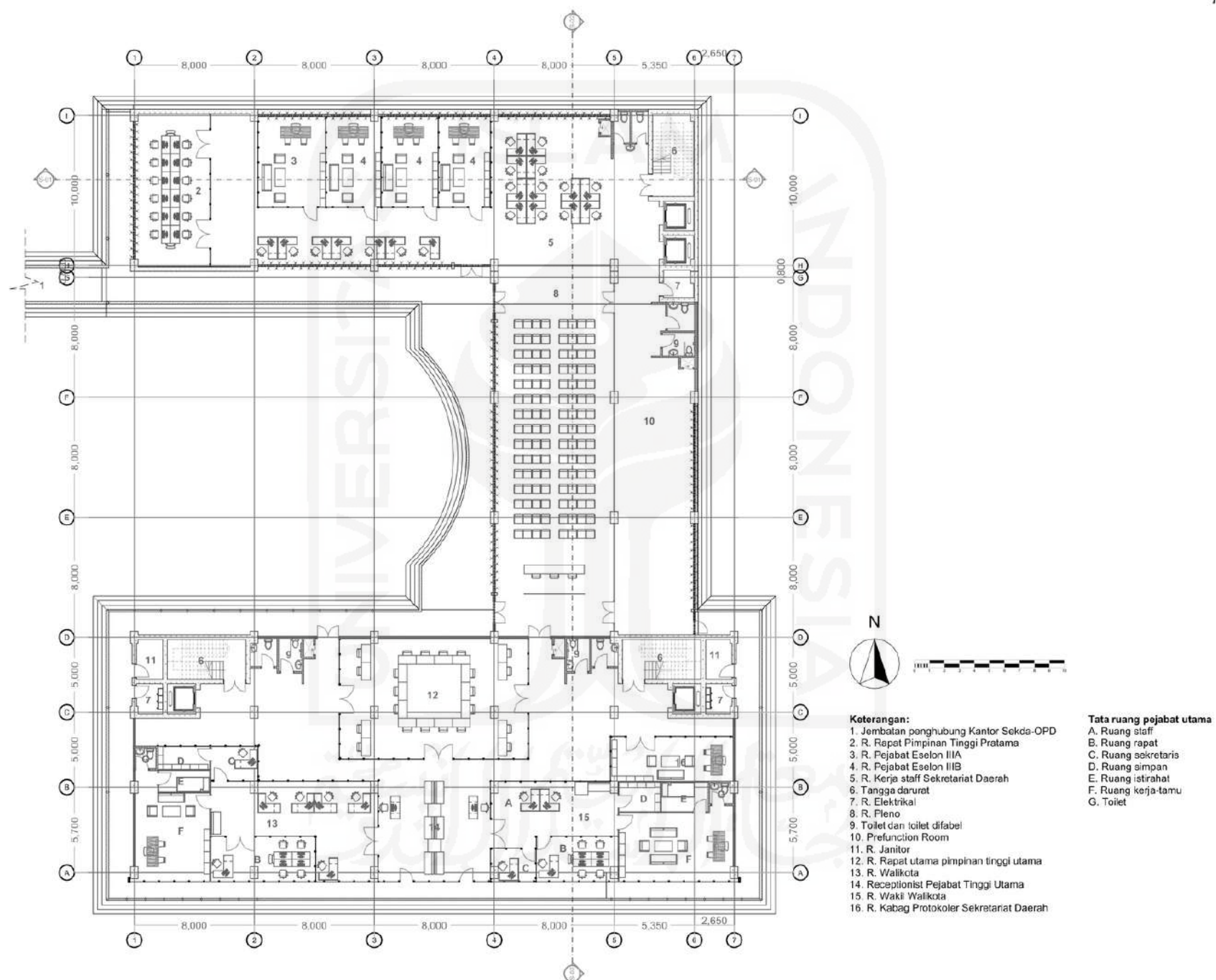
Keterangan:

1. Kantin
2. Musholla
3. Tangga darurat
4. R. Elektrikal
5. Toilet dan toilet dfabel
6. R. tunggu pelayanan
- 7A. R. Pelayanan dan pengaduan
- 7B. Mezzanine: Koperasi
8. R. Laktasi
9. R. Janitor
10. Lobby utama
11. Lapangan Apel Pegawai

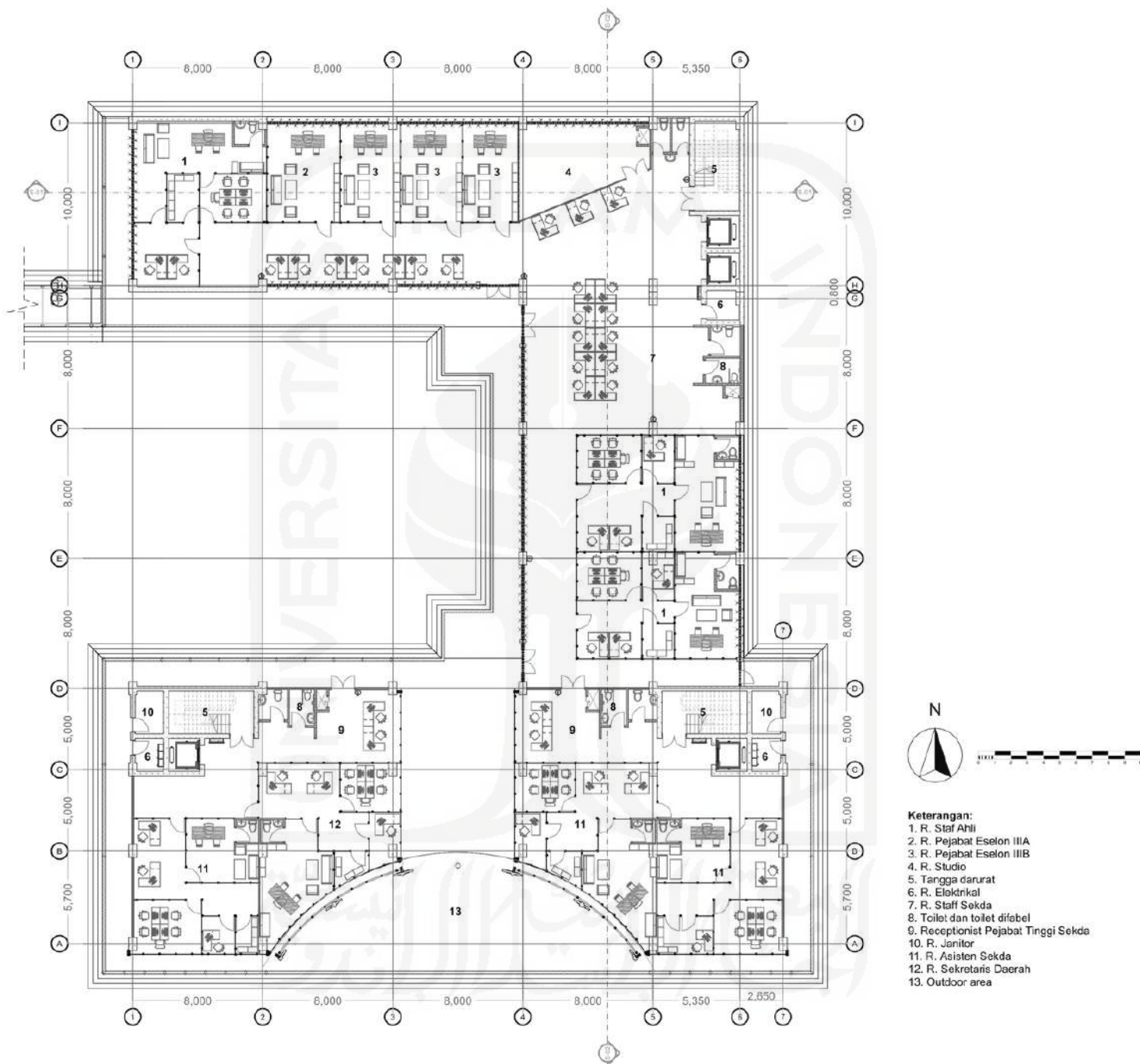
Dokumen
Gambar
Arsitektural



DENAH LT. 1 GEDUNG UTAMA



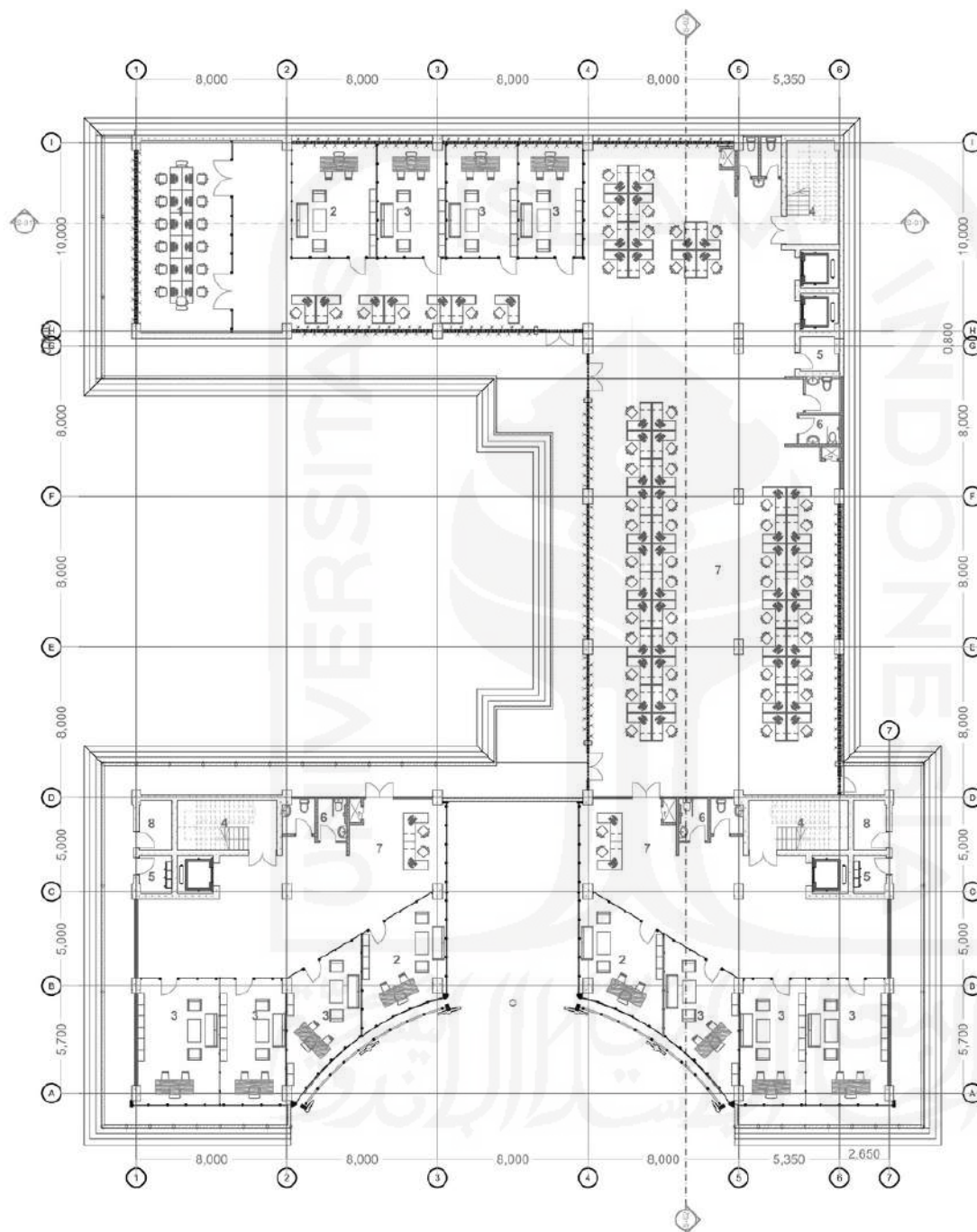
DENAH LT. 2 GEDUNG UTAMA



Dokumen
Gambar
Arsitektural



DENAH LT. 3 GEDUNG UTAMA

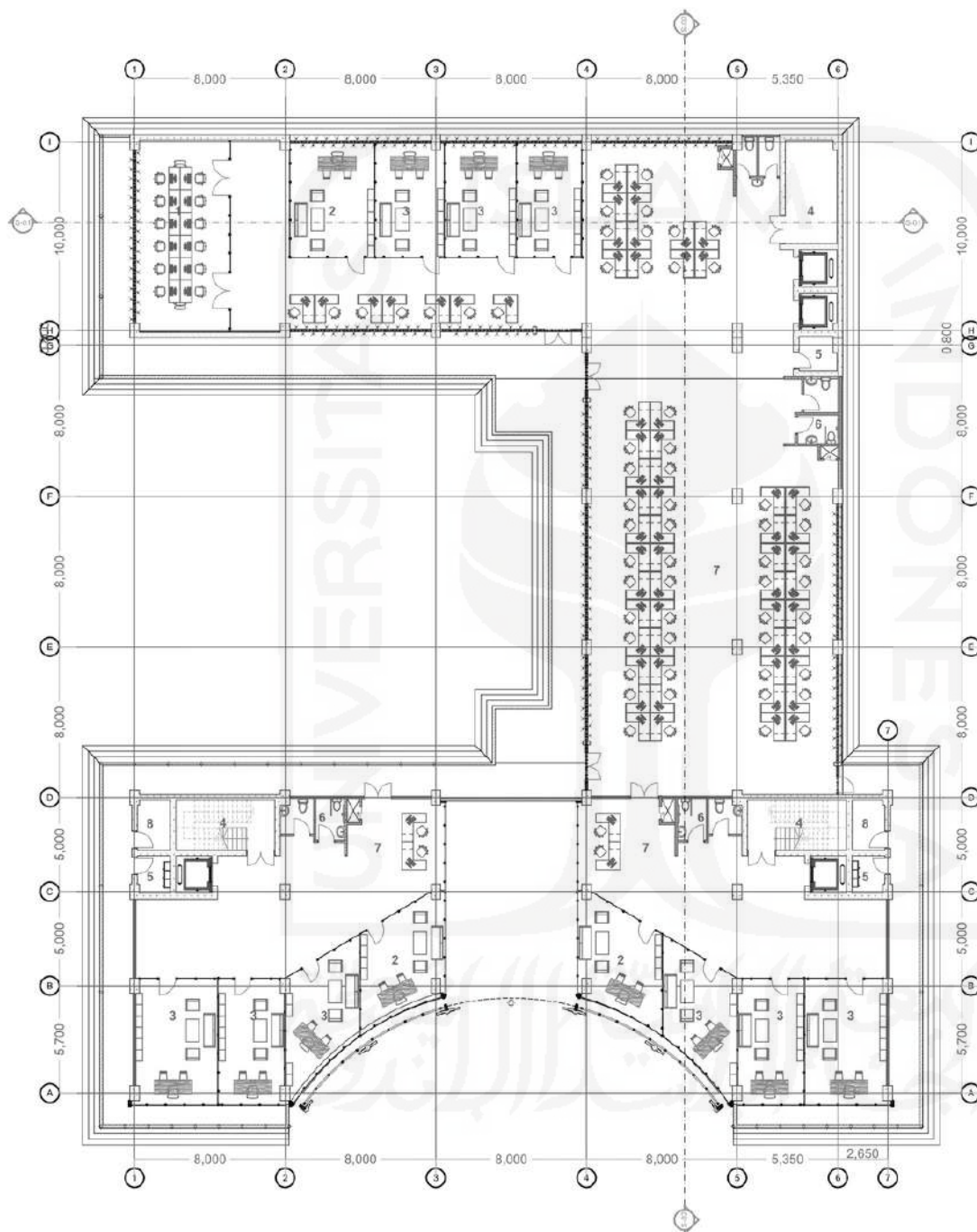


- Keterangan:**
1. R. Rapat Pimpinan Tinggi Pratama
 2. R. Pejabat Eselon IIIA
 3. R. Pejabat Eselon IIIB
 4. Tangga darurat
 5. R. Elektrikal
 6. Toilet dan toilet difabel
 7. R. Staff Sekda
 8. R. Janitor

Dokumen
Gambar
Arsitektural



DENAH LT. 4 GEDUNG UTAMA

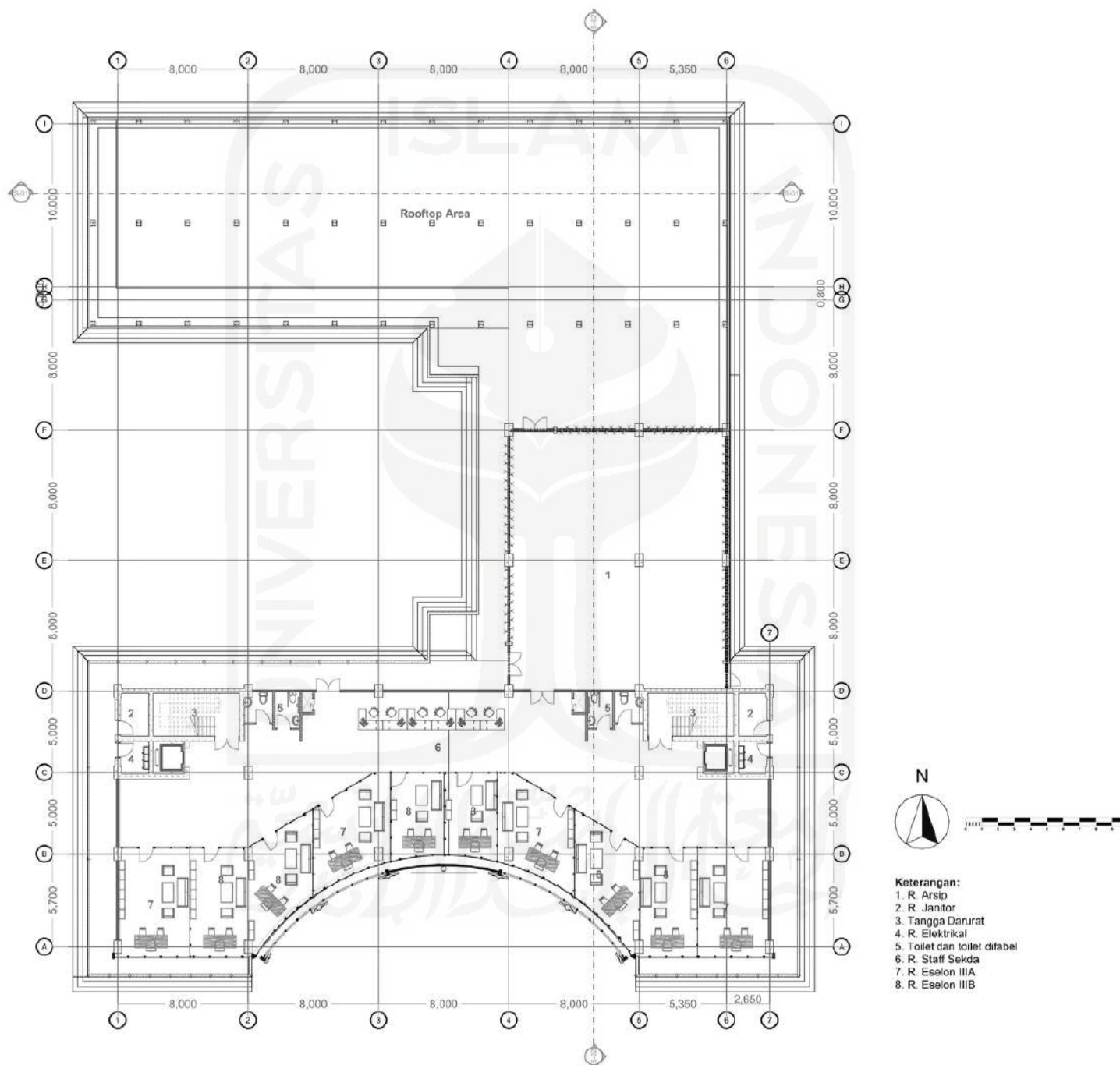


- Keterangan:**
1. R. Rapat Pimpinan Tinggi Pratama
 2. R. Pejabat Eselon IIIA
 3. R. Pejabat Eselon IIIB
 4. Tangga darurat
 5. R. Elektrikal
 6. Toilet dan toilet difabel
 7. R. Staff Sekda
 8. R. Janitor

Dokumen
Gambar
Arsitektural



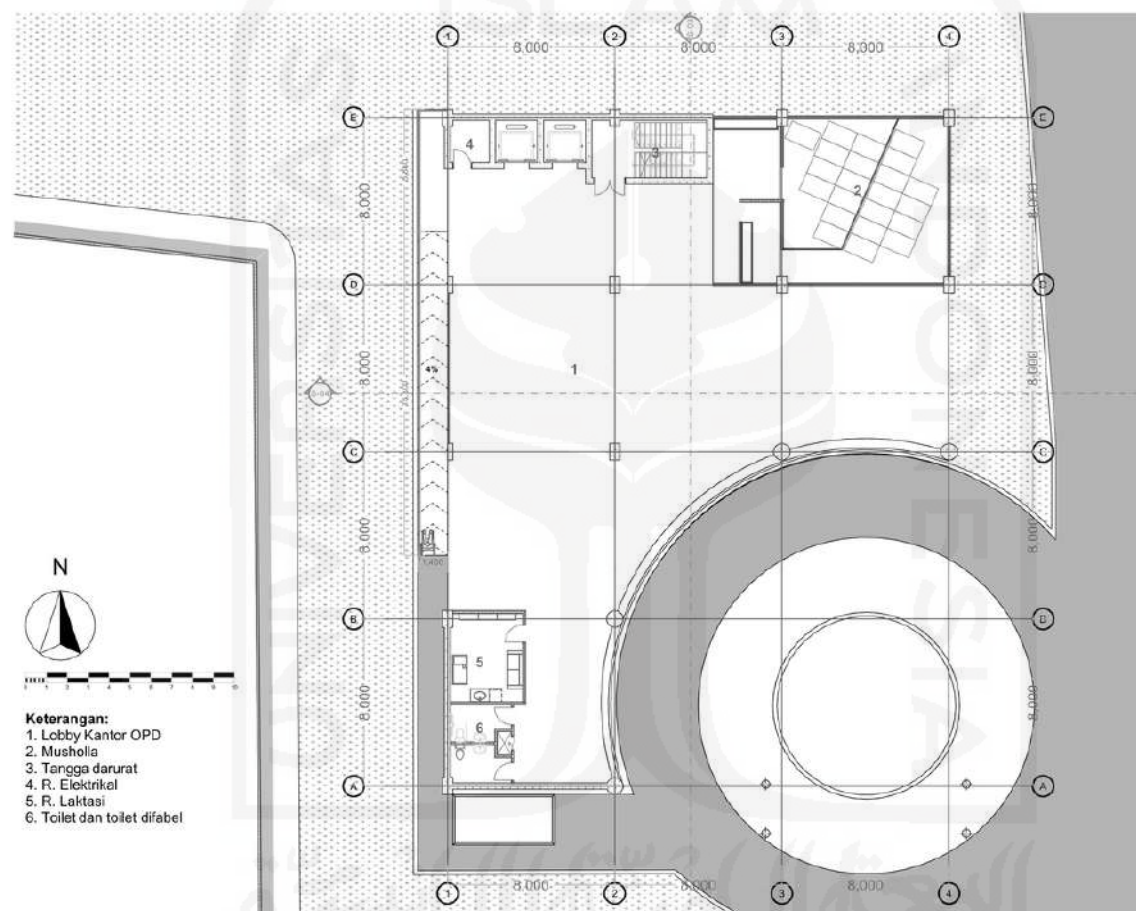
DENAH LT. 5 GEDUNG UTAMA



Dokumen
Gambar
Arsitektural



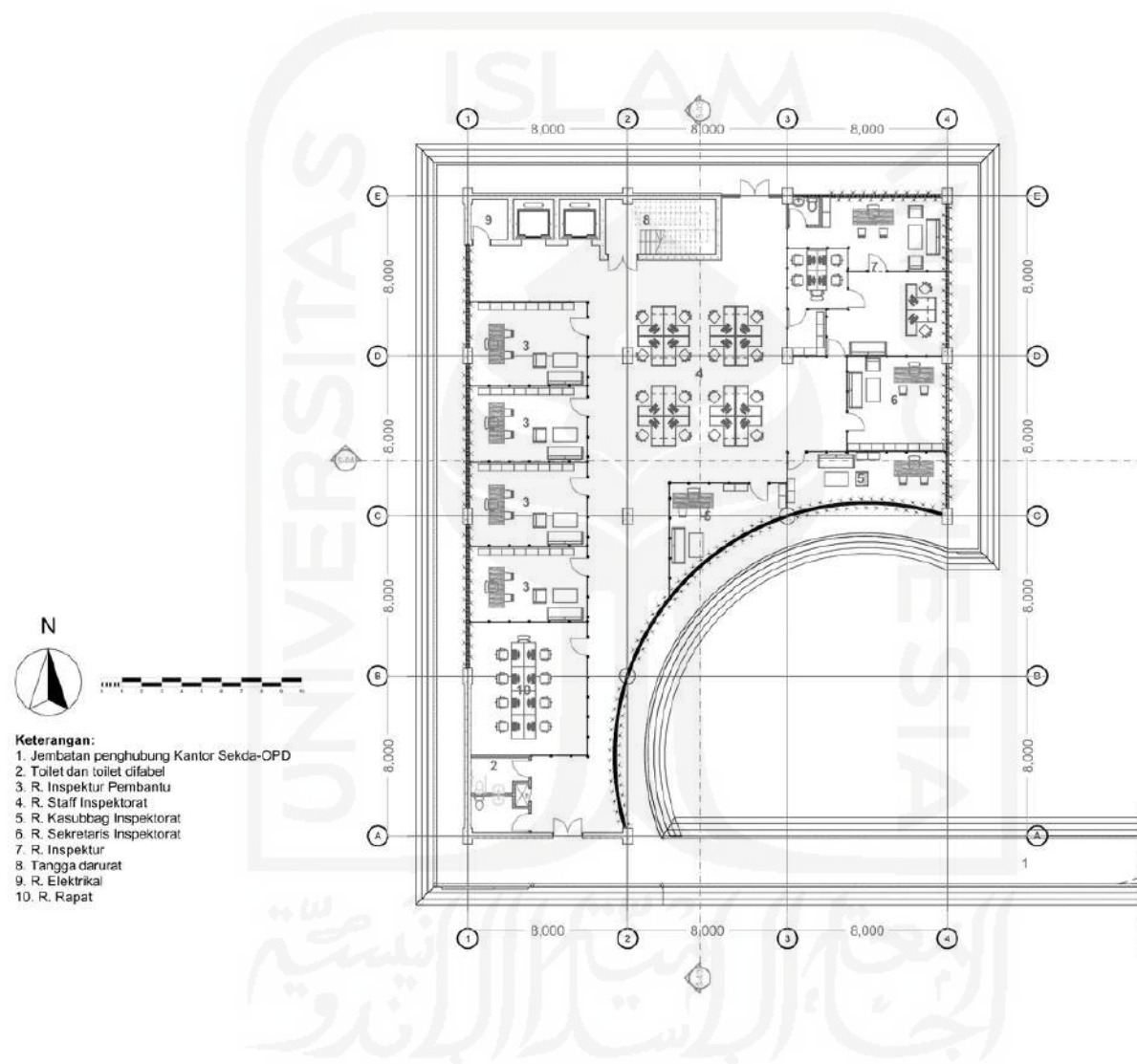
DENAH GF KANTOR OPD



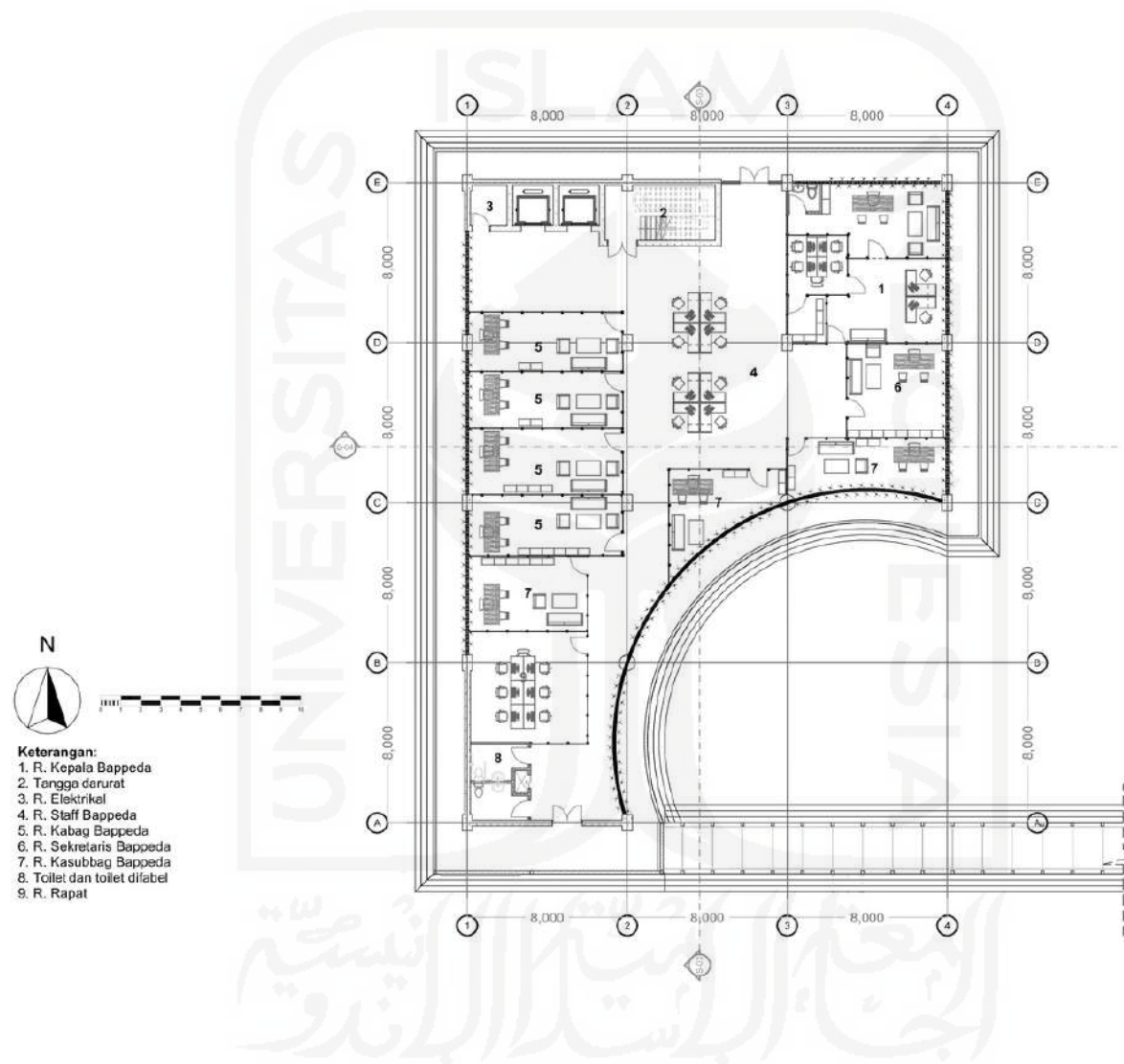
Dokumen
Gambar
Arsitektural



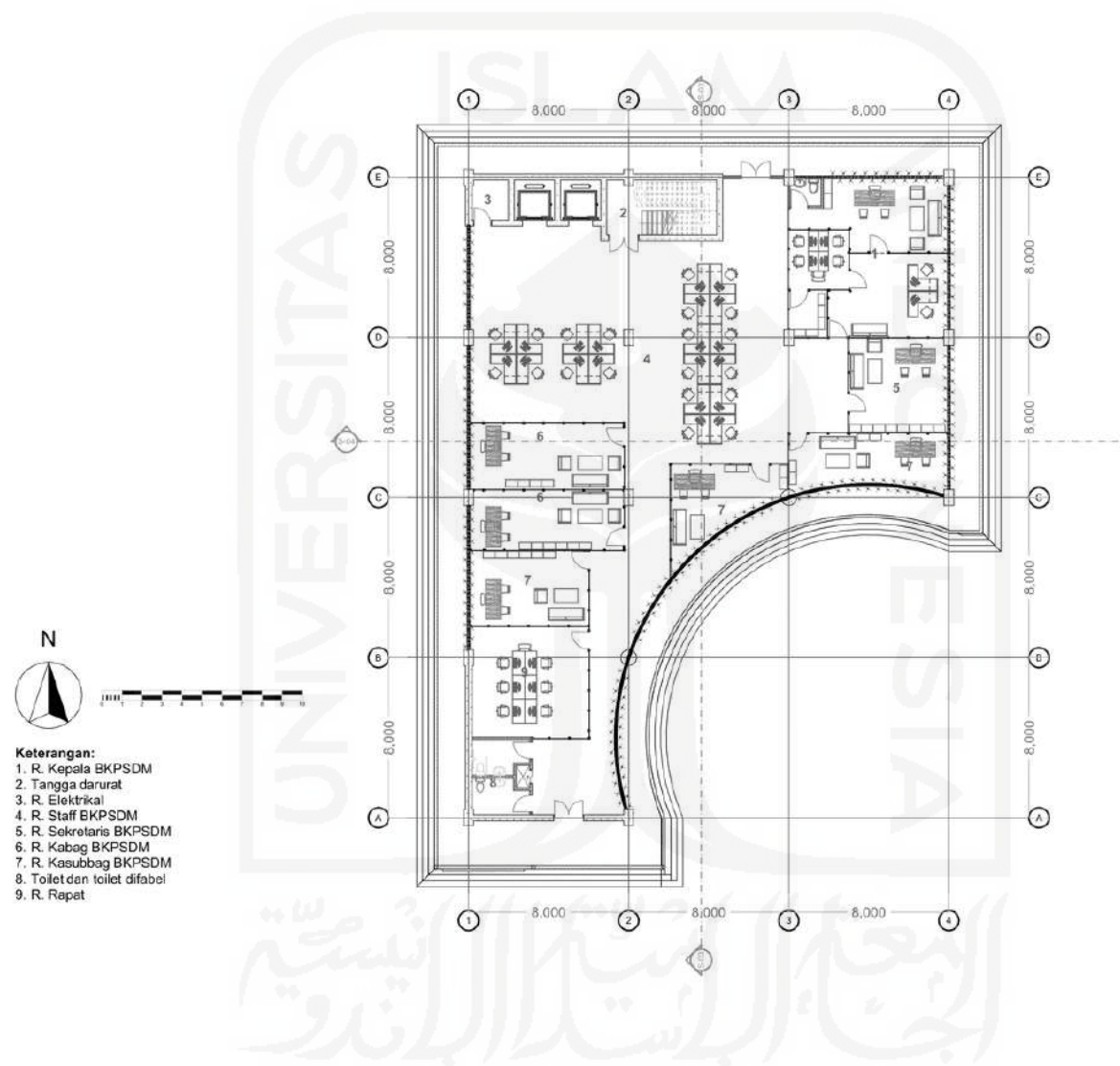
DENAH LT. 1 KANTOR OPD



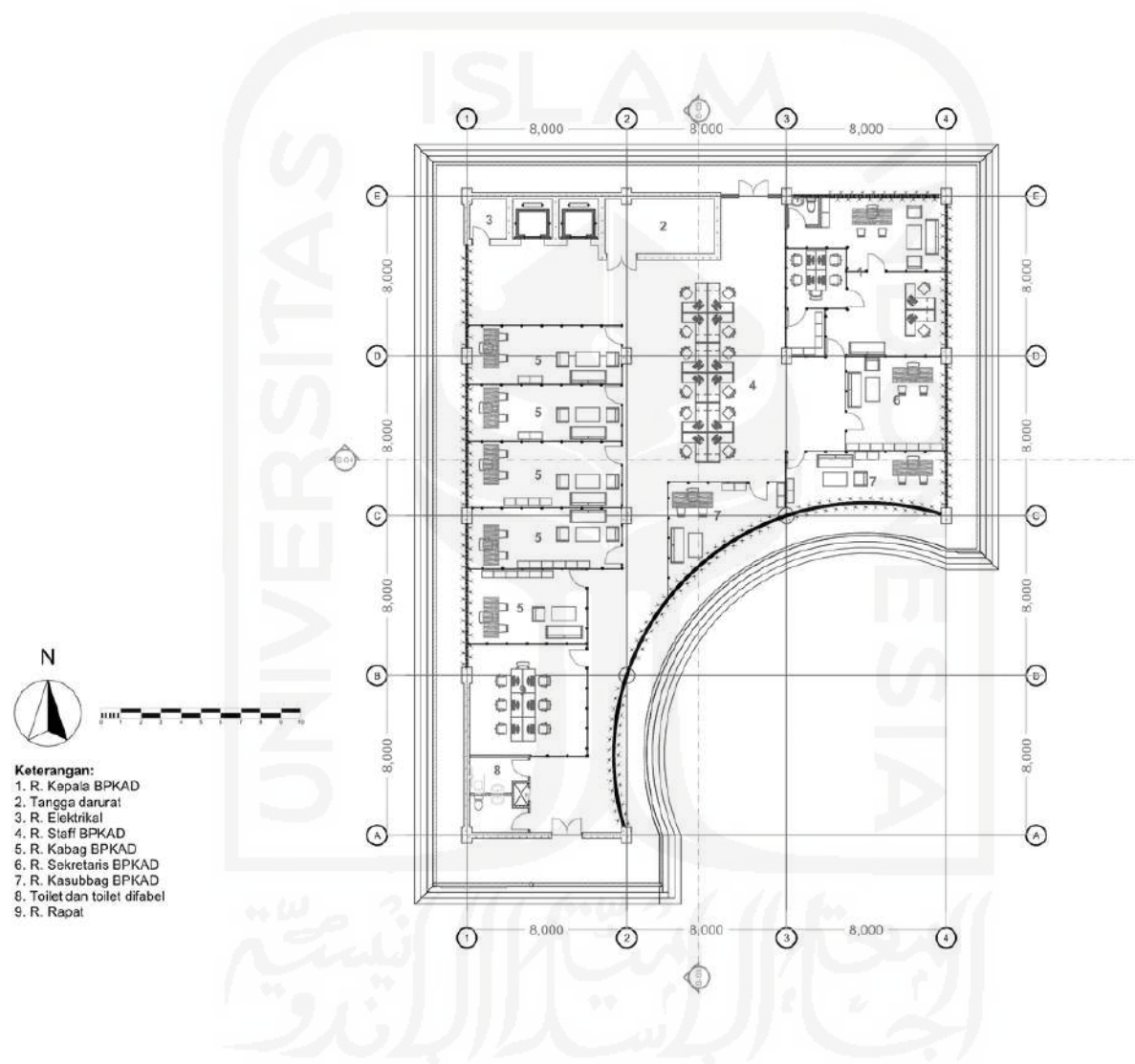
DENAH LT. 2 KANTOR OPD



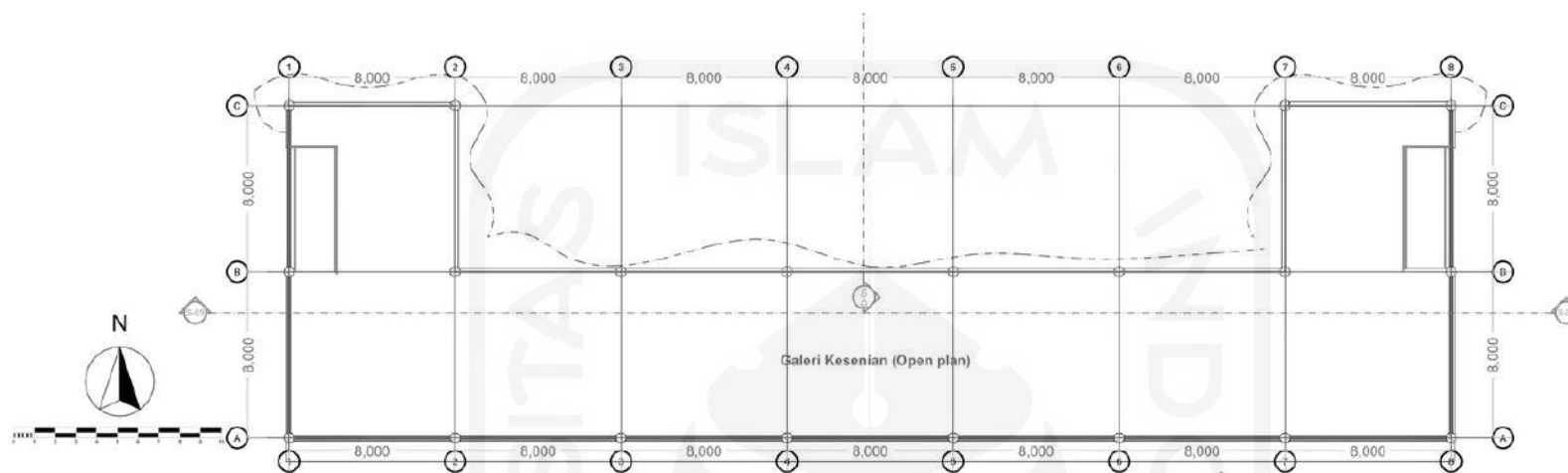
DENAH LT. 3 KANTOR OPD



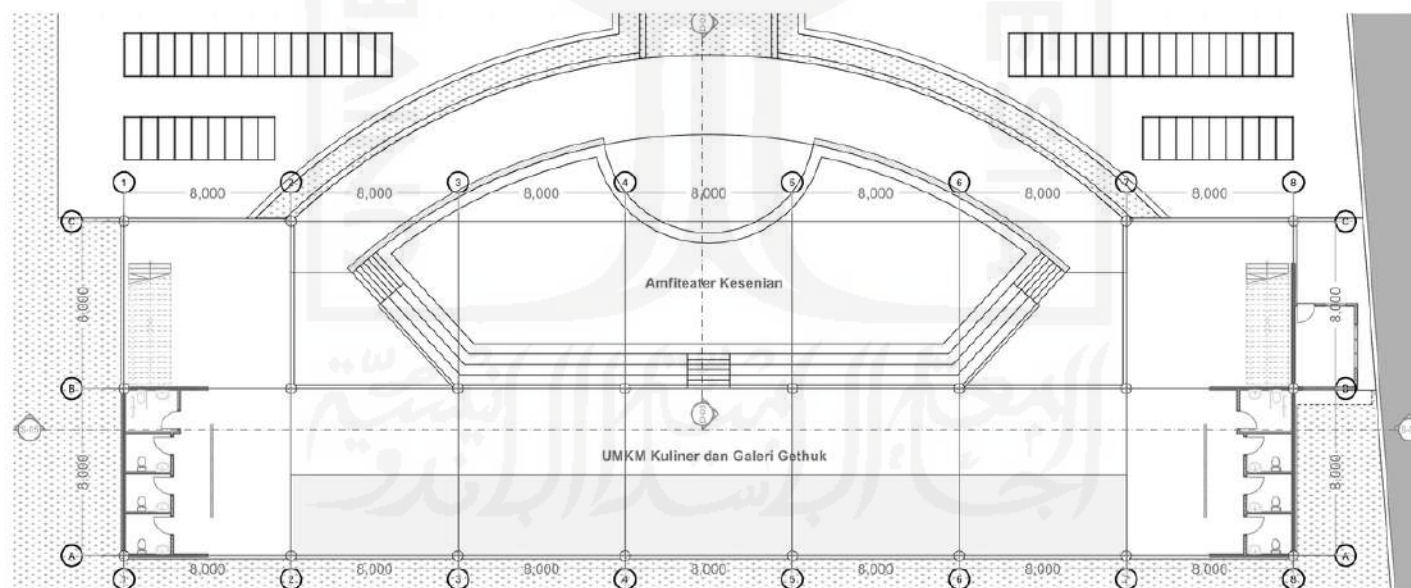
DENAH LT. 4 KANTOR OPD



DENAH ARTMAG



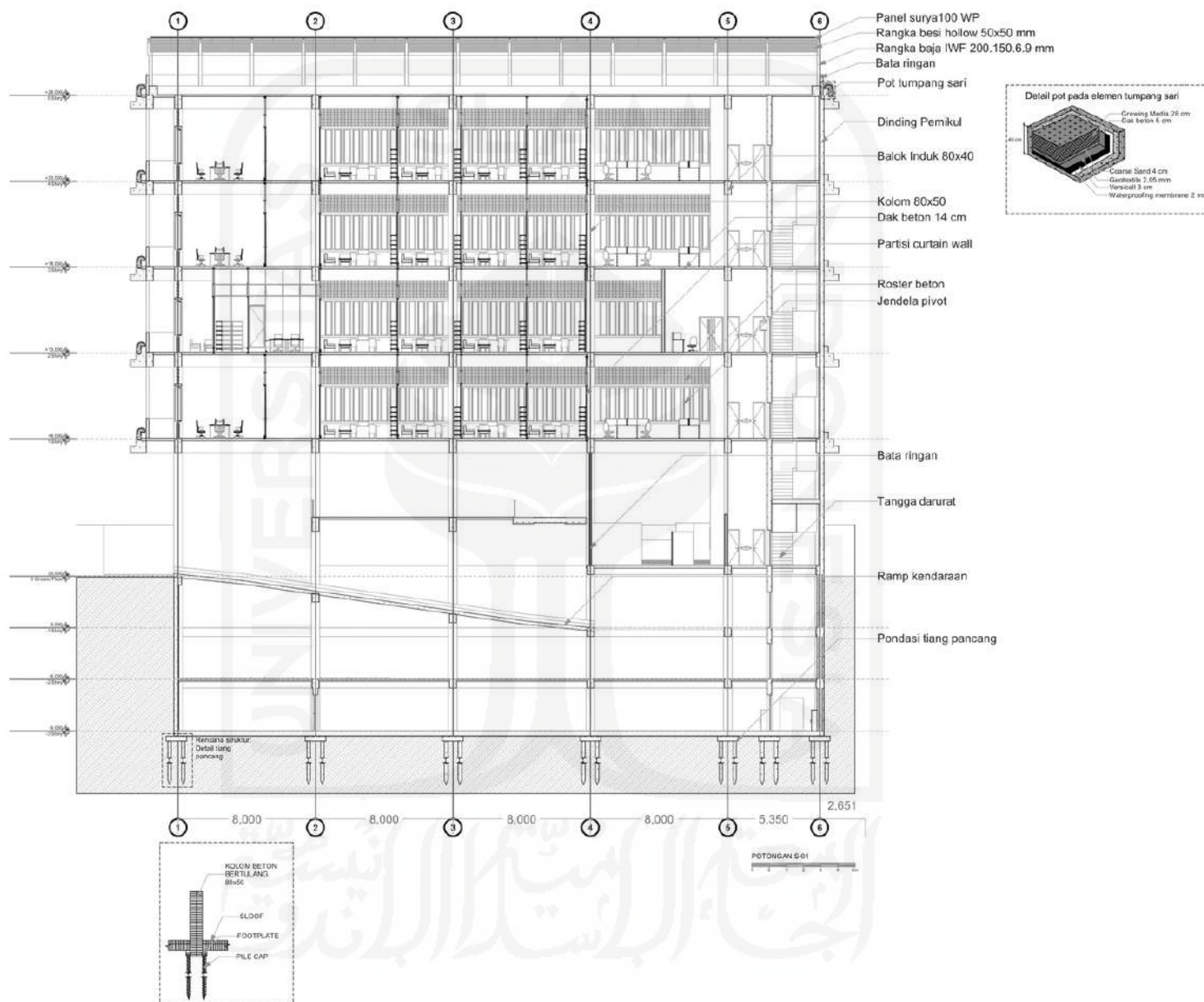
Lantai 1: Galeri Kesenian



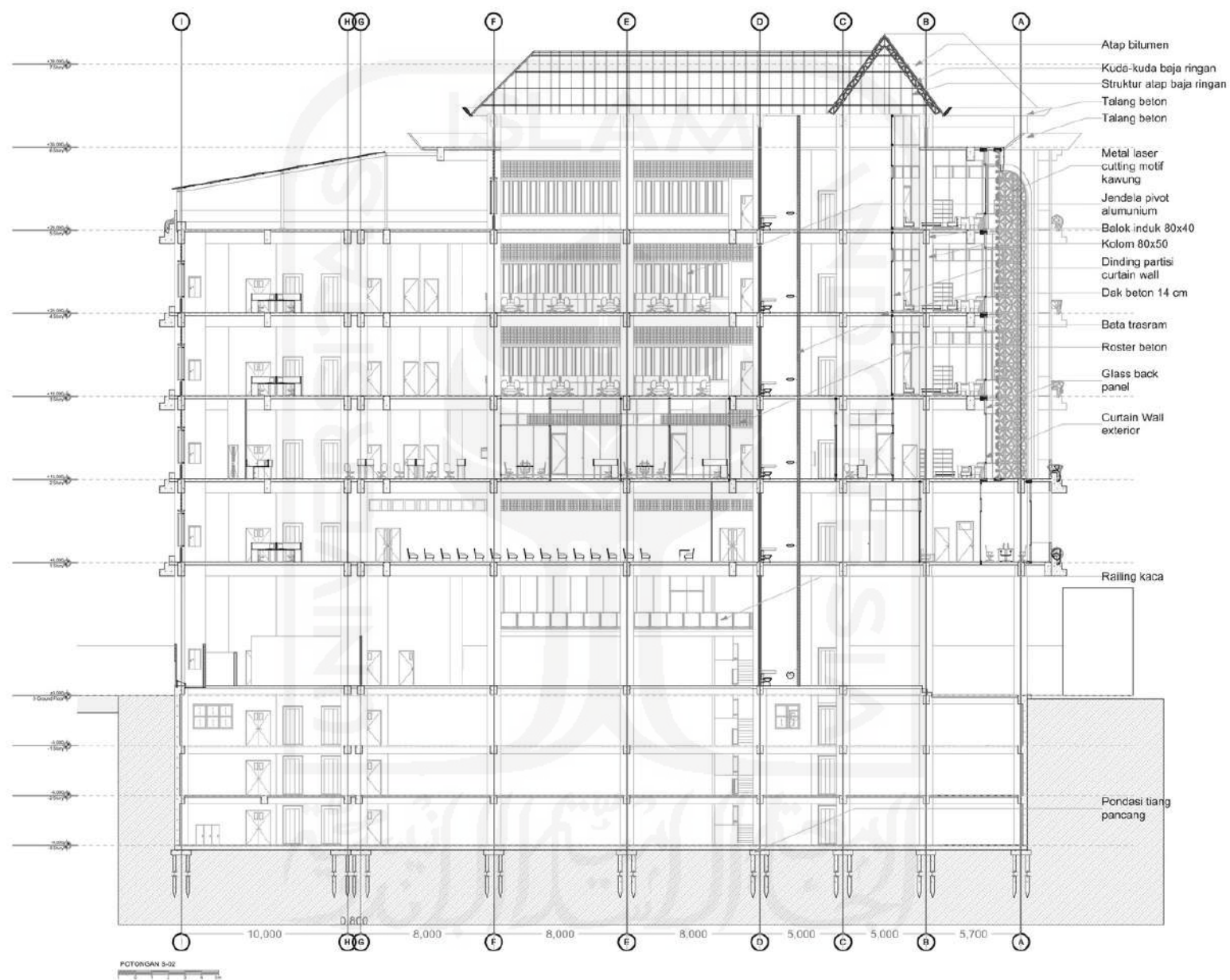
Lantai GF: UMKM Kuliner dan Galeri Gethuk



5.9. POTONGAN POTONGAN S-01



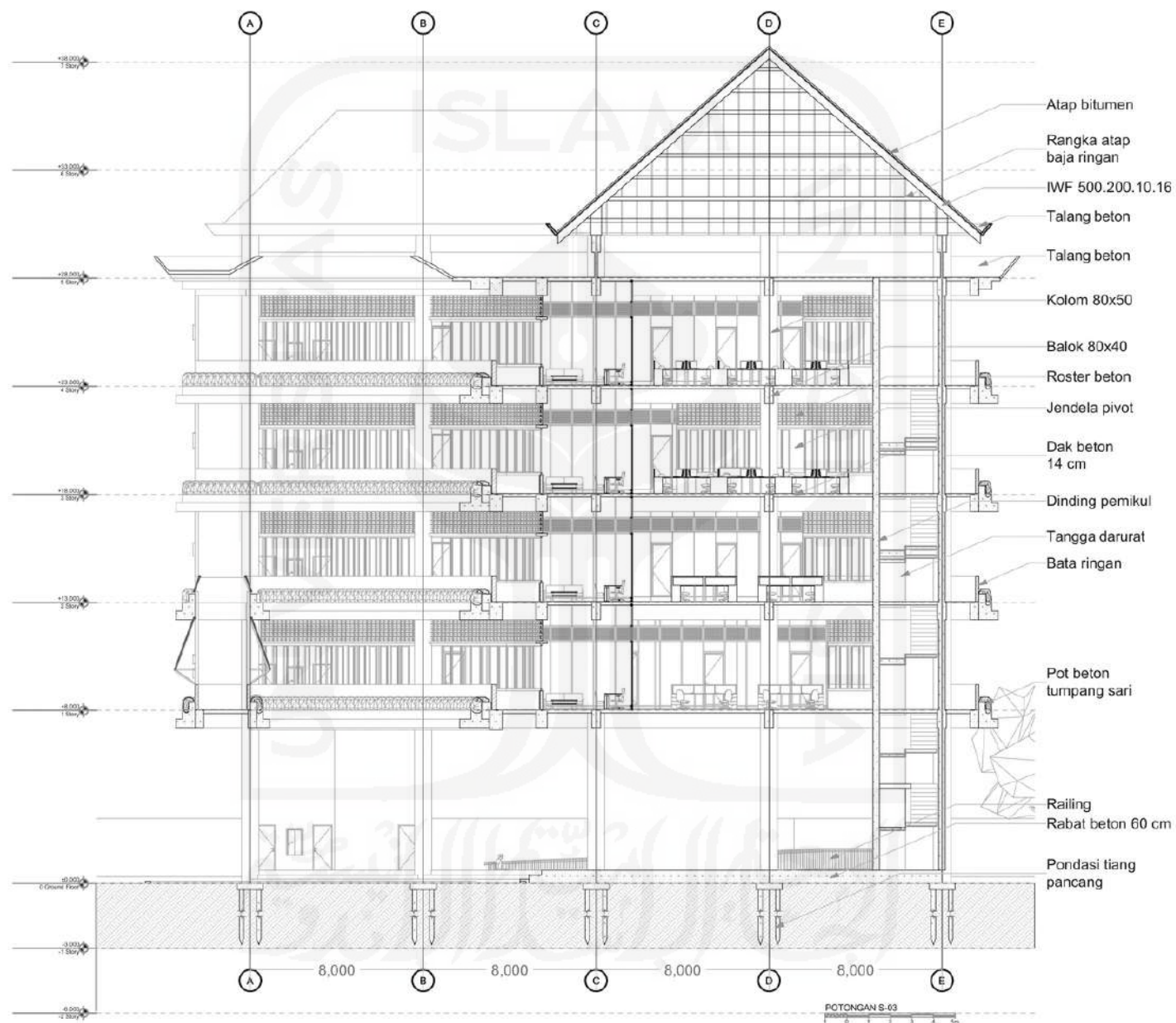
POTONGAN S-02



Dokumen
 Gambar
 Arsitektural



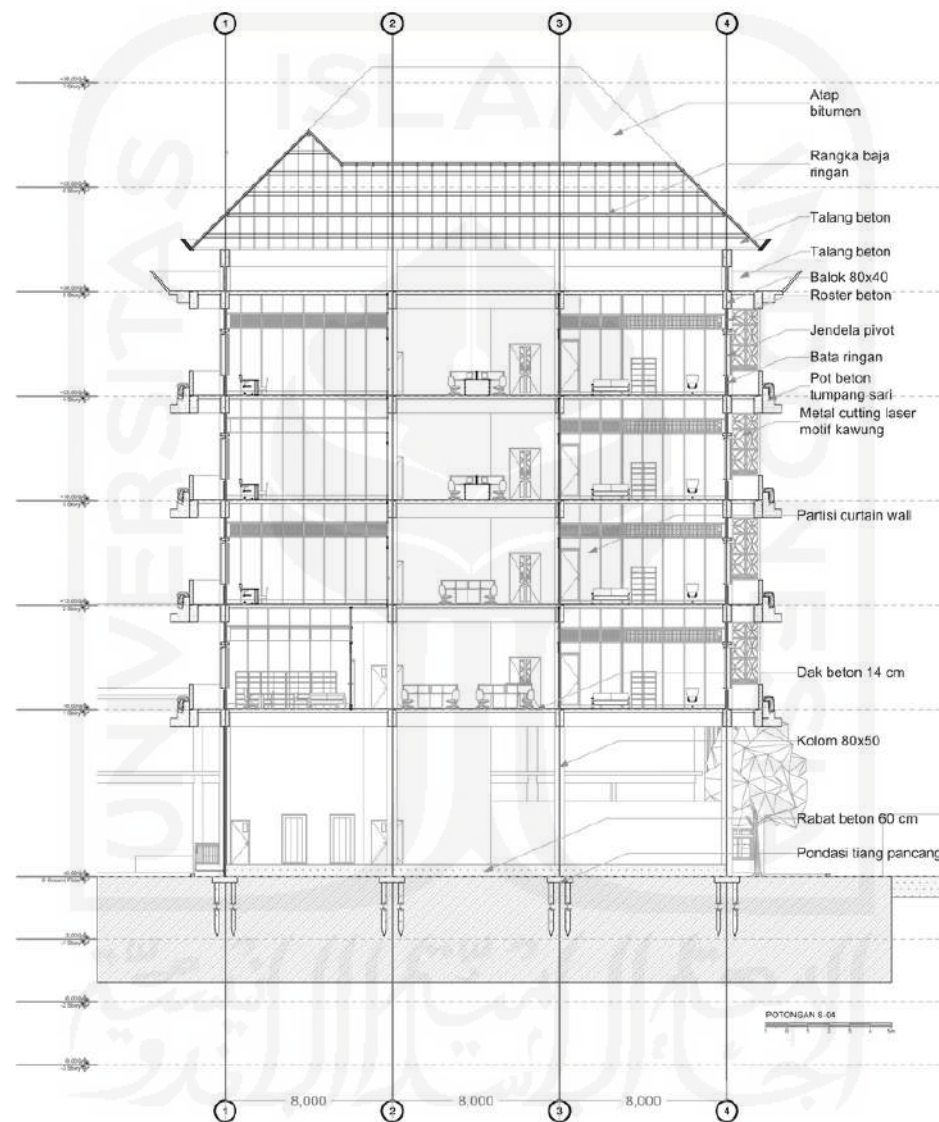
POTONGAN S-03



Dokumen
Gambar
Arsitektural



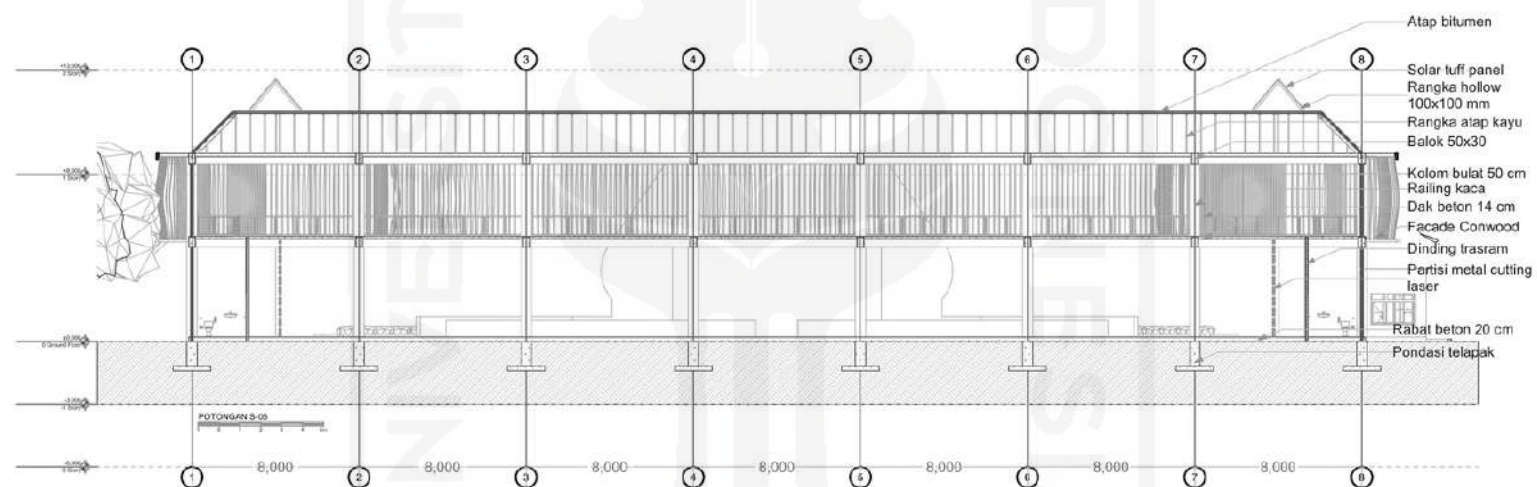
POTONGAN S-04



Dokumen
Gambar
Arsitektural



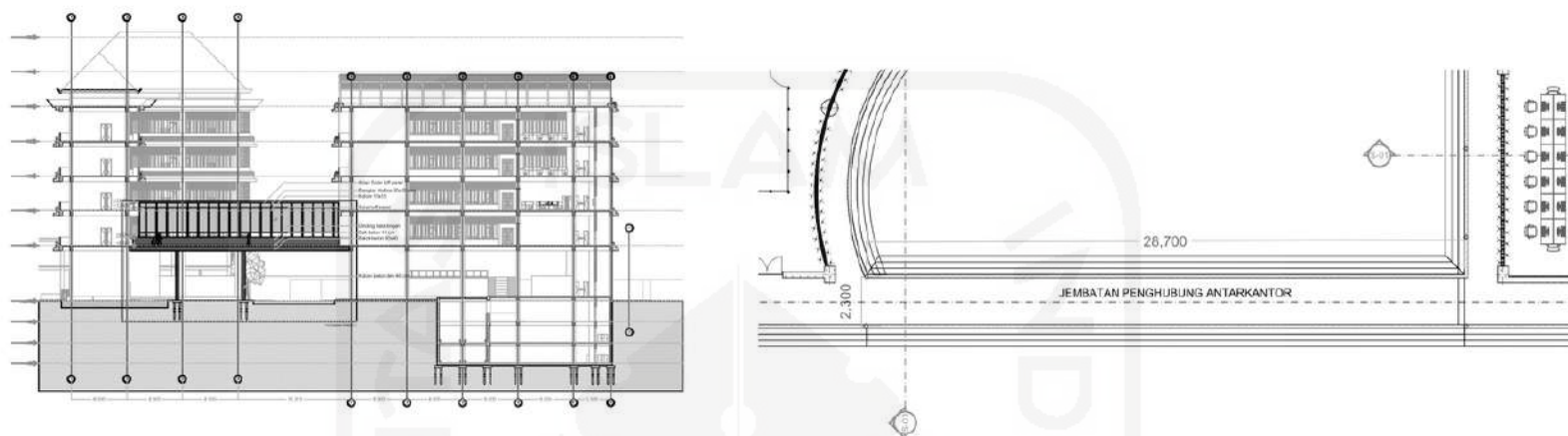
POTONGAN S-05



Dokumen
Gambar
Arsitektural

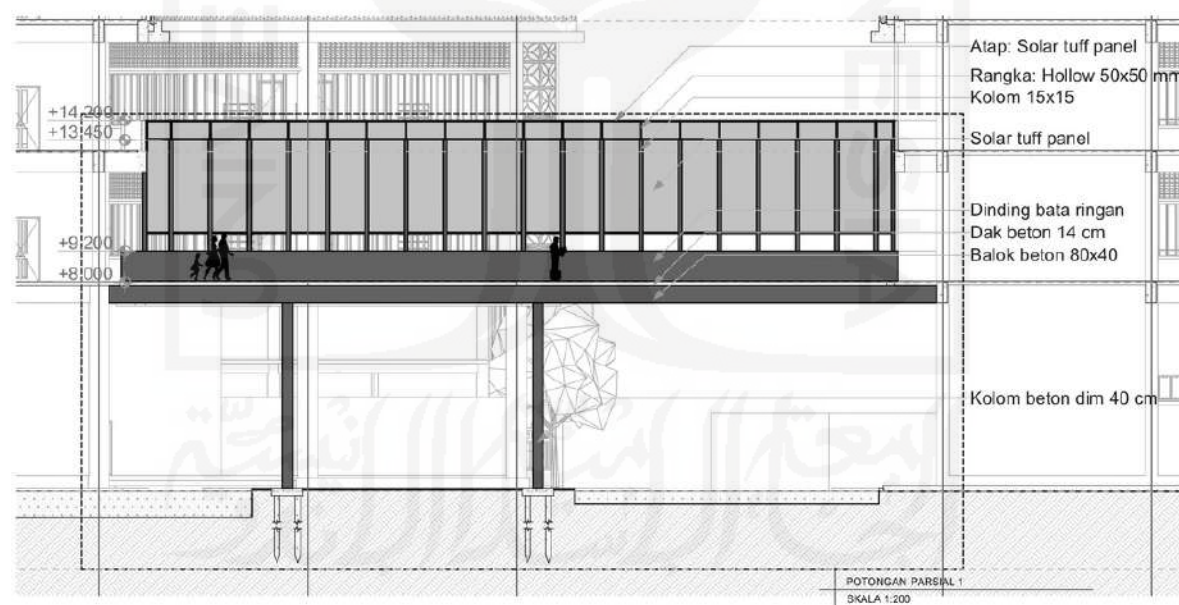


POTONGAN PARSIAL



P-01 Potongan Melintang Jembatan Konektor Gedung OPD-Kantor Utama 1:750 P-01

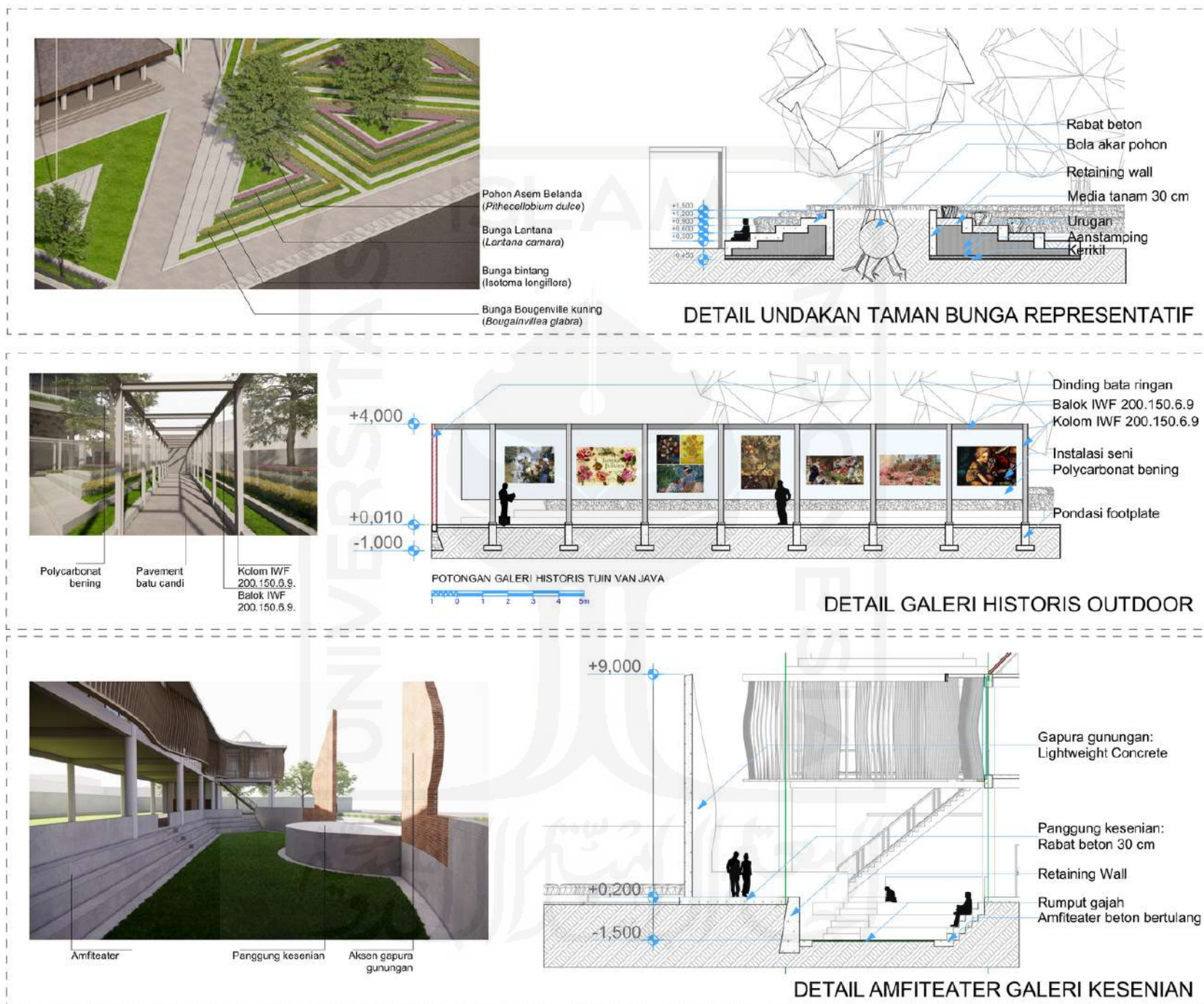
Denah Jembatan Konektor Gedung OPD-Kantor Utama 1:250



Dokumen
Gambar
Arsitektural



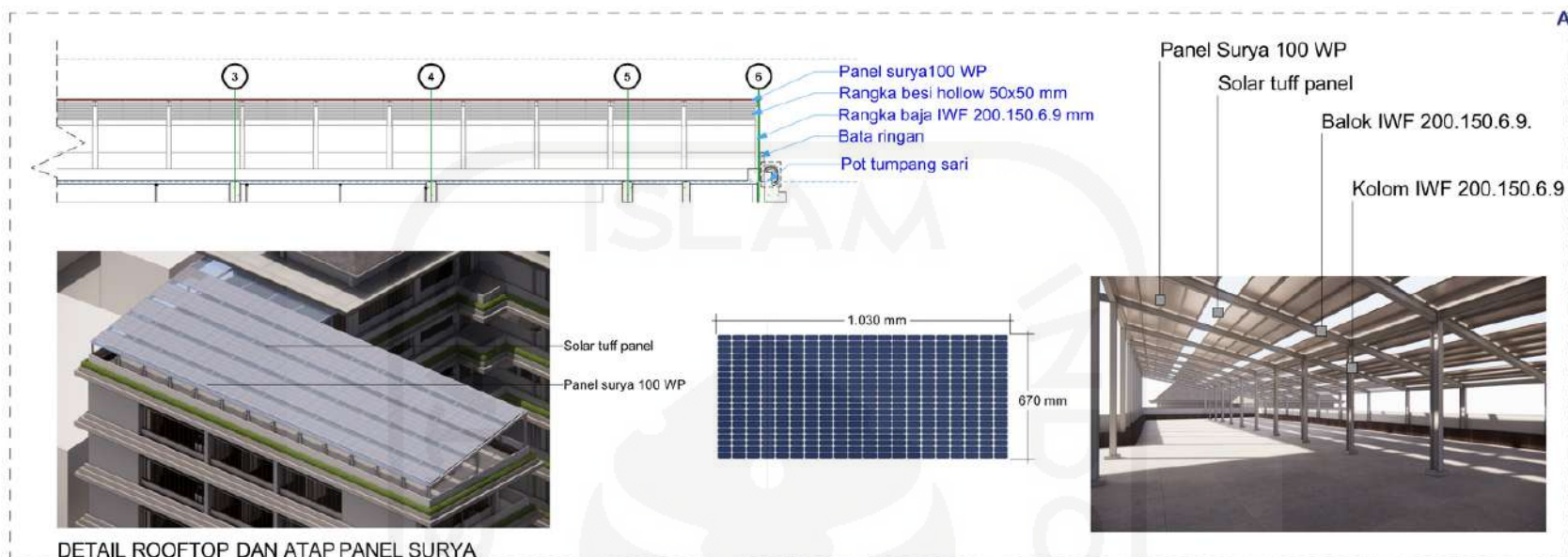
5.10. DETAIL ARSITEKTURAL



Dokumen
 Gambar
 Arsitektural



DETAIL ARSITEKTURAL



DETAIL ROOFTOP DAN ATAP PANEL SURYA

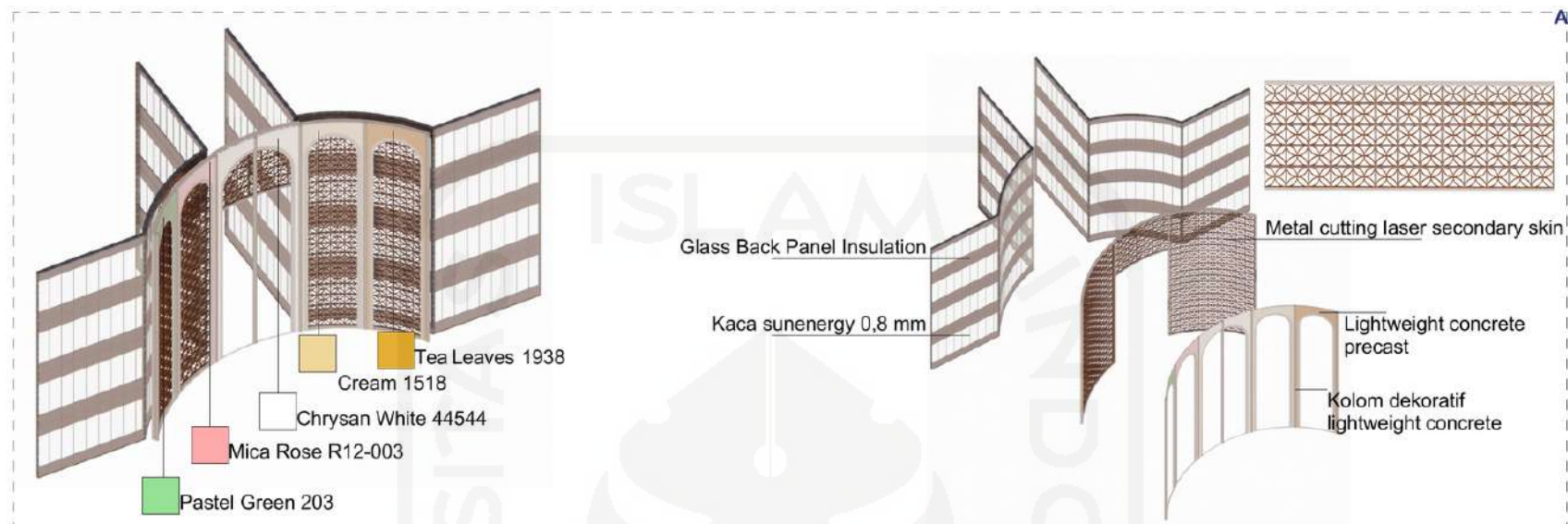
DETAIL ORNAMEN REPRESENTATIF FASAD BARAT



DETAIL POT TANAMAN TUMPANG SARI



5.11. DETAIL SELUBUNG BANGUNAN



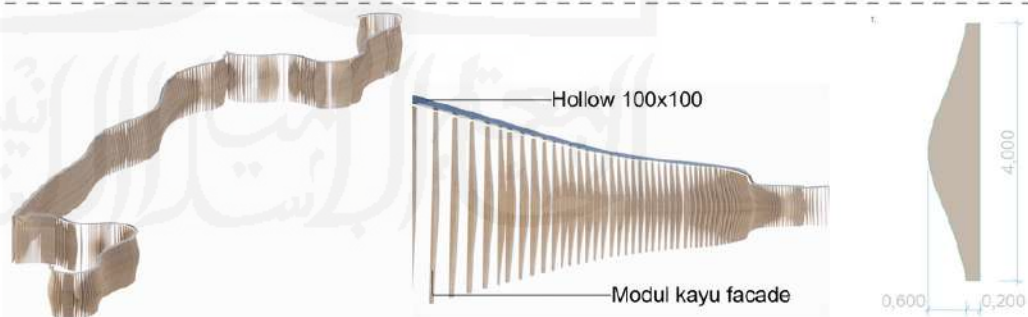
DETAIL FASAD UTAMA DAN SELUBUNGNYA



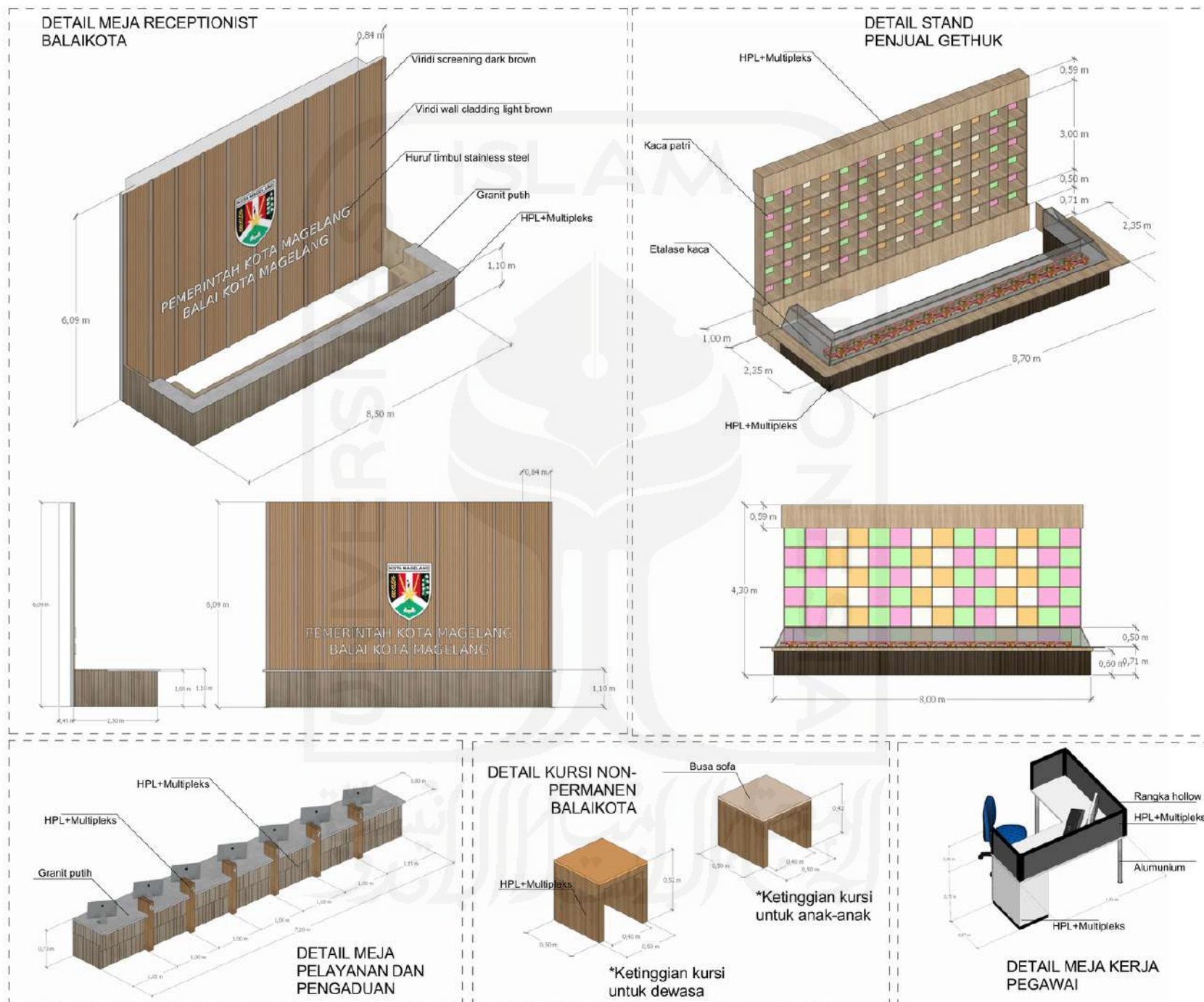
DETAIL JENDELA PIVOT



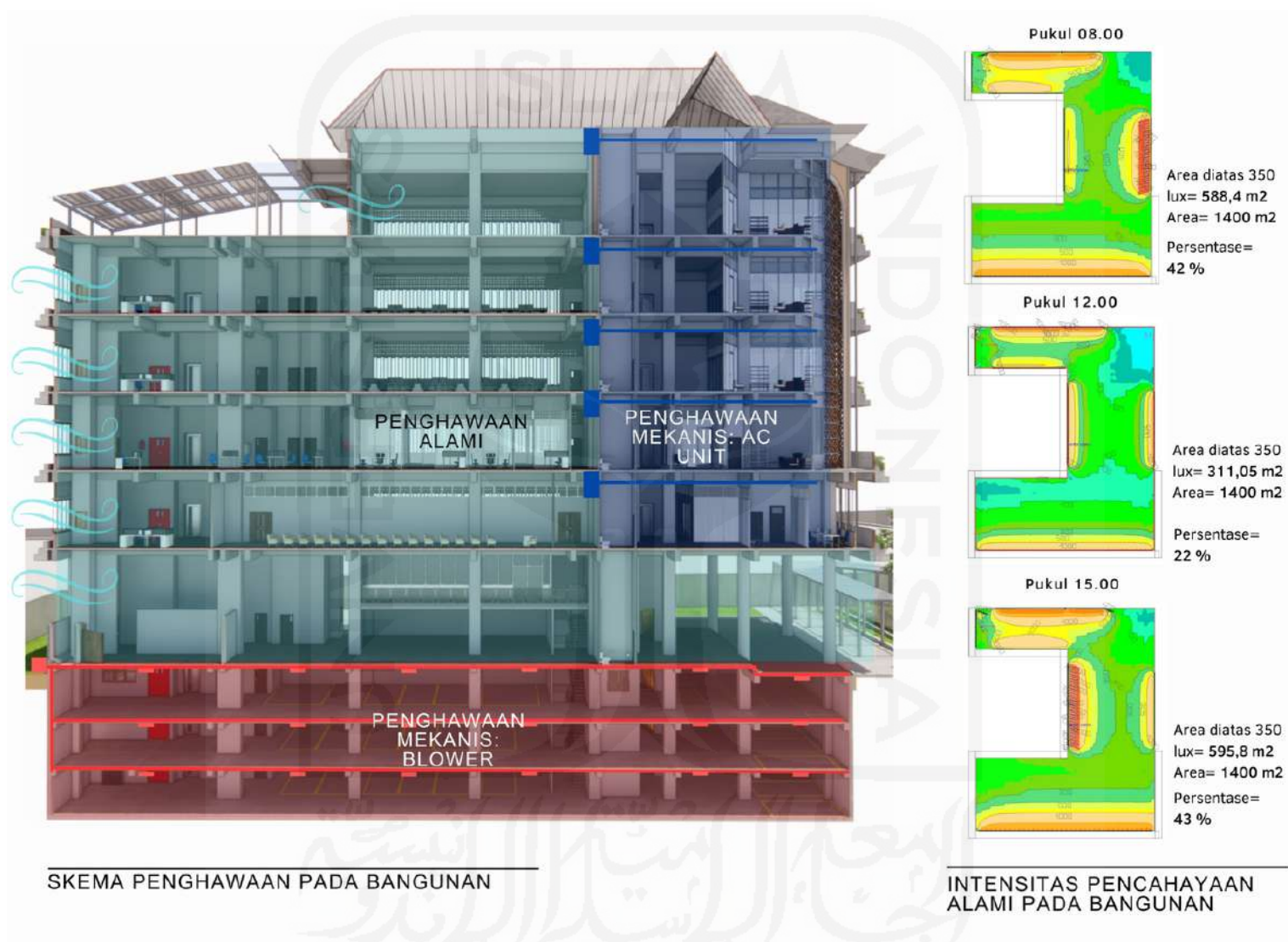
DETAIL FASAD GALERI KESENIAN DAN UMKM GETHUK



5.12. DETAIL INTERIOR UTAMA

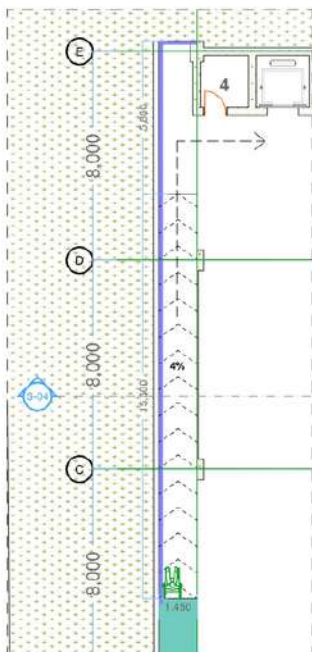


5.13 SKEMATIK PENCAHAYAAN DAN PENGHAWAAN

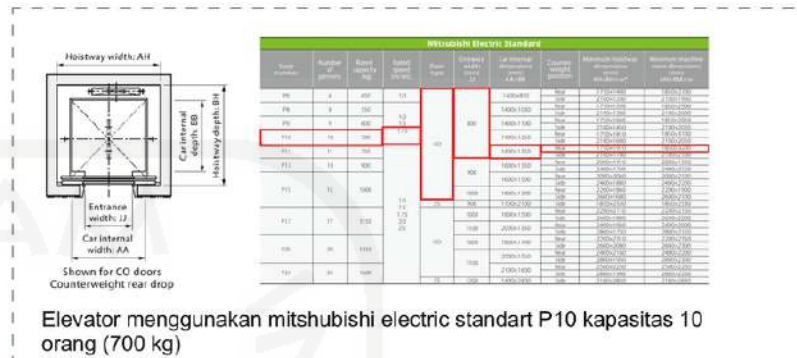
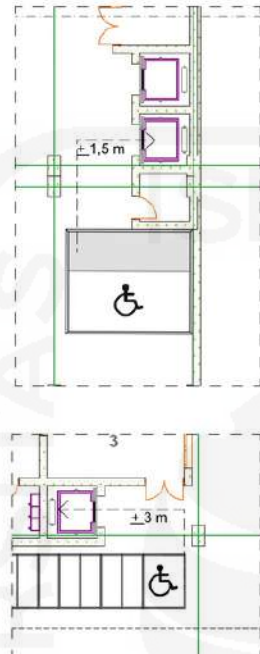


5.14. SKEMATIK TRANSPORTASI VERTIKAL DAN DISABILITAS

Ramp gedung OPD



Lift basement



Elevator menggunakan mitsubishi electric standart P10 kapasitas 10 orang (700 kg)



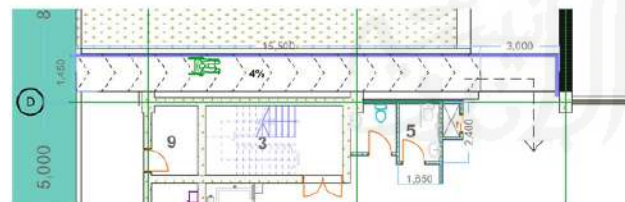
Pos satpam (pelayanan difabel)

Paving pedestrian (batu candi)
Guiding Block Pedestrian

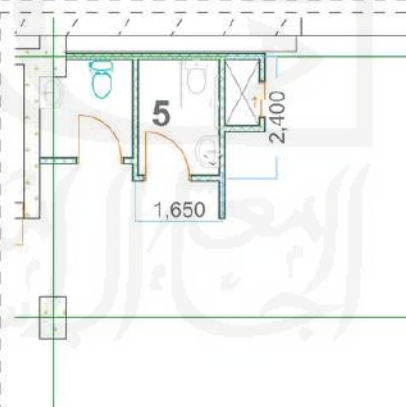
Pedestrian



Perspektif fasilitas ramp disabilitas pada gedung



Ramp gedung utama

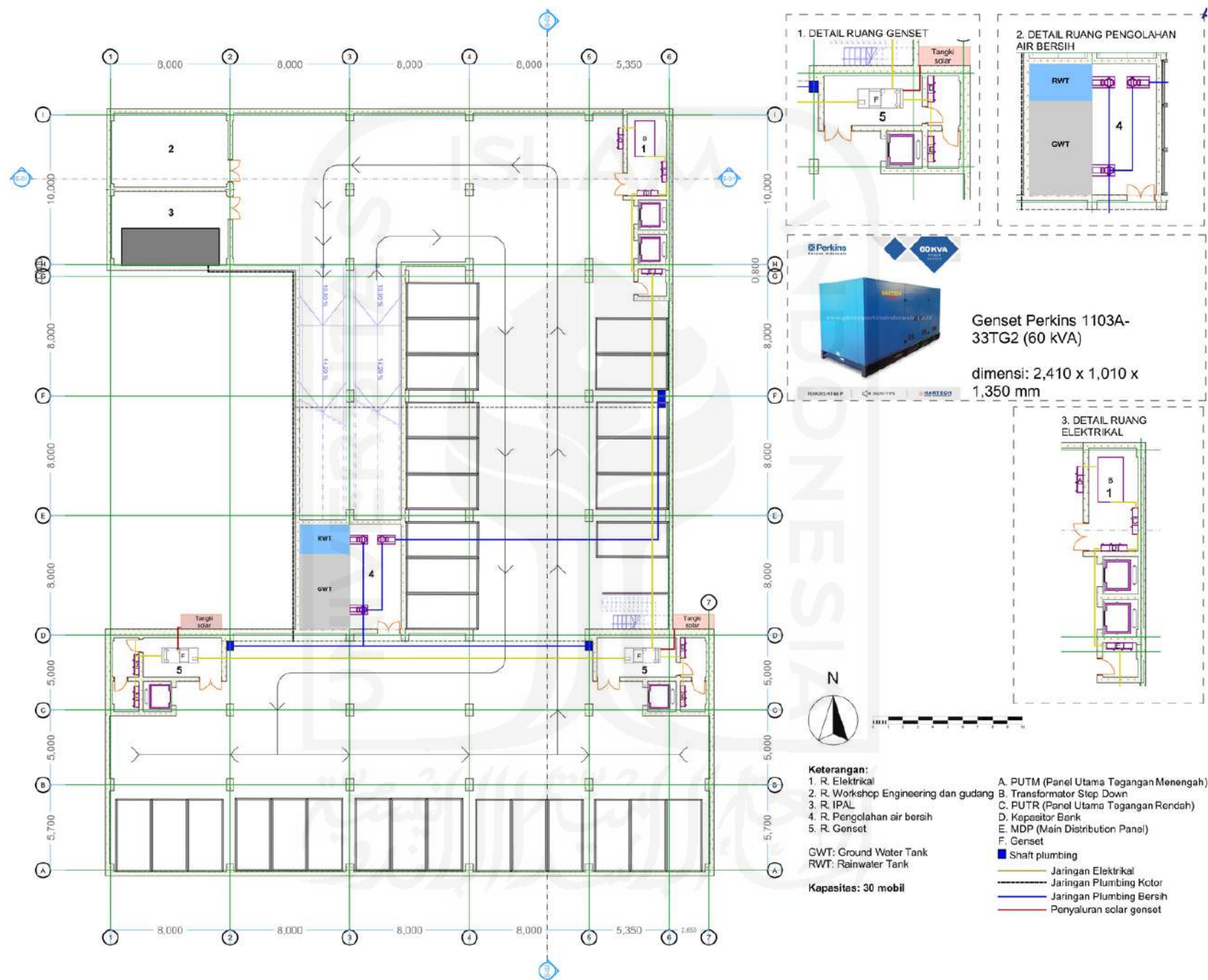


Toilet disabilitas

Dokumen
Gambar
Arsitektural



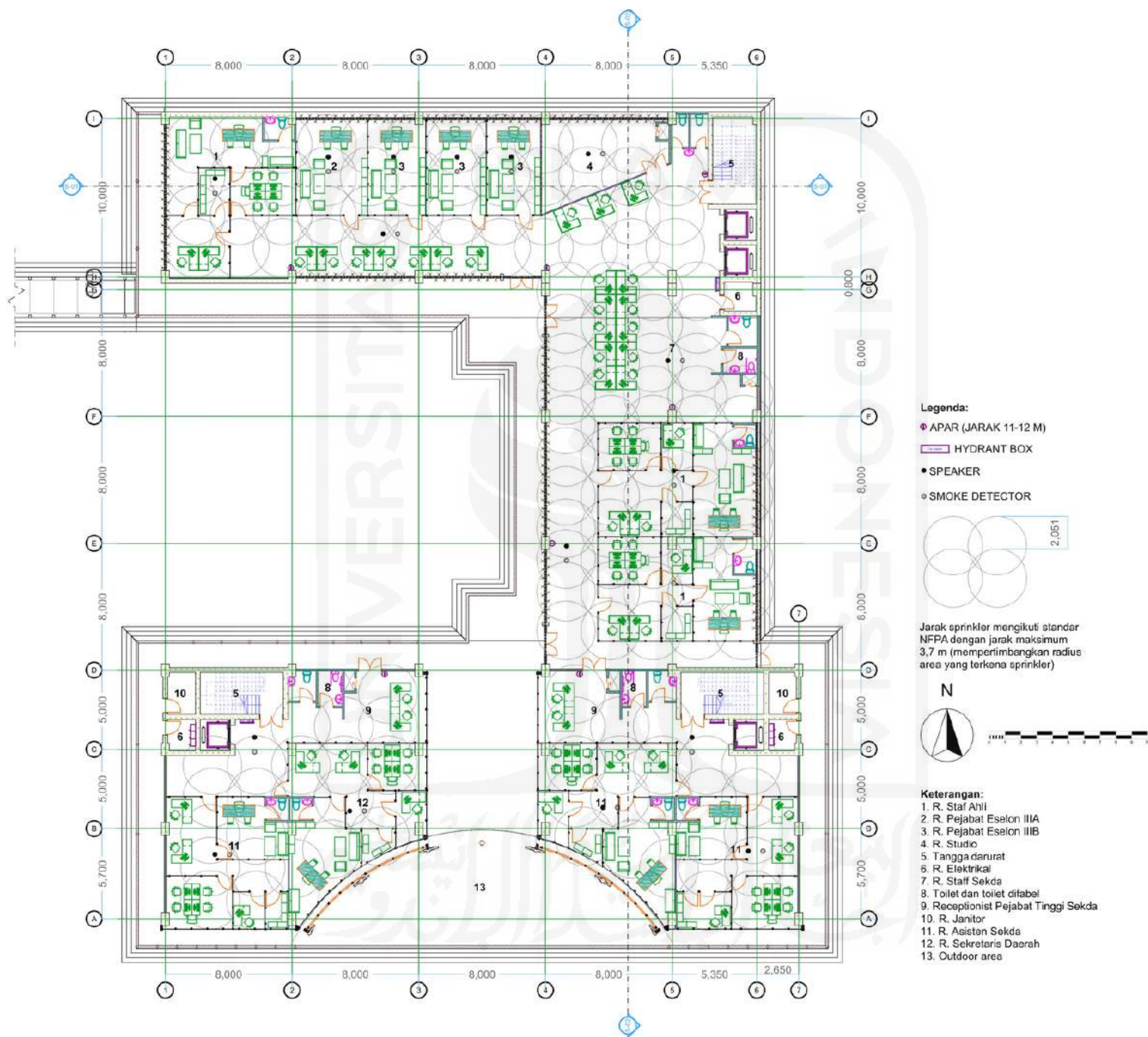
5.15. SKEMATIK JARINGAN INFRASTRUKTUR



Dokumen
 Gambar
 Arsitektural



5.16. SKEMATIK KESELAMATAN BANGUNAN



5.17. PERSPEKTIF EKSTERIOR DAN INTERIOR



Gedung Galeri Kesenian dan UMKM



Gedung Organisasi Perangkat Daerah



Gedung Sekretariat Daerah



Gedung Kantor Utama



Interior UMKM dan Museum Gethuk



Interior Ruang Receptionist OPD



Interior Ruang Pelayanan dan Pengaduan



Interior Ruang Receptionist Balai Kota

Dokumen
Gambar
Arsitektural



5.18. KOMENTAR DAN SARAN PENGUJI

PENGUJI 1

M. Galieh Gunagama, S.T., M.Sc.

KOMENTAR DAN SARAN	RESPON	RUJUKAN
Bagaimana menjelaskan ruang publik yang tercipta di utara dan selatan, khususnya ruang publik utara yang lebih cenderung untuk komersial?	Ruang publik utara dan selatan bebas diakses oleh publik. Zona yang terpisah dari inti massa perkantoran membuatnya dapat diakses oleh publik kapan pun tanpa mengganggu kepentingan birokrasi. Ruang publik utara (ArtMag) memang diarahkan sebagai ruang publik yang mendukung fungsi perekonomian dengan hadirnya tempat UMKM gethuk.	Halaman 61 dan 62
Bagaimana menjelaskan fasad batik kawung pada fasad utara (kantor OPD) dalam fungsinya dan estetikanya?	Fasad batik kawung lebih difungsikan untuk menjaga privasi ruang perkantoran sehingga ruang dalam lebih tersamarkan sekaligus memberikan kesan estetika dengan pola kawung yang juga melambangkan ekspresi <i>tuin van java</i> pada bagian utara balai kota (gedung ArtMag).	Halaman 65, 73, 77

PENGUJI 2

Dr. Ar. Jarwa Prasetya Sih Handoko, ST. , M.Sc., IAI., GP.

KOMENTAR DAN SARAN	RESPON	RUJUKAN
<i>Participatory design</i> tidak menggunakan model menggambar bersama, jelaskan metode Anda!	Menggunakan metode <i>design for user</i> (rujukan teori vogel (2021)) dimana <i>participatory design</i> mendengarkan pendapat para <i>stakeholders</i> (<i>emphatize</i>) yang kemudian tahap <i>define, ideate, design</i> dilakukan oleh perancang, dan <i>testing</i> dilakukan kembali dengan mengajukan pra-rancangan ke para <i>stakeholders</i> .	Halaman 26, 27, 28
Bagaimana cara Anda mengakomodir keamanan dan keselamatan bangunan	Dengan memperhatikan peraturan serta standar yang berlaku dan diterapkan baik pada rancangan bangunan maupun tata tapak.	Halaman 82, 83, 97

6. LAMPIRAN



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2126642830/Perpus./10/Dir.Perpus/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : DWIWANGGA SANG NALENDRA HADI
Nomor Mahasiswa : 19512096
Pembimbing : DR. Ir. Revianto Budi Santosa, M.Arch., IAI.
Fakultas / Prodi : Teknik Sipil dan Perencanaan/ Arsitektur
Judul Karya Ilmiah : BALAI GATHUK Perancangan Balaikota Magelang dengan Pendekatan Participatory Design sebagai Bentuk Demokratisasi Arsitektur

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **5 (Lima) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7/5/2023

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

MODEL BANGUNAN (MAKET)





BALAI GATHUK

Perancangan Balai Kota Magelang dengan Pendekatan *Participatory Design* sebagai Bentuk Demokratisasi Arsitektur

PREMIS PERANCANGAN

Indonesia memiliki sistem birokrasi yang memiliki realitas bersifat ambivalen dimana antara kepentingan privat dan publik tercampur sehingga tercipta gaya feodalistik dalam birokrasi yang bertentangan dengan semangat demokratis guna menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, netral, dan profesional (Baru & Rusbiyanti, 2020). Birokrasi yang feodal membuat masyarakat tidak bisa mengekspresikan pendapatnya untuk turut membangun tata pemerintahan yang baik. Partisipasi publik yang heterogen menjadi upaya demokratis sehingga kedudukan pemerintah perlu dekat dengan "suara rakyat". Dalam skala arsitektur, kedudukan pemerintah diidentikkan dengan kantor. Kantor pemerintahan erat kaitannya dengan kebangsawanan sehingga banyak yang terkesan menjaga kewibawaannya dengan menjauhkan diri dari masyarakat (Tarigan, 2020). Sebagaimana contoh, Kantor Walikota Magelang yang seharusnya melayani masyarakat Kota Magelang justru terletak jauh di perbatasan dengan Kabupaten Magelang. Meskipun akan dipindahkan, hal tersebut bukan berasal dari pemikiran "kedekatan dengan rakyat", tetapi karena adanya konflik pemanfaatan gedung dengan Akademi TNI.



Kantor Walikota Magelang berdiri di atas tanah milik Akademi TNI dan diminta untuk dikembalikan

KONFLIK KEPEMILIKAN LAHAN



RESOLUSI KONFLIK

Diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dengan keputusan:

Kantor Walikota (Pemkot) harus pindah ke lokasi baru di Utara Alun-Alun Kota Magelang
Dalam jangka waktu 5,5 tahun (sejak 2022) proses tersebut harus selesai



- 1 Balai kota didefinisikan sebagai ruang pertemuan penduduk dan pemerintah kota*, Kota Magelang belum memiliki balai kota *KBBI, 2016
- 2 Pemkot berencana membangun kantor walikota sehingga fungsi ruang cenderung eksklusif untuk kekuasaan birokrat
- 3 Rencana pembangunan dilakukan tanpa melibatkan peran aktif masyarakat
- 4 Peran arsitek yang harus merespon kebutuhan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam balai kota

PROBLEM STATEMENT



METODE PARTISIPATORIS: DESIGN FOR USERS



STAKEHOLDERS Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

OWNER (REPRESENTASI KEDAULATAN RAKYAT)

Mas Bagus Priyana
Ketua Komunitas Sejarah Kota Toea Magelang

Elizabeth Rahayu Sri Hastuti,
S.Pd., M.Si,
Anggota Komunitas Magelang Kembali,
Edukatör, Pegiat Kebudayaan

+
Samplang pendapat masyarakat Kota Magelang

PUBLIK (MASYARAKAT KOTA MAGELANG)

MANAGERIAL (PERENCANA DAN PELAKSANA PEMBANGUNAN)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang

Iwan Triteny Setyadi, S.T., MT,
Kabid Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Rizqi Dwi Herawati, S.T.
Fungsionaris TBP An. Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi (PBJK)

Dr. Yetty Setyaningsih, S.P., M.Eng.
Kabid Ekonomi dan Prasarana Wilayah

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

END USER (PELAKSANA PELAYANAN MASYARAKAT)

Sekretariat Daerah Kota Magelang

Drs. H. Joko Budiyo, M.M.
Sekretaris Daerah Kota Magelang 2019-2023

LINGKUP RANCANGAN: PENDAPAT STAKEHOLDERS

Bagaimana rancangan ruang publik pada balai kota yang masyarakat inginkan?

Bagaimana rancangan balai kota yang merepresentasikan kebanggaan bersama?

Bagaimana rancangan balai kota sebagai kantor para birokrat?



LOKASI

Jl. Alun-Alun Utara No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117





POSTER PRESENTASI (APREB)

BIMX

GAMBAR TEKNIS



Alun-alun Kota Magelang: ruang publik luas untuk kegiatan massif



Ruang publik selatan: taman bunga tulin van java Paviliun tulin van java outdoor



Lobby balai kota (gedung utama) Ruang pelayanan dan pengaduan



Kantin bersama Lapangan yang teduh untuk apei dan masyarakat



Lobby Kantor OPD Ruang kerja Staff



Stand UMKM Kuliner Gethuk Galeri historis gethuk Magelang (museum)



Pendopo existing: untuk masyarakat Amfiteater galeri kesenian ArtMag



VIDEO ANIMASI

BALAI KOTA DALAM WAJAH DEMOKRATIS: RUANG PUBLIK UTARA DAN SELATAN



POSTER PRESENTASI (APREB)

PARTISIPATORIS

Mendengarkan pendapat untuk mendapatkan pemahaman tentang balai kota yang menjadi preferensi desain para *stakeholders*.

PEMERINTAH (END-USER)



- Menyetujui konsep balai kota
- Ekspansi vertikal untuk penghematan lahan
- Orientasi pelayanan publik: pelayanan perizinan
- Pemindahan OPD dengan skema prioritas
- Demolish total existing tapak karena tidak layak
- Pembangunan bertahap



BUKIT TIDAR
Sebagai simbol pakunya Tanah Jawa dan menjadi salah satu simbol budaya Kota Magelang

KULINER GETUK

Getuk (makanan berasal dari singkong) yang merupakan makanan khas Magelang dan ditemukan pertama kali saat zaman penjajahan Jepang bahkan pernah menjadi pengganti bahan pangan pokok masyarakat saat itu



TUIN VAN JAVA

Terkenal sebagai kota taman yang indah sejak zaman Belanda, kebudayaan menanam bunga menjadi bentuk hobi para noni yang dilestarikan menjadi spirit Kota Sejuta Bunga



IDEATION: PERTIMBANGAN DESAIN BERDASARKAN PENDAPAT



- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Prioritas
- Inspektorat Daerah
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)



PEMERINTAH (MANAGERIAL)

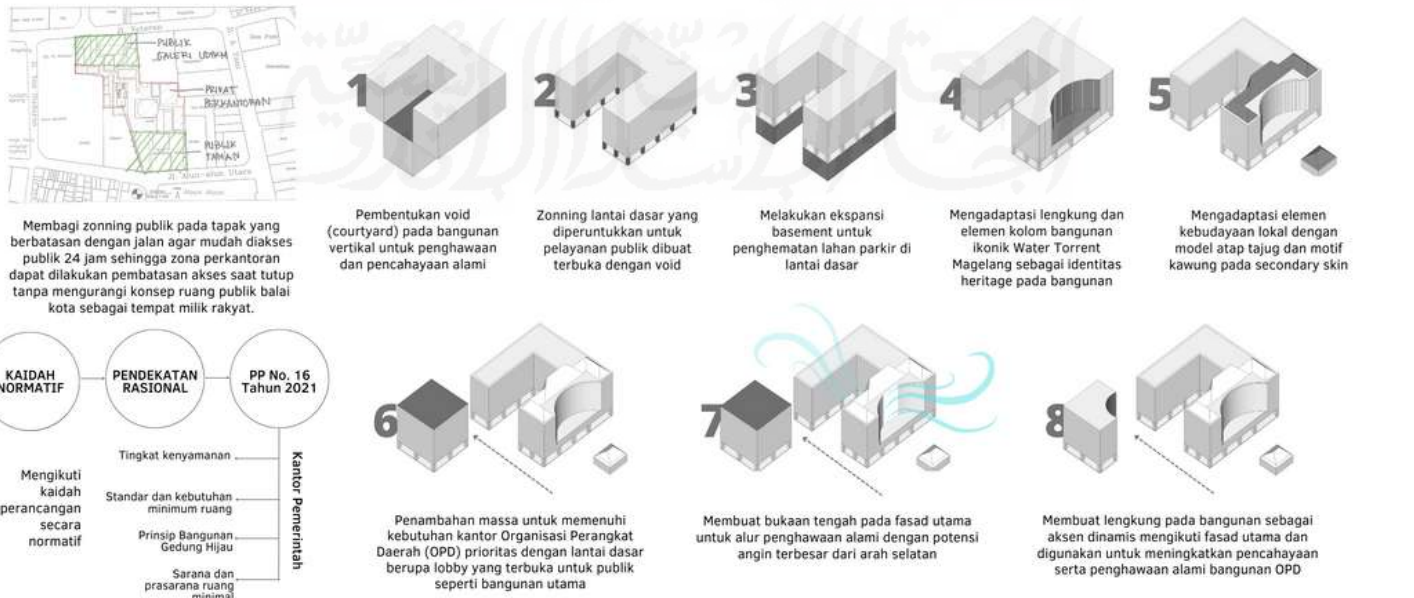


- Menyetujui konsep balai kota
- Ekspansi vertikal untuk penghematan lahan
- Peran kantor yang ramah publik
- Pemindahan OPD dengan skema prioritas
- Mendukung keberlanjutan: Norma BGH
- Pembangunan bertahap



Simbolisme bangunan *heritage* ikonik: water torrent oleh Herman Thomas Karsten

IDEATION: PERTIMBANGAN DESAIN BERDASARKAN PENDAPAT



POSTER PRESENTASI (APREB)


PUBLIK (MASYARAKAT KOTA MAGELANG)

REPRESENTASI PUBLIK: AKTIVIS KEBUDAYAAN DAN SEJARAH KOTA MAGELANG

PELESTARIAN

Pelestarian pendopo existing pada tapak balaikota

Rekam jejak sejarah untuk balaikota yang representatif

Mengikuti citra kawasan sekitar yang heritage

Mengakomodir fungsi pelayanan publik

Fasilitas publik yang lengkap dan bersih

Aksesibilitas mudah

RAADHUIS

Asisten Residen Kedu mendirikan *raadhuis* atau balaikota di Kota Magelang (sekarang menjadi kantor PDAM). Awal mula *raadhuis* hanya bergaya sederhana seperti rumah pada umumnya

RIWAYAT PENDOPO EXISTING

Tapak memiliki riwayat historis sebagai kediaman bupati. Peristiwa Magelang Bumi Hangus (1945-1949) disinyalir menjadi penyebab kehilangan fisik dari kediaman bupati tersebut. Sekarang tapak calon balaikota tersebut terdapat pendopo yang bukan bangunan asli tetapi menjadi representasi dari situs tersebut.

IDEATION: PERTIMBANGAN DESAIN BERDASARKAN PENDAPAT

PRA-RANCANGAN

1 Indikator: Peran Balaikota sebagai ruang administrasi
Parameter: Memenuhi kebutuhan ruang para birokrat (interior)

Fixed structure: core bangunan
Selubung exterior: jendela pivot
Ruang staff, open space
Dinding sekat

Menggunakan konsep fleksibilitas ruang dengan open plan yang kemudian dilakukan penyekatan sesuai dengan kebutuhan ruang. Dinding partisi menjadi sekat antar ruang sehingga dapat dilakukan penyesuaian ketika terjadi perubahan kebutuhan.

Open plan Kebutuhan sekarang Kebutuhan nanti?

5 Indikator: Peran Balaikota sebagai ruang administrasi
Parameter: Memenuhi kebutuhan ruang para birokrat (eksterior)

Alternatif 1 Alternatif 2

Antara gedung OPD dan Kantor Walikota-Sekda dirancang terpisah tanpa penghubung sehingga masing-masing unit memiliki independensinya.

Gedung OPD dan Kantor Walikota terkoneksi dengan jembatan penghubung sehingga memudahkan koordinasi antarbirokrat dan meningkatkan aksesibilitas antargedung.

2 Indikator: Citra Balaikota
Parameter: Citra Identitas Kota: melestarikan riwayat heritage kota

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3

Citra bangunan kolonial lebih ditonjolkan Citra kebudayaan Jawa ditonjolkan pada pemilihan fasad batik kawung Gabungan citra kebudayaan lokal Jawa dan riwayat heritage kolonial.

6 Indikator: Citra Balaikota
Parameter: Citra demokratis: *public space* dan kejelasan orientasi

Alternatif 1 Alternatif 2

Ruang publik utara dan selatan bebas diakses oleh publik untuk beraktivitas Ruang publik utara dan selatan dilakukan pembatasan akses

3 Indikator: Citra Balaikota
Parameter: Citra Identitas Kota: melestarikan riwayat heritage kota

Taman bunga disusun berundak melambangkan lima gunung yang mengelilingi Kota Magelang (Merapi, Merbabu, Sumbing, Telomoyo, Menoreh) dengan pusat pada undak-undakan tiang bendera sebagai simbol "pakuning tanah jawa" Bukit Tidar Magelang

4 Indikator: Citra Balaikota
Parameter: Citra Identitas Kota: melestarikan riwayat heritage kota

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3

Pemilihan alternatif citra galeri kesenian dan UMKM sebagai ruang publik utara

7 Indikator: Citra Balaikota
Parameter: Citra demokratis: sirkulasi

Alternatif 1 Alternatif 2

Karena lantai satu dipusatkan sebagai ruang pelayanan publik, sirkulasi pada jalan tengah (satu arah) menjadi jalan publik dimana masyarakat bebas mengaksesnya

Karena berada pada massa pemerintahan, diperlukan pembatasan akses sirkulasi jalan dengan pemberian portal dan pos pengamanan pada bagian depan

* Mayoritas stakeholders menyetujui konsep dan alternatif



POSTER PRESENTASI (APREB)

UJI DESAIN PARTISIPATORIS

Menunjukkan pra-rancangan kepada *stakeholders* untuk mendengar pendapat dan masukan serta memilih alternatif terbaik berdasarkan preferensinya.

END-USER

Dokumen Uji Desain

Sekda Kota Magelang
Stakeholder Pemerintah
Pencak End-User

MASUKAN 1

Sekat interior baiknya transparan untuk meningkatkan teamwork antarpegawai dan pejabat

MASUKAN 2

Menggunakan sekat kaca (curtain wall) sehingga pencahayaan juga lebih optimal

MASUKAN 3

Publik baiknya tetap bisa mengakses balai kota dengan mudah, tetapi perlu kontrol keamanan yang baik dalam lingkungan

Diberikan pos pengamanan pada akses utara dan selatan, publik hanya bisa mengakses lantai dasar

Perlu penambahan vegetasi pohon beringin dan kepel yang identik dengan filosofi Jawa lantai dasar

RESPON

zona publik yang bisa diakses pada lantai dasar

kepel

Pohon beringin

Sawo kecil

MANAGERIAL

Dokumen Uji Desain

DPUPR Kota Magelang
Stakeholder Pemerintah
Pencak Manajerial pembangunan

MASUKAN 1

Bentang jarak dinding ke dinding dipertimbangkan untuk isu pencahayaan

MASUKAN 2

Sediakan ruang pengelolaan sampah internal

MASUKAN 3

Pertimbangkan untuk menjadikan bangunan tropis dan bangunan hijau

MASUKAN 4

Bayangan gedung dapat dimanfaatkan untuk area rapat dan ruang terbuka

MASUKAN 5

Jumlah lantai bisa ditambah untuk pengoptimuman keterbatasan lahan

MASUKAN 6

Pertimbangkan untuk penambahan area parkir basement

MASUKAN 7

Konsep terbuka dan terbatas menjadi tepat untuk menciptakan peruntukkan ruang publik dan kantor

MASUKAN 8

Memilih kembali vegetasi yang mampu bertahan pada lingkungan outdoor tropis, khususnya pada taman bunga representatif

RESPON

Isu pencahayaan dirapikan dengan menggunakan banyak bukaan dan shading untuk mereduksi panas. Tingkat pencahayaan diuji dengan dialux

Direncanakan diletakkan di selatan gedung OPD dengan ukuran 5x3 m untuk masing-masing organik; anorganik

Hanya sebagian kecil gedung $\leq 25\%$ yang menggunakan penghawaan mekanis (gedung utama dan basement)

Ruang terbuka untuk apel bisa menggunakan inner court yang lebih teduh. Ruang rapat terbuka dapat dilakukan pada rooftop.

Pertimbangan biaya yang terbatas dengan kebutuhan ruang yang mencukupi dirasa sudah memenuhi aspek kebutuhan ruang. Kapasitas parkir dilakukan peningkatan dengan menambah jumlah basement menjadi 3 sehingga kapasitas parkir menjadi mobil 107 dan motor 219.

Lantai dasar semua ruang terbuka untuk publik, lantai perkantoran yang terletak di atas dilakukan pembatasan akses.

Vegetasi yang lebih tahan dan memiliki tone warna sama dengan konsep getuk trio pada taman bunga representatif dipilih

- Bunga Lantana (Lantana camara)
- Bunga bintang (Isotoma langillora)
- Bougenville cokelat-kuning

PRIVAT

PUBLIK

OWNER

Dokumen Uji Desain

Masyarakat Stakeholder Publik
Pencak Owner

MASUKAN 1

Perhatikan nilai penting antara pemkot dan masyarakat, khususnya urgensi pendirian area UMKM di bagian utara

MASUKAN 2

Lebih mencirikan kebudayaan lokal Magelang sebagai kota historis dan heritage

MASUKAN 3

Pertimbangkan form lengkung (arch) pada muka bangunan agar lebih berkesan kolonial

MASUKAN 4

Pertimbangkan form gapura agar lebih mengedepankan lokalitas, misal gunung wayang

MASUKAN 5

Ruang publik yang bisa diakses siapapun, tetapi tetap diberi pembatasan temporer atau sesuai kebutuhan

MASUKAN 6

Pembatasan akses agar kesan balai kota tidak menjadi jalur alternatif menuju jalan utara

MASUKAN 7

Makna taman bunga tuin van java dan simbol gunung tidar perlu diberikan narasi dan informasi untuk edukasi

RESPON

UMKM menjadi pilihan opsional, tetapi melihat urgensinya bahwa belum terdapat pusat edukasi dan kuliner getuk, terdapat potensi untuk memulainya. Selain ekonomi juga terdapat potensi sebagai tempat wisata.

Muka bangunan mengambil style water torrent yang cenderung bergaya kolonial dengan aksesoris ornamenasi dan atap yang bergaya Jawa sebagai lokalitas.

Menambahkan lis sehingga terdapat kesan seperti pada style arch bangunan heritage plengkung Kota Magelang.

Gubahan gapura diubah mengambil bentuk gunung wayang yang dapat menjadi backstage dari panggung performer.

Undak-undakan pada taman bunga depan juga menjadi penanda batas secara intangible yang dapat membatasi area luar balai kota dengan bagian dalam.

Terdapat pos satpam di setiap akses utara dan selatan balai kota yang mampu mengawasi aksesibilitas kendaraan secara tidak langsung

Terdapat museum outdoor berupa paviliun pada sirkulasi taman bunga yang mampu menarik pengunjung secara visual untuk mengetahui tuin van java.

PENILAIAN DESAIN: PENDEKATAN POPULER

68 RESPONDEN Masyarakat Kota Magelang



Kuesioner 19/07/2023



Citra heritage dan lokalitas Kota Magelang



Konsep ruang publik representatif



Konsep ruang publik yang terbuka untuk rakyat



Konsep ruang publik utama di Balai Kota



Konsep ruang publik sekunder pada Balai Kota



Konsep ruang publik tersier di Balai Kota



Rata-rata tingkat preferensi sampling masyarakat dengan pendekatan populer: 3.72/4.00 kategori: Baik-sangat baik

GALERI KEGIATAN PARTISIPATORIS

Tempat UMKM membantu wadah pengembangan ekonomi

Sangat menginspirasi dengan mengadaptasi budaya lokal

Ruang publik disarankan dapat menjadi wadah edukasi flora dan fauna dalam tuin van java

Perlu disediakan tempat pagelaran outdoor

Perlu ada fasilitas duduk dan penerangan, bunga perlu lebih variatif



sampling Pendapat para responden



UJI DESAIN NORMATIF

Melakukan uji desain berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku (PP No. 16 tahun 2021)

KETERCAPAIAN KEBUTUHAN RUANG

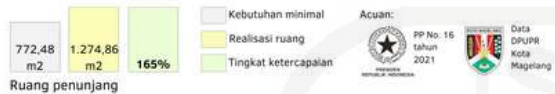


xlsx data
kebutuhan
ruang detail

Total kusen gedung	Luas Realisasi Ruang (m ²)
Konstruksi (Staff)	2.437,90
Ruang pejabat struktural	2838,88
Ruang pertemuan	1274,86
Ruang	4000
Ruang gedung utama	1632
Ruang	184
Ruang gedung utama	494
Ruang gedung OPD	545
Caetan LUKM	333
Ruang	151
Ruang	134
TOTAL	16.284,86



Ruangan Utama Pejabat Struktural + Ruang Staff = Total ruang kepegawaian



PRAKIRAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN

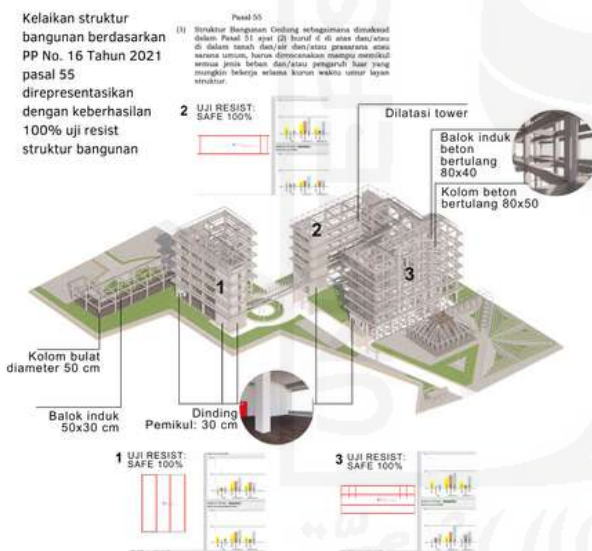
Prakiraan biaya gedung utama walk-out-sekda	Prakiraan biaya gedung OPD	Prakiraan biaya gedung ArtMag	Prakiraan biaya pekerjaan lansekap	Keterangan
Rp11.408.500	3700	11.500	11.833	m ²
Rp62.747.000.000	Rp14.850.000.000	Rp1.325.000.000	Rp1.519.150.000	Figural
				Total
				Rp80.441.175.000

SHBJ BGN tertinggi per m²: Rp 5.550.000

Anggaran RPJMD 2021-2026	Prediksi biaya DPUPR	Prediksi biaya Balai Gathuk	Tahap 1: Gedung Utama dan lansekap	Tahap 2: Gedung OPD	Tahap 3: Gedung ArtMag
76 M	180-210 M	91 M	70 M	15 M	7 M

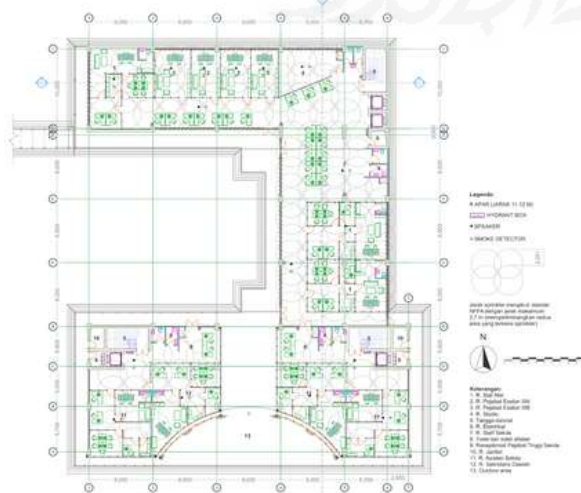
KETERCAPAIAN KELAYAKAN STRUKTUR

Kelayakan struktur bangunan berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021 pasal 55 direpresentasikan dengan keberhasilan 100% uji resist struktur bangunan

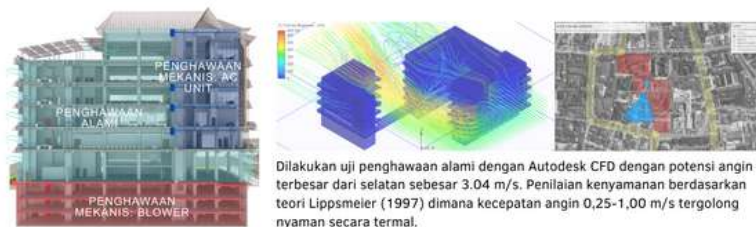


KETERCAPAIAN KELAYAKAN INFRASTRUKTUR

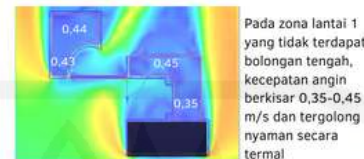
Kelayakan sistem keselamatan bangunan berdasarkan PP No.16 Tahun 2021 pasal 54 pada gedung



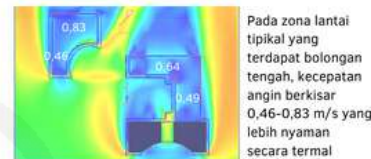
KETERCAPAIAN TINGKAT KENYAMANAN TERMAL



Dilakukan uji penghawaan alami dengan Autodesk CFD dengan potensi angin terbesar dari selatan sebesar 3.04 m/s. Penilaian kenyamanan berdasarkan teori Lippsmeler (1997) dimana kecepatan angin 0,25-1,00 m/s tergolong nyaman secara termal.

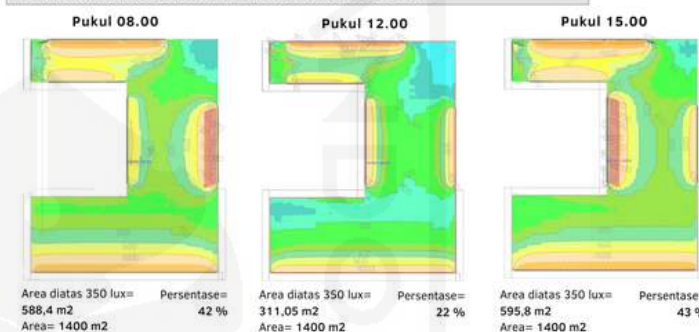


Pada zona lantai 1 yang tidak terdapat bolongan tengah, kecepatan angin berkisar 0,35-0,45 m/s dan tergolong nyaman secara termal

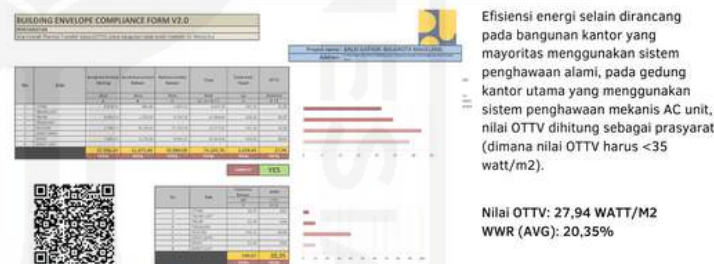


Pada zona lantai tipikal yang terdapat bolongan tengah, kecepatan angin berkisar 0,46-0,83 m/s yang lebih nyaman secara termal

KETERCAPAIAN TINGKAT KENYAMANAN VISUAL



KETERCAPAIAN TINGKAT EFISIENSI ENERGI



Efisiensi energi selain dirancang pada bangunan kantor yang mayoritas menggunakan sistem penghawaan alami, pada gedung kantor utama yang menggunakan sistem penghawaan mekanis AC unit, nilai OTTV dihitung sebagai prasyarat (dimana nilai OTTV harus <35 watt/m²).

Nilai OTTV: 27,94 WATT/M²
WWR (AVG): 20,35%



Pemasangan panel surya pada rooftop gedung utama

510 panel surya kapasitas 100 wp
Prediksi penghasilan energi: 51.000 w atau (51 kw)

SUMMARY

"Participatory design yang melibatkan pemikiran dan pendapat para stakeholders secara demokratis bukan digunakan untuk mengakhiri desain balai kota, lebih dari itu desain ini digunakan untuk mengawalinya."

Dwiwangga Sang Nalendra Hadi, 2023



LAMPIRAN UJI DESAIN: SEKDA KOTA MAGELANG



Audio Uji Desain

DOKUMEN UJI DESAIN
Perencanaan Sekeloa Magelang dengan Pendekatan Participatory Design sebagai Bentuk Demokratisasi Perencanaan

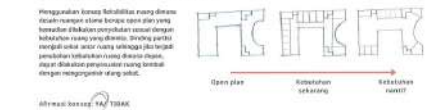


Apresiasi konsep yang disajikan, baik itu konsep Sekeloa yang sudah ada, maupun konsep yang baru. Sekeloa yang ada di Apellidika - juga baik. Tapi...

Nama: **DWIWANGSA SANG RILINDIKA HADI**
NIM: 19512098
Supervisor: **DR. Ir. Nurwanto Budi Santosa, M.Arch., IAC**

Indikator: Peran Sekeloa sebagai ruang administratif
Fungsinya: Memenuhi kebutuhan ruang para birokrasi

Perencanaan konsep Sekeloa yang dibuat dengan konsep yang ada karena konsep yang sudah ada lebih banyak dan sudah ada dengan lebih banyak ruang yang dibuat. Sehingga perlu menguji konsep yang ada yang ada dengan konsep yang baru yang ada dengan konsep yang ada.



Alternatif 1: **Alternatif 2**

Penetapan lain (Alternatif 2): **Sekeloa yang ada di Apellidika - juga baik. Tapi...**

Indikator: Peran Sekeloa sebagai ruang administratif
Fungsinya: Memenuhi kebutuhan ruang para birokrasi

Alternatif 1 **Alternatif 2**



Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

Indikator: Citra Sekeloa
Fungsinya: Citra sebagai ruang publik open, hijau, sejuk, estetis, orientasi, sirkulasi

Alternatif 1 **Alternatif 2**



Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

Indikator: Citra Sekeloa
Fungsinya: Citra sebagai ruang publik open, hijau, sejuk, estetis, orientasi, sirkulasi

Alternatif 1 **Alternatif 2**



Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

Indikator: Citra Sekeloa
Fungsinya: Citra sebagai ruang publik open, hijau, sejuk, estetis, orientasi, sirkulasi

Alternatif 1 **Alternatif 2** **Alternatif 3**



Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

Indikator: Citra Sekeloa
Fungsinya: Citra sebagai ruang publik open, hijau, sejuk, estetis, orientasi, sirkulasi


Alternatif 1 **Alternatif 2**



Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

Indikator: Citra Sekeloa
Fungsinya: Citra sebagai ruang publik open, hijau, sejuk, estetis, orientasi, sirkulasi

Alternatif 1 **Alternatif 2** **Alternatif 3**



Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

LAMPIRAN UJI DESAIN: BAPPEDA KOTA MAGELANG



Audio Uji Desain

DOKUMEN UJI DESAIN
Perencanaan Bappeda Magelang dengan Pendekatan Participatory Design sebagai Bentuk Demokratisasi Perencanaan

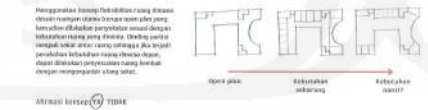


Yang penting itu ada konsepnya, yang lain itu konsepnya yang ada. Tapi...

Nama: **DWIWANGSA SANG RILINDIKA HADI**
NIM: 19512098
Supervisor: **DR. Ir. Nurwanto Budi Santosa, M.Arch., IAC**

Indikator: Peran Sekeloa sebagai ruang administratif
Fungsinya: Memenuhi kebutuhan ruang para birokrasi

Perencanaan konsep Sekeloa yang dibuat dengan konsep yang ada karena konsep yang sudah ada lebih banyak dan sudah ada dengan lebih banyak ruang yang dibuat. Sehingga perlu menguji konsep yang ada yang ada dengan konsep yang baru yang ada dengan konsep yang ada.




Alternatif 1: **Alternatif 2**

Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

Indikator: Peran Sekeloa sebagai ruang administratif
Fungsinya: Memenuhi kebutuhan ruang para birokrasi

Alternatif 1 **Alternatif 2**



Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

Indikator: Citra Sekeloa
Fungsinya: Citra sebagai ruang publik open, hijau, sejuk, estetis, orientasi, sirkulasi

Alternatif 1 **Alternatif 2**



Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

Indikator: Peran Sekeloa sebagai ruang administratif
Fungsinya: Memenuhi kebutuhan ruang para birokrasi


Alternatif 1 **Alternatif 2**



Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

Indikator: Citra Sekeloa
Fungsinya: Citra sebagai ruang publik open, hijau, sejuk, estetis, orientasi, sirkulasi

Alternatif 1 **Alternatif 2**



Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

Indikator: Citra Sekeloa
Fungsinya: Citra sebagai ruang publik open, hijau, sejuk, estetis, orientasi, sirkulasi

Alternatif 1 **Alternatif 2** **Alternatif 3**



Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

Indikator: Citra Sekeloa
Fungsinya: Citra sebagai ruang publik open, hijau, sejuk, estetis, orientasi, sirkulasi

Alternatif 1 **Alternatif 2** **Alternatif 3**



Penetapan lain (Alternatif 2): **Alternatif 1**

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, I. (2015). Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sampel Pada Pengujian Hipotesis Statistika Dan Analisis Butir. *Jurnal Formatif*, 2(2), 140–148.
- BAPPEDA Kota Magelang, (2013). <https://bappeda.magelangkota.go.id/>
- Baru, B. M., & Rusbiyanti, S. (2020). Budaya Birorasi Publik, Dan Potensi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Kkn). *Seminar Nasional Sistem Informasi (Senasif)*, 2345–2358.
- Binilang, Artahsasta B. P., Et Al. "Balai Kota Tahuna (Arsitektur Art Deco)." *Daseng: Jurnal Arsitektur*, Vol. 4, No. 1, 11 May. 2015, Pp. 1-15.
- Boentoro, M. T. (2018). Balai Kota Pangkalpinang Dengan Pendekatan Arsitektur Lokal (Thesis, UAJY).
- Cantika Adinda Putri, (2022). <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220427192209-37-335494/canggih-koordinasi-pemda-pusat-bakal-lewat-metaverse>
- Christian, A. (2020). Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur Balai Kota Surakarta Dengan Pendekatan Green Architecture (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Dahmet, O. S., Tela, N., & Fajriansyah, D. (2018). Revitalisasi Ex. Bangunan Balaikota Lama dan Rth Imam Bonjol Padang sebagai Kawasan Wisata Cagar Budaya. *Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Civil And Planning Engineering, Bung Hatta University*, 2(2).
- DPUPR Kota Magelang, (2023). <http://dpupr.magelangkota.go.id/home>
- Fauzi, R. S., & Nareswari, A. (2022). Efektivitas Participatory Design Di Kampung Kota. *Pawon: Jurnal Arsitektur*, 6(1), 57-72.
- Fitriana, Ika dan David Oliver Purba, (2020). <https://regional.kompas.com/read/2020/07/04/13074251/sejak-1985-pemkot-magelang-menempati-aset-kami?page=all>
- Fitriana dan Rusiana, (2022). <https://regional.kompas.com/read/2022/09/15/092237378/sengkarut-aset-negara-rampung-pemkot-magelang-siap-bangun-kantor-baru?page=all>
- Hartono Juwono; Heri Prasetyo; Agus Widiatmoko (Direktorat Sejarah, Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018)
- Hertzberg, M., Smith, R., & Westphal, R. (2013). *A Consensus Handbook: Co-Operative Decision-Making For Activists, Co-Ops And Communities. Seeds For Change Lancaster Co-Operative Ltd*, 1.
- Indriani, (2022). <https://www.suara.com/news/2022/09/18/173223/mau-bangun-kantor-baru-15-lantai-pemkot-magelang-siapkan-dana-rp-70-miliar>
- Indriani, R. M. D., (2022). Mau Bangun Kantor Baru 15 Lantai, Pemkot Magelang Siapkan Dana Rp 70 Miliar. <https://www.suara.com/news/2022/09/18/173223/mau-bangunkantor-baru-15-lantai-pemkot-magelang-siapkan-dana-rp-70-miliar>
- KBBI, (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] <http://kbbi.web.id/pusat>
- Kota Magelang, (2019). <https://magelangkota.go.id/page/sekretariat-daerah>
- Liputan6.com, (2012). <https://www.liputan6.com/news/read/469719/jokowi-kantor-walikota-harus-seterbuka-balaikota>
- Luck, R. (2018). What Is It That Makes Participation In Design Participatory Design?. *Design Studies*, 59, 1-8.
- Malik, A. (2018). Ruang Publik Sebagai Representasi Kebijakan Dan Medium Komunikasi Publik. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 82-88.
- Munawaroh, A. S., & Elbes, R. (2019). Penilaian Kenyamanan Termal Pada Bangunan Perpustakaan Universitas Bandar Lampung. *Arteks: Jurnal Teknik Arsitektur*, 4(1), 85–98. <https://doi.org/10.30822/arteks.v4i1.83>

"New City Hall In Buenos Aires / Foster + Partners" 02 Apr 2015. Archdaily. Accessed 3 Mar 2023. <<https://www.Archdaily.Com/615436/New-City-Hall-In-Buenos-Aires-Foster-Partners>> Issn 0719-8884

Pemkot Surakarta, (2019). <https://Surakarta.Go.Id/?P=13815>

Pemkot Surakarta, (2018). <https://Surakarta.Go.Id/?P=9540>

Permanasari, E., Nugraha, H., & Nurhidayah, F. (2018). Metode Desain Partisipatif Sebagai Model Pembangunan 6 Rptr Dki Jakarta. Jakarta: Universitas Pembangunan Jaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Prameswari, N. S. (2019). Kontinuitas Karakter Kawasan-Kawasan Pusaka Di Kota Magelang (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Priyana, Bagus, (2019). <https://jateng.antaraneews.com/berita/258706/telaah--kota-magelang-dalam-catatan-kota-taman-berkelanjutan>

Prokompim, (2022). <https://humas.magelangkota.go.id/tni-kemenkeu-dan-pemkot-magelang-teken-nota-kesepahaman-polemik-aset-eks-mako-akabri-selesai/>

Putra, G. A., & Zahro, H. Z. (2019). Desain Partisipasi Dalam Ruang Publik, Ruang Komunal Sosial Dalam Kampung Heritage Tawang Sari Sebagai Salah Satu Bentuk Aplikasi Unsur Keberlanjutan Sosial. Pawon: Jurnal Arsitektur, 3(02), 25-36.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021 - 2026. (2021). Kota Magelang: Pemerintah Daerah Kota Magelang.

Rudianto, A. (2001). Balai Kota Surakarta Representasi Kekuasaan Demokrasi dalam Guna dan Citra Arsitektur.

Rumah.com, (2022). <https://www.rumah.com/areainsider/bandung/article/balai-kota-bandung-15542>

Rezaei, M., (2020). Reviewing Design Process Theories: Discourses In Architecture, Urban Design And Planning Theories. Springer Nature.

Sofiyah, Fauziyyah & Firda Rasyidian. (2022). Arsitektur Partisipatoris untuk Mahasiswa: Masa Depan Arsitektur Indonesia. Jakarta: Omah Library

Sudrajat, Dodi Jajat, Et Al. (2019). "Kajian Konsep Kearifan Lokal Pada Perancangan Kantor Bupati Kabupaten Bandung Local Wisdom Concepts Study In Bandung Regency Regent Office Design Abstrak.": 116-123.

Tarigan, R. (2020). Laporan Akhir Penelitian (Karya Desain) Ekspresi Makna Pelayanan Pada Perancangan Bangunan Kantor Pemerintah Kasus Studi: Kantor Bupati Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan), Ps. 1 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Vogel, (2021). <https://D-Lab.Mit.Edu/News-Blog/Blog/Co-Creating-More-Equitable-World-Transformative-Benefits-Participatory-Design>





BALAI GATHUK

DOKUMEN
PERANCANGAN

Perancangan Balai Kota
Magelang dengan
Pendekatan *Participatory
Design* sebagai Bentuk
Demokratisasi Arsitektur



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN



DEPARTMENT of
ARCHITECTURE



한국건축학교육인증원
Korea Architectural Accrediting Board



CANBERRA
ACCORD

